



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2025-2045**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
PULAU PUNJUNG, TAHUN 2024**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 6. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
6. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 – 2045.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dharmasraya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen Perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJM Nasional
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Pasal 3

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rentaca tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 4

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. bab IV memuat visi dan misi Daerah;
 - e. bab V memuat arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
 - f. bab VI memuat penutup.
- (2) Penjabaran RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2045.

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD Tahun 2025-2045 kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 6. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 Ayat (4), menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP didefinisikan sebagai dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah ini kemudian menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Dharmasraya 2025-2045 perlu memperhatikan kebijakan nasional, karena Kabupaten Dharmasraya merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka visi Indonesia Emas harus dijadikan orientasi akhir guna mendukung cita-cita Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengacu pada sasaran Indonesia Emas, maka disusunlah Visi Indonesia Tahun 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

RPJPD Tahun 2025-2045 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi acuan bagi calon Bupati untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati.

RPJPD Tahun 2025-2045 tertuang dalam dokumen RPJPD yang tercantum dalam lampiran merupakan merukan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi Daerah, permasalahan dan isu strategis Daerah, visi dan misi Daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok, dan penutup.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan Bupati dalam melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD Tahun 2025-2045. Disamping itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai tata cara perubahan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

DHARMASRAYA

NOMOR 6. TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

DAERAH TAHUN 2025-2045

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN 2025-2045**



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1.	LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2.	DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-4
1.3.	HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.....	I-6
1.3.1.	Hubungan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025- 2045.....	I-7
1.3.2.	Hubungan RPJPD Kabupaten Dharmasraya dengan RTRW Kabupaten Dharmasraya, KLHS RPJPD	I-7
1.3.3.	Hubungan RPJPD Kabupaten Dharmasraya dengan dokumen dibawahnya	I-7
1.4.	MAKSUD DAN TUJUAN	I-8
1.5.	SISTEMATIKA PENULISAN	I-8
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
2.1.1.	Aspek Geografi	II-7
2.1.2.	Kondisi Demografi.....	II-22
2.2.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-24
2.2.1.	Kesejahteraan Ekonomi	II-24
2.2.2.	Kesejahteraan Sosial Budaya.....	II-31
2.3.	ASPEK DAYA SAING	II-34
2.3.1.	Daya Saing Ekonomi Daerah	II-34
2.3.2.	Daya Saing SDM	II-40
2.3.3.	Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah	II-42
2.3.4.	Daya Saing Iklim Investasi	II-43
2.4.	ASPEK PELAYANAN UMUM	II-44
2.4.1.	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional	II-44
2.4.2.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi.....	II-45
2.4.3.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	II-46
2.4.4.	Angka Kematian Ibu.....	II-47
2.4.5.	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	II-49
2.4.6.	Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage).....	II-50
2.4.7.	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	II-51
2.4.8.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	II-51
2.4.9.	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	II-53
2.4.10.	Kapasitas Air Baku	II-54
2.4.11.	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	II-54
2.4.12.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	II-55
2.4.13.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	II-56



2.4.14. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	II-57
2.4.15. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	II-58
2.4.16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	II-59
2.4.17. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	II-59
2.4.18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	II-60
2.4.19. Indeks Tutupan Lahan	II-61
2.4.20. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	II-62
2.4.21. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	II-63
2.4.22. Persentase Desa Mandiri	II-64
2.4.23. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	II-65
2.4.24. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	II-66
2.4.25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	II-67
2.4.26. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian	II-68
2.4.27. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	II-69
2.4.28. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	II-69
2.4.29. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	II-70
2.4.30. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	II-71
2.4.31. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	II-72
2.4.32. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	II-72
2.4.33. Indeks Reformasi Hukum	II-73
2.4.34. Indeks Pelayanan Publik	II-73
2.4.35. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	II-75
2.4.36. Return on Asset (ROA) BUMD	II-75
2.4.37. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	II-75
2.4.38. Indeks Inovasi Daerah	II-76
2.4.39. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	II-76
2.4.40. Indeks Persepsi Anti Korupsi	II-77
2.5. EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025	II-77
2.5.1. Evaluasi Capaian Indikator Makro Daerah	II-77
2.5.2. Evaluasi capaian Sasaran Pokok Pembangunan Daerah	II-80
2.6. TREND DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK	II-102
2.6.1. Proyeksi Kependudukan	II-102
2.6.2. Proyeksi Sarana dan Prasarana	II-108
2.7. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH	II-113
2.7.1. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten	II-115
2.7.2. Pengembangan Sarana Permukiman	II-117
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
3.1. PERMASALAHAN	III-1
3.1.1. Kesehatan	III-1
3.1.2. Pendidikan	III-1
3.1.3. Perlindungan Sosial	III-2
3.1.4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	III-3
3.1.5. Penerapan ekonomi hijau	III-5
3.1.6. Transformasi digital	III-5
3.1.7. Integrasi Pengembangan Wilayah	III-6
3.1.8. Perdesaan dan Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	III-7



3.1.9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	III-7
3.1.10. Hukum Berkeadilan dan Keamanan Daerah.....	III-7
3.1.11. Stabilitas Ekonomi Makro	III-7
3.1.12. Kerjasama Antar Wilayah	III-8
3.1.13. Beagama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	III-8
3.1.14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	III-9
3.1.15. Lingkungan Hidup Berkualitas	III-9
3.1.16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	III-10
3.1.17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	III-10
3.2. ISU STRATEGIS DAERAH.....	III-11
3.2.1. Isu Strategis Pembangunan Nasional	III-11
3.2.2. Isu Strategis Regional Sumatera Barat.....	III-11
3.2.3. Isu Strategis Jangka Panjang Daerah	III-11
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
4.1. VISI DAERAH TAHUN 2025-2045	IV-1
4.2. MISI DAERAH TAHUN 2025-2045.....	IV-6
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....	V-1
5.1. ARAH KEBIJAKAN	V-2
5.2. SASARAN POKOK RPJPD TAHUN 2025-2045	V-102
BAB VI PENUTUP.....	VI-1
6.1. KAIDAH PELAKSANAAN.....	VI-1
6.1.1. Konsistensi Perencanaan	VI-1
6.1.2. Keterkaitan RPJPD Kabupaten Dharmasraya dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat	VI-2
6.1.3. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan	VI-3
6.1.4. Skema Pendanaan dan Penganggaran	VI-4
6.1.5. Kerangka Pengendalian	VI-4
6.1.6. Sistem Insentif	VI-6
6.1.7. Mekanisme Perubahan	VI-6
6.1.8. Komunikasi Publik	VI-6
6.2. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	VI-7



DAFTAR TABEL

Tabel 2- 1 Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong	II-2
Tabel 2- 2 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021	II-6
Tabel 2- 3 Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan	II-7
Tabel 2- 4 Ijin Usaha (IUP) Pertambangan.....	II-8
Tabel 2- 5 Nilai indeks risiko Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023	II-11
Tabel 2- 6 Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya	II-12
Tabel 2- 7 Kondisi Kualitas Air Sungai di Kabupaten Dharmasraya.....	II-15
Tabel 2- 8 Daya Dukung Ketersediaan Air PerKecamatan di Kabupaten Dharmasraya	II-18
Tabel 2- 9 Daya Dukung Kabupaten Dharmasraya dalam Jasa Penyediaan Pangan menurut Kecamatan	II-20
Tabel 2- 10 Daya Dukung Sangat Tinggi dan Tinggi Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Dharmasraya menurut Ekoregion dan Tutupan Lahan.....	II-21
Tabel 2- 11 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Dharmasraya Tahun 2019-2023	II-22
Tabel 2- 12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.....	II-23
Tabel 2- 13 Nilai, Kontribusi, dan Petumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s.d 2023	II-25
Tabel 2- 14 Inflasi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota sampel inflasi pada Januari 2024 (persen)	II-29
Tabel 2- 15 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2022-2023 (persen)	II-30
Tabel 2- 16 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Tahun 2022-2023 (persen).....	II-36
Tabel 2- 17 Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan Tahun 2018-2022.....	II-37
Tabel 2- 18 Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2019-2023 (kWh/orang)	II-42
Tabel 2- 19 Capaian Kemampuan Literasi dan Kemampuan Numerasi Pada Tingkat Pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK (persen)	II-45
Tabel 2- 20 Pengelompokan Bidang Keahlian Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-46
Tabel 2- 21 Angka Kematian Ibu Tahun 2019-2023	II-48
Tabel 2- 22 Jumlah Nagari berdasarkan Status IDM.....	II-65
Tabel 2- 23 Persentase Desa Mandiri.....	II-65
Tabel 2- 24 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Tahun 2022-2023.....	II-66
Tabel 2- 25 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	II-71
Tabel 2- 26 Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun 2016-2021	II-73
Tabel 2- 27 Kategori, Nilai dan Prediket Indeks Reformasi Hukum.....	II-73
Tabel 2- 28 Kategori, Nilai dan Prediket Indeks Pelayanan Publik	II-74
Tabel 2- 29 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	II-74
Tabel 2- 30 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	II-75
Tabel 2- 31 Skor Dan Kategori, Indeks Inovasi Daerah	II-76
Tabel 2- 32 Realisasi Capaian Sasaran pokok Pembangunan Daerah.....	II-82
Tabel 2- 33 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya.....	II-102
Tabel 2- 34 Proyeksi Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 - 2045.....	II-102
Tabel 2- 35 Jumlah Penduduk berdasarkan Data Dinas Dukcapil	II-103
Tabel 2- 36 Proyeksi Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 - 2045 berdasarkan Data Dukcapil	II-104
Tabel 2- 37 Perkiraan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya sampai Tahun 2045.....	II-104
Tabel 2- 38 Jumlah Penduduk Perkotaan Tahun 2022 Berdasarkan Data BPS	II-105
Tabel 2- 39 Jumlah Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Dharmasraya	II-106



Tabel 2- 40 Perkiraan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya sampai Tahun 2045 Berdasarkan Data Dukcapil.....	II-106
Tabel 2- 41 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya.....	II-106
Tabel 2- 42 Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur	II-107
Tabel 2- 43 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Dharmasraya Sampai Tahun 2045	II-109
Tabel 2- 44 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Dharmasraya Sampai Tahun 2045.....	II-109
Tabel 2- 45 Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Kabupaten Dharmasraya	II-110
Tabel 2- 46 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Dharmasraya.....	II-111
Tabel 2- 47 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Dharmasraya.....	II-111
Tabel 2- 48 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Sampai Tahun 2045.....	II-112
Tabel 2- 49 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Sampai Tahun 2045	II-113
Tabel 2- 50 Perkiraan Jumlah Sarana Pendidikan Pelayanan Skala Wilayah Menurut Kecamatan Sampai Tahun 2043	II-117
Tabel 2- 51 Rencana Peningkatan Fasilitas Kesehatan (Penyesuaian dengan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043)	II-118
Tabel 4- 1 Hasil Penyeragaman Visi RPJPD Kabupaten Dharmasraya dengan visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJP Nasional	IV-2
Tabel 4- 2 Penyeragaman Sasaran, Indikator dan Target Visi RPJP Nasional, Provinsi Sumatera Barat dengan RPJPD Kabupaten Dharmasraya	IV-3
Tabel 4- 3 Hasil Penyeragaman Visi RPJPD Kabupaten Dharmasraya dengan visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJP Nasional	IV-8
Tabel 5- 1 Arah (Tujuan) Kebijakan Pembangunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045.....	V-2
Tabel 5- 2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah berdasarkan Misi Dan Lima Tahunan	V-3
Tabel 5- 3 Arah Kebijakan Daerah Tahun 2025-2045	V-5
Tabel 5- 4 Arah Kebijakan Daerah Berdasarkan Indikator Utama Pembangunan Tahun 2025-2045.....	V-10
Tabel 5- 5 Sasaran Pokok Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045.....	V-103



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2- 1	Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya	II-3
Gambar 2- 2	Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya	II-4
Gambar 2- 3	Peta Kelereng Kabupaten Dharmasraya	II-4
Gambar 2- 4	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya	II-6
Gambar 2- 5	Peta Status Lahan Kabupaten Dharmasraya.....	II-8
Gambar 2- 6	Perubahan tutupan lahan Kabupaten Dharmasraya 1985 – 1990 – 2000 – 2008 - 2016	II-9
Gambar 2- 7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.....	II-10
Gambar 2- 8	Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya	II-13
Gambar 2- 9	Peta Overlay Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Ketersediaan Air	II-18
Gambar 2- 10	Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Dharmasraya	II-19
Gambar 2- 11	Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	II-23
Gambar 2- 12	Pertumbuhan PDRB (persen).....	II-24
Gambar 2- 13	PDRB Perkapita (rupiah).....	II-26
Gambar 2- 14	Tingkat Kemiskinan Tahun 2019-2023(persen).....	II-27
Gambar 2- 15	Rasio Gini Tahun 2019-2023 (indeks)	II-28
Gambar 2- 16	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010-2023 (indeks).....	II-31
Gambar 2- 17	Usia Harapan Hidup Tahun 2010-2023 (Tahun).....	II-32
Gambar 2- 18	Indeks Pembangunan Gender Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022 (indeks).....	II-33
Gambar 2- 19	Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	II-34
Gambar 2- 20.	Ekspor Barang Dan Jasa Tahun 2019-2022 (persen)	II-35
Gambar 2- 21.	Ekspor Barang Dan Jasa Tahun 2019-2022 (persen)	II-36
Gambar 2- 22.	Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan (Rupiah).....	II-37
Gambar 2- 23.	Total Kredit /PDRB Tahun 2019-2022 (persen).....	II-38
Gambar 2- 24.	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Tahun 2019-2023 (persen).....	II-39
Gambar 2- 25.	Rasio Kewirausahaan Daerah (persen)	II-40
Gambar 2- 26.	Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2018-2022 (persen).....	II-41
Gambar 2- 27.	Konsumsi Listrik per Kapita Thun 2019-2023 (kWh/orang).....	II-43
Gambar 2- 28.	Pembentukan Modal Tetap Brutto Tahun 2019-2023 (kWh/orang)	II-44
Gambar 2- 29.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2022 (persen)	II-46
Gambar 2- 30.	Angka Kematian Ibu Tahun 2019-2023	II-48
Gambar 2- 31.	Prevalensi Stunting Tahun 2019-2023.....	II-49
Gambar 2- 32.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis Tahun 2019-2023	II-50
Gambar 2- 33.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis Tahun 2019-2023	II-51
Gambar 2- 34.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) Tahun 2019-2023	II-52
Gambar 2- 35.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2019-2023	II-53
Gambar 2- 36.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2019-2023	II-56
Gambar 2- 37.	Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2019-2023.....	II-57
Gambar 2- 38.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023.....	II-58
Gambar 2- 39.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2018-2023	II-59



Gambar 2- 40. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Tahun 2019-2023	II-60
Gambar 2- 41. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	II-61
Gambar 2- 42. Indeks Tutupan Lahan	II-62
Gambar 2- 43 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	II-66
Gambar 2- 44 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	II-68
Gambar 2- 45. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Tahun 2019-2023.....	II-69
Gambar 2- 46. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Tahun 2019-2023	II-70
Gambar 2- 47. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2010-2023	II-71
Gambar 2- 48. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Tahun 2019-2023	II-72
Gambar 2- 49 Pertumbuhan PDRB ADHK Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 s.d 2022 (persen)	II-78
Gambar 2- 50 PDRB Perkapita ADHBNasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 s.d 2022 (Juta Rupiah)	II-78
Gambar 2- 51 PDRB Tingkat kemiskinanNasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 s.d 2022 (persen)	II-79
Gambar 2- 52 Gini RasioNasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 s.d 2022 (persen)	II-79
Gambar 2- 53 Tingkat Pengangguran TerbukaNasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 s.d 2022 (persen)	II-80
Gambar 2- 54 Proyeksi Piramida Penduduk Tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045	II-108
Gambar 2- 55 Peta Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Dharmasraya	II-114
Gambar 3- 1 Matriks Tipologi Sektor Berdasarkan Laju Pertumbuhan dan Perubahan Kontribusi PDRB tahun 2010-2023.....	III-4

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

*Bab I. Pendahuluan
memuat tentang Latar Belakang,
Dasar Hukum Penyusunan,
Hubungan Antar Dokumen,
Maksud dan Tujuan dan
Sistematika Dokumen RPJPD*



ditinjau dari perkembangan sektoral.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan, dimana pemerintah daerah diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Adapun dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas :

1. **RPJPD**, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah
2. **RPJMD**, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, dan
3. **RKPD**, merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, maka pemerintah telah menyusun RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025, dimana perodesasi RPJPD tersebut akan berakhir di tahun 2025. Selama periode RPJPD pertama tersebut Kabupaten Dharmasraya telah mampu menunjukkan berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan, baik ditinjau secara indikator makro maupun

Sebagai Daerah Otonomi Hasil Pemekaran (DOHP) dari Kabupaten Sijunjung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten

Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya cukup berhasil dalam melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, keberhasilan tersebut dapat ditinjau secara indikator makro maupun ditinjau dari perkembangan sektoral dan mampu bersaing dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat.

Diantara keberhasilan yang dapat dicapai selama periodisasi RPJPD Tahun 2005-2025 adalah meningkatnya pendapatan perkapita dari Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) di tahun 2005 menjadi Rp 52.120.970,- (lima puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ratus tujuh puluh rupiah) di tahun 2022, PDRB perkapita Dharmasraya tersebut sudah lebih tinggi dari capaian Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 50.593.410,- . begitu juga dilihat dari pertumbuhan PDRB berada pada kisaran 4,5 persen hingga 6,8 persen. Selanjutnya indikator keberhasilan lain yaitu menurunnya tingkat kemiskinan dari 13,1 persen di tahun 2005 berkurang menjadi 5,5 persen di tahun 2022.

Selanjutnya Indikator Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia yang terdiri dari dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak di tahun 2004 masih berada pada besaran 63,70, angka ini jauh di bawah kondisi Sumatera Barat yang sudah berada pada capaian 70,50, namun di tahun 2022 meningkat menjadi 72,30 atau hampir mendekati capaian rata-rata Provinsi Sumatera barat yang berada pada angka 72,90.

Keberhasilan pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas tidak terlepas dari hasil kolaborasi dari stakeholder pembangunan yang terdiri dari pemerintah daerah, masyarakat dan serta swasta yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Oleh sebab itu untuk mencapai sasaran pembangunan jangka panjang sebagaimana terdapat pada Tujuan pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau disebut juga dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditargetkan hingga tahun 2030, dimana TPB tersebut terdiri dari 4 pilar pembangunan, 17 Tujuan pembangunan dengan 114 sasaran pembangunan.

Gambar 1- 1 Pilar Pembangunan dan Tujuan Pembangunan





Keberhasilan pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas tidak terlepas dari hasil kolaborasi dari stakeholder pembangunan yang terdiri dari pemerintah daerah, masyarakat dan serta swasta yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Oleh sebab itu untuk lebih mencapai sasaran pembangunan sebagaimana terdapat pada Tujuan pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau disebut juga dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditargetkan hingga tahun 2030, dimana TPB tersebut terdiri dari 4 pilar pembangunan, 17 Tujuan pembangunan dengan 114 sasaran pembangunan.

Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025–2045 dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan mencakup:
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD.
 - b. Orientasi mengenai RPJPD.
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD.
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD mencakup:
 - a. Forum konsultasi publik dalam rangka membahas Rancangan Awal RPJPD bersama dengan para pemangku kepentingan.
 - b. Penyempurnaan rancangan awal RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan pada acara forum konsultasi publik.
3. Penyusunan Rancangan RPJPD Kabupaten Dharmasraya mencakup:
 - a. Pengajuan rancangan awal RPJPD Kabupaten Dharmasraya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD.
 - b. Penyempurnaan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD hasil konsultasi dengan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Pengajuan persetujuan rancangan RPJPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
4. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Kabupaten Dharmasraya.
5. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Dharmasraya mencakup:
 - a. Penyempurnaan rancangan RPJPD Kabupaten Dharmasraya menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD Kabupaten Dharmasraya.
 - b. Penyampaian rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
 - c. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.
 - d. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Dharmasraya kepada Gubernur melalui Biro Hukum.



- e. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Dharmasraya oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - f. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Dharmasraya berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Penetapan RPJPD Kabupaten Dharmasraya mencakup:
- a. Pengajuan nomor register Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Dharmasraya kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Dharmasraya.
 - c. Penyampaian Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Dharmasraya kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dokumen RPJPD Kabupaten Dharmasraya telah dilakukan penyelarasan dan sinkronisasi terhadap RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk dukungan Kabupaten Dharmasraya dalam pencapaian sasaran pembangunan Indonesia Emas 2045.

Disamping itu dengan mempertimbangkan rekomendasi KLHS sebagai bagian dari pengambilan keputusan pada perumusan RPJPD diharapkan RPJPD akan berfungsi sebagai arah atau pedoman yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan menuju Indonesia Emas Tahun 2045 yang menjamin pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi berikutnya.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Dharmasraya.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan di atas, penyusunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 mempedomani serta memperhatikan :

1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 600.1/176/SJ dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
3. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/38/III/P2EPD/BAPPEDA-2024 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya;
5. Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya.

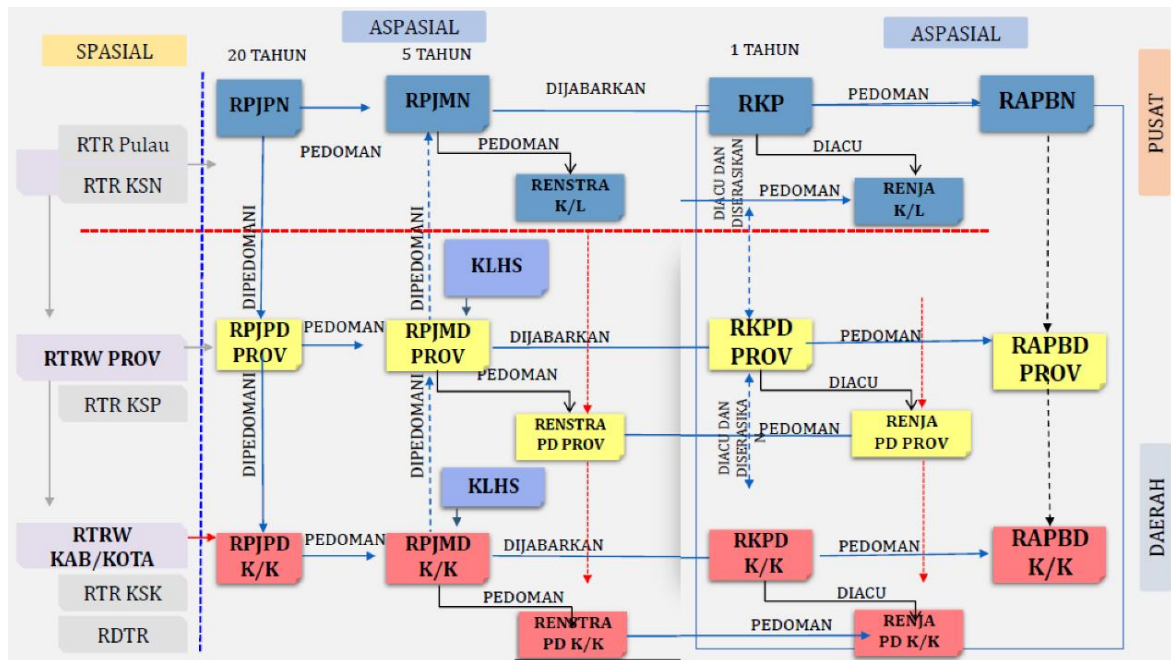
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah terdapat 2 (dua) bentuk dokumen perencanaan, yaitu Perencanaan Pembangunan (aspasial) dan Perencanaan Keruangan (spasial). Dimana pada perencanaan pembangunan diarahkan pada fokus (prioritas pembangunan), sedangkan perencanaan keruangan diarahkan pada lokus (peruntukan kawasan).

Dengan telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043, sehingga dokumen ini menjadi acuan dalam perwujudan pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam menentukan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan rencana pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1- 2 Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota



Dengan ditetapkannya RTRW Kabupaten Dharmasraya lebih dahulu dibandingkan dengan RPJPD, maka muatan RTRW akan menjadi diintegrasikan dengan muatan RPJPD Kabupaten Dharmasraya.

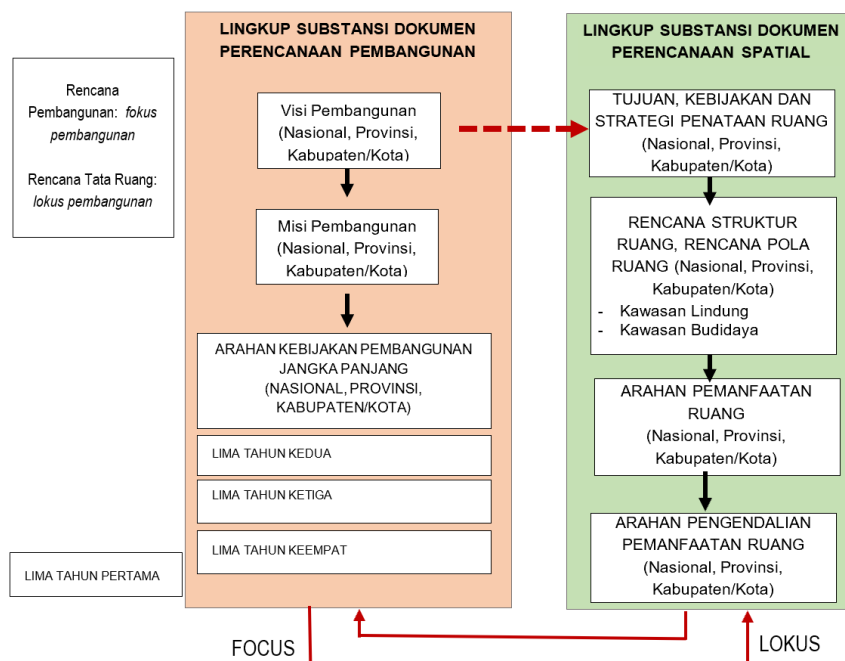
1.3.1. Hubungan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya dilakukan melalui penyelarasan arah kebijakan, dan sasaran pokok dari kedua dokumen tersebut yang terdiri dari 8 (delapan) misi, 17 (tujuh belas) arah kebijakan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan daerah.

1.3.2. Hubungan RPJPD Kabupaten Dharmasraya dengan RTRW Kabupaten Dharmasraya, KLHS RPJPD

Dengan ditetapkannya RTRW Kabupaten Dharmasraya lebih dahulu dibandingkan dengan RPJPD, maka muatan RTRW, maka diintegrasikan dengan muatan RPJPD Kabupaten Dharmasraya yang meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang terutama terkait struktur ruang dan kawasan strategis daerah. Rekomendasi KLHS yang telah disusun diintegrasikan dengan RPJPD. Untuk lebih jelasnya keterkaitan perencanaan pembangunan (aspasial) dan perencanaan keruangan (spatial) dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Gambar 1- 3 Keterkaitan Perencanaan Pembangunan (aspasial) dan Perencanaan Keruangan (Spatial)



1.3.3. Hubungan RPJPD Kabupaten Dharmasraya dengan dokumen dibawahnya

Selanjutnya RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 maupun RPJMD berikutnya setelah RPJPD ini ditetapkan yang telah disesuaikan dengan kewenangan kabupaten.



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 ini dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan jangka panjang Kabupaten Dharmasraya yang terintegrasi dengan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi Sumatera Barat.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 adalah :

1. Pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif
3. Sebagai instrumen dalam mengukur pencapaian pembangunan daerah

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

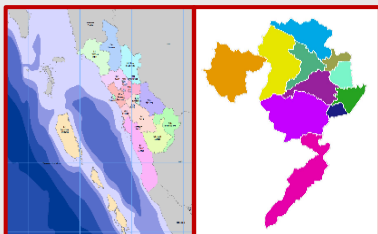
Sebagaimana telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka sistematika penulisan RPJPD adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Dokumen RPJPD
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, terdiri dari tinjauan terhadap Kondisi Umum Kondisi Daerah antara lain Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, dan Aspek Pelayanan Umum. Selanjutnya pada bab ini juga dibahas terkait evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KABUPATEN, bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi berdasarkan capaian pembangunan daerah, serta memuat isu strategis yang akan mempengaruhi kebijakan jangka panjang daerah
- BAB IV VISI DAN MISI DAERAH, memuat visi dan misi dalam dokumen RPJPD untuk menggambarkan keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang atau hingga tahun 2045
- BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH, bab ini menguraikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD, serta menjelaskan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
- BAB VI PENUTUP.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah

terdiri dari tinjauan terhadap Kondisi Umum Kondisi Daerah antara lain Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, dan Aspek Pelayanan Umum. Selanjutnya pada bab ini juga dibahas terkait evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah



Kondisi umum kondisi daerah disajikan menggunakan gambar peta, grafik dan tabel untuk data 5 (lima) tahun terakhir, yaitu data tahun 2018 hingga tahun 2022, serta didukung penjelasan dan narasi yang memudahkan pembaca dalam memahami kondisi daerah serta beberapa indikator makro disandingkan capaian indikator nasional dan Provinsi Sumatera Barat, sebagai perbandingan capaian pembangunan dengan daerah yang lebih luas.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

A. Letak, Batas dan Luas Wilayah

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00°48'25,367"- 1°41'40,269" LS dan 101°08'32,52"- 101°53'30,166"BT. Kabupaten Dharmasraya terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 yaitu 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 302.599 Ha. Sementara luas berdasarkan citra 2017 dan diupdate menggunakan data citra tahun 2022 dan telah disesuaikan dengan batas kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu 292.120 Ha.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki luas sebesar 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil interpretasi digitasi Citra Satelite

Pleiades tercatat bahwa luas Kabupaten Dharmasraya adalah 292.120 Ha sebagai konsekuensi dari keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penetapan batas daerah antara Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten dan provinsi tetangga seperti :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tentang Batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

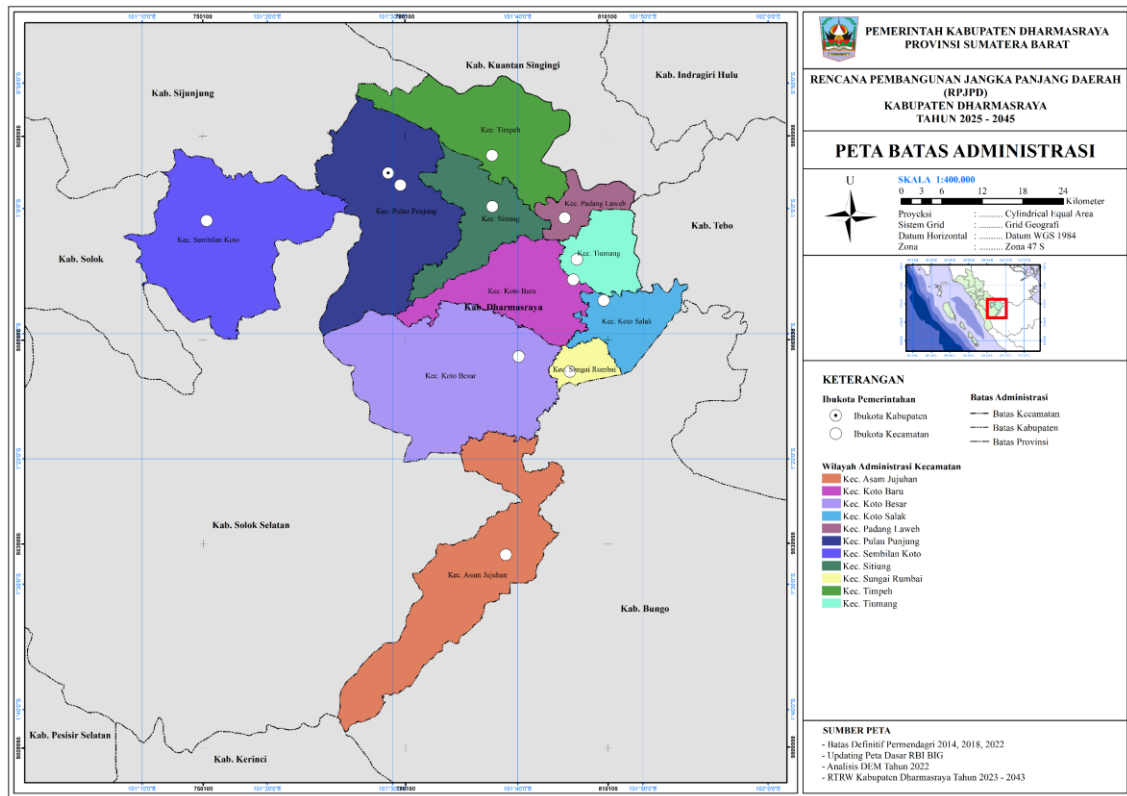
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, secara administrasi pemerintahan Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari terdiri dari 52 nagari dengan 461 jorong. Wilayah administrasi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.1.

Tabel 2- 1 Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Nagari
1	Koto Baru	21,813	4
2	Pulau Punjung	43,835	6
3	Sungai Rumbai	4,950	4
4	Sitiung	18,459	4
5	Sembilan Koto	46,655	4
6	Timpeh	28,711	5
7	Koto Salak	12,212	5
8	Tiumang	11,243	4
9	Padang Laweh	7,184	4
10	Asam Jujuhan	43,280	5
11	Koto Besar	53,780	7
Kab. Dharmasraya		292.120	52

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dan Tata Batas Administrasi Kemendagri dan Perhitungan Luas Peta Administrasi 2022

Gambar 2- 1 Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya



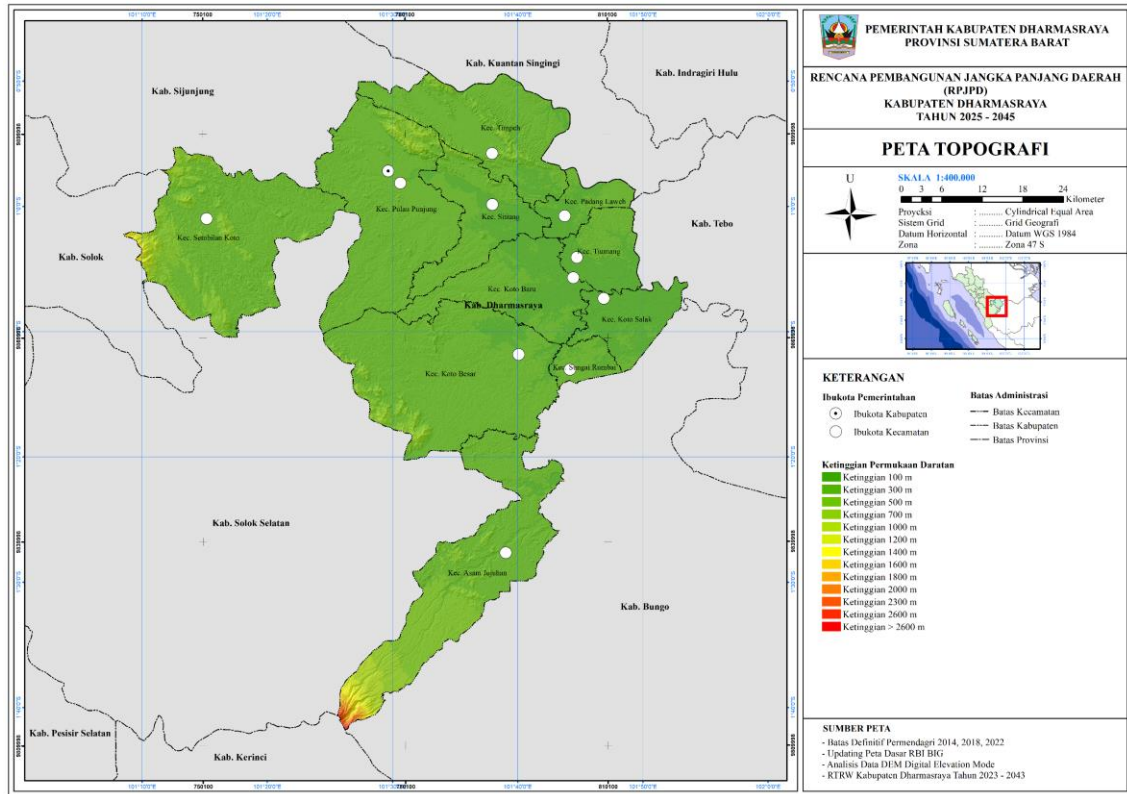
Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

B. Topografi dan Kelerengan

Wilayah Kabupaten Dharmasraya secara umum merupakan wilayah perbukitan dan pergunungan dengan kondisi topografi berada pada ketinggian 100-2.600 meter diatas permukaan laut (mdpl). Wilayah dengan ketinggian mulai dari 100 mdpl berada pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, sedangkan ketinggian 2.600 mdpl berada pada kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat (Gambar 2.2 dan Gambar 2.3).

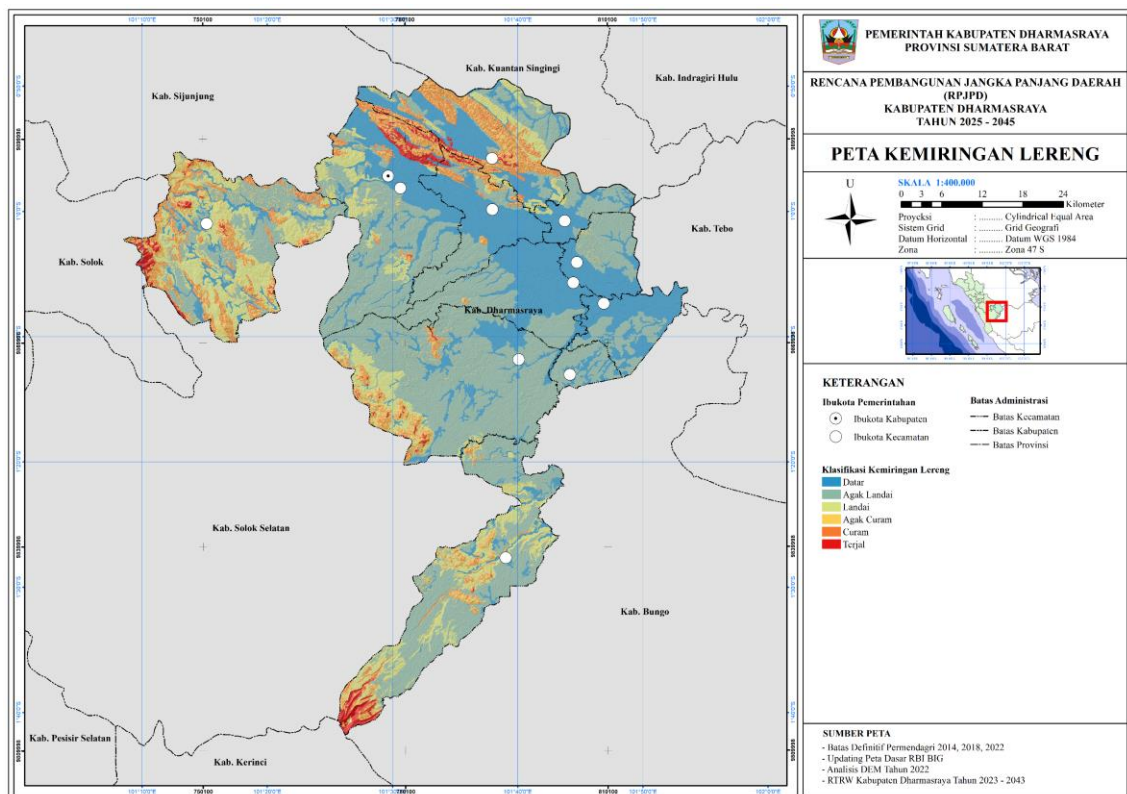


Gambar 2- 2 Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Gambar 2- 3 Peta Kelerengan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043



C. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu yang merupakan bagian dari DAS Batanghari. Wilayah Kabupaten Dharmasraya dialiri oleh banyak sungai/batang, dan salah satu sungai yang menjadi bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari. Selain sungai sumber mata air lainnya yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya yaitu berupa embung ssebanyak 44 embung.

D. Klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya termasuk ini tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan. Curah hujan sebagian wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong tinggi yaitu lebih dari 200 mm/bulan.

Suhu udara berkisar antara 210C hingga 330C, dengan tingkat kelembaban antara 70 hingga 80%. Curah hujan sebesar 14.684 mm/tahun dengan banyak hari hujan 361.

E. Tutupan Lahan

Berdasarkan pemetaan kembali tutupan lahan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2018 berdasarkan citra terbaru tahun 2017 dan diupdating dengan data citra 2021 maka diperoleh hasil seperti berikut ini.

1. Lahan Pertanian

Luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan seluas 214.791 Ha (72,53% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan sawit seluas 182.424 Ha (62,45%) dan karet seluas 21.874 Ha (7,49%). Lahan Sawah dengan padi terus menerus seluas 4.295 Ha (1,47%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering (ladang/tegalan dengan palawija) seluas 6.198 Ha (2,12%).

2. Hutan

Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 58,757 Ha (20,11% dari luas wilayah).

3. Permukiman

Luas kawasan permukiman 5.026 Ha (1,70% dari luas wilayah). Kawasan permukiman dominan berkembang diarah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan permukiman didorong oleh perkembangan permukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an.

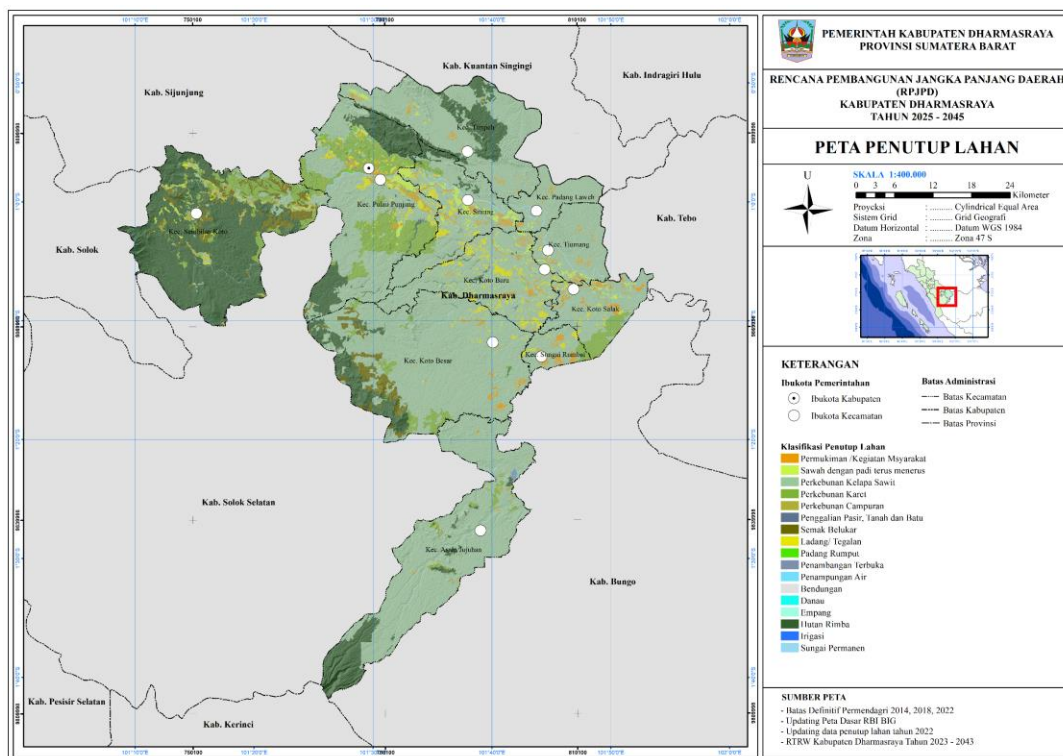
Untuk lebih jelasnya tutupan lahan Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.4.

Tabel 2- 2 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Jenis	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman/ tempat kegiatan masyarakat	5,026	1.72
2	Sawah dengan padi terus menerus	4,295	1.47
3	Perkebunan kelapa sawit	182,424	62.45
4	Perkebunan karet	21,874	7.49
5	Perkebunan campuran	3,087	1.06
6	Penggalian Pasir, Tanah dan Batu	346	0.12
7	Semak belukar	7,509	2.57
8	Ladang / tegalan/ palawija	6,198	2.12
9	Padang rumput/ alang-alang	219	0.08
10	Penambangan terbuka	137	0.05
11	Penampungan air	1	0.00
12	Bendungan	1	0.00
13	Danau	16	0.01
14	Empang	65	0.02
15	Hutan rimba	58,757	20.11
16	Irigasi	146	0.05
17	Sungai permanen	2,018	0.69
Total Luas		292.120	100

Sumber : Interpretasi Pemetaan Digitasi Citra Satellite Pleiades pada RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Gambar 2- 4 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

2.1.1. Aspek Geografi

A. Pemanfaatan Lahan berdasarkan Status

Berdasarkan status lahan yang merupakan penguasaan lahan oleh perusahaan atau pemerintah berdasarkan peraturan yang menunjukkan penguasaan lahan tergambar proporsi pemanfaatan lahan oleh masyarakat maupun daerah. Dari data status penguasaan lahan didapat gambaran sebagai berikut:

- Luas lahan yang telah diperuntukan bagi berbagai pemanfaatan berdasarkan perijinan yang telah dikeluarkan di Kabupaten Dharmasraya yaitu: kawasan hutan, perkebunan besar, kawasan pertambangan dan rencana pengembangan kawasan cadangan lahan oleh Departemen Transmigrasi seluas 143.769 Ha (48,90% dari luas wilayah kabupaten)
- Kawasan hutan berdasarkan yaitu SK. No 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 seluas 80.819 Ha (28,24% dari luas kabupaten).
- Perkebunan besar seluas 48.272 Ha (16,74% dari luas kabupaten)
- Kawasan pertambangan berdasarkan IUP operasi produksi pertambangan seluas 2.409 Ha.
- Luas kawasan untuk penggunaan lain diluar kawasan yang telah dikeluarkan ijin penguasaan pemanfaatan lahannya yaitu 150.213 Ha (51,10% dari luas wilayah).

Untuk lebih jelasnya peruntukan lahan berdasarkan status dan ijin usaha pertambanagn di kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 serta Gambar 4.5.

Tabel 2- 3 Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan

Peruntukkan Lahan Berdasarkan Status Lahan	Luas	
	Ha	%
Kawasan Hutan	88.582,06	30,32
- Hutan Lindung (HL)	10.653,55	3,65
- Hutan Produksi (HP)	24.116,69	8,26
- Hutan Produksi Konversi (HPK)	16.272,38	5,57
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)	28.171,03	9,64
- Kawasan Cagar Alam	770,95	0,26
- Kawasan Suaka Alam	3,51	0,00
- Kawasan taman nasional (TN)	8.593,94	2,94
Perkebunan Besar	48.272	16,52
Kawasan Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan (KP2B)	7.895	2,70
Kawasan Pertambangan (berdasarkan IUP operasi produksi)	2.526	0,86
Luas lahan yang dikuasai perusahaan dan pemerintah berdasarkan peraturan-perundangan	147.270	50,41
Penggunaan lain oleh masyarakat dan Pemda	158.387	49,59
Total Luas Kabupaten	292.120	100,00

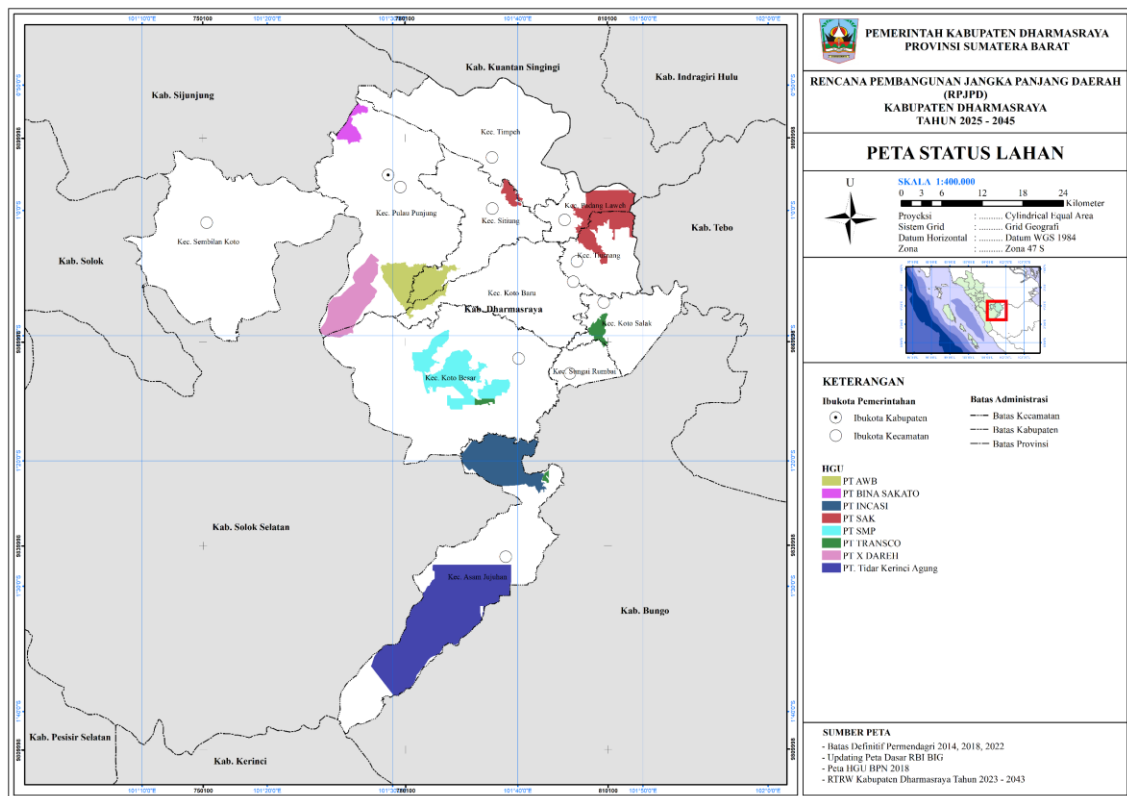
Sumber: SK. No 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Analisis data Tahun 2022

Tabel 2- 4 Ijin Usaha (IUP) Pertambangan

No	Kategori	Luas Ha	Proporasi Dari Luas Kabupaten
1	IUP Pertambangan	2.526	0,86 %
2	IUP Operasi Produksi Pertambangan	2.526	0,86 %
3	IUP Eksplorasi Pertambangan	17.587	5,87%
4	Wilayah Pertambangan	292.120	100,00%

Sumber : Dinas Energi, Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Barat

Gambar 2- 5 Peta Status Lahan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

B. Persentase Alih Fungsi Lahan

Ada beberapa permasalahan terkait dengan konflik dan perubahan guna lahan di Kabupaten Dharmasraya antara lain :

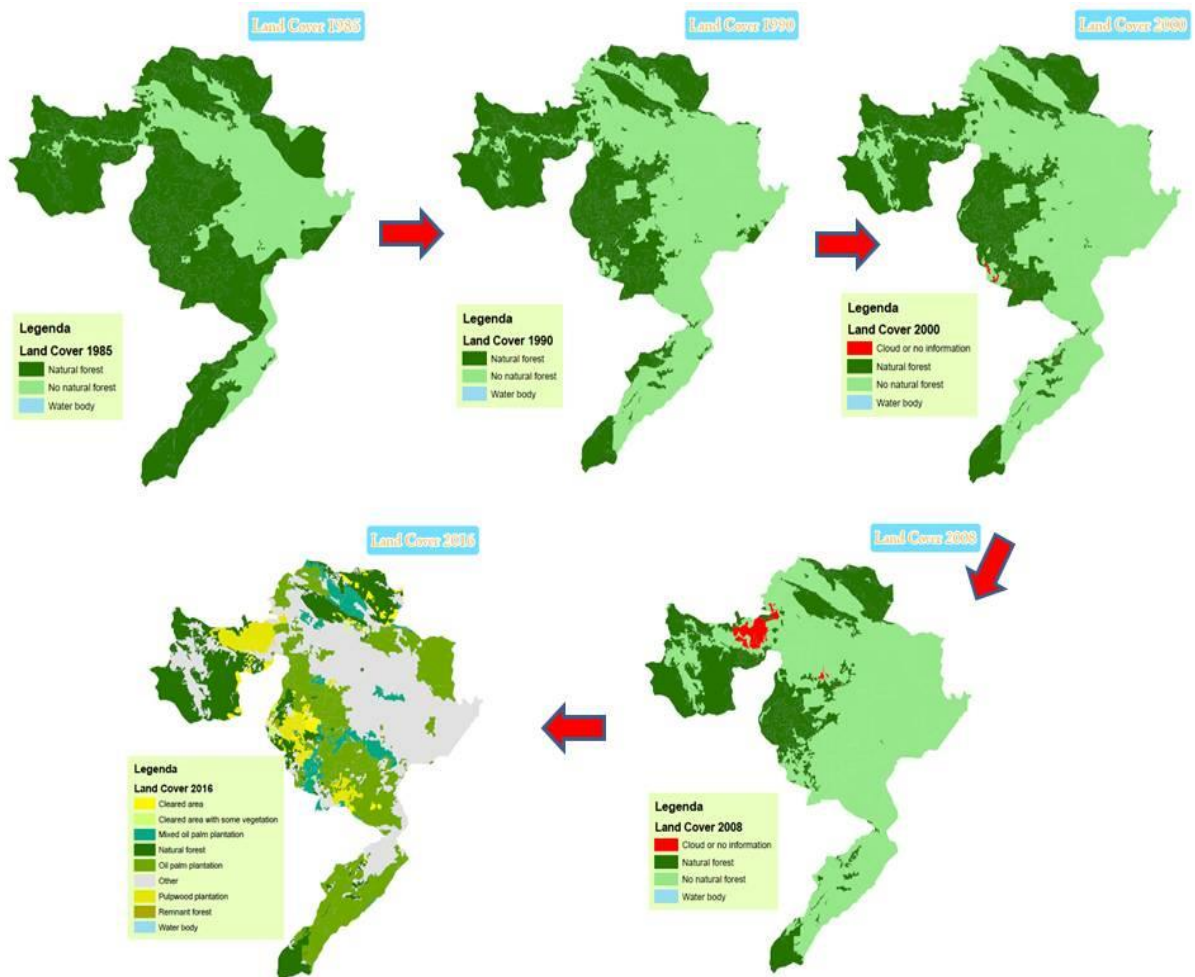
- Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) pada lahan-lahan masyarakat;
- Tingginya kecenderungan alih fungsi lahan (lindung VS perkebunan, budidaya pertanian dan perkebunan VS perumahan);

Salah satu masalah utama di Kabupaten Dharmasraya adalah alih fungsi lahan yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari luasan hutan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit oleh dunia usaha dengan ijin dari pemerintah. Booming kelapa sawit oleh dunia usaha tersebut berakibat pada alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat baik dari hutan ke kelapa sawit, dari perkebunan karet ke kelapa sawit, maupun dari lahan pertanian ke kelapa sawit.

Pertumbuhan kegiatan di bidang perkebunan akan selalu terjadi sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya. Untuk skala usaha/kegiatan ekonomi menengah keatas membutuhkan lahan usaha untuk menggerakkan perekonomian korporasi dan memperoleh keuntungan secara finansial, Kabupaten Dharmasraya memiliki 9 (Sembilan) kegiatan perkebunan dan 1 (satu) kegiatan HTI dengan luas 83.482,07 Ha. Sedangkan bagi masyarakat yang belum mapan dan kuat secara finansial serta memiliki tingkat pendidikan yang rendah maka akan muncul ketergantungan terhadap sumber daya alam untuk menambah penghasilan dengan menjual kayu atau perkebunan skala masyarakat karena modal dan keahlian yang dibutuhkan untuk usaha ini relatif kecil dan sederhana.

Terjadi juga alih fungsi lahan dari hutan ke areal pertambangan yang akhirnya meninggalkan areal bekas tambang yang terbengkalai. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah penduduk tentu diperlukan penambahan lahan untuk permukiman dan sarana-sarana terkait yang diperlukan, seperti sarana pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur yang diperlukan. Dari berbagai alih fungsi lahan dan kegiatan-kegiatan yang menyertainya mengakibatkan terjadinya dampak tidak langsung seperti perambahan dan fragmentasi kawasan hutan. Perubahan tutupan lahan 1985 – 2016 yang disajikan pada Gambar 2-6. di bawah ini yang menunjukkan bahwa terjadi perubahan tutupan lahan yang drastis dari hutan ke budidaya antara tahun 1985 – 1990.

Gambar 2- 6 Perubahan tutupan lahan Kabupaten Dharmasraya 1985 – 1990 – 2000 – 2008 - 2016

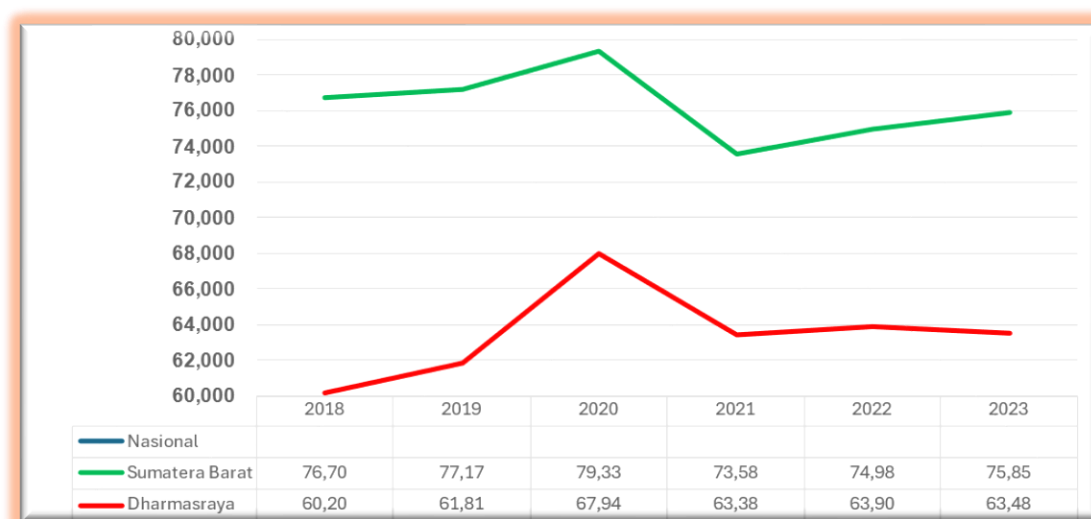


C. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) adalah Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, dan tutupan ekosistem gambut.

Nilai indeks kualitas udara bersama-sama dengan indeks kualitas air dan indeks tutupan lahan akan menentukan nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang akan menjadi indikator pencapaian kinerja program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah daerah. Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2- 7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Pada tahun 2019, IKLH Kabupaten Dharmasraya masih masuk kategori kurang dengan nilai $58 \leq \text{IKLH} \leq 66$. Selanjutnya di tahun 2020 terjadi peningkatan nilai IKA, IKU dan ITH sehingga meningkatkan nilai IKLH kabupaten Dharmasraya dari 61,81 pada tahun 2019 menjadi 67,94 pada tahun 2020. Nilai IKLH tersebut masuk kedalam kategori cukup yaitu dengan nilai $66 \leq \text{IKLH} \leq 74$. Namun pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan kualitas Udara yang mengakibatkan IKLH menurun menjadi 63,38 sebagai kategori kurang. Selanjutnya di tahun 2022 kembali terjadi sedikit kenaikan di bandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2023 IKLH Kabupaten Dharmasraya menurun menjadi 63,48 tetapi termasuk kategori kurang. Rendahnya IKLH Kabupaten Dharmasraya disebabkan oleh rendahnya luasan tutupan lahan hutan dan kualitas air di Kabupaten Dharmasraya.

D. Indeks Risiko Bencana Kerawanan Bencana Alam

Ancaman bencana di Sumatera Barat diantaranya gempabumi, tsunami, gunungapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca esktrim, gelombang ekstrim dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2022 Provinsi Sumatera Barat memiliki kelas risiko tinggi dengan nilai 144,39. Namun

untuk nilai indeks risiko bencana Kabupaten Dharmasraya berada di bawah angka Sumatera Barat, yaitu sebesar 137,69 yang dikategorikan sedang. Untuk jelasnya perkembangan IRBI Dharmasraya dapat dilihat pada tabel 2-5.

Tabel 2- 5 Nilai indeks risiko Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023

No	Tahun	IRBI Dharmasraya	Kategori
1	2015	143.20	sedang
2	2016	143.20	sedang
3	2017	143.20	sedang
4	2018	143.20	sedang
5	2019	143.20	sedang
6	2020	143.20	sedang
7	2021	137.69	sedang
8	2022	137.69	sedang
9	2023	141.50	sedang

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana alam adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Salah satu faktor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi daerah rawan bencana harus dikenali dan dibuat rencana tata ruang daerah rawan bencana. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.

Salah satu klasifikasi kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi di Kabupaten Dharmasraya adalah bencana tanah longsor yang dapat dilihat berdasarkan potensi gerakan tanah dan bencana banjir seperti uraian berikut:

D.1. Potensi Gerakan Tanah

Bencana Gerakan Tanah/longsor gerakan tanah merupakan perpindahan tanah yang disebabkan karena gempa bumi, kelerengan terjal maupun adanya kontak antar batuan yang mempunyai densitas berbeda. Gerakan tanah/longsor yang terjadi Kabupaten Dharmasraya umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi geologi, morfologi, dan curah hujan. Daerah lokasi potensi tinggi longsor : Kecamatan Silago, Sialang Kecamatan Pulau Punjung, dan Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung.

Potensi gerakan tanah dijumpai pada daerah yang dibentuk oleh batuan Anggota Filit, Formasi Barisan (Pb) dan serpih Formasi kuantan (Pckl) dan batuan vulkanik (Qd) . Umumnya gerakan tanah berupa longsor bahan rombakan dan nendatan

berdimensi panjang antara 1-2 m, lebar antara 0,5-1 m, terdapat pada kemiringan lereng antara 40-50 %. Sedangkan tipe gerakan tanah yang sering terjadi berupa longsoran bahan rombakan dan batu.

Bencana gerakan tanah pernah terjadi di Sialang, Kampung Surau, Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Silago yang mengakibatkan rusaknya sarana-prasarana transportasi dan lahan pertanian di daerah tersebut. Karakteristik bencana gerakan tanah tersebut dicirikan oleh adanya pergerakan suatu masa tanah/batuan dan air yang terjadi secara tiba-tiba dan serentak dengan kecepatan tinggi.

Gerakan tanah di wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan berdasarkan dominasi sebaran batuan utamanya, sehingga sebaran batuan yang luasnya kecil dan mempunyai topografi hampir sama akan disatukan dengan dominasi batuan utamanya, sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah digunakan metode kualitatif. Metode ini parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah terdiri atas: bentuk muka tanah (morfologi), kondisi geologi, curah hujan, dan kegempaan. Dari analisis parameter-parameter tersebut secara umum di Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Adapun parameter gerakan tanah di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2- 6 Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya

No	Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Kelompok Batuan Utamanya	Jenis Gerakan Tanah	Sebaran
1	Tinggi	Kelompok Anggota filit dan serpih Formasi Kuantan (PCKs), Batuan Intrusi Granit (g), Andesit (Qatg), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau).	Jenis gerakan tanah luncuran hingga runtuh, ataupun tumbang, lereng > 25%, kekar dan sesar.	Zona ini terdapat pada bagian Barat, meliputi Kecamatan Silago, Sialang, Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung
2	Sedang	Kelompok Batuan Anggota Batu Gamping Formasi Kuantan (PCKs), Anggota Formasi Kasai (QTpu) Anggota Filit Serpih Formasi Kuantan, Batuan Intrusi (g), Andesit (Qatg), dan bahan vulkanik tak terpisahkan.	Gelinciran – Seluncuran (bidang lapisan, kekar dan sesar).	Zona ini terdapat pada bagian Tengah dan Timur Laut meliputi wilayah Kecamatan Kota Baru dan Ampalu
3	Rendah	Kelompok Bantuan Anggota Batugamping Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih Formasi Kuantan (PCKs), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau), kipas Aluvium (Qf) dan Endapan Aluvium (Qaf).	Gelinciran – Luncuran (bidang foliasi, kekar dan sesar).	Penyebaran zona ini terdapat di bagian utara, selatan dan Timur daerah kajian yang meliputi wilayah Kecamatan Timpeh, Padang Laweh, Koto Besar, Kec. Koto Salak, Sungai Rumbai.

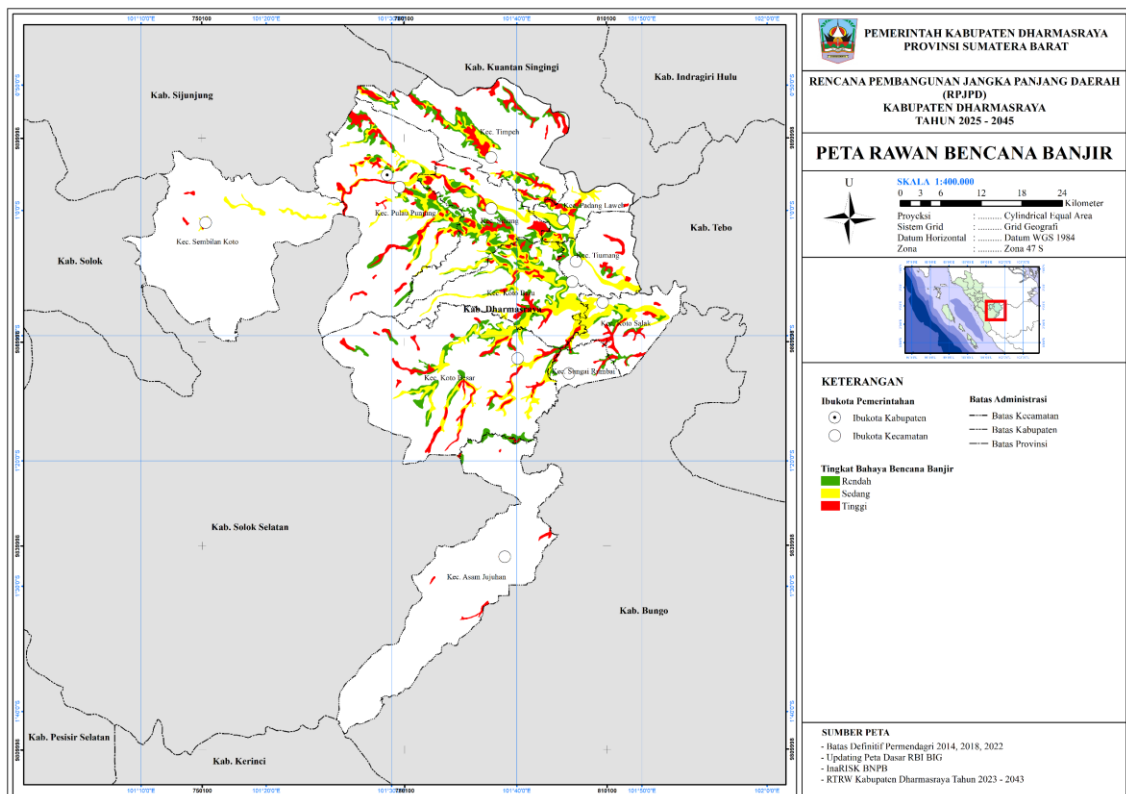
No	Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Kelompok Batuan Utamanya	Jenis Gerakan Tanah	Sebaran
4	Sangat Rendah	Batuan penyusunan zona ini terdiri dari bahan vulkanik (Qv), Kipas Aluvium dan Endapan Aluvium (Qal).	Erosi tebing sungai (litologi bersifat lepas-lepas).	Sebaran zona ini terletak di bagian tengah dan timur daerah telitian

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya, tahun 2021

D.2. Bencana Banjir

Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Dharmasraya terdapat pada kawasan-kawasan yang bercirikan: dataran limpah banjir yang terbentuk oleh teras-teras sungai yang terbentuk pada masa lampau, pertemuan dua sungai besar, meander sungai, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan berhutan gundul. Kawasan yang sangat potensi bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya adalah dataran banjir yang morfologi dataran disepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Timpeh, Sungai Batang Abai dan Sungai Bonjol, yang ketika aliran sungai pada kondisi normal tidak meluap namun pada saat musim hujan aliran sungai melampaui batas normal terjadi limpasan air sungai yang menyebabkan banjir. Untuk lebih jelasnya daerah rawan banjir di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2- 8 Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Bahaya banjir sering terjadi di lokasi potensi banjir : Kampung Surau, Pelayangan, Nagari Gunung Selasih di Kecamatan Pulau Punjung. Banjir Bandang sekitar Batang



Timpeh di Kecamatan Timpeh, Pasar Abai, Sungai Batang Abai, Sungai Bonjol di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Padang Laweh. Berikut data bencana banjir pada Kabupaten Dharmasraya.

D.3. Kerawanan Longsor

Tingkat kerentanan terhadap bahaya longsor dari hasil analisis skoring terhadap parameter penentu kerawanan longsor klasifikasi berupa kelerengan, ketinggian, curah hujan, dan jenis tanah maka Diperoleh kelas kerentanan yaitu tidak rawan, kerawanan rendah, kerawanan sedang, kerawanan tinggi. Hasil dari analisis skoring dengan metode tabular dan overlay diperoleh gambaran tentang area rawan yang hanya sebagian kecil saja kawasan longsor yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya.

D.4. Kerawanan Pencemaran Lingkungan

Baku mutu air raksa telah dilewati terutama oleh Sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, dan pada jumlah yang tidak terlalu signifikan pada Sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan. Kualitas air beberapa sungai di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.6.



Tabel 2- 7 Kondisi Kualitas Air Sungai di Kabupaten Dharmasraya

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Lokasi Sampling														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Waktu Pemantauan (tgl/bln/thn)				8/27/ 2010	27/08 /2010	27/08 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	5/31 /2010	5/31 /2010	5/31 /2010	5/31 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010
1	FISIKA																	
	Temperatur	°C										28,4	30,0	30,1	30,1			
	TDS	Mg/L	1000	64	17	22	55	95	45	182	23	21,7	80,4	64,4	57,6	15	88	51
	TSS	Mg/L	50	6	23	13	42	421	8	520	19	305	9	20	12	16	51	25
2	KIMIA ORGANIK																	
	PH		6-9	6,57	6,37	6,76	6,70	6,34	6,80	7,05	6,50	6,82	7,48	7,33	7,50	6,64	6,98	6,80
	BOD	Mg/L	2	2,4	2,0	1,6	2,0	3,2	3,5	2,8	3,4	1,56	1,92	2,44	2,86	3,1	4,5	2,8
	COD	Mg/L	10	10	15	4	12	13	7	21	9	16	17	9	14	17	43	25
	DO	Mg/L	6	7,2	7,3	6,9	7,1	7,1	6,1	6,7	7,2	4,0	4,7	5,9	5,3	6,8	7,0	6,3
	Posfat	Mg/L	0,20	TTD	0,008	0,083	0,033	0,216	TTD	0,106	0,015	0,039	TTD	TTD	TTD	0,162	0,154	TTD
	NO2	Mg/L		TTD	0,004	TTD	0,005	0,119	TTD	0,099	TTD	0,019	0,007	0,008	0,023	TTD	TTD	TTD
	Tembaga	Mg/L	0,02	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD					TTD	TTD	TTD
	Besi	Mg/L	0,3	0,265	2,152	1,574	3,617	11,92	0,882	12,14	0,4					1,229	4,869	1,551
	Timbal	Mg/L	0,03	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD					TTD	TTD	TTD
	Air Raksa	Mg/L	0,001	TTD	0,00092	0,00138	0,00166	0,00299	TTD	0,00069	0,00054	0,00172	0,00172	0,00163	0,02099	0,01392	0,00205	0,00075
	Seng	Mg/L	0,05	5,440	5,821	0,377	0,299	0,297	0,114	0,334	0,135					3,947	0,648	0,074
	Sulfat	Mg/L	400	1,475	3,594	2,634	4,665	71,032	6,98	48,023	23,49					1,867	3,713	19,74
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya																		

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya

Baku mutu berdasarkan PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 = Sungai Batang Momongan Hulu | 9 = Sungai Batang Siat Hilir |
| 2 = Sungai Batang Mimpi | 10 = Sungai Batang Timpeh |
| 3 = Sungai Batang Siat Abai | 11 = Sungai Muaro batang Momongan |
| 4 = Sungai Betung | 12 = Sungai Muaro Pangian |
| 5 = Sungai Koto Balai & S. Batih | 13 = Sungai Batanghari (Hulu) |
| 6 = Sungai Pangian Hulu | 14 = Sungai Batanghari (Tengah) |
| 7 = Sungai Piruko Palangko & Nyunyo | 15 = Sungai Batanghari (Hilir) |
| 8 = Sungai Kuranji&Btng Siat | |

E. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Saat ini kapasitas penanggulanangan bencana Kabupaten Dharmasraya semakin meningkat terkait dengan kejadian bencana banjir yang terjadi berdasarkan kala ulangnya. Keterlibatan berbagai pihak baik pada saat kemungkinan terjadi bencana maupun pasca bencana diharapkan semakin memperkecil resiko bencana dan meningkatkan kapasitas ketahanan daerah. Dimasa yang akan datang ketahanan daerah menghadapi bencana akan semakin ditingkatkan agar dapat menyamai rata-rata indeks ketahanan daerah provinsi.

F. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks ketahanan pangan Kabupaten Dharmasraya sebagaimana indeks ketahanan pangan kabupaten lainnya di Sumatera Barat memiliki angka yang tinggi. Komponen indeks ketahanan pangan terdiri dari :

- Ketersediaan
- Keterjangkauan
- Pemanfaatan

Dari segi ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan Kabupaten Dharmasraya memiliki cadangan pangan yang cukup karena ditunjang oleh lahan pangan yang luas. Oleh sebab itu indeks ketahanan pangan di Kabupaten Dharmasraya termasuk tinggi melebihi rata-rata nasional. Dimasa yang akan datang diharapkan kondisi ini hendaknya dapat dipertahankan dengan indeks yang semakin tinggi.

G. Indeks Ketahanan Energi

Di Indonesia, definisi ketahanan energi adalah kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup (Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014). Dengan ketersediaan sumberdaya mineral dan sumberdaya air sebagai pembangkit energi yang berlimpah di Kabupaten Dharmasraya, maka ketahanan energi sudah baik, dengan adanya jaringan interkoneksi Sumatera. Hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya konsumsi energi per tahun di Kabupaten Dharmasraya. Dengan semakin berkembangnya Kabupaten Dharmasraya konsumsi energi akan semakin meningkat, dan diperkirakan dapat diantisipasi karena adanya ketahanan energi yang tinggi.

H. Indeks Ketahanan Air

Menurut Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air dijelaskan bahwa ketahanan air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air. Didalam pasal 4 dijelaskan bahwa Ketahanan air nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit diukur berdasarkan target *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai berikut :

- a. akses terhadap air minum yang aman, merata, terjangkau, dan yang terlayani 100% (seratus persen);
- b. akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan pada:
 1. tidak ada praktik buang air besar di tempat terbuka;

2. ada perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan dan kelompok masyarakat rentan; dan
3. layanan air dan sanitasi telah efektif untuk mendukung perkembangan ekonomi;
- c. peningkatan mutu air sesuai Baku Mutu Air yang ditetapkan dan berdasarkan pada:
 1. rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air;
 2. upaya pengendalian pencemaran air, meliputi:
 - a) pembangunan fasilitas pengolahan air limbah di daerah aliran sungai
 - b) prioritas;
 - c) ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah;
 - d) pemantauan mutu air sungai dan dana secara manual;
 - e) pemantauan mutu air sungai secara otomatis dan terus-menerus; dan
 - f) pengawasan terhadap *effluent* Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal atau terpadu, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dan lindi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kabupaten/kota;
 3. upaya pemeliharaan mutu air;
 - a) peningkatan efisiensi penggunaan air di semua sektor
 - b) jaminan keberlanjutan pasokan air;
 - c) penerapan prinsip Pengelolaan Sumber Daya Air terpadu;
 - d) perlindungan dan pemulihan ekosistem terkait sumber daya air; dan
 - e) pengurangan risiko kerugian akibat bencana terkait air.

Pelayanan sumberdaya air baik untuk konsumsi untuk masyarakat maupun untuk pertanian dan industri masih perlu ditingkatkan terutama pada peningkatan kapasitas pengolahan. Kabupaten Dharmasraya memiliki sumber air baku yang berlimpah, tetapi masih membutuhkan pembangunan instalasi pengolahan air minum layak di setiap kecamatan.

I. Daya dukung dan daya tampung

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sementara daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (UUPPLH No.32/2009).

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya terdiri atas 20 jasa ekosistem yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok jasa, yaitu: jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya dan jasa pendukung. Berdasarkan dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, pada kajian ini menggambarkan ambang batas jasa lingkungan penyedia digunakan untuk menganalisis kemampuan lingkungan Kabupaten Dharmasraya yang dikuantifikasi sebagai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk mengkuantifikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH).

a). Jasa Penyedia Air

Secara agregat, D3T Air di Kabupaten Dharmasraya diindikasikan belum terlampaui. Hal ini terlihat dari selisih ketersediaan air yang masih memadai untuk memenuhi kebutuhan kegiatan manusia di masing-masing wilayah di Kabupaten Dharmasraya. Ketersediaan Air sebesar 4.065.234.272,89 m³, sedangkan kebutuhan air nya sebesar 2.085.478.789,17 m³/tahun dengan indikasi belum terlampaui. Jumlah ketersediaan air di Kabupaten

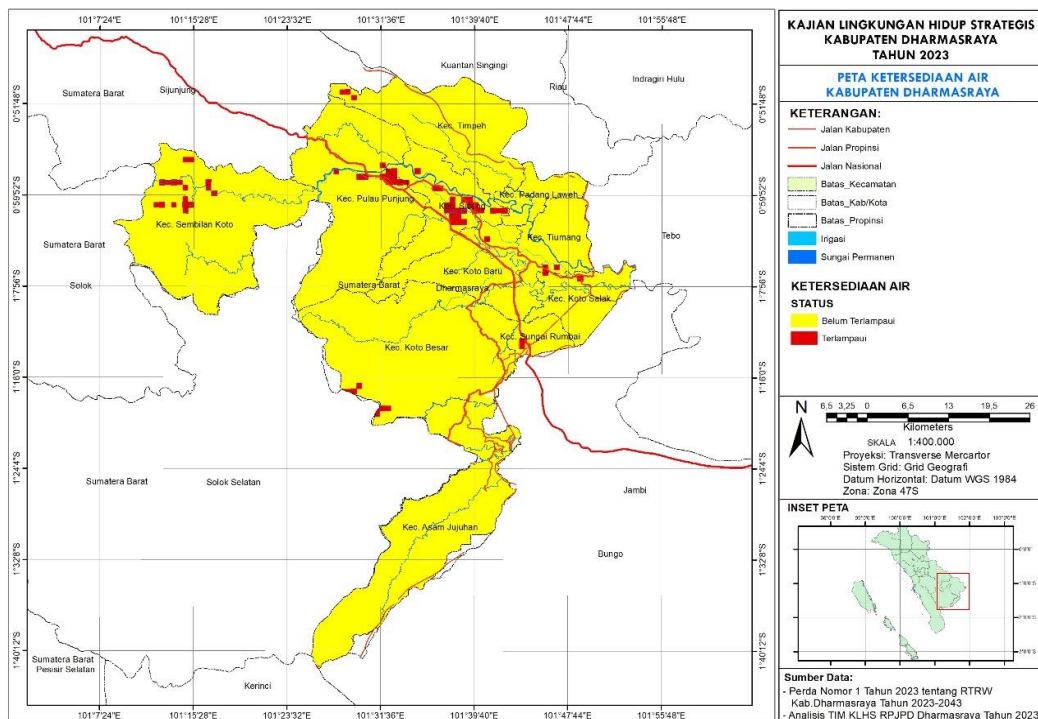
Dharmasraya yang sedemikian besar diperkirakan mampu mendukung jumlah penduduk paling banyak 232.597 jiwa dengan total luas daratan Kabupaten Dharmasraya mencapai 292.120 Ha. Untuk lebih jelasnya daya dukung ketersediaan air per kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2- 8 Daya Dukung Ketersediaan Air PerKecamatan di Kabupaten Dharmasraya

Kecamatan	Kebutuhan Air Domestik (m ³)	Kebutuhan Air Lahan (m ³)	Kebutuhan Air Total (m ³)	Ketersediaan Air (m ³)	Belum Terlampaui (m ³)	Terlampaui (m ³)
Asam Jujuhan	2.359.238,40	346.177.382,75	348.536.621,15	652.127.593,75	652.127.593,75	-
Koto Baru	2.078.006,40	213.959.621,87	216.037.628,27	376.213.674,07	371.853.003,76	4.360.670,31
Koto Besar	2.755.036,80	369.993.378,12	372.748.414,92	661.982.899,31	656.955.270,54	5.027.628,77
Koto Salak	1.275.868,80	116.180.605,64	117.456.474,44	230.908.789,13	228.093.036,66	2.815.752,46
Padang Laweh	1.314.662,40	74.859.280,06	76.173.942,46	126.073.136,61	126.073.136,61	-
Pulau Punjung	3.634.761,60	328.409.973,90	332.044.735,50	567.705.813,73	549.414.282,46	18.291.531,27
Sembilan Koto	3.335.904,00	53.841.266,46	57.177.170,46	488.187.160,52	474.298.278,10	13.888.882,43
Sitiung	2.372.025,60	202.539.426,34	204.911.451,94	334.491.712,27	291.013.010,77	43.478.701,49
Sungai Rumbai	904.608,00	47.875.986,72	48.780.594,72	96.991.888,24	93.994.615,36	2.997.272,89
Timpeh	2.543.011,20	201.050.048,74	203.593.059,94	355.562.253,79	351.947.187,97	3.615.065,83
Tiumang	1.553.817,60	106.464.877,76	108.018.695,36	174.989.351,46	172.098.572,65	2.890.778,81
Total	24.126.940,80	2.061.351.848,37	2.085.478.789,17	4.065.234.272,89	3.967.867.988,63	97.366.284,26

Sumber : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 146 Tahun 2023 tentang Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Ketersediaan Air

Gambar 2- 9 Peta Overlay Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Ketersediaan Air Kabupaten Dharmasraya



Sumber :Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045

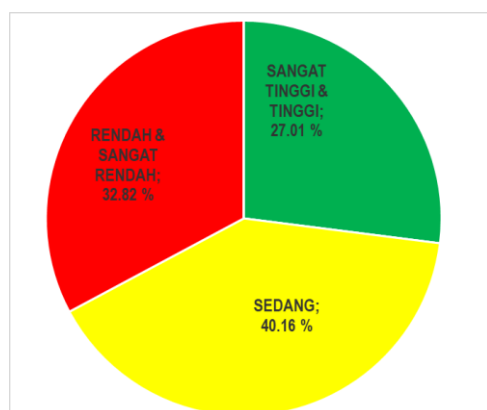
b) Jasa Penyediaan Pangan

Jasa penyediaan pangan adalah jasa ekosistem dalam menghasilkan barang yang dapat digunakan untuk pangan, baik dikonsumsi langsung maupun menjadi bahan baku bagi produksi pangan. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil dan termasuk pangan dari hutan.

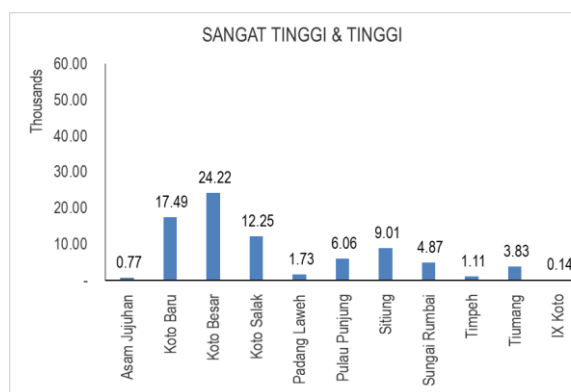
Luasan lahan yang mendukung jasa penyediaan pangan di Kabupaten Dharmasraya termasuk kategori sangat rendah dan rendah sebagian besarnya. Sebagaimana terlihat dalam bahwa ada sebanyak 32,82% luasan lahan memberikan daya dukung yang sangat rendah dan rendah untuk jasa penyediaan pangan. Sementara itu, luasan lahan Kabupaten Dharmasraya tersebut, sekitar 40,16%, memberikan daya dukung yang masuk kategori sedang, dan 27,01% masuk kategori sangat tinggi dan tinggi. Ini mengindikasikan bahwa daya dukung penyediaan pangan secara umum adalah rendah di kabupaten ini.

Daya dukung jasa penyediaan pangan yang masuk kategori sangat tinggi dan tinggi tersebar di beberapa kecamatan. Sebagian besar berada di Kecamatan Koto Besar, Koto Baru dan Koto Salak, lihat Gambar 2.9.

Gambar 2- 10 Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Dharmasraya



a. Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan



b. Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan Sangat Tinggi dan Tinggi menurut Kecamatan

Tiga kecamatan memberikan daya dukung sangat tinggi dan tinggi merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah yang besar. Sehingga kontribusi ketiga kecamatan ini menjadi sangat besar dalam daya dukung jasa penyediaan pangan. Tiga kecamatan ini memberikan daya dukung sangat tinggi dan tinggi mencapai 66% dari total luas wilayah kabupaten Dharmasraya. Daya dukung sangat tinggi dan tinggi di kecamatan Koto Besar adalah seluas lebih kurang 24 ribu hektar. Sebesar 42% dari luas kecamatan Koto Besar memberikan daya dukung yang sangat tinggi dan tinggi untuk jasa penyediaa pangan. Sementara di kecamatan Koto Baru terdapat seluas lebih kurang 17 ribu hektar lahannya memberikan daya dukung yang sangat tinggi, atau lebih dari 80% dari total luas lahan kecamatan. Terhadap kabupaten Dharmasraya, kecamatan Koto Baru memberikan kontribusi mencapai lebih kurang 21% dari daya dukung sangat tinggi dan tinggi. Kecamatan Koto Salak memiliki luas lahan yang memberikan daya dukung sangat tinggi dan tinggi

mencapai 12,2 ribu hektar, atau 98% dari total luas lahannya memberikan daya dukung sangat tinggi dan tinggi atas jasa penyediaan pangan. Daya Dukung Kabupaten Dharmasraya dalam Jasa Penyediaan Pangan menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2- 9 Daya Dukung Kabupaten Dharmasraya dalam Jasa Penyediaan Pangan menurut Kecamatan

No	KECAMATAN	SANGAT TINGGI & TINGGI		SEDANG		RENDAH & SANGAT RENDAH		JUMLAH	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Asam Jujuhan	769.17	0.94	39,243.57	32.39	6,359.90	6.42	46,372.63	15.37
2	Koto Baru	17,493.91	21.47	3,761.11	3.10	492.02	0.50	21,747.05	7.21
3	Koto Besar	24,220.88	29.73	20,905.27	17.26	12,184.14	12.31	57,310.30	19.00
4	Koto Salak	12,247.79	15.03	34.44	0.03	157.83	0.16	12,440.07	4.12
5	Padang Laweh	1,733.25	2.13	4,277.09	3.53	90.43	0.09	6,100.77	2.02
6	Pulau Punjung	6,057.02	7.43	21,988.76	18.15	16,704.68	16.87	44,750.47	14.84
7	Sitiung	9,014.75	11.06	1,504.04	1.24	2,499.81	2.52	13,018.60	4.32
8	Sungai Rumbai	4,865.12	5.97	244.39	0.20	-	-	5,109.51	1.69
9	Timpeh	1,114.52	1.37	16,841.11	13.90	14,774.72	14.92	32,730.35	10.85
10	Tiumang	3,826.54	4.70	9,539.66	7.87	177.49	0.18	13,543.70	4.49
11	IX Koto	138.53	0.17	2,812.73	2.32	45,570.74	46.03	48,522.00	16.09
	DHARMASRAYA	81,481.49	100.00	121,152.17	100.00	99,011.78	100.00	301,645.45	100.00
	Persentase	27.01		40.16		32.82		100.00	

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045

Daya dukung yang rendah dan sangat rendah untuk jasa pangan berada pada semua Kecamatan kecuali di kecamatan Sungai Rumbai. Namun demikian, daya dukung rendah dan sangat rendah terluas berada di Kecamatan Sembilan Koto, Pulau Punjung dan Timpeh. Hampir 78% lahan yang memberikan daya dukung rendah dan sangat rendah untuk jasa penyediaan pangan berada di tiga kecamatan ini.

Besarnya kemampuan ekosistem memberikan jasa pangan sangat ditentukan oleh tutupan lahan dan ekoregion. Tutupan lahan yang memberikan daya dukung sangat tinggi dan tinggi sebagian besar dengan tutupan lahan perkebunan kelapa sawit dan sawah yang berada pada ekoregion dataran fluvio gunungapi dan dataran aluvial. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.9 daya dukung yang rendah dan sangat rendah untuk jasa penyediaan pangan adalah permukiman dan lahan terbuka. Sementara itu, ekoregion yang daya dukung dengan jasa penyediaan rendah dan sangat rendah yang dominan adalah kaki gunung api.

Sebaran daya dukung jasa ekosistem penyediaan pangan Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada 2-9. Daya dukung sangat tinggi adalah sangat kecil yang menyebar pada beberapa bagian di bagian tengah wilayah kabupaten. Pada wilayah dimana daya dukung sangat tinggi ini, ekoregion dominan adalah dataran aluvial dengan tutupan lahan sawah irigasi. Daya dukung tinggi berada pada bagian tengah wilayah kabupaten yang meluas kearah Selatan yang berbatas dengan propinsi Jambi. Kawasan tersebut adalah kawasan dimana ekoregion dominan adalah dataran fluvio gunungapi dan dataran aluvial dengan tutupan lahan dominan adalah perkebunan campuran, ladang dan perkebunan kelapa sawit.

Daya dukung sedang berada pada wilayah dimana penutupan lahan adalah dominan perkebunan karet dan kelapa sawit pada ekoregion perbukitan/ pergunungan lipatan (intermountain basin) dan kaki gunungapi. Sementara itu daya dukung rendah dan sangat rendah berada wilayah dimana ekoregion dominan adalah pergunungan patahan dan perbukitan lipatan dengan tutupan lahan dominan adalah hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder.

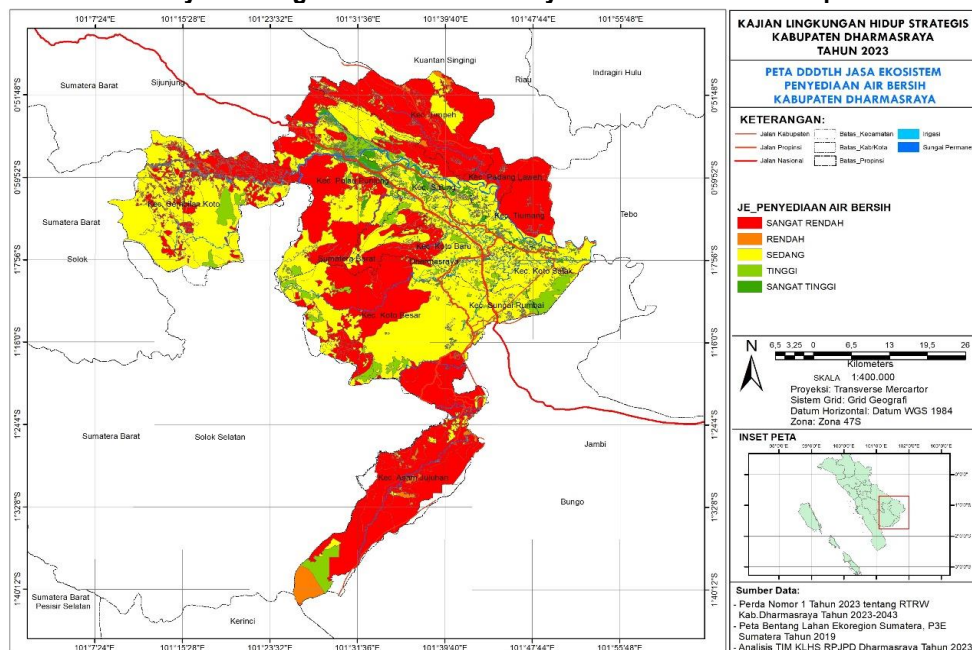
Dengan demikian dapat disarankan bahwa pemanfaatan ruang dan kegiatan pembangunan hendaknya seminimal mungkin mengalihkan tutupan lahan dari sawah irigasi menjadi peruntukan lainnya, karena akan menurunkan daya dukung alam menyediakan pangan. Daya dukung jasa penyediaan pangan kabupaten Dharmasraya dapat dilakukan pada wilayah dimana ekoregion dataran aluvial dan dataran fluvio gunungapi dengan merubah tutupan lahan menjadi sawah. Sungguhpun demikian, keberadaan perkebunan sawit memberikan daya dukung tinggi, walau belum sangat tinggi, untuk jasa penyediaan pangan. Wilayah tersebut sebagian besar berada pada kecamatan Koto Salak, Sungai Rumbai, Koto Baru, Koto Besar, Pulau Punjung, Padang Laweh dan Tiumbang.

Tabel 2- 10Daya Dukung Sangat Tinggi dan Tinggi Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Dharmasraya menurut Ekoregion dan Tutupan Lahan

No	Tutupan Lahan	Dataran Aluvial		Dataran Fluvio Gunungapi		Kaki Gunungapi		Lembah antar Perbukitan/Pegunungan		Lembah antar perbukitan/Pegunungan Lipatan		Jumlah	
		Jml (ha)	%	Jml (ha)	%	Jml (ha)	%	Jml (ha)	%	Jml (ha)	%	Jml (ha)	%
1	Bangunan Permukiman Desa	-	-	466,26	5,69	-	-	-	-	-	-	466,26	1,80
2	Bangunan Permukiman Kota	-	-	132,31	1,61	-	-	-	-	-	-	132,31	0,51
3	Bendungan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,63	0,01	0,63	0,00
4	Danau	-	-	2,46	0,03	15,23	0,52	-	-	-	-	17,69	0,07
5	Empang	-	-	20,56	0,25	-	-	-	-	-	-	20,56	0,08
6	Hutan Lahan Kering Primer Kerapatan Rendah	144,45	1,37	-	-	-	-	-	-	52,35	1,23	196,80	0,76
7	Hutan Lahan Kering Primer Kerapatan Sedang	-	-	0,02	0,00	-	-	-	-	1.483,58	34,73	1.483,60	5,72
8	Hutan Lahan Kering Primer Kerapatan Tinggi	24,00	0,23	-	-	2.724,53	93,63	-	-	2.215,69	51,87	4.964,23	19,14
9	Irigasi	104,71	0,99	22,89	0,28	-	-	-	-	18,94	0,44	146,53	0,56
10	Ladang/Tegalan dengan Palawija	2.098,51	19,90	2.552,17	31,14	-	-	-	-	-	-	4.650,68	17,93
11	Padang Rumput	82,30	0,78	69,26	0,85	-	-	-	-	-	-	151,56	0,58
12	Penampungan Air	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,01	0,50	0,00
13	Perkebunan Campuran	1.334,77	12,66	232,72	2,84	-	-	15,88	82,06	-	-	1.583,37	6,10
14	Perkebunan Karet	1.945,92	18,45	4.295,70	52,41	-	-	-	-	-	-	6.241,63	24,06
15	Sawah dengan padi terus menerus	3.561,26	33,77	7,03	0,09	-	-	-	-	-	-	3.568,29	13,75
16	Semak Belukar	38,79	0,37	229,22	2,80	-	-	-	-	-	-	268,02	1,03
17	Sungai Permanen	1.211,17	11,48	165,55	2,02	170,20	5,85	3,47	17,94	500,06	11,71	2.050,45	7,90
DHARMASRAYA		10.545,88	100,00	8.196,16	100,00	2.909,97	100,00	19,36	100,00	4.271,75	100,00	25.943,12	100,00
Persentase		40,65		31,59		11,22		0,07		16,47		100,00	

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045

Gambar 3.35. Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045

2.1.2. Kondisi Demografi

A. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dalam penyajian kondisi demografi, akan disajikan karakter penduduk Kabupaten Dharmasraya berdasarkan jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk. Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri.

Perkembangan jumlah penduduk disajikan dari data tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Untuk lebih jelasnya jumlah, dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2- 11 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Dharmasraya Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sungai Rumbai	20.487	21.650	22.591	22.720	23.586
2	Koto Besar	24.404	26.373	27.387	27.457	28.214
3	Asam Jujuhan	9.285	7.787	8.295	8.493	9.120
4	Koto Baru	29.331	30.269	32.208	32.729	33.869
5	Koto Salak	16.747	17.217	17.729	17.771	18.267
6	Tiumang	11.217	12.813	13.193	13.295	13.733
7	Padang Laweh	8.207	6.003	6.335	6.472	6.877
8	Sitiung	26.511	27.107	28.139	28.523	29.515
9	Timpeh	15.359	16.293	17.252	17.457	18.102
10	Pulau Punjung	39.167	41.953	43.993	44.559	46.790
11	Sembilan Koto	13.577	8.737	9.143	9.325	9.651
Jumlah		214.292	216.202	226.265	228.801	237.724
Pertumbuhan		2,69	0,89	4,65	1,12	3,90

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2023 mencapai 228.801 jiwa. Dilihat berdasarkan distribusi penduduk, maka dapat diranking 3 (tiga) besar kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 46.790 jiwa atau 19,68 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Koto Baru sebanyak 33.869 jiwa atau 14,25 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, dan di Kecamatan Sitiung sebanyak 29.515 jiwa atau 12,39 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya.

Sementara jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh yaitu sebanyak 6.877 jiwa atau hanya 2,89 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya.

B. Rasio Penduduk

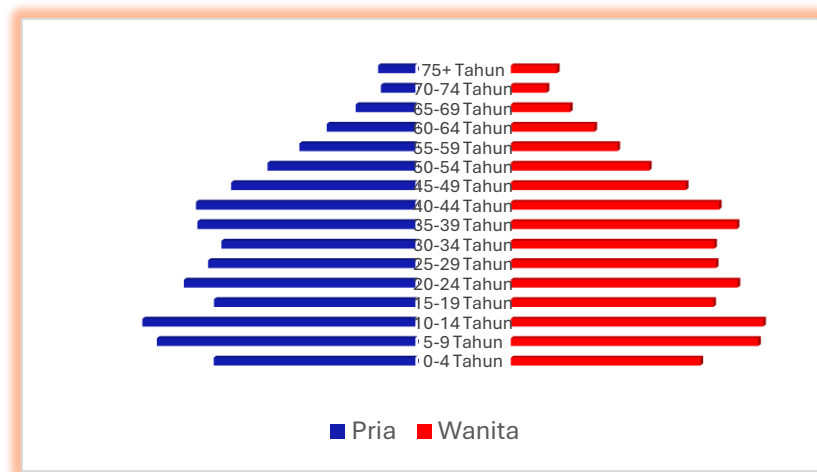
Apabila dilihat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, maka secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan dengan sex ratio sebesar 102,97, sedangkan rasio jenis kelamin tertinggi ada pada kelompok umur 50-54 tahun dan 55-59 tahun. Untuk lebih jelasnya Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Gambar 2.8..

Tabel 2- 12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No.	Kelompok umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)	Sex Rasio
		Pria	Wanita		
1	0-4	9.025	8.235	17.260	109,59
2	5-9	11.322	10.700	22.022	105,81
3	10-14	11.690	11.059	22.749	105,71
4	15-19	10.050	9.747	19.797	103,11
5	20-24	10.499	10.362	20.861	101,32
6	25-29	9.347	8.963	18.310	104,28
7	30-34	8.524	8.797	17.321	96,90
8	35-39	9.299	9.541	18.840	97,46
9	40-44	9.728	9.498	19.226	102,42
10	45-49	8.359	7.970	16.329	104,88
11	50-54	6.958	6.481	13.439	107,36
12	55-59	5.317	4.995	10.312	106,45
13	60-64	4.018	3.789	7.807	106,04
14	65-69	2.925	2.970	5.895	98,48
15	70-74	1.780	1.775	3.555	100,28
16	75+	1.761	2.240	4.001	78,62
Jumlah		120.602	117.122	237.724	102,97

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Hasil Analisis Bapperida, Tahun 2024

Gambar 2- 11 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin



Sumber : Hasil Analisis Bapperoda Tahun 2-24

Dan apabila dilihat dari piramida penduduk seperti gambar di bawah maka terlihat bahwa semakin tinggi kelompok umur maka jumlahnya semakin sedikit. Dan jumlah penduduk terbanyak ada pada kelompok usia 10-14 dan 5-9 tahun masing-masing sebesar 22.749 orang dan 22.022 orang.

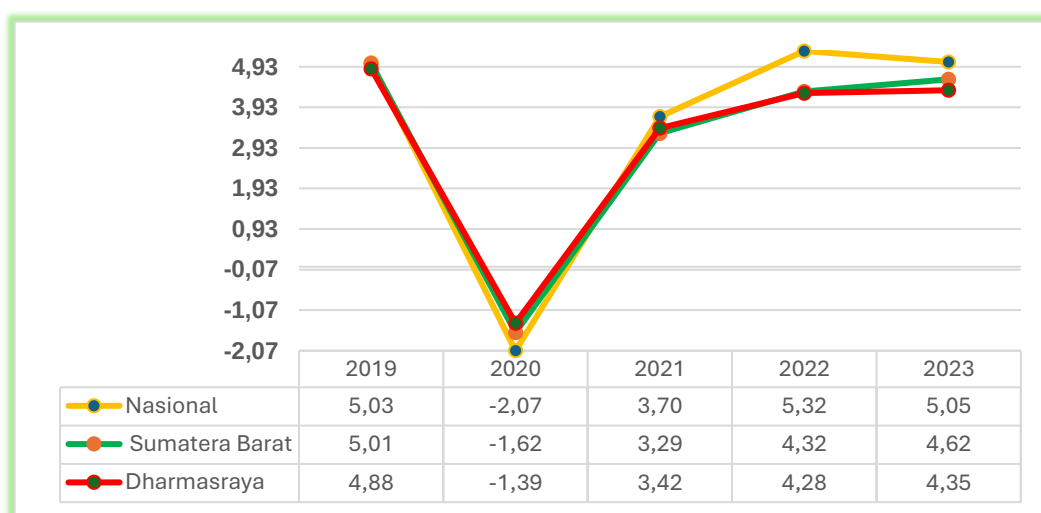
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan PDRB dihitung berdasarkan perkembangan PDRB ADHK Tahun 2000, indikator ini digunakan untuk untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan daerah. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya, nasional dan provinsi dapat dilihat pada Gambar 2.9 dan Tabel 2.10.

Gambar 2- 12 Pertumbuhan Ekonomi (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya berkontraksi pada tahun 2020 akibat covid-19. Selanjutnya dari tahun 2021-2023 atau pasca pasca covid-19 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif dan mengalami percepatan. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB/PDB secara nasional, Sumatera Barat maupun Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan sedikit perkembangan positif, meskipun sempat berkontraksi di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Namun di tahun 2021 kembali tumbuh positif. pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 berada di bawah nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya Nilai, Kontribusi, dan Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s.d 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.9.



Tabel 2- 13 Nilai, Kontribusi, dan Petumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s.d 2023

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHK 2010 (juta rupiah)				Kontribusi (persen)				Pertumbuhan (persen)			
		2010	2015	2020	2023	2010	2015	2020	2023	2011	2015	2020	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.441.465,13	1.833.705,78	2.139.968,87	2.367.214,83	31,73	29,71	28,71	28,22	3,80	5,23	(0,76)	2,95
B	Pertambangan dan Penggalian	524.346,86	645.615,44	564.963,60	482.551,36	11,54	10,48	7,58	5,75	13,74	(1,65)	0,69	2,34
C	Industri Pengolahan	311.838,06	387.208,43	406.789,72	451.345,14	6,86	6,40	5,46	5,38	4,18	3,50	(3,35)	1,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	757,89	1.051,86	1.207,79	1.339,00	0,02	0,02	0,02	0,02	6,25	1,93	(6,52)	4,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	597,29	860,70	979,54	929,51	0,01	0,01	0,01	0,01	10,32	4,59	(2,08)	(0,88)
F	Konstruksi	498.122,08	748.673,82	980.206,59	1.105.433,18	10,97	12,15	13,15	13,18	5,64	10,35	(5,31)	6,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	552.250,96	792.839,93	1.054.774,38	1.229.913,25	12,16	12,87	14,15	14,66	6,22	6,24	(0,34)	5,31
H	Transportasi dan Pergudangan	245.253,72	367.215,96	437.325,65	516.409,91	5,40	5,96	5,87	6,16	5,79	8,63	(13,18)	5,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	35.613,60	48.465,17	54.564,80	72.718,24	0,78	0,78	0,73	0,87	5,40	5,69	(15,19)	6,58
J	Informasi dan Komunikasi	246.404,88	420.857,80	648.765,21	797.144,62	5,42	6,83	8,70	9,50	9,77	11,58	7,89	7,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	96.507,41	134.403,33	152.699,53	179.267,21	2,12	2,18	2,05	2,14	6,96	4,25	0,73	3,90
L	Real Estat	94.283,28	128.101,14	159.413,89	179.855,13	2,08	2,08	2,14	2,14	7,65	6,45	0,04	6,20
M,N	Jasa Perusahaan	873,78	1.245,41	1.402,09	1.596,68	0,02	0,02	0,02	0,02	7,09	7,52	(5,67)	6,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	303.725,54	367.082,24	451.647,30	546.615,39	6,69	5,96	6,06	6,52	8,65	5,28	(0,93)	1,71
P	Jasa Pendidikan	95.586,70	142.525,69	207.286,28	225.103,33	2,10	2,31	2,78	2,68	8,95	8,05	4,11	2,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	64.407,51	95.910,14	138.664,08	161.542,80	1,42	1,56	1,86	1,93	7,21	8,51	7,11	6,80
R, S, T, U	Jasa lainnya	30.564,78	40.989,22	54.308,35	68.167,17	0,67	0,67	0,73	0,81	5,56	5,88	(9,40)	6,92
T O T A L		4.542.599,47	6.156.752,06	7.454.967,67	8.387.146,76	100	100	100	100	6,56	5,80	(1,39)	4,32

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor terbesar dalam pembentukan nilai PDRB, yaitu sebesar 28,22 persen. selanjutnya sektor kedua terbesar di tahun 2023 dalam pembentukan nilai PDRB adalah sektor perdagangan sebesar 14,66 dan diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 13,18 persen.

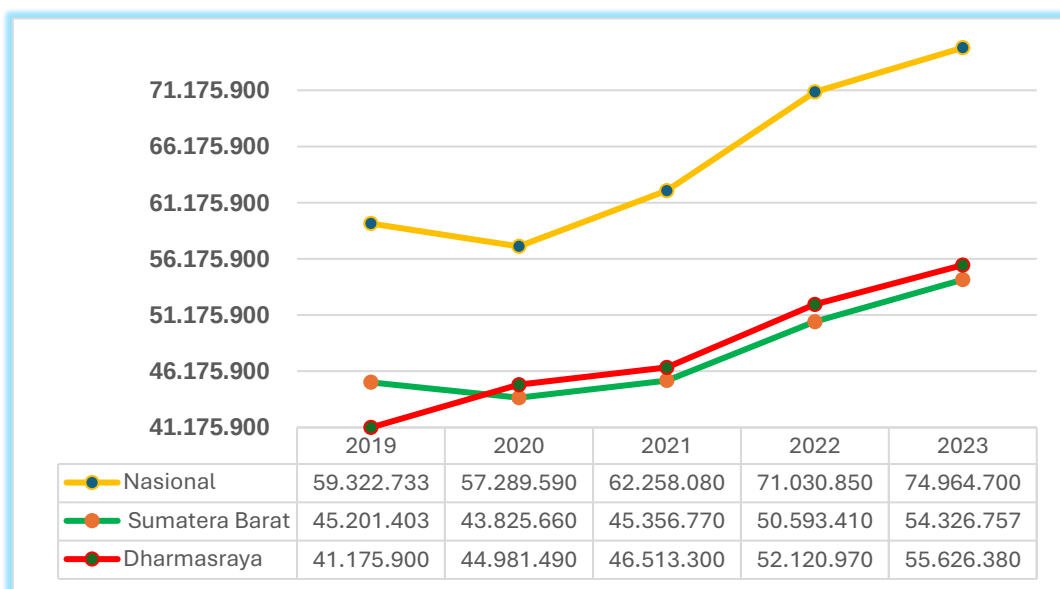
Dilihat dari tren perkembangan PDRB Tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 terlihat adanya perubahan kontribusi sektor yang cukup signifikan dalam membentuk nilai PDRB. Salah satu sektor dengan kontribusi turun yaitu sektor pertambangan, kontribusinya dari 11,5 persen di tahun 2010 turun menjadi 5,75 persen di tahun 2023. Begitu juga dengan sektor industri pengolahan yang juga menunjukkan penurunan dalam pembentukan kontribusi nilai PDRB dari 6,68 persen menjadi 5,38 persen

Sektor yang cukup meningkat kontribusinya diantaranya ada pada sektor konstruksi, dan sektor perdagangan sebagai sektor utama pembentuk nilai PDRB, masing-masing meningkat dari 10,97 persen menjadi 13,18 persen di tahun 2023 untuk sektor konstruksi, dan untuk sektor perdagangan juga meningkat dari 12,16 persen menjadi 14,66 persen. Adapun sektor yang cukup meningkat pesat yaitu sektor Informasi dan Komunikasi dimana di tahun 2010 hanya berkontribusi sebesar 5,4 persen, naik menjadi 9,5 persen di tahun 2023. Sedangkan sektor lainnya cenderung tidak memperlihatkan perubahan kontribusi yang cukup signifikan.

B. PDRB perkapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi. Untuk lebih jelasnya PDRB Perkapita Kabupaten Dharmasraya, nasional dan provinsi dapat dilihat pada Gambar 2.10.

Gambar 2- 13 PDRB Perkapita (rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

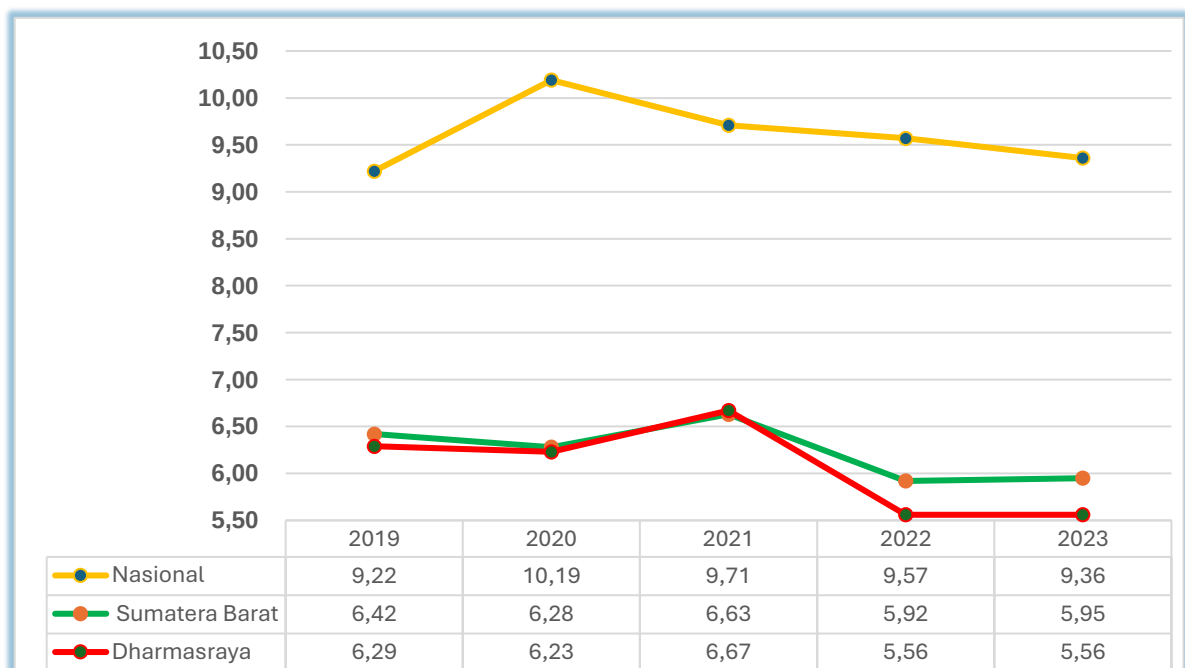
PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya terlihat sudah berada di atas PDRB perkapita Provinsi Sumatera Barat. Namun masih berada di bawah PDRB perkapita nasional.

C. Tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kondisi kemiskinan dikatakan membaik apabila tingkat kemiskinan semakin lama semakin menurun atau mendekati nol.

Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic Needs Approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan NonMakanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis kemiskinan (GK) pada Maret 2023 sebesar Rp. 477.580 per kapita per bulan. Artinya jika rata-rata satu orang memiliki pendapatab perkapitan di bawah garis kemiskinan maka tergolong pada kelompok miskin. Untuk lebih jelasnya tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya, nasional dan provinsi dapat dilihat pada Gambar 2.11

Gambar 2- 14 Tingkat Kemiskinan Tahun 2019-2023(persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Tingkat kemiskinan Dharmasraya sedikit berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, dan cukup rendah dibandingkan capaian nasional. Meskipun begitu tingkat kemiskinan ini, dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan angka kemiskinan Kabupaten Dharmasraya pada periode 2019-2023 sejalan dengan angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.

D. Rasio Gini

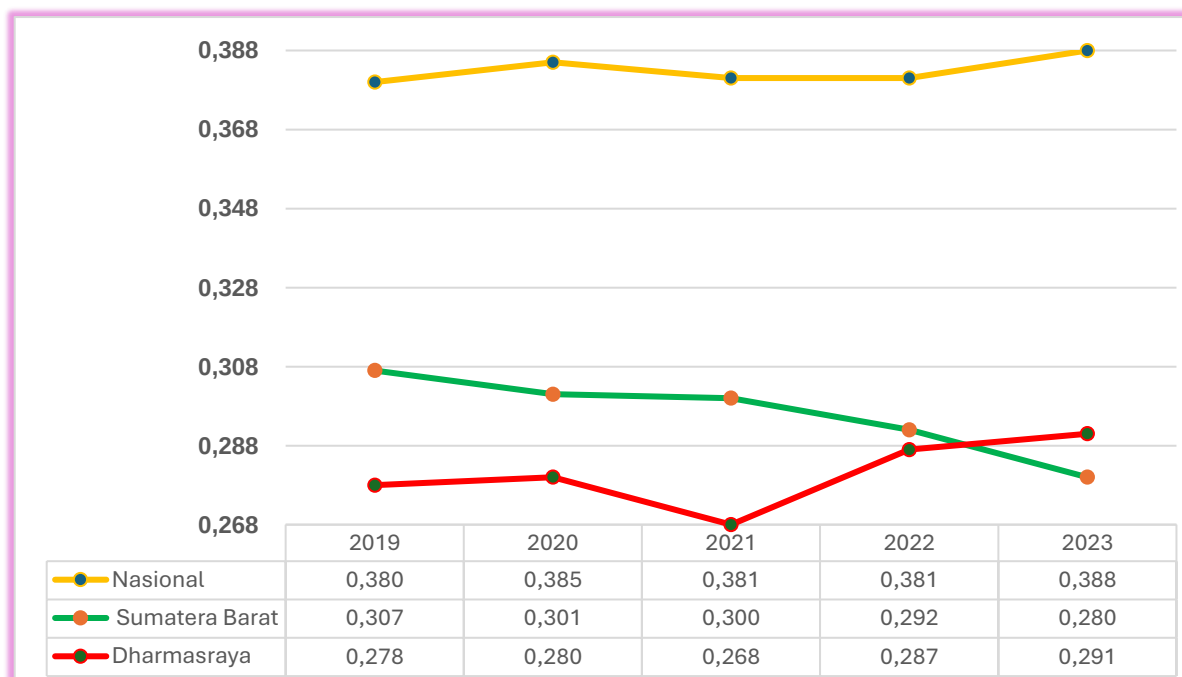
Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.

Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:

1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.
2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang.
3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik.

Untuk lebih jelasnya rasio gini Kabupaten Dharmasraya, nasional dan provinsi dapat dilihat pada Gambar 2.12

Gambar 2- 15 Rasio Gini Tahun 2019-2023 (indeks)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Rasio Gini Dharmasraya maupun Provinsi Sumatera Barat tergolong pada ketimpangan rendah sehingga disini dipandang bahwa pemerataan pendapatan di

masyarakatnya Berbeda dengan capaian nasional yang tergolong pada ketimpangan sedang.

E. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah kabupaten tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK.

Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga:

- Inflasi m-t-m membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember).
- Inflasi y-t-d membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan.
- Inflasi y-o-y membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya

Terhitung sejak Januari 2024, perhitungan inflasi Sumatera Barat terdapat penambahan kabupaten/kota sampel IHK, dimana sebelumnya hanya dilakukan di Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan saat ini terdapat penambahan di Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga kabupaten/kota sampel IHK saat ini sudah berjumlah 4 daerah. Penambahan Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat dilakukan pasca penyesuaian diagram timbang tahun dasar perhitungan inflasi menggunakan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sejalan dengan hal tersebut, tracking inflasi Provinsi Sumatera Barat ke depan akan memperhitungkan kondisi dan risiko yang bersumber dari 2 (dua) kabupaten tambahan tersebut. Inflasi Sumatera Barat dan Kabupaten/kota sampel inflasi dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2- 14 Inflasi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota sampel inflasi pada Januari 2024 (persen)

Indikator	Sumatera Barat	Padang	Bukittinggi	Dharmasraya	Pasamana Barat
% mtm	-0,32	-0,09	-0,27	-0,25	-0,19
% ytd	-0,32	-0,09	-0,27	-0,25	-0,19
% yoy	2,57	2,43	1,38	2,28	3,73

Sumber : Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Sumatera Barat, Tahun 2024

Pada Januari 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Dharmasraya sebesar 2,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,72.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,30 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,70 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,91 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,30 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,34 persen;

kelompok transportasi sebesar 0,78 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,38 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,58 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,57 persen. Sementara itu dua indeks kelompok pengeluaran mengalami penurunan harga, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,77 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen;

Tingkat deflasi month to month (m-to-m) dan tingkat deflasi year to date (y-to-d) Kabupaten Dharmasraya bulan Januari 2024 masing-masing sebesar 0,25 persen.

F. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk/output. Semakin tinggi produktivitas maka semakin bagus rata-rata kinerja tenaga kerja di suatu wilayah. Tingkat produktivitas tenaga kerja dihitung dengan cara membagi nilai PDRB ADHB pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2- 15 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2022-2023 (persen)

Indikator	Satuan	2022	2023
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp Juta/ orang	91,19	108,04
<i>PDRB ADHB</i>	<i>juta rupiah</i>	<i>12.233.469,95</i>	<i>13.345.769,26</i>
<i>Jumlah Tenaga Kerja</i>	<i>orang</i>	<i>134.147</i>	<i>123.524</i>

Sumber : BPS Sumatera Barat, tahun 2024

Realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Dharmasraya terlihat adanya peningkatan dari 91,19 juta/orang naik menjadi 108,04 juta/orang. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan nilai PDRN yang cukup signifikan, namun disisi lain data menunjukkan penurunan jumlah tenaga kerja dari 134.147 orang menjadi 123.524 orang.

G. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut. pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

- Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life)
- Pengetahuan (knowledge)
- Standar hidup layak (decent standard of living)

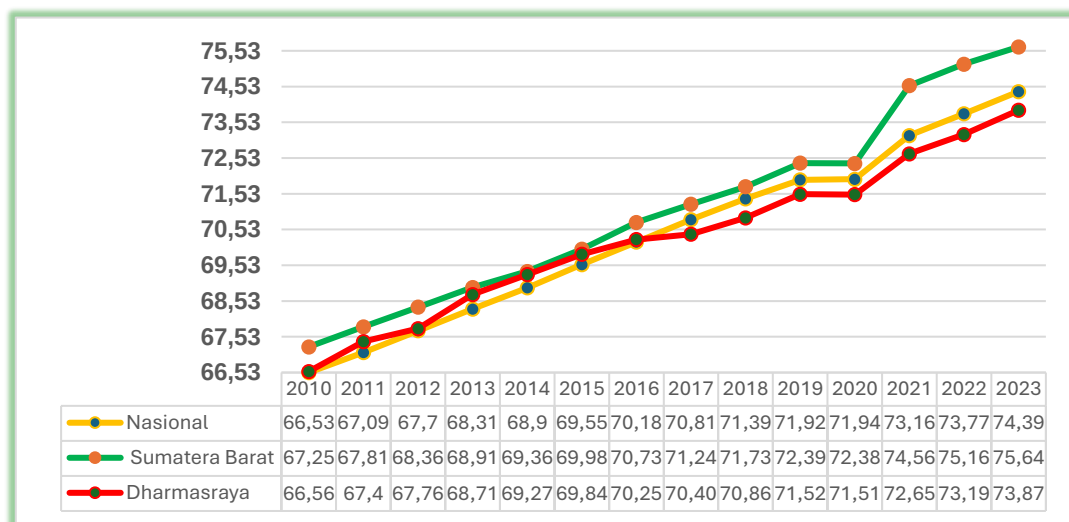
Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- Rendah: $IPM < 60$;
- Sedang: $60 \leq IPM < 70$;
- Tinggi: $70 \leq IPM < 80$;
- Sangat tinggi: $IPM \geq 80$.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dharmasraya, Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.16.

Gambar 2- 16 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010-2023 (indeks)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

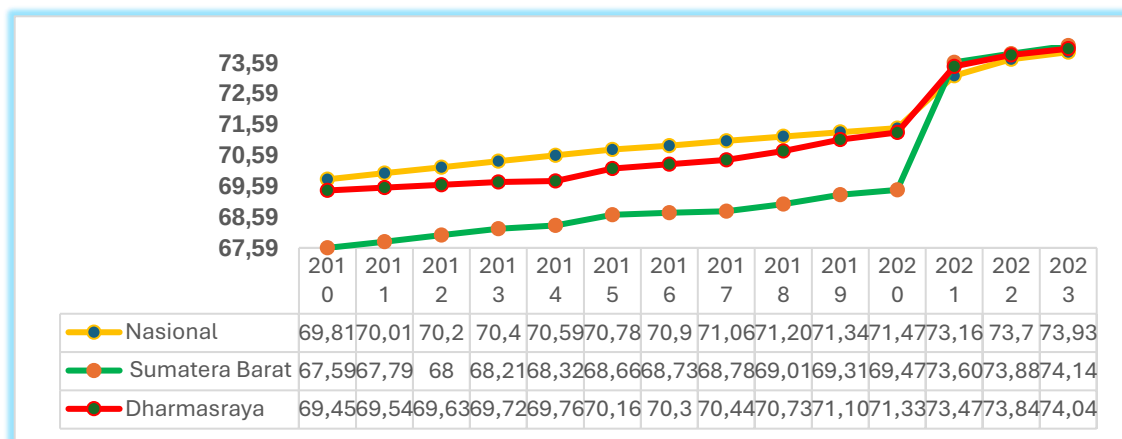
Dari sisi relevansi, kecenderungan perkembangan Kabupaten Dharmasraya sejalan dengan perkembangan IPM Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Dimana perkembangan ketiga wilayah tersebut dari tahun 2010 hingga tahun 2015 tergolong pada kategori sedang. Dan mulai tahun 2016 hingga tahun 2023 secara bersamaan juga beralih menjadi kategori tinggi. Namun demikian IPM Dharmasraya hingga tahun 2015 masih berada di atas Provinsi, namun di tahun 2016 sudah berada di bawah Provinsi Sumatera Barat.

B. Usia Harapan Hidup (UHH)

UHH merupakan Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Idealnya UHH dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack. Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Adapun Usia Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.14.

Gambar 2- 17 Usia Harapan Hidup Tahun 2010-2023 (Tahun)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

UHH Kabupaten Dharmasraya meningkat seiring dengan perkembangan UHH Provinsi Sumatera Barat. Disini dapat dilihat UHH Dharmasraya dari tahun 2010 hingga 2020 lebih baik dibandingkan dengan Provinsi atau rata-rata selisih lebih tinggi sekitar 2 tahun. Namun setelah adanya perhitungan Usia Harapan Hidup Long Form Sensus Penduduk 2020 (UHH LF SP2020) terdapat penyesuaian perhitungan, sehingga UHH Dharmasraya sedikit di bawah Provinsi Sumbar namun tetap berada di atas nasional.

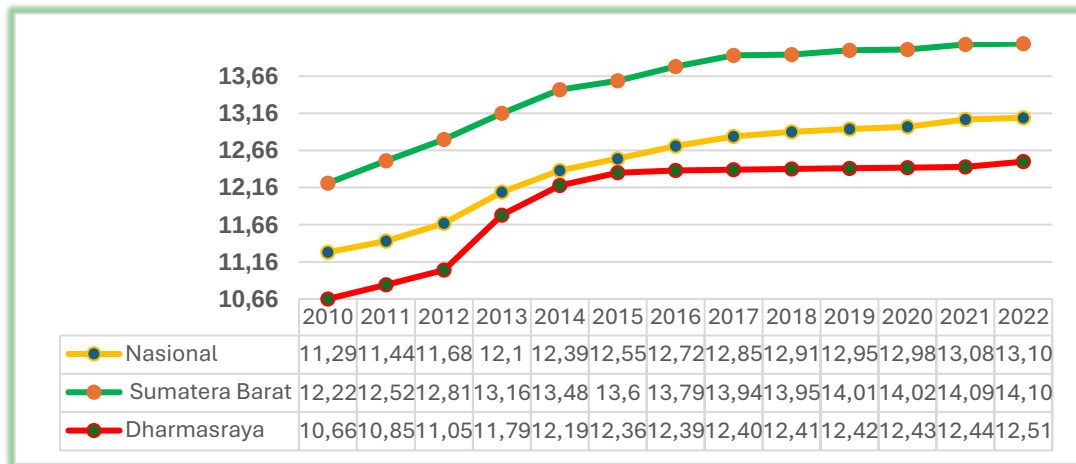
Hal ini menandakan status kesehatan masyarakat Dharmasraya sudah lebih baik dibandingkan nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

C. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah merupakan lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.

Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Dharmasraya, Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.15.

Gambar 2- 18 Indeks Pembangunan Gender Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022 (indeks)



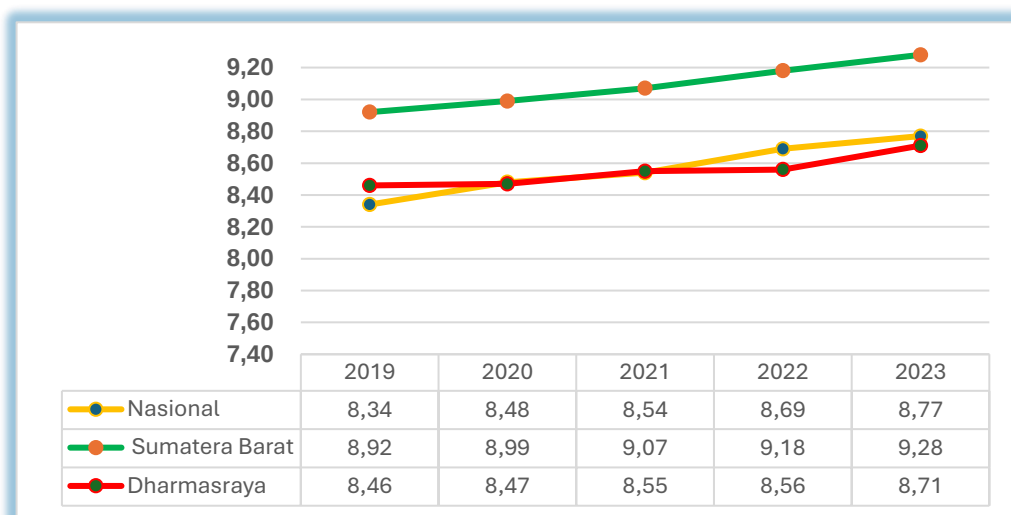
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

HLS Dharmasraya masih berada capaian nasional dan Provinsi Sumatera Barat, yaitu berada di 12,51 tahun. Ini dapat diartikan bahwa HLS Dharmasraya tahun 2023 rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,51 tahun, atau sudah menamatkan pendidikan SMA/MA/SMK namun belum menamatkan pendidikan D1. Sedangkan di tingkat nasional sudah menamatkan pendidikan setara D1, dan untuk Provinsi Sumatera Barat sudah setara menamatkan D2 atau kuliah di tahun kedua universitas.

D. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Perbandingan data rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.16.

Gambar 2- 19 Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

E. Keragaman Budaya

Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten pertama yang menerima Transmigran yang terbesar di Sumatera Barat yang berasal dari Pulau Jawa. Beberapa satuan permukiman seperti Sitiung, Silago, dan Sungai Rumbai, sudah terbentuk sejak tahun 1975 sehingga hampir 50 tahun telah terjadi pembauran budaya antara suku Jawa, Sunda dan Minang. Dalam perjalanan waktu dengan semakin meningkatnya ekonomi Dharmasraya pada saat boom hasil perkebunan maka terjadi migrasi dari suku lainnya seperti Batak, dan Nias. Sehingga Kabupaten Dharmasraya dapat menjadi indikator keberagaman budaya di Provinsi Sumatera Barat. Keragaman budaya ini diharapkan menghasilkan akulturasi budaya positif untuk pembangunan wilayah.

Banyak iven-iven kebudayaan yang telah diselenggarakan di Kabupaten Dharmasraya yang intinya ingin menunjukkan keragaman budaya lokal dan keharmonisan antar budaya seperti pelaksanaan iven Pamalayu, festival lintas budaya (multi etnis), dan budaya yang berkaitan dengan keagamaan. Dimasa yang akan datang jumlah kegiatan atau iven kebudayaan yang melibatkan berbagai suku dan etnis dapat menjadi tolak ukur keragaman budaya di Kabupaten Dharmasraya

2.3. ASPEK DAYA SAING

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

A. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam

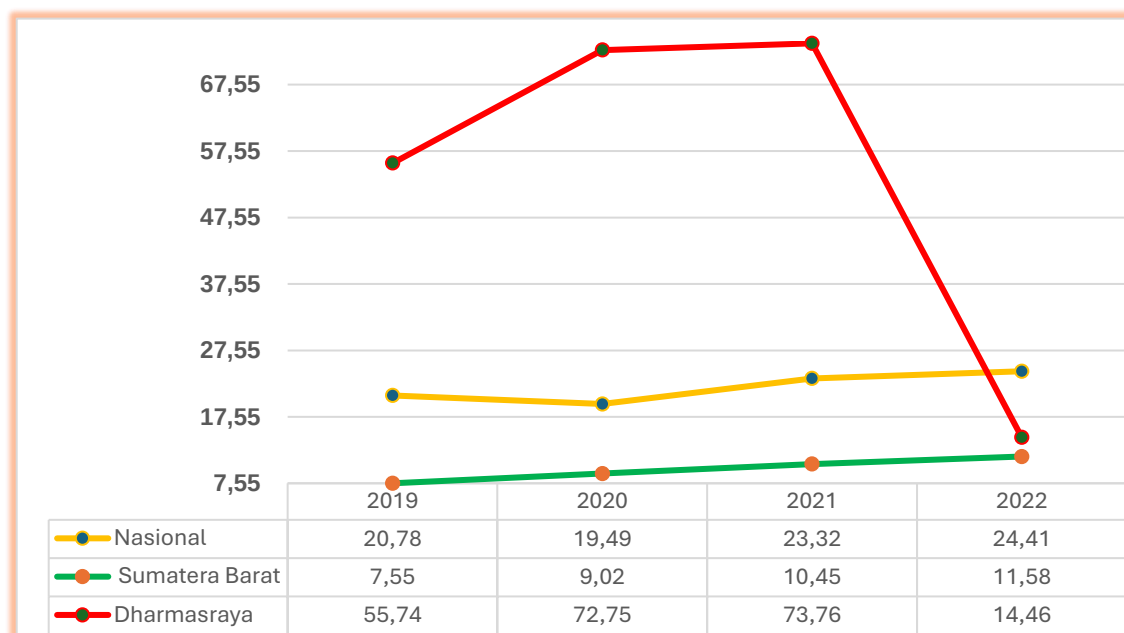
aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun.

Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanaan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB kabupaten.

Dilihat dari sisi iterpretasinya, maka ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.

Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global. Ekspor barang dan jasa Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.17.

Gambar 2- 20. Ekspor Barang Dan Jasa Tahun 2019-2022 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Peran nilai ekspor barang dan jasa di Dharmasraya cukup besar dibandingkan dengan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, bahkan tertinggi bisa mencapai 73,76 persen di tahun 2021, namun di tahun 2022 turun mencapai 14,46 persen. Hal ini dipicu oleh turunnya volume ekspor barang dan jasa di Tahun 2022.

B. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB

Total Dana Pihak Ketiga/PDRB adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu.

Dimana dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah provinsi.

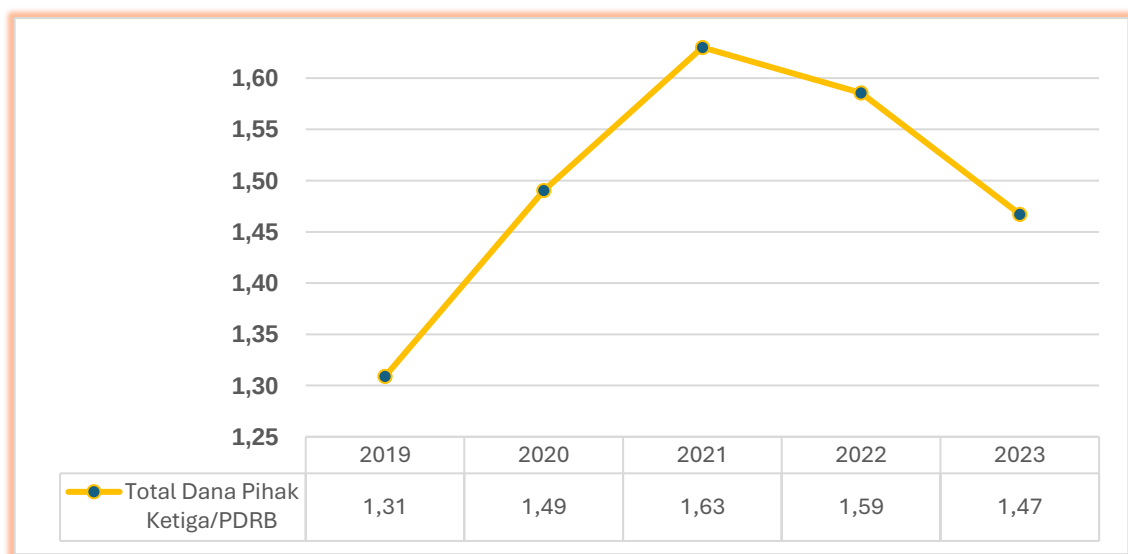
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah. Adapun Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.16. dan Gambar 2.18.

Tabel 2- 16 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Tahun 2022-2023 (persen)

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (persen)	1,31	1,49	1,63	1,59	1,47
Total dana pihak ketiga (juta rupiah)	135.473,11	152.691,36	175.331,79	193.974,85	195.797,80
Nilai PDRB ADHB (juta rupiah)	10.349.563,17	10.245.774,26	10.756.664,94	12.233.469,95	13.345.769,26

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, dan Perbankan di wilayah Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2- 21. Ekspor Barang Dan Jasa Tahun 2019-2022 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, dan Perbankan di wilayah Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024 (data diolah)

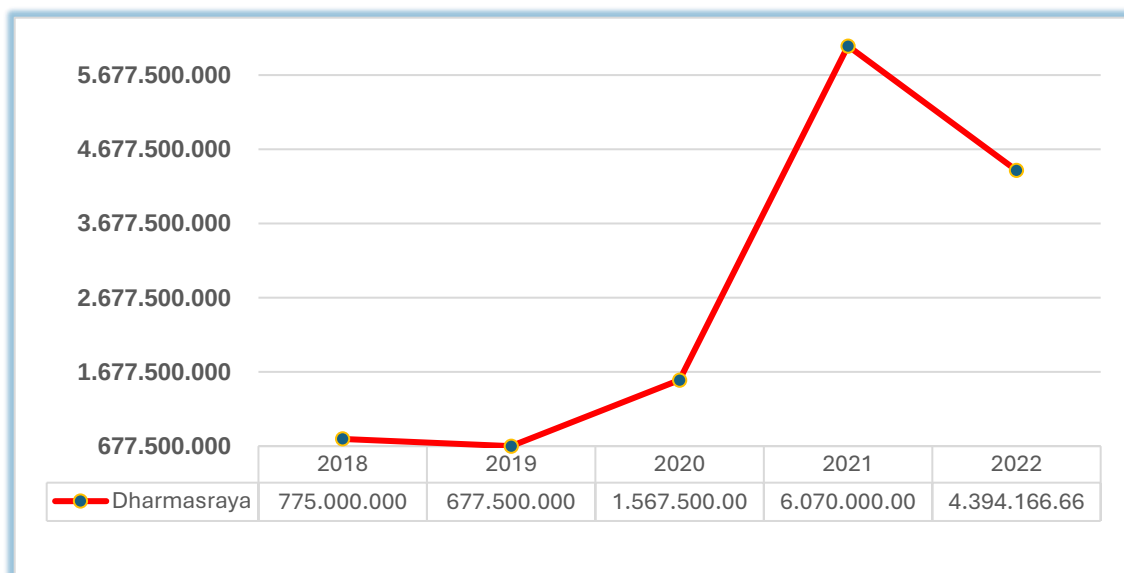
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Dharmasraya cukup fluktuatif, berkisar antara 1,3 sampai 1,63 persen. Hal ini menggambarkan masih kecilnya DPK yang dikelola oleh perbankan di Dharmasraya dibandingkan nilai PDRB yang ada di tahun tersebut.

C. Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan

Nilai transaksi saham adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili. Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.

Untuk mengukur size dari pasar modal dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengukur tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Pasar modal yang aktif memberikan sinyal adanya pertumbuhan perekonomian. Sentimen pasar yang baik kemudian akan meningkatkan performa saham yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai kapitalisasi pasar secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya . Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata dapat dilihat pada gambar 2.19 dan tabel 2.13.

Gambar 2- 22. Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan (Rupiah)



Sumber : Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat, tahun 2024

Tabel 2- 17 Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan Tahun 2018-2022

Wilayah	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Sumatera Barat	Juta rupiah	1.312.685	864.482,5	727.069,167	1.570.570	1.358.113,33
Dharmasraya	Juta rupiah	775	677,5	1.567,5	6.070	4.394,17
kontribusi	Persen	0,06	0,08	0,22	0,39	0,32

Sumber : Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat, tahun 2024

Perkembangan nilai transaksi saham berupa nilai rata-rata tahunan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 terlihat adanya peningkatan nilai yang cukup signifikan. Namun apabila dibandingkan dengan nilai transaksi di Provinsi Sumatera Barat, maka kontribusi nilai saham Kabupaten Dharmasraya masih sangat kecil yaitu sekitar 0,32 persen.

D. Total Kredit/PDRB

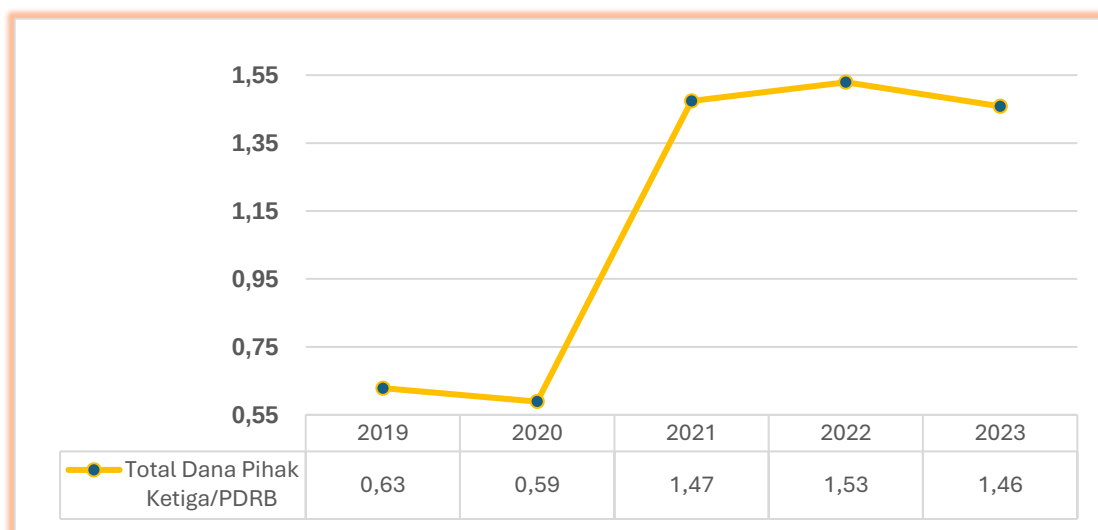
Total Kredit /PDRB menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu kab/kota terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) pada suatu waktu tertentu.

Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup Kab/kota.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

Total Kredit /PDRB menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di kab/kota sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit /PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian provinsi tersebut. Untuk lebih jelasnya Total Kredit /PDRB dapat dilihat pada Gambar 2.20.

Gambar 2- 23. Total Kredit /PDRB Tahun 2019-2022 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, dan Perbankan di wilayah Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024 (data diolah)

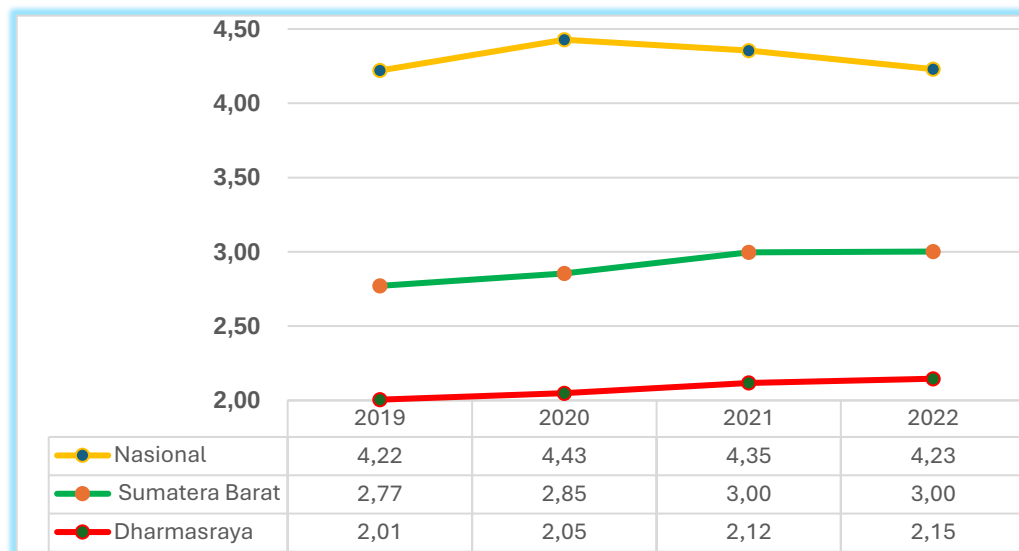
Tidak jauh berbeda dengan dana pihak ketiga yang dikelola oleh perbankan, total kredit yang dikelola oleh perbankan juga tergolong relatif kecil dibandingkan dengan PDRB yang ada di tahun tersebut

E. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi menunjukkan rasio sektor keuangan dan asuransi di suatu kab/kota terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) pada suatu waktu tertentu.

Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi menggambarkan kontribusi sektor jasa keuangan dan asuransi di kab/kota dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai yang dihasilkan oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah. Untuk lebih jelasnya Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Tahun 2019-2023 (persen) dapat dilihat pada Gambar 2.21.

Gambar 2- 24. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Tahun 2019-2023 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Perkembangan rasio PDRB sektor jasa keuangan dan asuransi di Dharmasraya apabila dibandingkan nasional dan Provinsi Sumatera Barat relatif rendah. Namun dilihat dari kecenderungan perkembangannya, dapat dilihat perkembangannya masih cukup berpotensi dapat mengalami peningkatan yang positif.

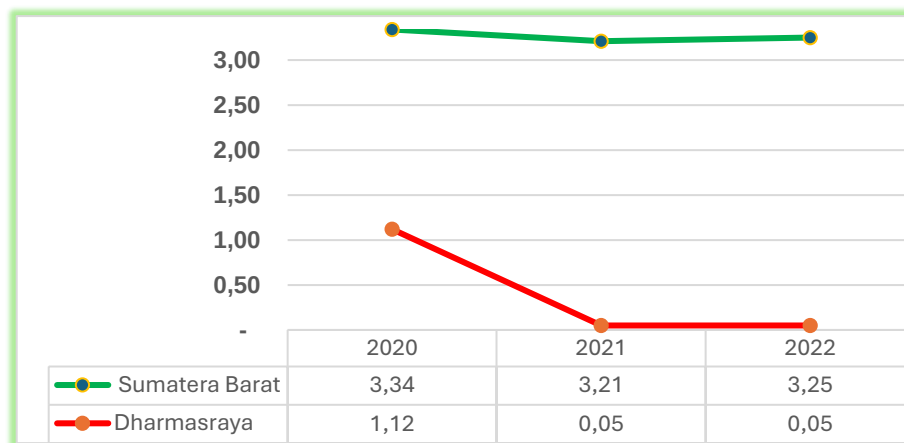
F. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan

tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Untuk lebih jelasnya Rasio Kewirausahaan Daerah (persen) dapat dilihat pada Gambar 2.22.

Gambar 2- 25. Rasio Kewirausahaan Daerah (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

2.3.2. Daya Saing SDM

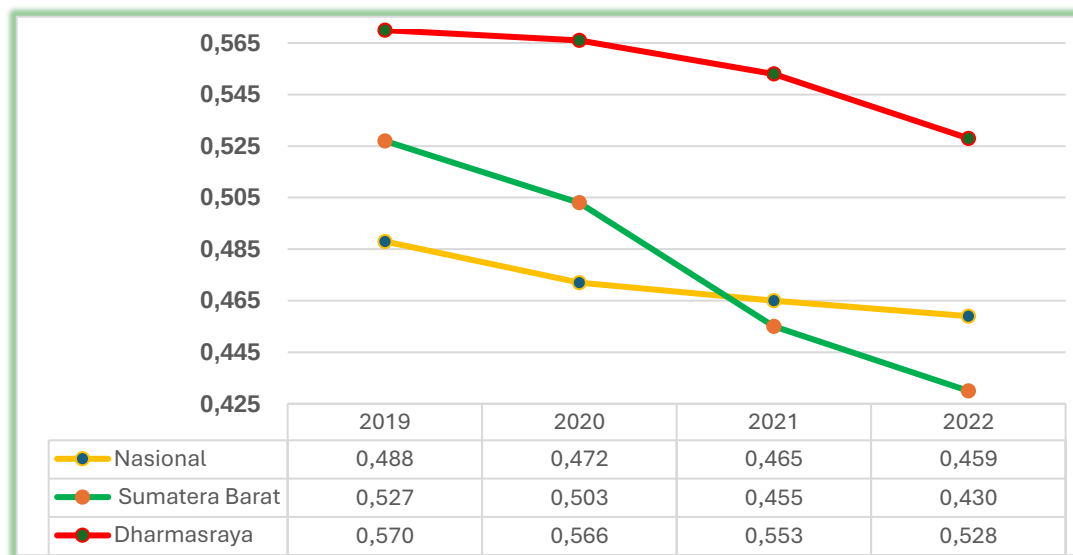
A. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu

- Dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari
 - indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF)
 - proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20),
- Dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari
 - indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas
 - persentase anggota legislatif
- Dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili
 - indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.

IKG bernilai antara 0-1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya Indeks Ketimpangan Gender dapat dilihat pada Gambar 2.23.

Gambar 2- 26. Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2018-2022 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2024

Perkembangan IKG nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Dharmasraya menunjukkan penurunan nilai secara konsisten. Hal ini menunjukkan perkembangan yang membaik dengan menurunnya ketimpangan gender.

B. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPHA) adalah ukuran yang menggambarkan capaian kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi tertentu, seperti:

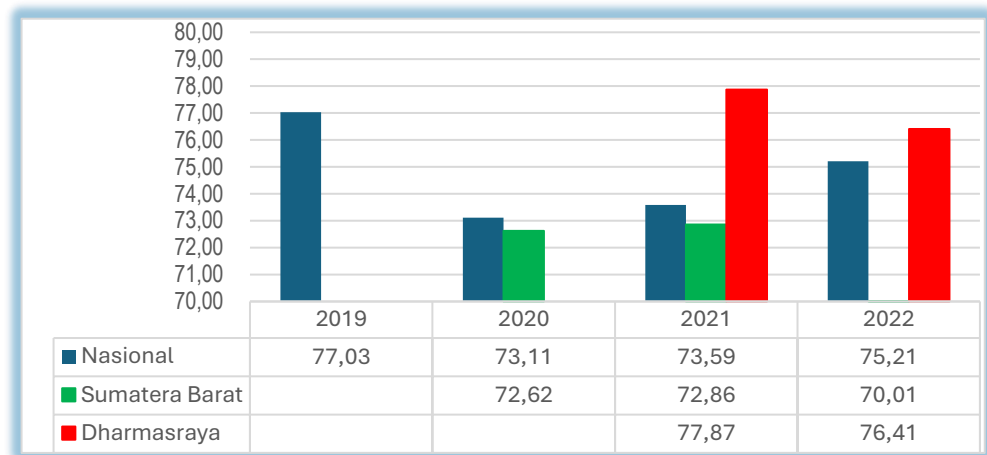
1. Anak penyandang disabilitas
2. Anak dengan HIV/AIDS
3. Anak kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak korban jaringan terorisme
5. Anak dalam situasi darurat
6. Anak korban penelantaran

Perlindungan Khusus Anak merupakan program yang didorong oleh Kemenko PMK untuk memberikan jaminan rasa aman kepada anak.

Perlindungan khusus anak hingga saat ini masih menjadi salah satu isu penting meskipun dalam upaya penyediaan perlindungan khusus anak pemerintah memiliki beragam tantangan. Perlindungan khusus anak diantaranya adalah perlindungan akan resiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak dengan disabilitas. Indikator yang termasuk dalam IPKA adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar baik secara nasional maupun di tingkat provinsi. Hasil IPKA menjadi indikator yang sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusun kebijakan terhadap perlindungan khusus anak dan sebagai indikator yang dapat menilai keberhasilan pembangunan

Adapun indeks perlindungan khusus anak di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2.28.

Gambar 2- 27. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa indeks perlindungan khusus anak (IPKA) tahun 2021-2022 diatas capaian IPKA Provinsi Sumatera Barat dan nasional. Meskipun demikian kasus-kasus yang terkait dengan isu pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak masih sering terjadi, baik kasus yang diungkap maupun kasus yang tidak sepenuhnya tertangani secara optimal. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah melalui pendirian unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang berada pada perangkat daerah yang menangani bidang urusan Sosial serta upaya dalam pencapaian kabupaten layak anak.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

A. Konsumsi Listrik per Kapita

Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.

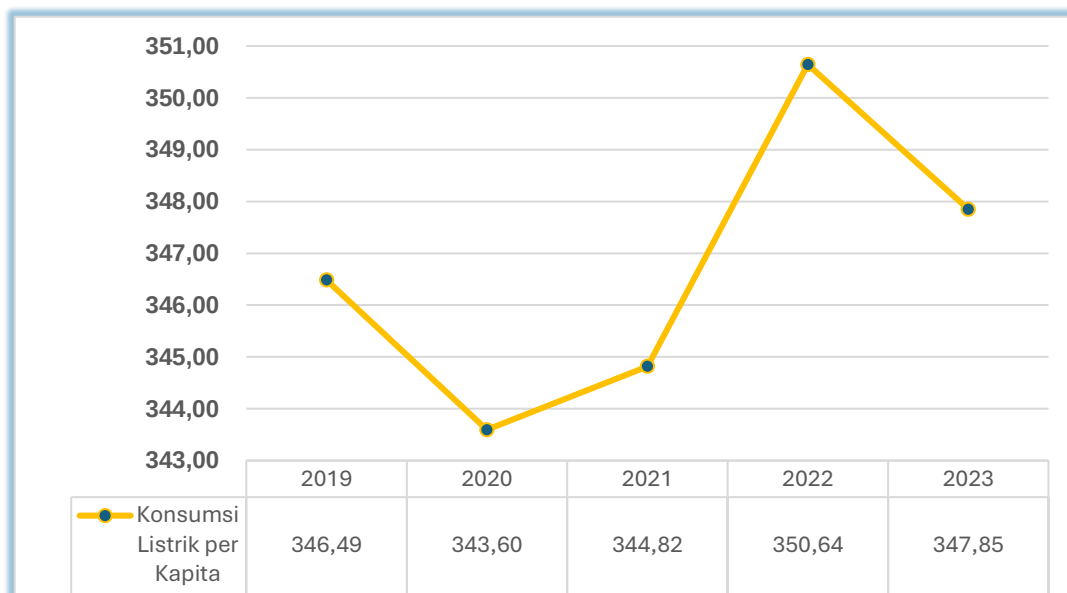
Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Untuk lebih jelasnya Konsumsi Listrik per Kapita di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.14 dan Gambar 2.24.

Tabel 2- 18 Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2019-2023 (kWh/orang)

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/orang	346,49	343,60	344,82	350,64	347,85
Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN	kWh	74.248.968	74.285.984	78.020.247	80.227.242	82.692.050
Jumlah Penduduk	orang	214.292	216.202	226.265	228.801	237.724

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tahun 2024

Gambar 2- 28. Konsumsi Listrik per Kapita Thun 2019-2023 (kWh/orang)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tahun 2024 (data diolah)

Jumlah produksi listrik Kabupaten Dharmasraya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2023 jumlah produksi listrik Kabupaten Dharmasraya mencapai 82.692.050 KWh dengan konsumsi listrik per-orang tertinggi tercatat di tahun 2022 sebesar 350,64 kWh/orang.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

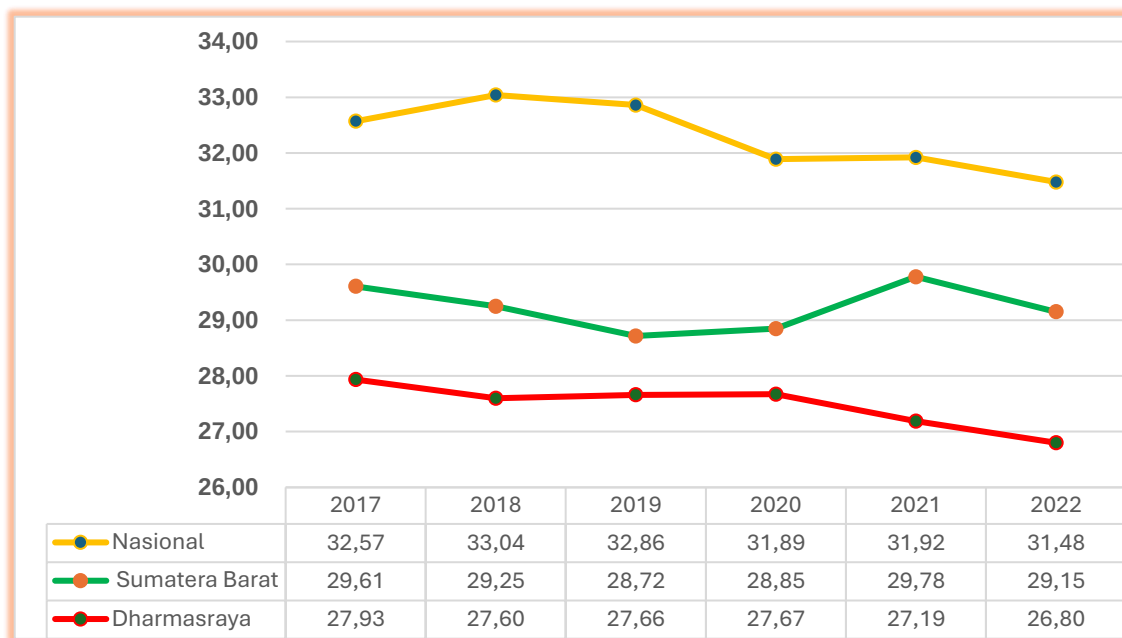
A. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB kabupaten

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. Untuk lebih jelasnya Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.25.

Gambar 2- 29. Pembentukan Modal Tetap Brutto Tahun 2019-2023 (kWh/orang)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Rasio PMTB terhadap pembentukan nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya cenderung menurun dibanding tahun sebelumnya. Tidak hanya di Dharmasraya, hal serupa juga terjadi di tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1. Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk (1) Literasi membaca, dan (2) Numerasi. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Perlu intervensi khusus
2. Dasar
3. Cakap
4. Mahir

Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”. Tingginya proporsi penduduk

Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.

Berdasarkan Rapor pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemampuan literasi dan kemampuan numerasi seluruh satuan pendidikan dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK sudah mencapai kategori baik, namun pada kemampuan numerasi masih berkategori sedang. Satuan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya baik negeri dan sekolah swasta berjumlah 234 satuan pendidikan, yang terdiri dari 168 SD, 40 SMP, 19 SMA dan 9 SMK.

Secara detail capaian kemampuan literasi dan kemampuan numerasi sekolah negeri dan swasta dapat dilihat pada tabel 2.15 di bawah :

Tabel 2- 19 Capaian Kemampuan Literasi dan Kemampuan Numerasi Pada Tingkat Pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK (persen) Tahun 2023

No.	Jenjang pendidikan	Satuan	Kemampuan Literasi	Kemampuan Numerasi
1	SD Umum Negeri dan Swasta	persen	77,54	61,92
2	SMP Umum Negeri dan Swasta	persen	76,75	68,23
3	SMA Umum Negeri dan Swasta	persen	79,82	74,04
4	SMK Umum Negeri dan Swasta	persen	73,95	63,42

Sumber : Rapor Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan literasi siswa di Kabupaten Dharmasraya tergolong baik, sementara kemampuan numerasi tergolong sedang. Ini artinya peningkatan kemampuan dibidang numerasi sangat dibutuhkan agar SDM Kabupaten Dharmasraya bisa bersaing di era global.

2.4.2. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Indikator ini digunakan untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.

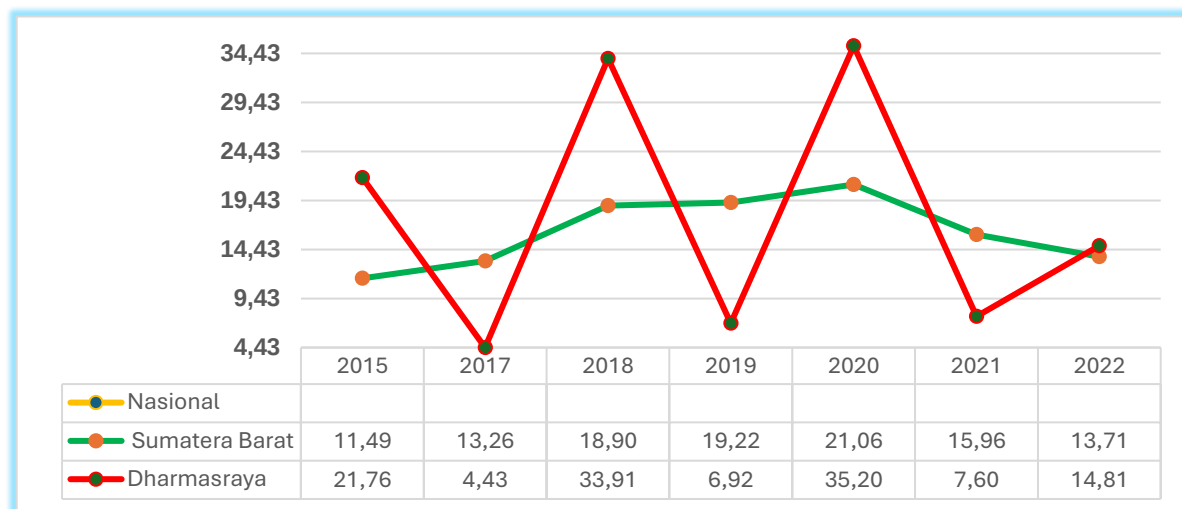
Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi).

Jenjang pendidikan tinggi mencakup:

1. Diploma I-IV
2. S1
3. S2
4. S2 Terapan
5. S3

Adapun Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2022 di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada gambar 2.26

Gambar 2- 30. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2022 (persen)



Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, tahun 2024

Capaian indikator ini setiap tahunnya selalu berfluktuasi, diluar valid atau tidaknya data untuk indikator ini. Maka secara umum realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebanyak 35,20 persen penduduk Dharmasraya sudah megenyam pendidikan tinggi.

2.4.3. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Untuk Pengelompokan Bidang Keahlian Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2- 20 Pengelompokan Bidang Keahlian Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Rendah	Tingkat Pendidikan Menengah	Tingkat Pendidikan Tinggi
Tidak/ belum tamat SD SD/ MI/ SDLB/ Paket A SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B	SMA/ MA/ SMLB/ Paket C SMK MAK	Diploma I/ II/ III Diploma IV S1 S2 S2 Terapan S3

Sumber : Surat Edaran Bersama Menteri PPN dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024.

Bidang keahlian menengah (*semi-skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi.

Bidang keahlian tinggi (*skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi.

Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.

Sejak pemekaran Kabupaten Dharmasraya lulusan pendidikan menengah dan tinggi semakin meningkat jumlahnya. Konsekwensi dari peningkatan jumlah tersebut dibutuhkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian pendidikan menengah dan tinggi tersebut. Saat ini sudah banyak lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang ditampung bekerja di Kabupaten Dharmasraya maupun di luar kabupaten. Walaupun tingkat kewirausahaan nasional sebesar 3% (masih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN) diharapkan lulusan pendidikan menengah dan tinggi dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri (wirausaha) dalam bentuk UMKM sekaligus mampu menampung tenaga kerja yang dibutuhkan dari kegiatan kewirausahaan tersebut. Dengan proses tersebut diharapkan capaian angka persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Berikut kondisi pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 21 Persentase Kondisi Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Dan Tinggi Yang Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2023

Kabupaten	Tahun	
	2022	2023
Dharmasraya	71,77	76,73

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

2.4.4. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000.

Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah.

Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:

1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan.

2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat.
3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu.
5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.

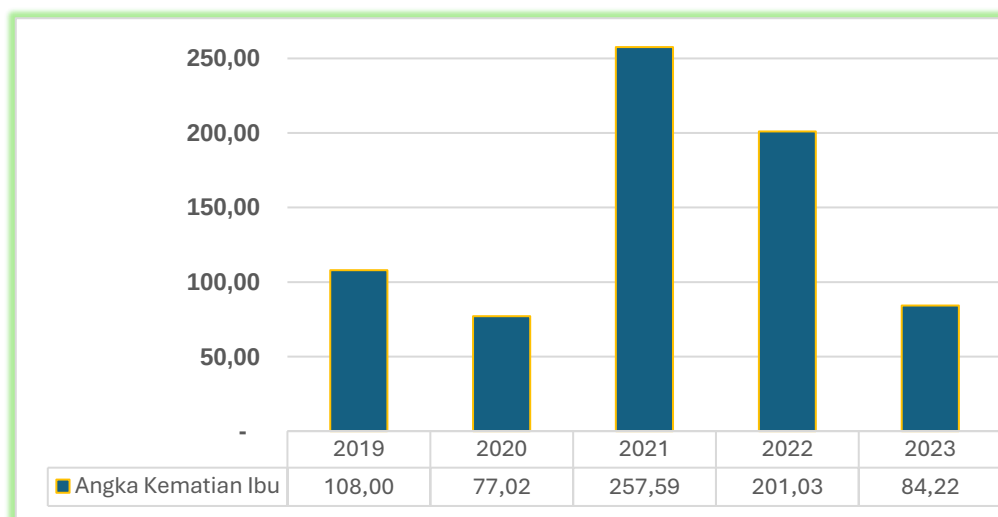
Untuk lebih jelasnya angka kematian ibu di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.17 dan Gambar 2.27.

Tabel 2- 22 Angka Kematian Ibu Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	108	77,02	257,59	201,03	84,22
Jumlah kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran	orang	6	3	14	7	3
Jumlah kelahiran hidup	orang	3.854	3.895	3.658	3.482	3.562

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Gambar 2- 31. Angka Kematian Ibu Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Perkembangan AKI Kabupaten Dharmasraya terlihat sangat fluktuatif, tertinggi di tahun 2021 sebesar 257,59 atau dengan jumlah kasus sebanyak 14 kasus, tingginya kematian ibu melahirkan di tahun 2021 masih akibat dampak covid19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 yang lalu. Terakhir di tahun 2023 tercatat AKI sebesar 84,22 atau dengan kejadian sebanyak 3 kasus.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa penanganan persalinan untuk membantu mengurangi angka kematian ibu melalui prosedur kesiapsiagaan dalam penanganan persalinan menjadi hal yang utama yang perlu ditingkatkan.

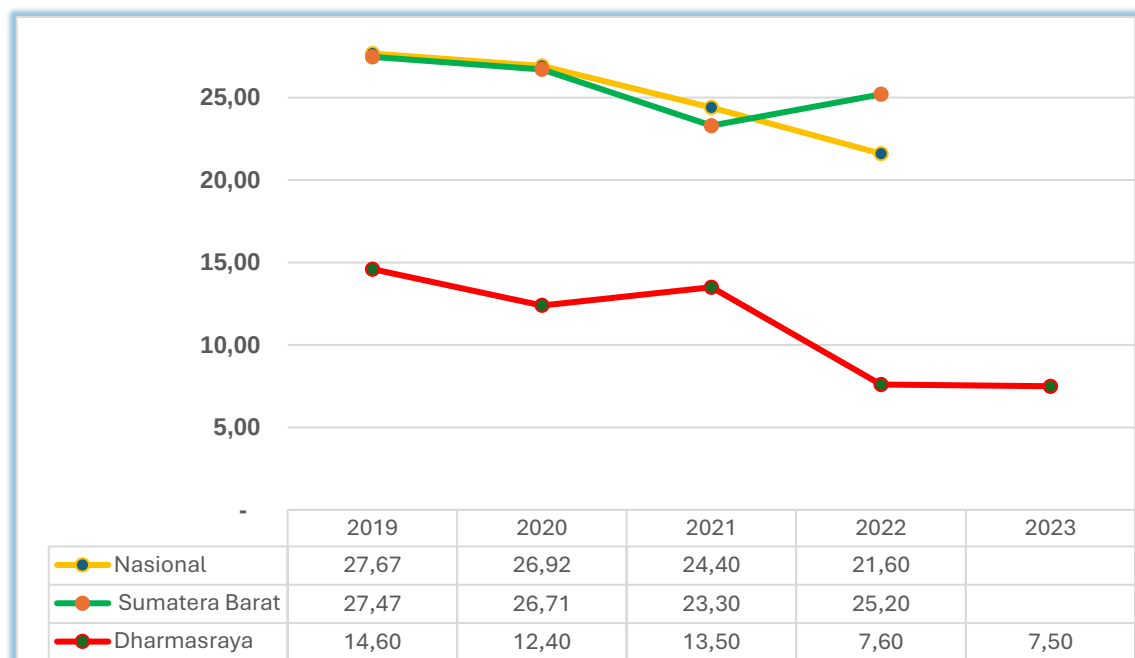
2.4.5. Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010, maka stunting dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

- Sangat pendek: Zscore < -3,0
- Pendek: Zscore $\geq$ -3,0 s/d Zscore < -2,0

Untuk lebih jelasnya Prevalensi Stunting Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.28.

Gambar 2- 32. Prevalensi Stunting Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Dharmasraya cukup terlihat baik, terutama jika dibandingkan capaian nasional dan provinsi, dimana jika angka ini semakin rendah, maka akan semakin baik. Dengan relatif rendahnya prevalensi stunting Dharmasraya tersebut. Adapun inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk penurunan sekaligus pencegahan stunting ini adalah melalui pelaksanaan bapak/ibu angkat terhadap kasus stunting. Balita stunting secara umum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi ataupun makanan, namun juga dipengaruhi oleh faktor keturunan dan kesehatan lingkungan. Oleh sebab itu program bapak/ibu angkat stunting lebih diprioritaskan bagi keluarga miskin. Sedangkan untuk upaya lain yang dilakukan adalah melalui perbaikan sanitasi dan kesehatan lingkungan oleh instansi terkait.

2.4.6. Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis adalah persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.

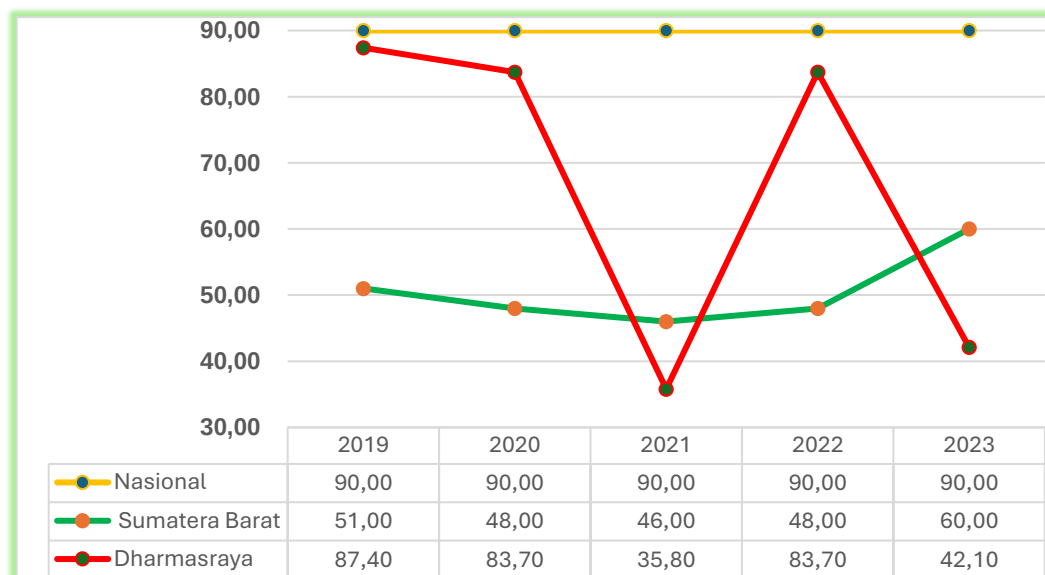
Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.

Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting :

- Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.
- Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis Tahun 2019-2023 di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.29.

Gambar 2- 33. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

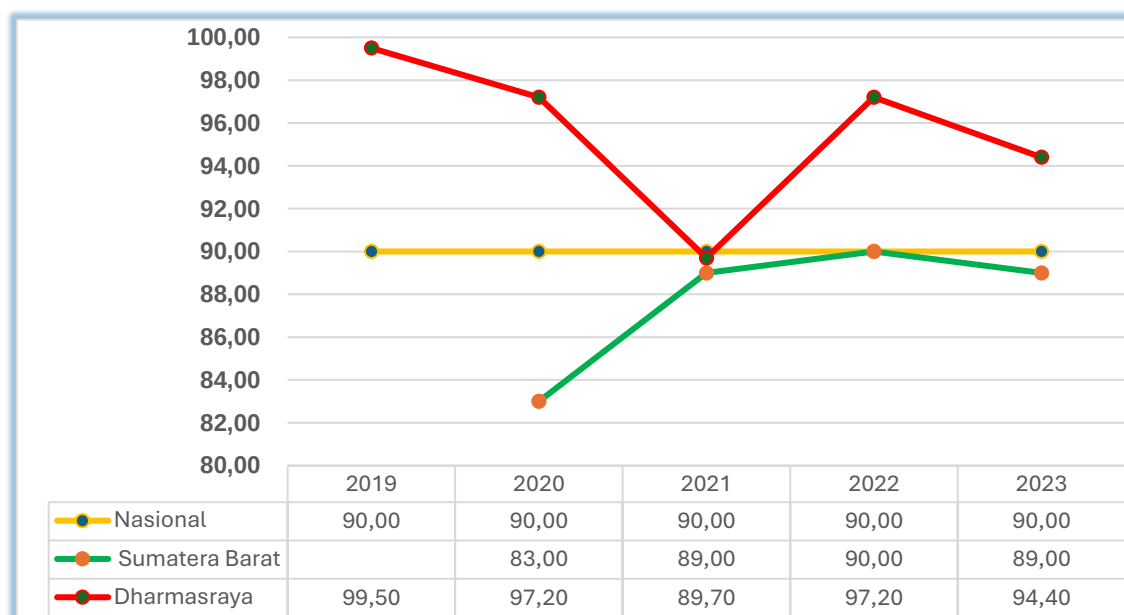
Penemuan dan pengobatan kasus TB di Kabupaten Dharmasraya terlihat fluktuatif, namun dengan capaian yang cukup berhasil atau lebih tinggi rata-rata capaian Provinsi. Hal ini perlu penanganan lebih komprehensif agar kasus TB ke depan dapat diantisipasi dan ditekan agar jumlah kasus TB dapat berkurang di masyarakat.

2.4.7. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis adalah persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap. Indikator ini dihitung dengan cara menghitung jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.

Indikator ini penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.30.

Gambar 2- 34. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Kinerja keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Dharmasraya bisa termasuk memiliki keberhasilan yang cukup tinggi. Hal ini didukung oleh tersedianya sarana prasarana serta tenaga kesehatan yang menangani kasus ini cukup memadai. Sehingga diharapkan dengan adanya berbagai arah pembangunan bidang kesehatan terutama untuk pencegahan kasus TB untuk jangka menengah dan jangka panjang berdampak pada berkurangnya kasus TB, terutama pada permukiman yang belum memiliki sanitasi belum layak atau permukiman kumuh.

2.4.8. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.

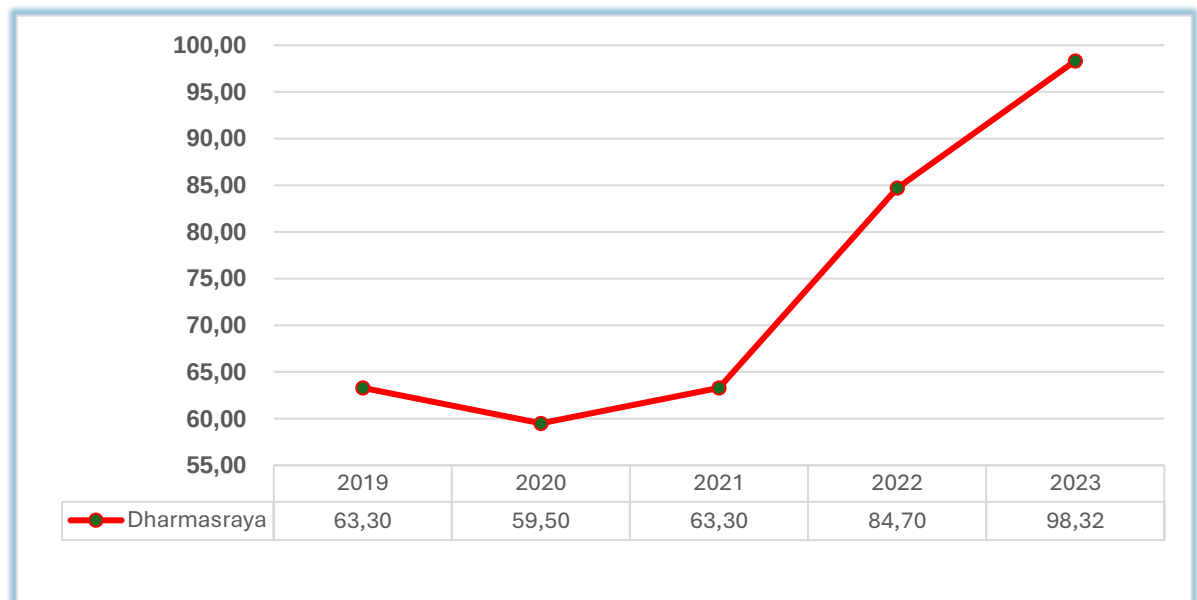
Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%.

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:

1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan.
2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional.
4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.31.

Gambar 2- 35. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

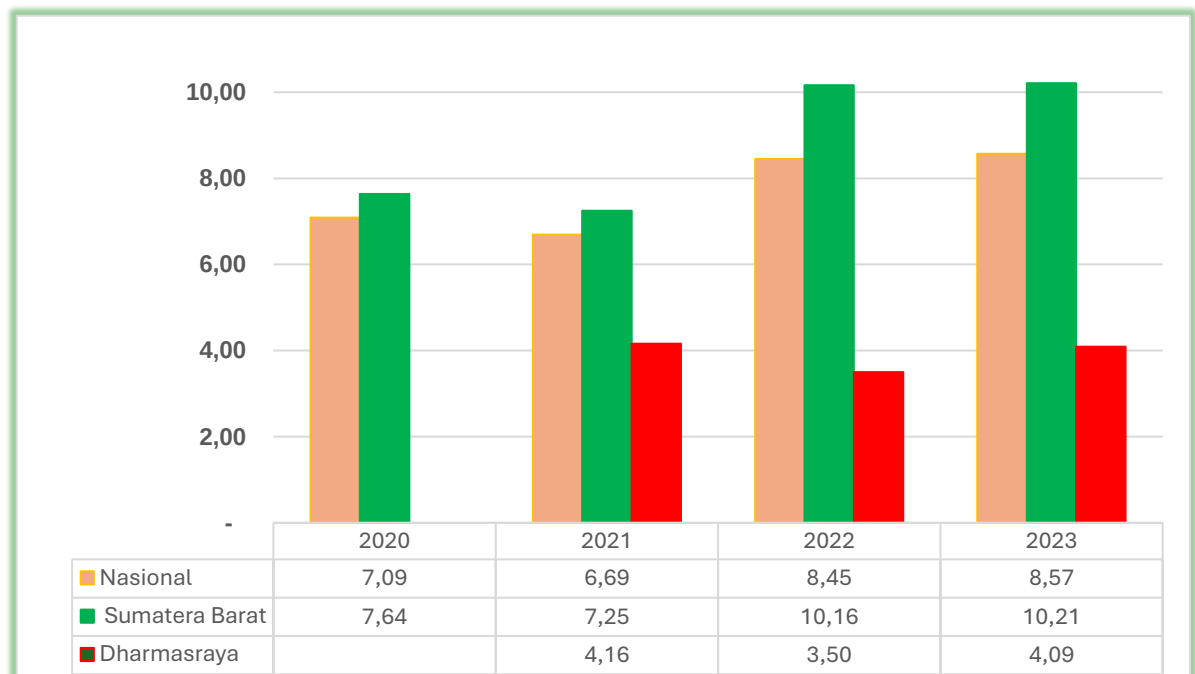
Capaian kepesertaan JKN atau BPJS kesehatan di Dharmasraya sudah hampir mencapai 100 persen atau Universal Health Coverage (UHC). Prinsip utama dari UHC adalah bahwa semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis, harus dapat mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa risiko finansial yang tidak terjangkau. Dengan demikian target ke jangka pendek Dharmasraya sudah dapat mencapai UHC untuk mencapai pemerataan dan keterjangkauan layanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat.

2.4.9. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman

Untuk menentukan bahwa Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, maka akses aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.32.

Gambar 2- 36. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Masih rendahnya capaian indikator ini mengindikasikan bahwa ke depan dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang cukup serius. Mengingat indikator ini merupakan salah satu indikator yang termuat di dalam SDGs/ TPB yang harus dicapai secara penuh di tahun 2030,

Berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, capaian Akses Air Limbah Domestik di Kabupaten Dharmasraya untuk Wilayah Perkotaan telah mencapai 44,07% (24.635 RT) akses layak yang terdiri dari akses aman 0,72% (420 RT), Layak individu tidak termasuk aman 41,78% (23.331 RT) dan akses layak bersama 1,58% (884 RT). Sedangkan untuk akses yang belum layak masih terdapat sebesar 0,59% (330 RT). Sementara di daerah Perdesaan akses layak mencapai 53,27% (29.787 RT) yang terdiri dari akses aman 1,49% (875 RT), layak individu tidak termasuk



aman 47,02% (26.249 RT) dan akses layak bersama 4,53% (2.532 RT) dimana masih terdapat 2,06% (1.150 RT) untuk untuk yang belum layak .

Dari data tersebut jika digabung wilayah kota dan desa diperoleh akses layak air limbah domestik di Kabupaten Dharmasraya mencapai 97,35% (termasuk akses aman sebesar 2,21%) dimana 88,68% rumah tangga sudah melakukan praktik buang air besar ke jamban pribadi milik sendiri, dan 6,11% rumah tangga menumpang ke jamban tetangga/saudara (sharing) dan masih terdapat 0,23% akses layak perdesaan berupa jamban leher angsa dengan cubluk. Dimasa yang akan datang perlu peningkatan akses aman air limbah sebesar minimum 50%, sehingga dibutuhkan kerja keras karena saat ini baru sebesar 2,21%.

2.4.10. Kapasitas Air Baku

Kapasitas air baku adalah debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya. Sumber air baku utama dapat diperoleh dari sungai Batanghari, dan embung-embung yang menyebar di seluruh kabupaten Dharmasraya, sehingga Kabupaten Dharmasraya termasuk daerah yang memiliki sumber air baku yang besar, namun perlu usaha untuk menjadikan air tersebut layak sebagai air baku.

2.4.11. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan;
- 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di dalam rumah (on premises);
- 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan
- 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Saat ini pelayanan air minum di Kabupaten Dharmasraya dilayani dalam bentuk perpipaan dan non perpipaan. Pelayanan air minum perpipaan terdiri dari pelayanan perpipaan yang dikelola oleh UPT air Minum Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya dan perpipaan yang dikelola oleh masyarakat melalui program PAMSIMAS. Pelayanan UPT masih sangat terbatas yaitu hanya terdapat di daerah perkotaan Pulau Punjung dan belum menyentuh wilayah perkotaan lainnya sehingga , cakupan pelayanan secara kuantitatif berkisar dibawah 3%. Dimasa yang akan datang dibutuhkan pengolahan air bersih perpipaan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk perluasan layanan UPT atau membentuk Perusahaan Daerah Air Minum, sehingga standar pelayanan perpipaan perkotaan dapat dicapai. Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target pembangunan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah.

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2- 37. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	0,50	0,20	0,46

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

2.4.12. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Indikator ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.

Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:

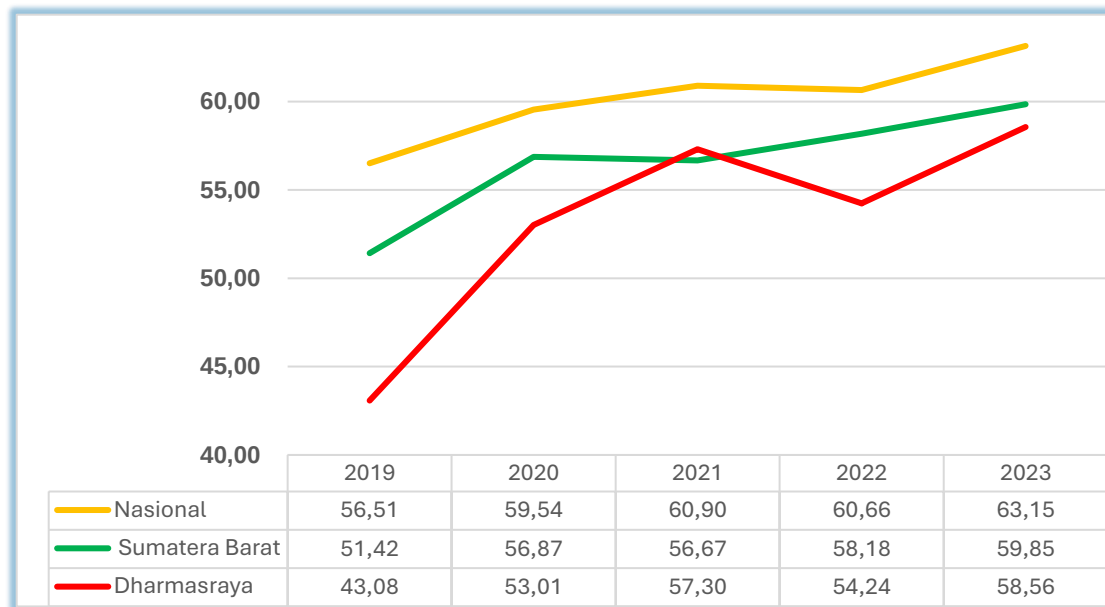
- Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
- Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah(kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:

- Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat,
- Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m²
- Memiliki akses air minum layak
- Memiliki akses sanitasi layak

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.33.

Gambar 2- 38. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa capaian indikator ini setiap tahunnya mengalami peningkatan dan peningkatan tersebut relevan baik untuk tingkat nasional, provinsi Sumatera Barat maupun Dharmasraya. Secara umum melihat capaian di atas maka sebagian besar (lebih dari 50 persen) rumah tangga sudah memiliki hunian layak. Sehingga dengan adanya tren kenaikan maka diharapkan dengan kenaikan kesejahteraan masyarakat, maka perkembangan indikator ini juga mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.

2.4.13. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana (IRB) dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu (1) bahaya, (2) kerentanan, dan (3) kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

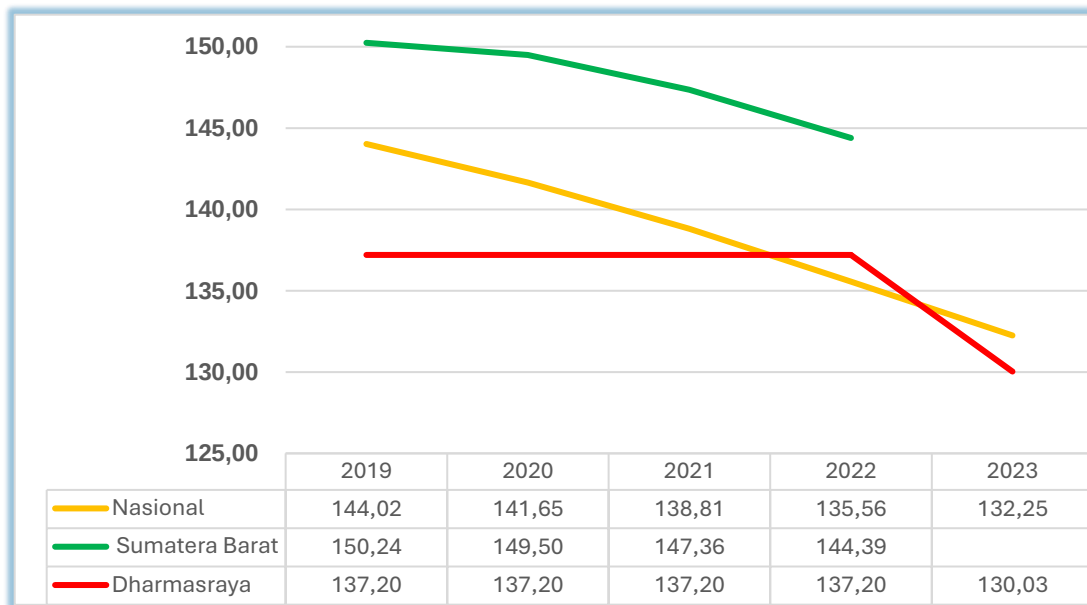
Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan.

Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut:

- Indeks <13 adalah Rendah
- Indeks 13 - 144 adalah Sedang
- Indeks >144 adalah Tinggi

Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2019-2023 di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2.34.

Gambar 2- 39. Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

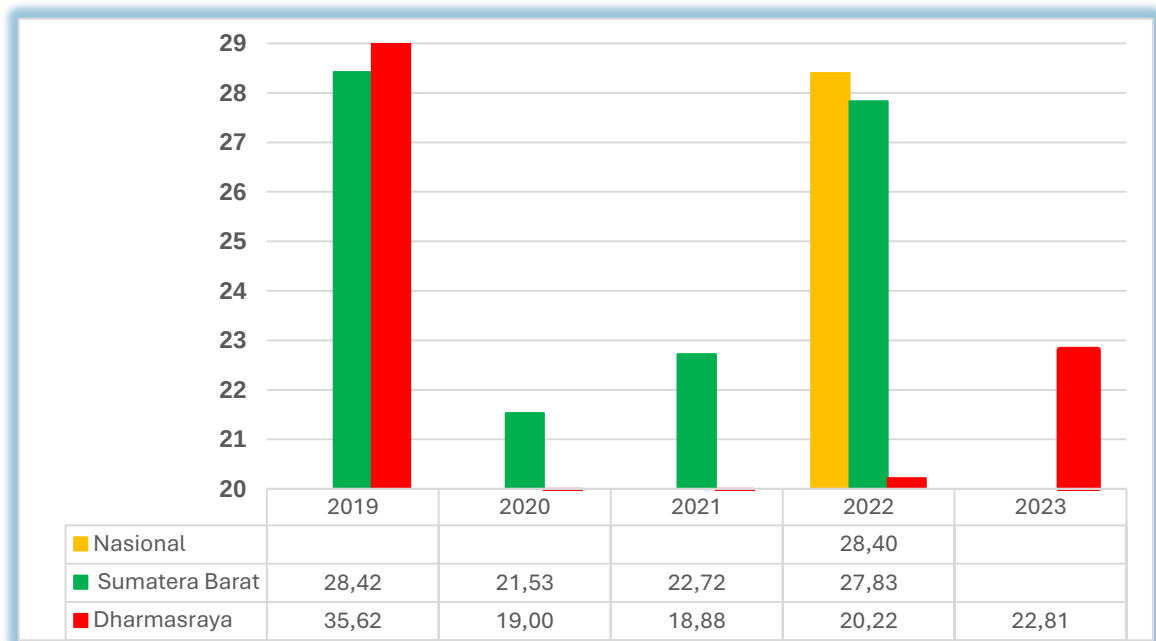
Kabupaten Dharmasraya termasuk pada wilayah dengan resiko bencana sedang. Adapun bencana yang memiliki kejadian terbanyak yaitu resiko banjir. Diantara faktor penyebab banjir disebabkan karena dharmasraya memiliki wilayah yang cenderung datar serta banyaknya sungai yang ada di wilayah Dharmasraya. Usaha penting yang dilakukan mengurangi resiko dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan stakeholders dan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

2.4.14. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. Untuk lebih jelasnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.35.

Gambar 2- 40. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023



Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Dilihat dari capaian data di atas, maka terlihat bahwa cakupan BPJS ketenagakerjaan tahun 2022 baik di tingkat nasional, Provinsi Sumatera Barat, maupun Kabupaten Dharmasraya masih relatif rendah. Masih rendahnya komitmen sektor pekerja formal, sektor pekerja informal maupun sektor pekerja konstruksi untuk keikutsertaan pada BPJS ketenagakerjaan menggambarkan masih belum besarnya komitmen perusahaan akan kesehatan dan resiko kerja yang ada di dunia kerja pada umumnya. Jika dilihat berdasarkan tahun 2019 capaian cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Dharmasraya sebesar 35,62, namun tahun 2020 capaiannya menurun menjadi 19% dan tahun 2021 capainnya sebesar 18%. Namun pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan menjadi 22,81%.

2.4.15. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah.

Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang

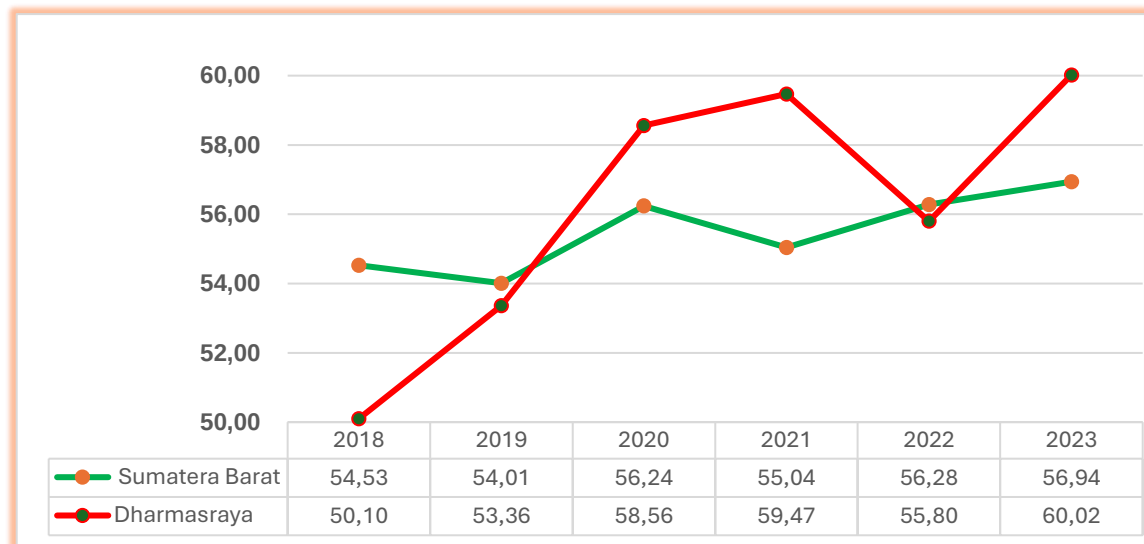
disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal. Saat ini baru 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal yaitu sebagai ASN.

2.4.16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.

TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial. Untuk lebih jelasnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.36.

Gambar 2- 41. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2018-2023



Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2024

Dengan trend yang meningkat pada kurun RPJPD Tahun 2025-2045 diharapkan terjadi akselerasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan yang mengisi sektor-sektor pembangunan di Kabupaten Dharmasraya.

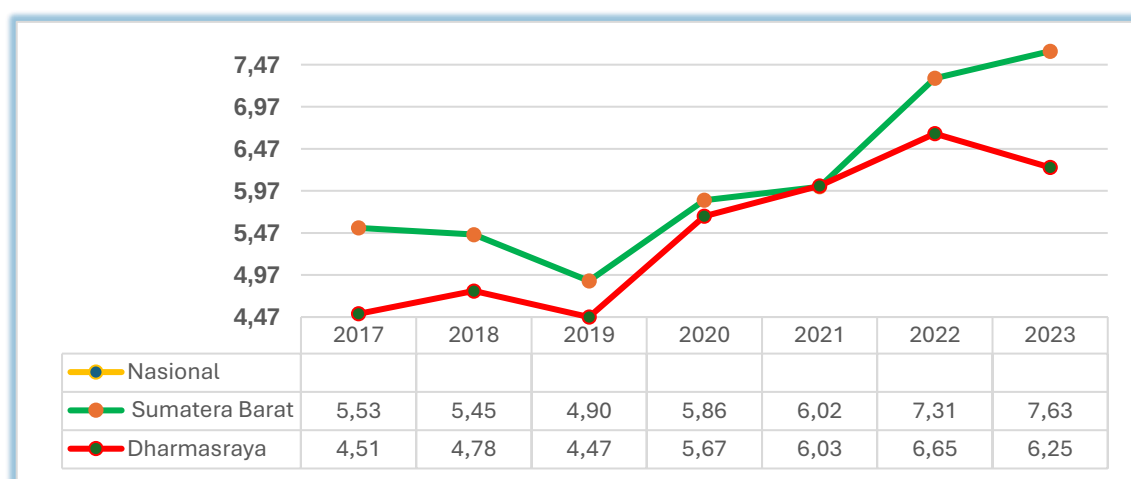
2.4.17. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya

Indikator ini dapat mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya. Untuk lebih jelasnya Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.37.

Gambar 2- 42. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2024.

Kecenderungan ketidakcukupan konsumsi pangan menunjukkan peningkatan dari tahun 2017-2022. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah penduduk, sementara peningkatan produksi pangan lebih lambat dari pada pertumbuhan penduduk. Dengan meningkatnya produktivitas pangan diharapkan terjadi penurunan angka ketidakcukupan pangan dimasa yang akan datang.

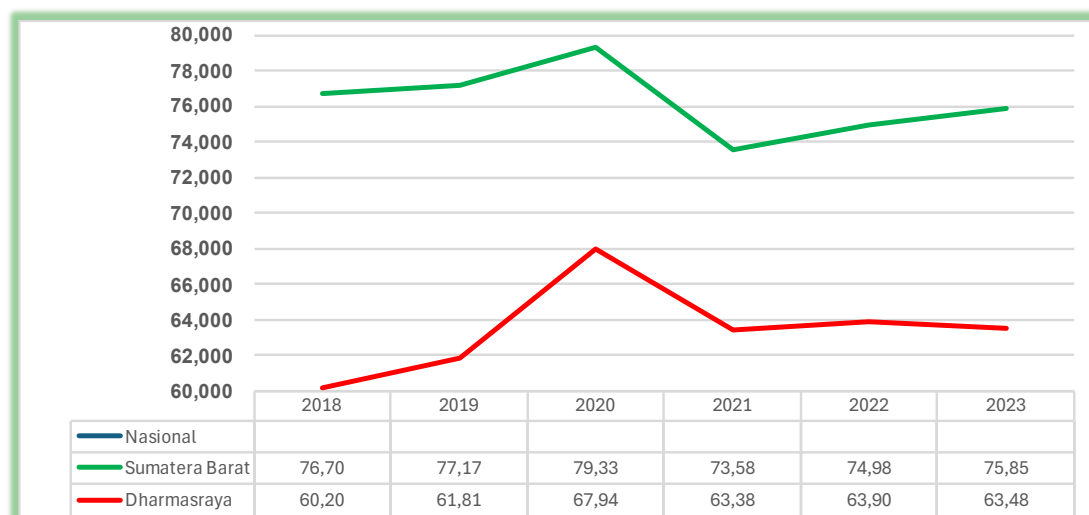
2.4.18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) adalah Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, dan tutupan ekosistem gambut.

Nilai indeks kualitas udara bersama-sama dengan indeks kualitas air dan indeks tutupan lahan akan menentukan nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang akan menjadi indikator pencapaian kinerja

program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah daerah. Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.38.

Gambar 2- 43. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024.

Pada tahun 2019, IKLH Kabupaten Dharmasraya masih masuk kategori kurang dengan nilai $58 \leq \text{IKLH} \leq 66$. Selanjutnya di tahun 2020 terjadi peningkatan nilai IKA, IKU dan ITH sehingga meningkatkan nilai IKLH kabupaten Dharmasraya dari 61,81 pada tahun 2019 menjadi 67,94 pada tahun 2020. Nilai IKLH tersebut masuk kedalam kategori cukup yaitu dengan nilai $66 \leq \text{IKLH} \leq 74$. Namun pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan kualitas Udara yang mengakibatkan IKLH menurun menjadi 63,38 sebagai kategori kurang. Selanjutnya di tahun 2022 kembali terjadi sedikit kenaikan di bandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2023 IKLH Kabupaten Dharmasraya menurun menjadi 63,48 tetapi termasuk kategori kurang. Rendahnya IKLH Kabupaten Dharmasraya disebabkan oleh rendahnya luasan tutupan lahan hutan dan kualitas air di Kabupaten Dharmasraya.

2.4.19. Indeks Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan/ Indeks Tutupan Lahan (ITL)

Nilai indeks kualitas udara bersama-sama dengan indeks kualitas air dan indeks tutupan lahan akan menentukan nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang akan menjadi indikator pencapaian kinerja program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah daerah.

Pada tahun 2019, IKLH Kabupaten Dharmasraya masih masuk kategori kurang dengan nilai $58 \leq \text{IKLH} \leq 66$. Selanjutnya di tahun 2020 terjadi peningkatan nilai IKA, IKU dan ITH sehingga meningkatkan nilai IKLH Kabupaten Dharmasraya dari 61,81 pada tahun 2019 menjadi 67,94 pada tahun 2020. Nilai IKLH tersebut masuk kedalam kategori cukup yaitu dengan nilai $66 \leq \text{IKLH} \leq 74$. Namun pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan kualitas Udara yang mengakibatkan IKLH menurun menjadi 63,38 sebagai kategori kurang. Selanjutnya di tahun 2022 kembali terjadi sedikit kenaikan di bandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2023 IKLH Kabupaten Dharmasraya menurun menjadi 63,48 tetapi masih termasuk kategori kurang.

a. indeks kualitas air

Kualitas air sungai di Kabupaten Dharmasraya akan menggambarkan keadaan kualitas air Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan melalui nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Kualitas air didefinisikan memenuhi baku mutu jika $IKA \geq 70$, didefinisikan tercemar ringan pada $IKA \geq 50$, tercemar sedang pada $IKA \geq 30$, tercemar berat jika $IKA \geq 10$. Pada rentang waktu lima tahun, indeks kualitas air Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 berada pada status tercemar ringan dengan nilai IKA berada pada rentang 50 hingga 54.

b. Indeks Kualitas Udara

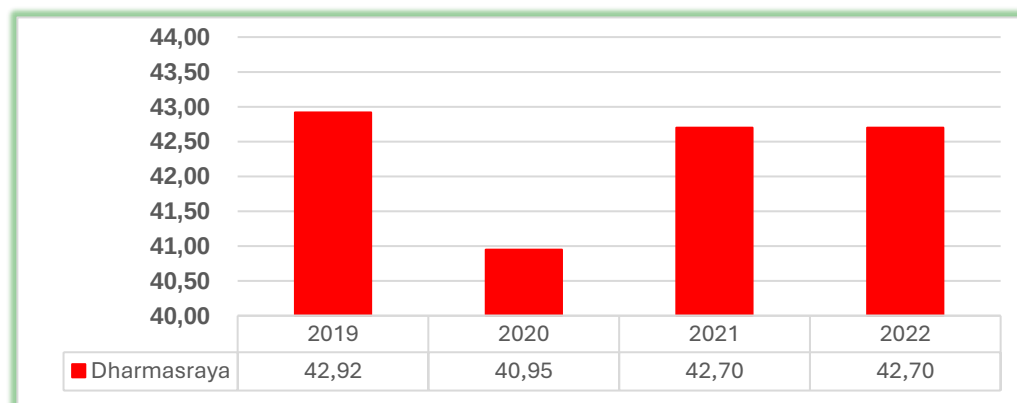
Parameter yang diuji dan menjadi dasar perhitungan IKU adalah parameter SO_2 dan NO_2 . Pada rentang waktu lima tahun terakhir, konsentrasi parameter NO_2 rata-rata dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami perubahan yang signifikan menjadi 83,28.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) Kabupaten Dharmasraya tahun 2019-2023 berfluktuatif. Tahun 2023, IKTL sebesar 42,92 dan tahun 2023 sebesar 43,14. Angka ini menunjukkan masih ada lokasi lahan kritis karena masih adanya lahan yang belum dilakukan penanaman/penghijauan kembali, pembukaan lahan baru serta pengalihan fungsi lahan yang bersifat tanaman hutan menjadi lahan perkebunan sawit.

Untuk lebih jelasnya indeks tutupan lahan dapat dilihat pada Gambar 2.39.

Gambar 2- 44. Indeks Tutupan Lahan



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024.

2.4.20. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di suatu wilayah.

Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan;

- a) Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb.
- b) Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir.

Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.

Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari *waste recovery* sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.

Jumlah sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Dharmasraya setiap tahunnya selalu meningkat dengan komposisi jenis sampah yang beragam. Tahun 2022, total timbulan sampah rumah tangga yang dihasilkan adalah 38.552 ton/tahun atau 105,62 ton/hari atau rata-rata 0,45 kg/orang/hari. Timbulan sampah rumah tangga kawasan perkotaan sebesar 47,18 ton/hari dan timbulan sampah rumah tangga di kawasan perdesaan sebesar 58,44 ton/hari, terdiri dari Anorganik 23,41% dan Organik 76,59%.

2.4.21. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang:

- a) Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau
- b) Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan

sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.

Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda.

Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah.

Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah “sampah terkumpul” dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.

Daerah pelayanan persampahan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya terbatas dalam pengangkutan sampah pasar dan beberapa kawasan perumahan. Daerah pelayanan pengelolaan sampah yaitu pasar Sungai Rumbai, pasar Koto Baru, pasar Sungai Dareh, pasar Pulau Punjung, areal rumah makan Umega dan sekitarnya, serta daerah pemukiman di Sitiung, sekitar Kantor Bupati, depan RSUD, Perumnas Sikabau, Perumnas Gung Sari, Gunung Medan, Perumnas ONP Sungai Dareh. Tingkat pelayanan persampahan di Kabupaten Dharmasraya ini masih sangat rendah atau baru 3-5% dari produksi sampah penduduk. Sampah permukiman pada umumnya dikelola sendiri oleh masyarakat dengan cara dibakar, ditimbun bahkan ada yang membuang sampah ke sungai.

2.4.22. Persentase Desa Mandiri

Persentase desa mandiri diukur dari hasil perhitungan Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.

Adapun klasifikasi Status Desa

- 1) Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.
- 2) Maju: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik.
- 3) Berkembang: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik.
- 4) Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas.
- 5) Sangat Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas.

Untuk lebih jelasnya jumlah nagari berdasarkan status Idm dapat dilihat pada Tabel 2.18 dan 2.19.

Tabel 2- 23 Jumlah Nagari berdasarkan Status IDM

No	Jenis	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	Mandiri	Nagari	4	5	6	9
2	Maju	Nagari	16	20	24	33
3	Berkembang	Nagari	28	24	20	10
4	Tertinggal	Nagari	4	3	2	-
5	Sangat Tertinggal	Nagari	-	-	-	-
Jumah Nagari		Nagari	52	52	52	52

Sumber : Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Tahun 2024

Tabel 2- 24 Persentase Desa Mandiri

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
Persentase Desa Mandiri	Persen	7,69	9,62	11,54	17,31
Jumlah Nagari Mandiri	Nagari	4	5	6	9
Jumlah Nagari	Nagari	52	52	52	52

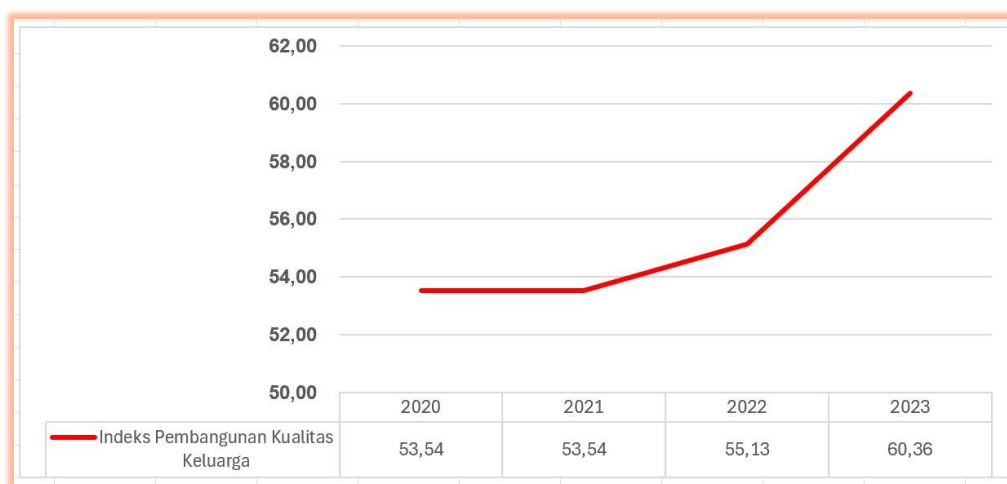
Sumber : Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah nagari mandiri di Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan, mencapai 17,31%. Jika trend ini berlanjut tidak mustahil pada tahun 2045 seluruh nagari di Kabupaten Dharmasraya menjadi nagari yang berstatus mandiri.

2.4.23. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya gambaran terkait indeks pembangunan kualitas keluarga dapat dilihat pada Gambar 2.40.

Gambar 2- 45 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga



Sumber : Dinas SOS3APPKB Tahun 2024

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Dharmasraya meningkat dari tahun ke tahun dan mulai mengalami percepatan sejak tahun 2021. Indeks ini menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Dharmasraya baik dari segi kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Agar pembangunan di Kabupaten Dharmasraya maju yang berbudaya dan berkelanjutan maka kualitas keluarga menjadi pondasi utama pembangunan. Akselerasi ini terus diharapkan terjadi sampai tahun 2045 sehingga tercipta kualitas keluarga yang tinggi.

2.4.24. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Survey IMDI telah dilaksanakan sejak tahun 2022, dan kembali dilaksanakan di tahun 2023.

Selanjutnya Masyarakat Digital adalah Sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (paperless) menjadi suatu hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, di mana semua lini kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya. Semakin tinggi capaian IMDI maka aktivitas yang dijalankan masyarakat secara elektronik dan tanpa kertas (paperless) menjadi suatu hal yang semakin terbiasa. Capaian indeks masyarakat digital Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2- 25 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Tahun 2022-2023

No.	Wilayah/ Pilar	2022	2023
1	Nasional	37,8	43,18
	Infrastruktur dan Ekosistem	40,24	57,09
	Keterampilan Digital	49,35	56,59
	Pemberdayaan	22,06	26,19
	Pekerjaan	40,35	32,14
2	Sumatera Barat	42,26	44,75
	Infrastruktur dan Ekosistem	46,22	60,85

	Keterampilan Digital	56,93	60,11
	Pemberdayaan	26,83	26,02
	Pekerjaan	39,88	38,59
3	Dharmasraya	40,25	46,9
	Infrastruktur dan Ekosistem	44,83	60,62
	Keterampilan Digital	50,09	65,95
	Pemberdayaan	24,92	23,73
	Pekerjaan	42,38	38,62

Sumber : Dinas Kominfo tahun 2024

Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Dharmasraya semakin membaik melebihi rata-rata nasional. Artinya, kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital melebihi rata-rata nasional baik dalam hal infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan (lihat tabel 2-20). Akan tetapi, indeks tersebut berada di bawah rata-rata Sumatera Barat kecuali untuk pekerjaan. Dengan kondisi yang ada, infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital dan pemberdayaan perlu ditingkatkan sehingga mendekati atau menyamai rata-rata keberhasilan Provinsi Sumatera Barat.

2.4.25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

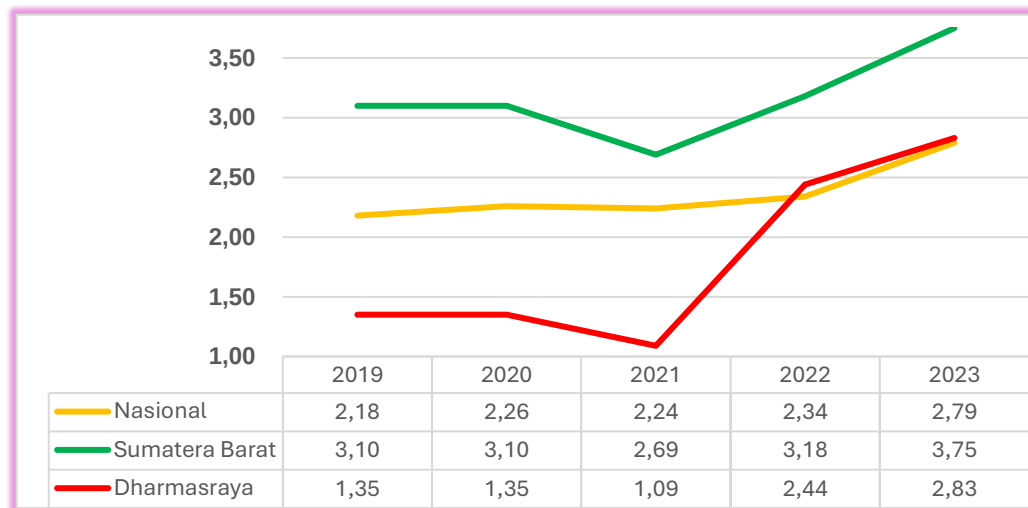
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.

Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan. Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti di bawah ini

- 1) 4,2 – 5,0 Memuaskan
- 2) 3,5 – < 4,2 Sangat Baik
- 3) 2,6 – < 3,5 Baik
- 4) 1,8 – < 2,6 Cukup
- 5) < 1,8 Kurang

Untuk lebih jelasnya indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilihat pada Gambar 2.41.

Gambar 2- 46 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Sumber : Dinas Kominfo Tahun 2024

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Dharmasraya masih berada di bawah angka Provinsi Sumatera Barat, namun terdapat peningkatan yang signifikan mulai tahun 2021, dimana indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Dharmasraya sudah menyamai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, meskipun masih di bawah rata-rata provinsi. Dengan kondisi ini dibutuhkan percepatan peningkatan pengelolaan sistem informasi berbasis elektronik untuk mengejar ketertinggalan dari Provinsi Sumatera Barat.

2.4.26. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama. Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya proporsi PDRB untuk sektor non pertanian. Walaupun saat ini sekitar 48% masih didominasi oleh kegiatan sektor industri pangan, namun melihat prospek dimasa yang akan datang jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian akan semakin berkembang sesuai dengan fungsi atau posisi Kabupaten Dharmasraya terhadap Provinsi Sumatera Barat sebagai pintu gerbang Provinsi Sumatera Barat dibagian Tenggara. Adapun proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 26 Proporsi Jumlah Usaha Kecil Dan Menengah Non Pertanian

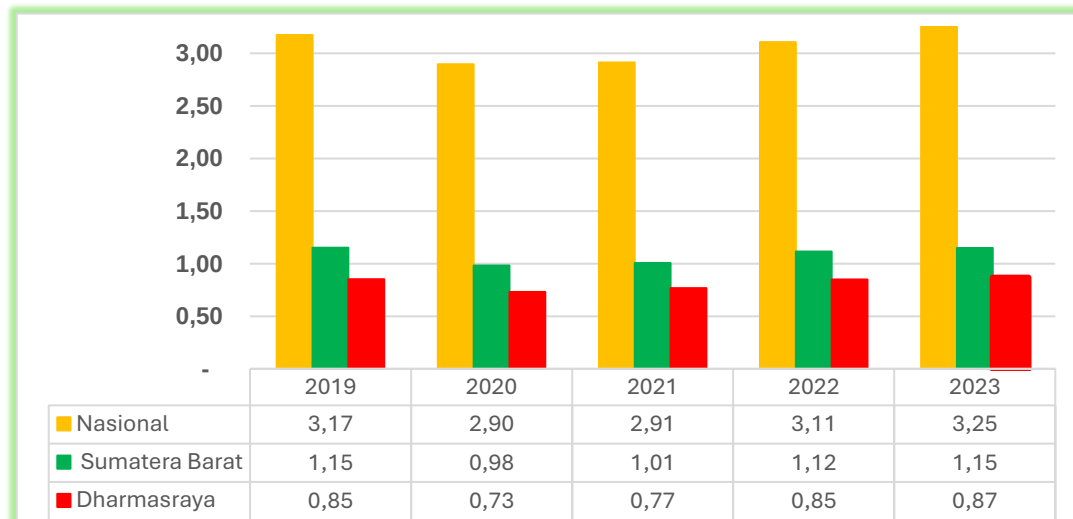
Uraian	2023
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian	82,17
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian	894
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	1088

Sumber : Dinas Kumperdag Tahun 2024 dan Olahan Bapperida Tahun 2024

2.4.27. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDRB yang berkontribusi oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan, dan penyediaan jasa makan dan minum. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Gambar 2- 47. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Kabupaten Dharmasraya saat ini masih berada dibawah rata-rata nasional dan Sumatera Barat yang disebabkan oleh karakteristik Kabupaten Dharmasraya, dimana kegiatan pariwisata masih pada tahap perintisan. Dengan dibukanya berbagai kemungkinan pembangunan terutama aksesibilitas dibagian Selatan Sumatera Barat menuju Riau dan Jambi, maka diperkirakan peningkatan akses tersebut akan meningkatkan kegiatan penyediaan akomodasi, makanan dan minuman sehingga akan mampu berkembang sekurang-kurangnya menyamai proporsi Sumatera Barat.

2.4.28. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

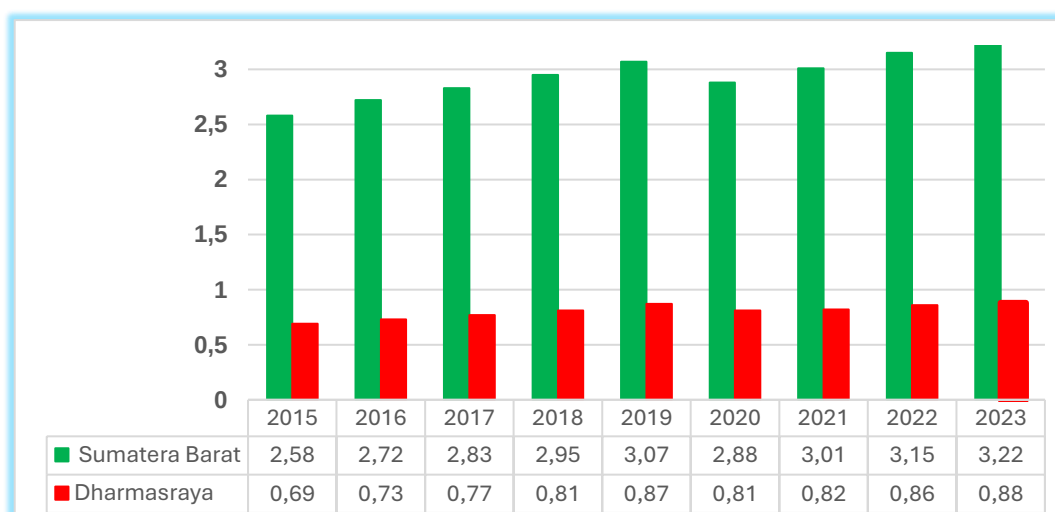
PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDRB regional yang berkontribusi oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk :

- 1) Fesyen
- 2) Kuliner

- 3) Kriya
- 4) Film, Animasi dan Video
- 5) Pengembang Permainan
- 6) Aplikasi
- 7) Musik
- 8) Seni Pertunjukan
- 9) Fotografi
- 10) Desain Komunikasi Visual
- 11) Televisi dan Radio
- 12) Seni Rupa
- 13) Desain Produk
- 14) Periklanan
- 15) Penerbitan
- 16) Arsitektur
- 17) Desain Interior

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.43.

Gambar 2- 48. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Tahun 2019-2023



Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

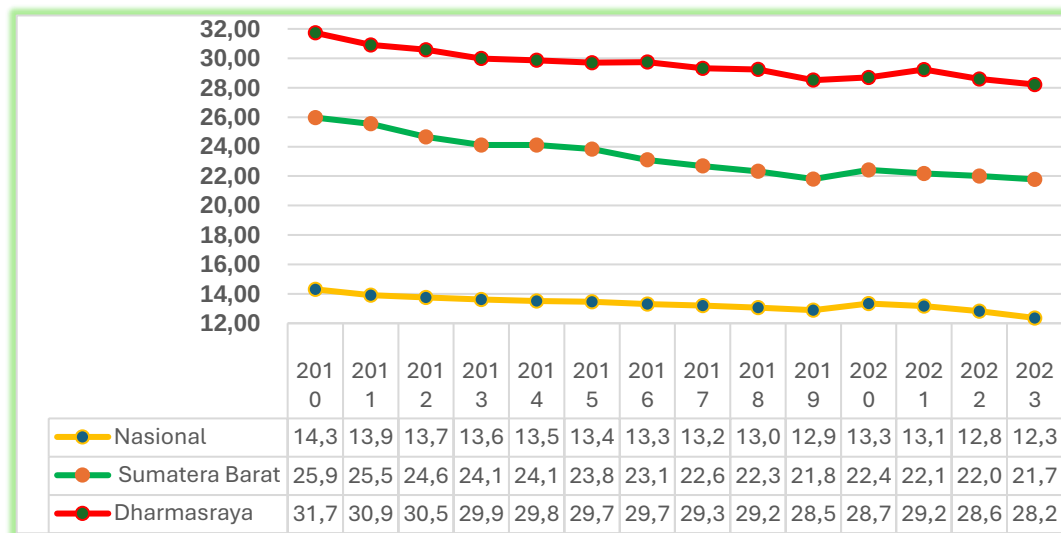
Ekonomi kreatif sangat berkaitan dengan ketersediaan jaringan telekomunikasi. Saat ini di Kabupaten Dharmasraya masih banyak wilayah-wilayah yang masih lemaj penerimaan signal telekomunikasi sehingga ekonomi kreatif yang umumnya berplatform digital kurang mendukung perkembangan ekonomi kreatif. Dengan pembangunan telekomunikasi dan pembangunan sumberdaya manusia peningkatan industri kreatif akan tumbuh berkembang di Kabupaten Dharmasraya sekurang-kurangnya akan terjadi akselerasi yang memperkecil gap atau perbedaan pencapaian Kabupaten Dharmasraya dibanding Provinsi Sumatera Barat.

2.4.29. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Rasio ini menggambarkan peran sektor pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan nilai PDRB. pada daerah berkembang, maka kontribusi sektor pertanian relatif besar. Namun apabila wayah tersebut bergerak menuju menuju negara maju, maka kontribusi ini akan semakin menurun.

Untuk lebih jelasnya rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2010-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.47.

Gambar 2- 49. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2010-2023



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Walaupun trend nasional, Sumatera Barat, dan Dharmasraya sama2 menurun , namun terlihat laju penurunan yang semakin kecil. Usaha untuk meningkatkan produktivitas, cetak sawah, perbaikan embung, merupakan langkah meningkatkan hasil sektor pertanian dan perikanan, serta penghijauan dan program-program hutan kerakyatan diharapkan mampu mengembalikan peranan sektor tersebut dalam sumbangannya terhadap produksi wilayah.

2.4.30. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan tenaga kerja sektor pertanian dalam menghasilkan produk/output. Semakin tinggi produktivitas tenaga kerja sektor pertanian maka semakin tinggi kinerja tenaga kerja di suatu wilayah. Semakin tinggi produktivitas tenaga kerja sektor pertanian maka semakin tinggi kinerja tenaga kerja di suatu wilayah. Untuk lebih jelasnya Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2- 27 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Indikator/ Variabel	Satuan	2022	2023
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp juta/orang	7.219	6.960
nilai PDRB ADHB sektor pertanian	Rp juta	3.254.823	3.466.881
Jumlah tenaga kerja sektor pertanian	orang	45.085	49.808

Sumber : BPS Sumatera Barat Tahun 2024

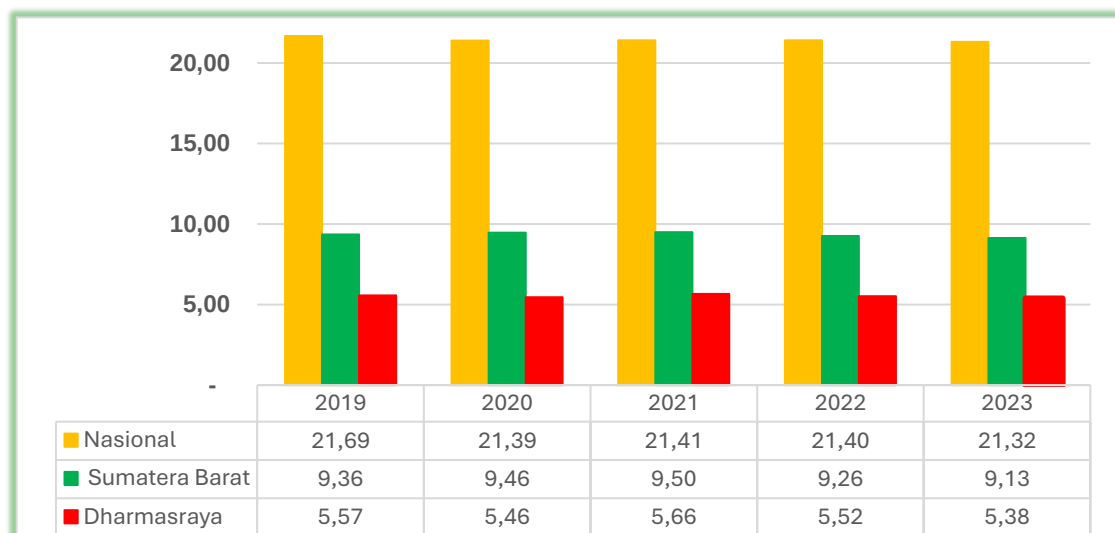
Dengan semakin banyaknya tenaga kerja sektor pertanian terlihat pada tabel di atas berdampak pada nilai produksi sektor pertanian sebagai konsekuensi logisnya. Namun jika kita perhatikan produktivitas

setiap tenaga kerja mengalami penurunan artinya sektor pertanian menampung tenaga kerja tetapi tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, karena sifat sektor pertanian sebagai pertambahan hasil yang semakin berkurang (*the law of diminishing return*).

2.4.31. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 4.45.

Gambar 2- 50. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Kabupaten Dharmasraya yang sampai saat ini masih mengandalkan sektor pertanian, sehingga peran sektor industri sangat rendah dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hasil pertanian sebagai komoditas yang potensial diolah dalam berbagai bentuk industri belum maksimal dikembangkan. Angka 5,8 tersebut dapat dinaikkan jika komoditas tersebut diolah di wilayah Dharmasraya sendiri. Oleh sebab itu pengembangan nilai tambah produk pertanian akan meningkatkan kontribusi PDRB industri pengolahan disamping sumbangan industri pengolahan lainnya.

2.4.32. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama. Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2- 28 Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun 2016-2021

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sumatera Barat	21.953	28.174	35.592	36.009	38.174	40.653
2	Dharmasraya	630	640	681	681	794	888

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat

2.4.33. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:

- 1) Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%.
- 2) Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%.
- 3) Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reuiu, dengan bobot 35%.
- 4) Penataan database PUU, dengan bobot 15%.

Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH : Kategori, Nilai dan Prediket Indeks Reformasi Hukum dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2- 29 Kategori, Nilai dan Prediket Indeks Reformasi Hukum

No	Kategori	Nilai	Prediket
1	AA	>90-100	istimewa
2	A	>80-90	sangat baik
3	BB	>70-80	baik
4	B	>60-70	cukup baik
5	CC	>50-60	cukup

Sumber : Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022

Pada tahun 2023, nilai indeks reformasi hukum Kabupaten Dharmasraya yaitu 67,92 atau kategori C (cukup baik), sehingga masih perlu perbaikan kinerja untuk mencapai kategori yang lebih baik untuk kedepannya.

2.4.34. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.

Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Prinsip-prinsip tersebut adalah: (1) Keadilan (Fairness); (2). Partisipasi (Participation); (3). Akuntabilitas (Accountability); (4). Transparansi (transparency); (5). Berdayaguna (useful); dan (6). Aksesibilitas (accessibility)

Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan sesuai dengan Kategori, Nilai dan Prediket Indeks Pelayanan Publik seperti ppada Tabel 2.28.

Tabel 2- 30 Kategori, Nilai dan Prediket Indeks Pelayanan Publik

No	Kategori	Nilai	Prediket
1	0,00 - 1,00	F	gagal
2	1,01 – 1,50	E	sangat buruk
3	1,51 – 2,00	D	buruk
4	2,00-2,50	C-	cukup (dengan catatan)
5	2,51-2,00	C	cukup
6	3,01-3,50	B-	baik (dengan catatan)
7	3,51-4,00	B	baik
8	4,01-4,50	A-	sangat baik
9	4,51 – 5,00	A	pelayanan prima

Sumber : Bagian Organisasi Setda Tahun 2024

Dengan tata kelola pemerintahan yang semakin baik akan meningkatkan indeks pelayanan publik. Semakin sedikit keluhan atau pengaduan masyarakat, semakin cepat waktu pelayanan, semakin transparan biaya-retribusi dan menggunakan sistem informasi maka akan meningkatkan indeks pelayanan publik, meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah, sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Saat ini kepuasan masyarakat Kabupaten Dharmasraya terhadap layanan pemerintahan lebih tinggi dari provinsi seperti dapat dilihat pada Tabel 2.29 dibawah ini.

Tabel 2- 31 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No.	Wilayah	2021	2022	2023
1	Sumatera Barat	-	80,40	
2	Dharmasraya	81,76	88,67	

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

2.4.35. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2- 32 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Skor	3,12	3,16	3,51	-	2,88	3,50
2	Status	sedang	sedang	tinggi	-	sedang	tinggi

Sumber : Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berfluktuatif, antara sedang dan tinggi. Pada tahun 2020 saat covid tidak adapenilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah, namun setelah covid terlihat terjadi peningkatan yang saat ini 3,50 dengan status tinggi. Dimasa yang akan datang kondisi ini perlu ditingkatkan sehingga kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah makin maksimal.

2.4.36. Return on Asset (ROA) BUMD

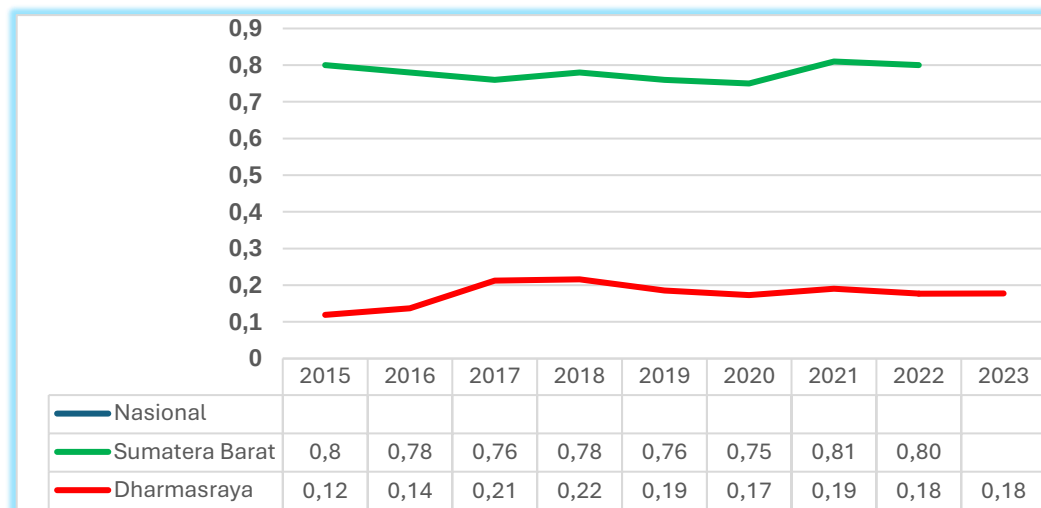
Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return On Asset* (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.

Sampai saat ini Kabupaten Dharmasraya belum memiliki BUMD, akan tetapi untuk masa yang akan datang Kabupaten Dharmasraya berpotensi untuk mengembangkan BUMD disektor pertanian dan perkebunan (CPO, IKM logam) dan layanan infrastruktur (air minum, sanitasi dan energi).

2.4.37. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.



Sumber : BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Data diatas hanya merupakan realisasi pajak daerah Kabupaten Dharmasraya dimana, belum termasuk realisasi pajak yang berasal dari masyarakat, perusahaan swasta dan instansi pemerintah vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Dharmasraya.

2.4.38. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah :

- 1) Sangat inovatif = 60,01-100
- 2) inovatif = 35-60
- 3) kurang inovatif = 0,01-34,99
- 4) tidak dapat dinilai = 0

Selain menetapkan skor dan kategori, indeks inovasi daerah juga dilakukan perankingan berdasarkan tingkatan pemerintahan Skor Dan Kategori, Indeks Inovasi Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2- 33 Skor Dan Kategori, Indeks Inovasi Daerah

Tahun	Skor	Kategori	Peringkat Nasional
2020	3	Kurang Inovatif	336
2021	48,07	Inovatif	114
2022	57,84	Inovatif	44
2023	55,61	Inovatif	65

Sumber : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11/2704/SJ Tahun 2023 Perihal Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan IGA 2023

Perkembangan inovasi daerah Kabupaten Dharmasraya dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi yang semakin baik. Kondisi untuk dapat menjadi sangat inovatif dibutuhkan untuk percepatan pencapaian kinerja pemerintah. Agar berada pada tahap sangat inovatif, Kabupaten Dharmasraya perlu meningkatkan jumlah inovasi yang berkualitas baik untuk tata kelola pemerintahan, pelayanan publik serta inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

2.4.39. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK



Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD). Hasil dari IIN dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris.

Sampai saat ini Kabupaten Dharmasraya belum pernah melakukan survei penilaian integritas (SPI) KPK. Dimasa yang akan datang perlu dilakukan survei ini mengingat survei ini penting untuk menetapkan resiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Dharmasraya.

2.4.40. Indeks Persepsi Anti Korupsi

IPAK mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi dan mencakup tiga fenomena utama korupsi, yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism). Nilai IPAK berkisar pada skala 0 sampai 5. Semakin mendekati 5 berarti masyarakat semakin antikorupsi.

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.

Pada rilis IPAK 2021, BPS mencatatkan nilai 3,88, meningkat dari tahun 2020 yaitu 3,84. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan pemahaman dan penilaian masyarakat terkait perilaku antikorupsi, terutama di lingkup keluarga dan komunitas.

Dari hasil IPAK ini, BPS memberikan beberapa rekomendasi untuk upaya pemberantasan korupsi dan edukasi antikorupsi. Pada 2021, BPS menekankan pentingnya penanaman budaya integritas dan nilai antikorupsi mulai dari lingkup keluarga sedari dini. Peningkatan penyebaran informasi antikorupsi juga perlu dilakukan secara langsung kepada tokoh masyarakat dan agama, pemerintah, ormas, dan yang lainnya.

Saat ini Indeks Korupsi Indonesia meningkat dari tahun sebelumnya. Untuk menekannya diperlukan upaya bersama melawan korupsi baik dalam lingkup keluarga, dunia usaha, pemerintahan dan lingkungan sekitar. Kabupaten Dharmasraya belum pernah melakukan perhitungan indeks tersebut. Agar maju, berbudaya dan berkelanjutan angka indeks ini perlu diketahui sebagai bagian dari keberhasilan berbudaya pada saat Indonesia emas.

2.5. EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025

Refleksi pembangunan jangka panjang daerah sejak terbentuknya Kabupaten Dharmasraya di tahun 2004 serta awal periodisasi RPJPD di tahun 2005 sesuai dengan ketersediaan data daerah. Adapun refleksi tersebut menggunakan 2 (dua) metode, yaitu pertama, menggunakan evaluasi indikator makro, yang dibandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya cara kedua yaitu melakukan evaluasi capaian Sasaran Pokok Pembangunan Daerah.

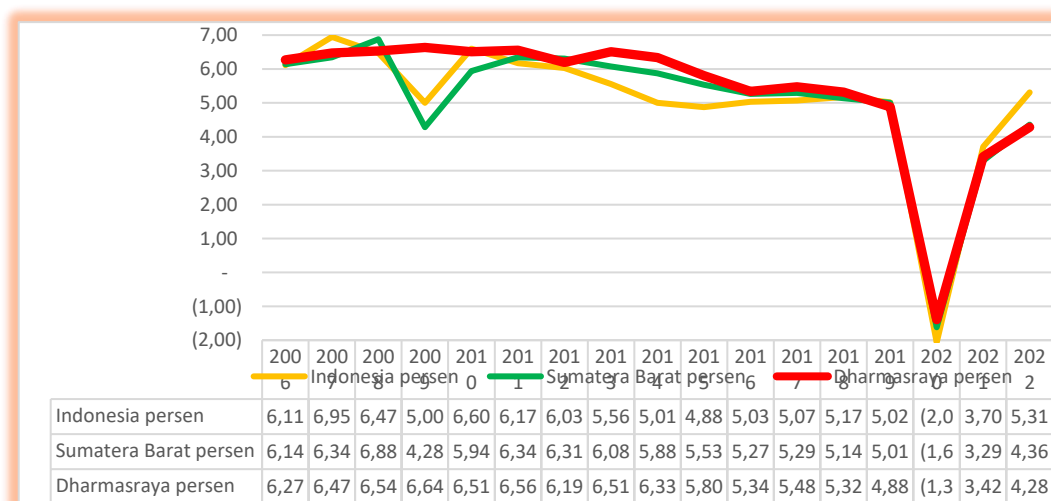
2.5.1. Evaluasi Capaian Indikator Makro Daerah

1. Pertumbuhan PDRB ADHK

Perkembangan PDRB Kabupaten Dharmasraya dari awal pemekaran wilayah atau di awal periode RPJPD menunjukkan perkembangan positif antara 3,7 hingga 6,95 persen setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan Pertumbuhan rata-rata nasional dan Provinsi Sumatera Barat, maka Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya hampir setiap tahunnya berada di atas rata-rata nasional ataupun Provinsi

Sumatera Barat. Pertumbuhan PDRB ADHK Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 s.d 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Gambar 2- 51 Pertumbuhan PDRB ADHK Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 s.d 2022 (persen)

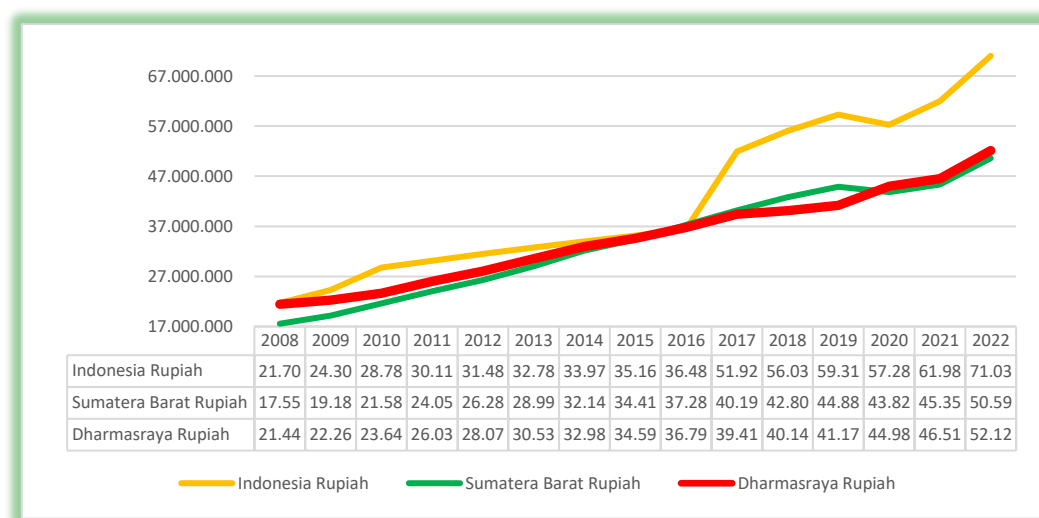


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

2. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan nilai PDRB ADHB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk membandingkan tingkat pendapatan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2022 setiap tahunnya selalu memperlihatkan peningkatan nilai PDRB perkapita. Bahkan dibandingkan kondisi tahun 2008 kenaikan PDRB di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan nilai yang cukup besar yaitu lebih dari dua kali lipat. PDRB Perkapita ADHB Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2.47.

Gambar 2- 52 PDRB Perkapita ADHB Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 s.d 2022 (Juta Rupiah)

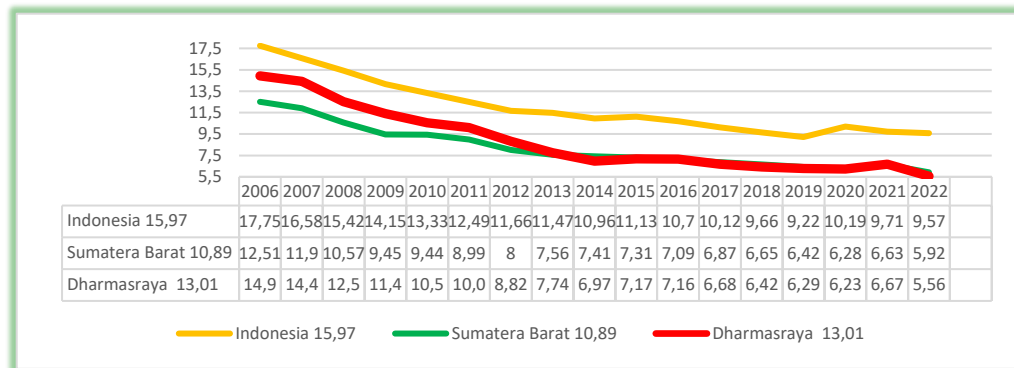


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

3. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya di awal pemekaran berada pada angka 13,01 persen, angka ini berada di atas angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat. Hingga tahun 2022 angka kemiskinan ini terus menunjukkan tren penurunan baik tingkat nasional Provinsi Sumatera Barat maupun Kabupaten Dharmasraya. Angka kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya terlihat cukup berhasil ditekan hingga angka 5,56 persen di tahun 2022, sehingga capaian ini paling rendah dibandingkan nasional maupun provinsi.

Gambar 2- 53 PDRB Tingkat kemiskinan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 s.d 2022 (persen)

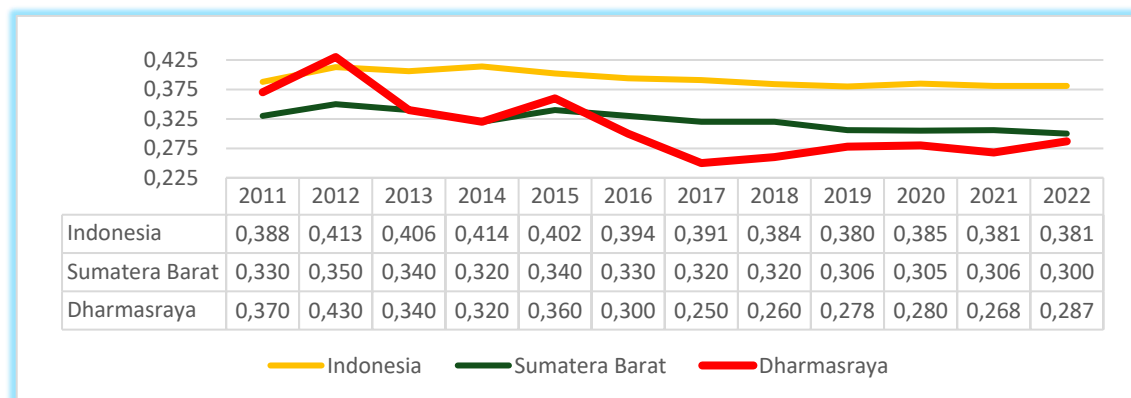


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

4. Gini Rasio

Angka gini rasio yang digunakan untuk mengukur ketimpang pendapatan penduduk terlihat berfluktuasi, angka yang tertinggi tercatat di tahun 2012 sebesar 0,430, dan angka ini dapat tercatat pada angka terbawah yaitu 0,250 di tahun 2017. Namun sejalan dengan peningkatan kesejahteraan penduduk yang diiringi oleh menurunnya tingkat kemiskinan, maka ketimpangan pendapatan menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2022 yang tercatat sebesar 0,287.

Gambar 2- 54 Gini Rasio Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 s.d 2022 (persen)



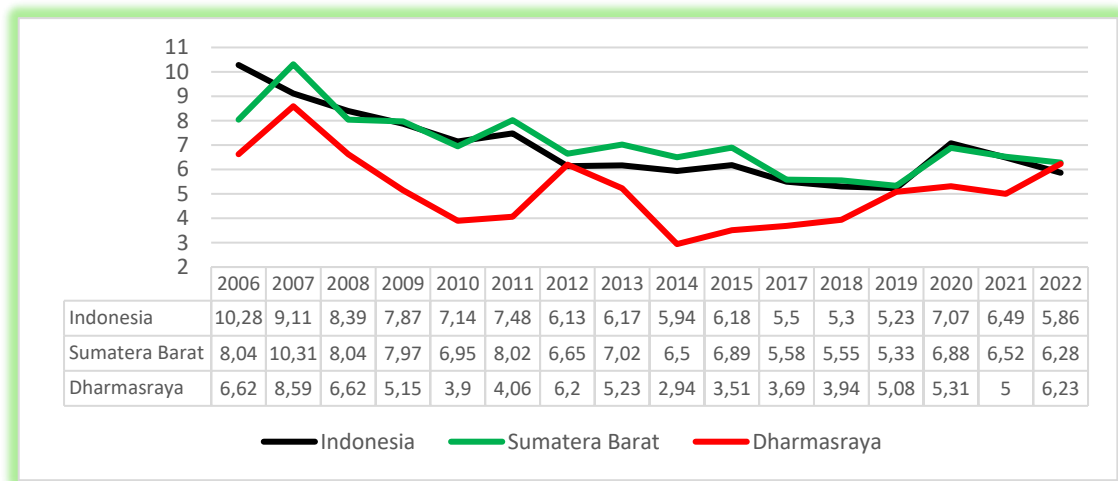
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT Kabupaten Dharmasraya secara rata-rata tergolong masih rendah dibandingkan nasional dan provinsi Sumatera Barat. Rendahnya tingkat pengangguran tersebut dipengaruhi oleh daya serap tenaga

kerja yang tergolong banyak pada sektor pertanian sebagai sektor terbesar dalam pembentukan nilai tambah ekonomi sekaligus sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja.

Gambar 2- 55 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 s.d 2022 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sebagai indikator yang digunakan untuk memperlihatkan sejauh mana pembangunan dapat dirasakan oleh penduduknya, maka perkembangan IPM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 hingga tahun 2022 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

Jika di tahun 2005 Dharmasraya menduduki posisi ke 19 dari kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan besaran IPM sebesar IPM 64,48, maka di tahun 2022 ranking IPM Dharmasraya sudah berada di posisi 10, atau berada pada ranking 3 dari 12 kab/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian terlihat bahwa tidak seluruh target pembangunan 2005-2025 tercapai. Terdapat 4 indikator yang tidak tercapai dan 8 indikator yang belum tercapai sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah pada RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045.

2.5.2. Evaluasi capaian Sasaran Pokok Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 memuat 7 Misi, 28 sasaran dan 71 indikator. Dilihat berdasarkan capaian masing-masing indikator terdapat sebanyak 59 indikator yang mencapai target yang telah ditetapkan dan tidak tercapai atau belum tercapai 14 indikator dan sebanyak 2 indikator yang tidak dapat dievaluasi. Indikator yang tidak dapat dievaluasi yaitu tutupan vegetasi hutan pada kawasan hutan berfungsi lindung seluas 17.368 Ha (5,74%) dan berkembangnya produksi dan pengolahan hasil hutan kayu dan non kayu. Kedua indikator ini tidak dapat dievaluasi karena bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Adapun uraian capaian masing-masing indikator sesuai misi dari RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Misi 1 Meningkatkan kualitas manusia agar bisa membawa kemajuan daerah disegala bidang dan berkontribusi sebagai pusat pengembangan pendidikan dan kesehatan dalam wilayah tenggara



- Provinsi Sumatera Barat terdapat sebanyak 4 sasaran, dimana semua indikator sudah mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Misi 2 Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, industri) dengan optimal dan bernilai tambah besar sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sekaligus menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan ekonomi bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat, dimana pada misi ini terdapat sebanyak 7 (tujuh) sasaran. Berdasarkan indikator sasaran dari misi 2 ini terdapat sebanyak 11 indikator yang sudah mencapai target, sedangkan sebanyak 5 indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan karena evaluasi dilakukan pada tahun 2022 untuk target di tahun 2025, sementara terdapat sebanyak 5 indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
 3. Misi 3 Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, memiliki sebanyak 2 sasaran dengan 5 indikator. Dari ke-5 indikator sasaran misi 3, yang tercapai hanya 1 indikator, 2 indikator tidak dapat dievaluasi karena bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya serta terdapat 1 indikator yang tidak tercapai yaitu indikator terjaminnya kualitas dan debit sungai Batanghari
 4. Misi 4 Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi, memiliki 3 sasaran dengan 4 indikator, dengan capaian indikator 100%
 5. Misi 5 Menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang mampu mendorong perkembangan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar kawasan. Pada misi ini terdapat 7 sasaran dengan 24 indikator sasaran. Dari 24 indikator sasaran, hanya 3 indikator yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
 6. Misi 6 Menegakkan kehidupan beragama dan beradat sebagai norma sosial dan semangat membangun serta melestarikan identitas Daerah. Pada misi 6 terdapat 2 sasaran dengan 4 indikator. Semua indikator sasaran sudah mencapai target yang telah ditetapkan.
 7. Misi 7 Mewujudkan tata kelola pembangunan yang andal dan maju serta melibatkan semua potensi peran kelembagaan daerah yang mampu membangun manfaat yang besar, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan. Pada misi ini terdapat 4 sasaran dengan 5 indikator sasaran. Semua indikator pada misi 7 ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya Realisasi Capaian Sasaran pokok Pembangunan Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.28.



Tabel 2- 34 Realisasi Capaian Sasaran pokok Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target Tahun 2025 (Tahap IV2020-2025)	Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	Realisasi (Tahun 2022)	Tercapai/ tidak tercapai
Misi 1 : Meningkatkan kualitas manusia agar bisa membawa kemajuan daerah disegala bidang dan berkontribusi sebagai pusat pengembangan pendidikan dan kesehatan dalam wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat							
1	Tercapainya penurunan laju pertumbuhan penduduk						
	1. Menggalakkan program Keluarga Berencana.	Jumlah peserta KB dan Laju pertumbuhan Penduduk (LPP)	Peserta keluarga KB aktif 14,5%.	Meningkatnya peserta KB aktif.	- Peserta Keluarga KB aktif termasuk tinggi di Provinsi Sumbar	80,60	tercapai
			LPP 3,09% (2 kali lipat LPP nasional 1,49%; LPP sumbar 1,34%)	LPP menurun mencapai kurang 2,5 %	- LPP dalam kategori sedang	1,12	tercapai
2	Meningkatnya nilai IPM mencapai rata-rata provinsi Sumatera Barat		69,13 (Urutan 17 dari 19 daerah)	Menengah (Rata-rata Sumatera Barat)	Pada rata-rata Sumatera Barat	Dharmasraya : 72,30, Sumbar 72,91	tercapai
	2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara promotif dan preventif.	Angka harapan hidup	66 tahun (terendah di Sumatera Barat)	Meningkat (mendekati rata-rata Sumatera Barat)	Mendekati rata-rata Sumatera Barat	Dharmasraya : 71,90, Sumbar 71,85	tercapai
	3. Meningkatkan partisipasi pendidikan pada tingkat SD, SMP, dan SMA.	Rata-rata lama sekolah	7,77 tahun (urutan ke 8 dari 12 kabupaten)	Menengah (rata-rata Sumatera Barat)	Pada rata-rata Sumatera Barat	Dharmasraya : 8,56, Sumbar 8,69	tercapai
	4. Memeratakan akses sarana sekolah pada setiap kecamatan.	Meratanya akses sarana pendidikan	Masih ada 5 kecamatan tanpa sarana SMA dan akses yang jauh untuk sarana lainnya.	Pembangunan di 1-2 kecamatan prioritas	Tersedianya sarana pendidikan menengah dalam radius akses pelajardi tiap kecamatan.		tercapai



No.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target Tahun 2025 (Tahap IV2020-2025)	Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	Realisasi (Tahun 2022)	Tercapai/ tidak tercapai
	5. Meningkatkan kualitas sekolah	Standar sekolah	Belum ada sekolah berstandar nasional	Meningkatnya jumlah sekolah	Dominannya jumlah sekolah berstandar nasional		tercapai
	6. Membebaskan kabupaten dari buta huruf.	Angka melek huruf	96,38% (urutan ke 8 dari 12 kabupaten)	100%	Bebas buta huruf	99,19	tercapai
	7. Peningkatan kualitas keluarga	Jumlah keluarga miskin	Keluarga miskin 10,56%	menurun	Jumlah keluarga miskin berkurang dengan signifikan	5,56	tercapai
		Pengeluaran per kapita rata-rata penduduk	Urutan 18 di Sumatera Barat	Menengah (rata-rata Sumatera Barat)	Pada rata-rata Sumatera Barat	Dharmasraya : 11.324, Sumbar 11.013	tercapai
3	Terlayannya pelayanan pendidikan dan kesehatan di nagari tertinggal.						
	8. Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan di nagari tertinggal.	Pelayanan dasar nagari tertinggal dan terpencil	31 nagari tertinggal dan 16 nagari terpencil	Berkurangnya 5-10 nagari tertinggal dan sangat terpencil	Terbebaskannya nagari dari ketertinggalan dan keterpencilan akses pendidikan dan kesehatan dasar	tidak ada lagi nagari tertinggal di tahun 2023	tercapai
4	Tercapainya Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat						
	9. Mengembangkan pelayanan kesehatan dan pendidikan skala regional dengan:	Kelengkapan sarana prasarana dan sumber daya manusia bidang	Orientasi pelayanan kesehatan penduduk	Pelayanan lokal dan wilayah sekitar	Kabupaten Dharmasraya menjadi bagian orientasi pelayanan kesehatan wilayah tenggara	Dharmasraya memiliki 2 RSUD	tercapai



No.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target Tahun 2025 (Tahap IV2020-2025)	Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	Realisasi (Tahun 2022)	Tercapai/ tidak tercapai
		kesehatanyang berkualitas	kabupatensebagian masih keluar kabupaten		Sumatera Barat dan sekitarnya.		
	- peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit untuk pelayanan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya						
	- mengembangkan lembaga pendidikan tinggi dan kejuruan khususnya bidang pertanian dan kesehatan	Pelayananpendidikan tinggi dan kejuruan untuk wilayah sekitar	Pelayanan lokal	Berkembangnya pendidikan tinggi danmenengah pelayanan wilayah	Kabupaten Dharmasraya menjadi bagian orientasi pendidikan wilayah tenggara Sumatera Barat dan sekitarnya.	Dharmasraya telah memiliki 3 perguruan tinggi	tercapai
Misi 2 : Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam(pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, industri) dengan optimal dan bernilai tambah besar sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sekaligus menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan ekonomi bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.							
5	Peningkatan produksi dan produktifitas padi sawah untukmemantapkan peran Kabupaten Dharmasraya dalam mendukung ketahanan pangan						
	10. Mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang ada dengan regulasi dan memberikan insentif produksi bagi petani.	Pengendalian alih fungsi lahan sawah ke fungsi lain	Kecenderungan adanya alih fungsi lahan	Berkurang	Bertahannya luas sawah eksisiting		tercapai
	11. Menambah luas lahan sawah D.I. Batanghari seluas 1.715 Ha dalam jangka menengah dan mencapai	Luas sawah	Luas sawah9.278 Ha (D.I. Batanghari 5.782	Penambahan luas sawah D.I. Batanghari dan peningkatan luas	Bertambahnya luas sawah 1.715 Ha dalam jangka menengah dan mencapai	4.295 ha	tidak tercapai



No.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target Tahun 2025 (Tahap IV2020-2025)	Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	Realisasi (Tahun 2022)	Tercapai/ tidak tercapai
	5.000 Ha dalam jangka panjang.		Ha dan lainnya 3.500 Ha).	dan pengairan irigasi lainnya	5.000 Ha dalam jangka panjang.		
		Produktifitas sawah	Produksi 50.713 Ha dengan produktifitas rata-rata 4,9 ton/Ha.		Produktifitas meningkat menjadi 5,2 ton/ha.	4,46 ton/ha	tidak tercapai
	12. Meningkatkan pengairan D.I.kabupaten yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dan revitalisasi sawah pada lahan lebih kurang 3.500 Ha.				Produksi mencapai 74.270 ton (meningkat 146%).	40.797 ton	tidak tercapai
6	Berkembangnya klaster agribisnis hortikultura berdaya saing tinggi						
	13. Mengembangkan agribisnis hortikulturabuah-buahan khas daerah seperti: manggis, duku, durian dan salak dengan pola klaster	Produksi dan klaster	Belum berkembang	Pengembangan agribisnis	Berkembangnya klaster. agribisnis hortikultura		tercapai
7	Berkembangnya kawasan minapolitan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra perikanan darat pada wilayah Sumatera Barat bagian tenggara						
	14. Meningkatkan produksi perikanan sehingga memiliki kontribusi besar pada produksi wilayah Sumatera Barat	Produksibertambah 3 kali lipat	Produksi perikanan budidaya1.555 ton	Pengembangan agribisnis	Berkembangnya agribisnis kawasan minapolitan denganproduksi lebih 4.650 ton.	25.120 ton	tercapai



No.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target Tahun 2025 (Tahap IV2020-2025)	Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	Realisasi (Tahun 2022)	Tercapai/ tidak tercapai
	bagian tenggara (yang meliputi Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya) mencapai lebih 300%.						
	15. Mengembangkan dan membangun prasarana sarana pendukung kawasan minapolitan	Ketersediaan sarana prasarana pendukung	Sebagian sarana telah tersedia	Peningkatan dan pembangunan	Berkembangnya prasarana sarana pendukung kawasan minapolitan (balai benih, balai penelitian, pasar minapolitan).		tercapai
	19. Membangun pabrik pengolahan industri hilir untuk pasar Sumatera Barat dan wilayah sekitar.	Terbangunnya pabrik	Belum terbangun	Peningkatan produksi	Tersedianya pabrik pengolahan hilir makanan dari sawit(seperti minyak goreng)		belum tercapai
	20. Mengembangkan pengolahan karet dalam bentuk slab dan sheet ditingkat petani dan pengolahan lebih lanjut produk karet.	Pengolahan karet oleh petani	Belum berkembangnya pengolahan karet dalam bentuk slab dan sheet ditingkat petani	Meningkat	Berkembangnya pengolahan karet ditingkat petani.		belum tercapai
	21. Mengembangkan komoditi potensial perkebunanlainnya seperti kakao dan kopi untuk mendukung ketahanan ekonomi wilayah.	Produksi komoditi lain (seperti kopi dan kakao)	Luaskopi:459 Ha, produktif 423 Ha.	Berkembangnya Pengolahan hasil produksi.	Berkembangnya produksi dan pengolahan hasil komoditi perkebunan lain (kopi dan kakao).		belum tercapai
			Luas kakao: 1.693 Ha, produktif 652 Ha				



No.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target Tahun 2025 (Tahap IV 2020-2025)	Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	Realisasi (Tahun 2022)	Tercapai/ tidak tercapai
	22. Mengembangkan industri rakyat skala mikro dan kecil berbasis pengolahan sumber daya pertanian (sawit, karet, kopi dan kakao).	Perkembangan industri pengolahan skala mikro dan kecil	Belum banyak berkembang	Peningkatan	Berkembangnya industrirakyat dalam pengolahan hasil perkebunan (sawit, karet, kopi dan kakao).	belum adanya industri rakyat pengolah hasil perkebunan	belum tercapai
	23. Mengembangkan pasar lelang agro hasil perkebunan.	Perkembangan pasar lelang agro hasil perkebunan	Sudah terbangun fisik pasar agro untuk komoditi sawit	Peningkatan kapasitas pasar	Berkembangnya kegiatan pasar agro hasil perkebunan yang menguntungkan petani.	sudah berjalan, namun perlu pembinaan lebih lanjut	tercapai
	24. Membangun pola investasi usaha budidaya perkebunan dan industri yang mendorong kemandirian petani dengan melibatkan potensi pengelolaan dan pembiayaan yang ada di daerah.	pelibatan potensi pengelolaan dan pembiayaan yang ada di daerah	Pola investasi yang memberi manfaat sosial besar masih belum terbentuk	Penerapan pola	Berkembangnya pola investasi yang memberi manfaat sosial yang besar.	adanya oertumbuhan investasi 4,24 pesen di tahun 2022	tercapai
	25. Meningkatkan akses menghubungkan kawasan budidaya perkebunan dengan jalur transportasi regional.	Penambahan biaya akibat kurangnya aksesjalan perkebunan	Harga jual hasil perkebunan ditingkat petani rendah karena akses yang buruk	Peningkatan harga akibat Peningkatan akses jalan	Tidak terdapat masalah harga jual akibat akses jalanarea perkebunan.	akses transportasi sudah banyak terbangun	tercapai
9	Berkembangnya budidaya sapi potong dengan strategi utama pengembangan integrasi kelapa sawit - sapi potong.						
	26. Memberdayakan petani peternak dalam budidaya sapi potong.	Jumlah sapi bertambah minimal 2 kali lipat	Jumlah sapi potong 25.773 ekor	Peningkatanjumlah sapi 2 kali lipat kondisi awal	Jumlah sapi mencapai lebih 50.000 ekor.	44.971 eko	belum tercapai



No.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target Tahun 2025 (Tahap IV2020-2025)	Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	Realisasi (Tahun 2022)	Tercapai/ tidak tercapai
	27. Mengembangkan dan melengkapi sarana pendukung sentra peternakan (pasar ternak, rumah potong hewan, puskesmas).	Ketersediaan sarana prasarana pendukung	Sudah terdapat pasar ternak, rumah potong hewan.	Optimalisasi pemanfaatan	Berfungsi optimalnya sarana pendukung sentra peternakan	sudah ada, namun perlu pembinaan lebih intensif	tercapai
10	Berkembangnya kegiatan pertambangan dan pengolahan hasil tambang yang berkelanjutan dan memberi manfaat yang besar untuk kesejahteraan masyarakat						
	28. Mengorientasikan kegiatan pertambangan yang memberi dampak besar kepada kesejahteraan masyarakat	Pendapatan pemerintah, nagari dan masyarakat	Belum optimalnya pertambangan yang terorganisir dan terkendali.	Eksplorasi dan kegiatan lanjut	Pertambangan yang memberi dampak besar bagi Pemda, nagari dan masyarakat	adanya penyerapan tenaga kerja lokal	tercapai
	29. Mengembangkan eksploitasi pertambangan yang ramah lingkungan.	Eksploitasi dengan teknologi ramah lingkungan	Penerapan belum optimal	Penerapan	Eksplorasi tambang yang ramah lingkungan	menjadi kewenangan pusat, namun kawasan bekas tambang sudah dilakukan reboisasi lahan	tidak tercapai
	30. Mengembangkan industri pengolahan hasil tambang.	Terbangunnya industri	Belum terbangun	Pembangunan	Berkembangnya industri pengolahan hasil tambang di Kabupaten.	tidak ada	tidak tercapai



No.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target Tahun 2025 (Tahap IV2020-2025)	Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	Realisasi (Tahun 2022)	Tercapai/ tidak tercapai
	31. Melakukan reklamasi lahan yang bermanfaat bagi masyarakat.	Luas lahan direklamasi	Belum berlangsung	Kegiatan reklamasi	Reklamasi lahan yang bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat.	menjaga kelestarian lingkungan dan habitat	tercapai
11	Berkembangnya usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM)						
	32. Percepatan peningkatan produksi dan pasar usaha skala mikro, kecil dan menengah prospektif.	Perkembangan produksi dan pasar	Kecenderungan perkembangan lambat	Peningkatan	Berkembangnya industri dan usaha skala mikro, kecil dan menengah prospektif	berkembang baik	tercapai
		industri dan usaha prospektif.					
Misi 3 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan							
12	Terjaganya kelestarian kawasan hutan berfungsi lindung di Kabupaten Dharmasraya						
	33. Mengembangkan kegiatan usaha pemanfaatan nilai ekonomi hutan kayu dan non kayu secara lestari bagi penduduk sekitar.	Tutupan vegetasi hutan pada kawasan hutan berfungsi lindung seluas 17.368 Ha (5,74%).	Tutupan hutan dengan vegetasi primer 7.290 Ha.	Reboisasi dan pemanfaatan hasil hutan	Terwujudnya kawasan hutan berfungsi lindung dengan tutupan vegetasi yang dapat dimanfaatkan hasil hutannya secara lestari.	bukan kewenangan kabupaten	(tidak dapat dievaluasi)
	34. Pengembangan industri hasil hutan.	Berkembangnya produksi dan pengolahan hasil	Masih pada tahap pengembangan awal	Pengembangan	Berkembangnya produksi dan pengolahan hasil hutan kayu dan non kayu pada kawasan hutan	bukan kewenangan kabupaten	(tidak dapat dievaluasi)



No.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target Tahun 2025 (Tahap IV2020-2025)	Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	Realisasi (Tahun 2022)	Tercapai/ tidak tercapai
		hutan kayu dan non kayu					
13	Terkendalnya pemanfaatan lahan budidaya sesuai aturan tata ruang						
	35. Menjaga kualitas dan debit airsungai Batanghari	Terjaganya kualitas dan debit sungai Batanghari	Indikasi pencemaran sungai Batanghari	Terkendalnya kegiatan pertambangan	Air sungai Batanghari tidak mengandung bahan berbahaya bagi lingkungan dan debit terjaga.	bukan kewenangan kabupaten	tidak tercapai
	36. Minimalnyakerawanan bencana longsor dan erosi lahan.	Tingkat kerawanan bencana longsor/erosi lahan	Masih adanya kawasan rawan longsor/erosi lahan	Terkendalnya perijinan dan pengawasan budidaya sesuai karakteristik lahan	Minimalnya kerawanan bencana longsor/erosi lahan	tidak adanya bencana tanah longsor dan erosi	tercapai
	37. Mengarahkan kegiatan budidaya pertanian dan eksploitasi pertambangan sesuai dengan rencana zonasi/tata ruang.	Kesesuaian dengan rencana zonasi/tata ruang	Masih terdapat eksploitasi tidak sesuai zonasi/tata ruang	Efektifnya pengawasan dan penindakan	Eksplorasi pertambangan sesuai dengan peraturan zonasi/tata ruang		tercapai
Misi 4 : Memberdayakan nagari dankelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi							
14	Berkembangnya fungsi sosial-budaya dan sosial-ekonomi nagari						
	38. Memperkuat fungsi nagari sebagai pelaku kegiatan sosial-budaya.	Fungsi sosial-budaya nagari	Fungsi terbatas	Berkembangnya fungsi sosial budaya sebagian besar nagari	Nagari berfungsi sebagai unit sosial-budaya	sesuai penilaian IDM	tercapai



No.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target Tahun 2025 (Tahap IV2020-2025)	Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	Realisasi (Tahun 2022)	Tercapai/ tidak tercapai
15	Meningkatnya kemandirian ekonomi terkait pengelolaan usaha, distribusi barang, pengolahan hasil, dan pemasaran						
	39. Mengembangkan fungsi nagari sebagai pelaku sosial-ekonomi.	Fungsi sosial ekonomi- nagari	Fungsi terbatas	Berkembangnya fungsi sosial ekonomi sebagian besar nagari	Nagari berfungsi sebagai unit sosial-ekonomi	sesuai penilaian IDM	tercapai
		Jumlah lembaga pengelola kegiatan ekonomi (distribusi, pengolahan, jasa)	Terbatas	Meningkatnya jumlah lembaga pengelola ekonomi	Pengelolaan ekonomi lebih mandiri tidak banyak bergantung kepada pelaku ekonomi luar.		tercapai
	40. Memberdayakan berbagai lembaga pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat.	Peran kelembagaan ekonomi oleh kelompok masyarakat	Terbatas	Meningkatnya peran kelompok masyarakat	Meningkatnya peran kelompok masyarakat dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.		tercapai
Misi 5 : Menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang mampu mendorong perkembangan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar kawasan.							
16	Tersedianya pusat perdagangan dan jasa untuk pelayanan internal daerah serta menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai orientasi perdagangan dan jasa di wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya						



No.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target Tahun 2025 (Tahap IV 2020-2025)	Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	Realisasi (Tahun 2022)	Tercapai/ tidak tercapai
	41. Revitalisasi pasar-pasar nagari sebagai tempat pemenuhan kebutuhan harian penduduk yang nyaman.	Kelengkapan fisik pasar	Terdapat 28 pasar nagari	Perbaikan dan peningkatan 5-10 pasar	Tersedianya pasar nagari yang nyaman dan sehat sebagai orientasi penduduk kawasan.	terdapat 48,63 pasar yang sudah direvitalisasi	tercapai
	42. Pengembangan pasar tematik untuk mendukung fungsi Kabupaten Dharmasraya sebagai sentra produksi perkebunan, peternakan, dan perikanan.	Kelengkapan fisik dan pasar kelembagaan	Telah terbangun pasar ternak dan pasar lelang sawit	Pembangunan dan penataan kelembagaan	Berkembangnya pasar pendukung produksi perkebunan, peternakan, dan perikanan yang menguntungkan petani dan peternak (berupa pasar lelang agro hasil perkebunan, pasar agropolitan ternak, dan pasar minapolitan)	adanya pasar ternak,	tercapai
	43. Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung, dan kawasan perkotaan yang berprospek berkembang dimasa depan seperti Padang Laweh serta rest area pada koridor Jalan Lintas Sumatera.	Orientasi perdagangan regional	Pasar masih bersifat lokal dengan jenis barang sekunder terbatas dan kebutuhan sehari-hari	Pengembangan pusat perdagangan regional baru	Orientasi perdagangan regional wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat sekitarnya ke pusat perdagangan dan jasa Kabupaten Dharmasraya.	belum adanya pusat perdagangan baru	belum tercapai
17	Terpenuhinya sarana prasarana fisik untuk mengentaskan kawasan tertinggal						
	44. Menyediakan sarana prasarana nagari tertinggal	Nagari tertinggal dan terpencil secara fisik	31 nagari tertinggal dan 16 nagari terpencil	Pembangunan sarana dan prasarana fisik 5-10	Terentaskannya nagari tertinggal dan terpencil	di tahun 2023 tidak ada lagi nagari tertinggal	tercapai



No.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target Tahun 2025 (Tahap IV2020-2025)	Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	Realisasi (Tahun 2022)	Tercapai/ tidak tercapai
				nagari tertinggal dan sangat terpencil	dalam aspek ketersediaan sarana prasarana.		
18	Berkembangnya kawasan dan objek wisata dan rekreasi dan tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) serba guna						
	45. Membangun kawasan terpadu wisata alam-budaya serta taman rekreasi bertema (theme park).	Berkembangnya kawasan	Belum ada fokus pengembangan	Pengembangan kawasan	Berkembangnya:	adanya destinasi wisata baru	tercapai
					- kawasan cagar dan objek budaya.		
					- taman rekreasi bertema.		
	46. Mengembangkan objek wisata dan rekreasi kawasan prioritas.	Terpenuhinya kebutuhan rekreasi penduduk	Objek wisata dan rekreasi yang telah ramai dimanfaatkan Batu Bakawik dan Danau Cinta.	Pengembangan objek wisata dan rekreasi pada kaw. prioritas	Berkembangnya Ruang Terbuka Hijau Rekreatif pada setiap klaster kawasan.		belum tercapai
	47. Membangun RTH serbaguna pada tingkatan kabupaten, kecamatan dan nagari (untuk kegiatan olahraga dan kegiatan sosial).	Sarana olahraga tingkat multifungsi tingkat kabupaten, kecamatan, dan nagari	Belum tersedia	Pembangunan tingkat kecamatan dan nagari	Tersedianya pelayanan aktifitas olah raga dan sosial masyarakat.	adanya GOR Koto baru	tercapai
19	Terpenuhinya kebutuhan prasarana energi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi lingkungan						



No.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target Tahun 2025 (Tahap IV2020-2025)	Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	Realisasi (Tahun 2022)	Tercapai/ tidak tercapai
	permukiman sesuai dengan standar pelayanan minimal						
	48. Meningkatkan akses pelayanan listrik di seluruh kabupaten dengan alternatif peluang memanfaatkan energi baru dan terbarukan (seperti mikrohidro dan tenaga surya).	Akses pelayanan listrik	Rasio elektrifikasi 89,89%	Meningkat (100%)	Rasio elektrifikasi 100%		tercapai
	49. Meningkatkan akses terhadap sumber air minum di perkotaan dan perdesaan minimal mencapai standar MDGs.	Pelayanan air minum dan	Proporsi pelayanan air minum perpipaan baru 0,67%.	Meningkatmencapai rata-rata Sumbar	Mencapai rata-rata Sumatera Barat 2011 yaitu15,95%.	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum sudah mencapai88,22 persen	tercapai
		Akses sumber air minum layak.	Akses sumber air minum layak: perkotaan 49,18%;perdesaan 55,75%		Mencapai standar MDGs akses air minum layak perkotaan 75,29% dan perdesaan 65,81%.	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum sudah mencapai88,22 persen	tercapai
	50. Terlayannya air bersih perpipaan terutama pada kawasan cepat tumbuh (Pulau Punjung – Sitiung – Kotobaru dan Sungai Rumbai).	Daerah terlayani	Masih sedikit terlayani	Meningkatnya pelayanan kawasan cepat tumbuh	Terlayannya air bersih perpipaan terutama pada kawasan cepat tumbuh (Pulau Punjung – Sitiung – Kotobaru dan Sungai Rumbai)		tercapai



No.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target Tahun 2025 (Tahap IV2020-2025)	Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	Realisasi (Tahun 2022)	Tercapai/ tidak tercapai
	51. Menuju Kabupaten Dharmasraya sehat lingkungan dengan meningkatkan pelayanan sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman.	Jumlah RT dengan sanitasi layak.	- Ketersediaan SPAL tinja tertinggi kedua di kabupaten Sumatera Barat (57,42%)tetapi dengan proporsi pembuangan lubang tanah tertinggi di Sumatera Barat (20%).	Meningkatnyapelayanan sanitasi perkotaan mencapai standar MDGs	Mencapai standar MDGs akses sanitasi perkotaan minimal 76,82% dan perdesaan 55,55%.	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum sudah mencapai88,22 persen	tercapai
		Kelengkapan prasarana sanitasi	- Belum tersedia IPLT dan IPAL	Pembangunan dan operasionalisasi sarana sanitasi	Tersedianya sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).	sudah tersedia IPLT dan IPAL	tercapai
		Kasus penyakit akibat sanitasi buruk	Penderita diare tercatat 5.021 tahun 2010.	Jarangnya kasus penderita	Sedikitnya kasus penyakit akibat sanitasi buruk		tercapai
		Daerah Pelayanan persampahan	Pelayanan terbatas pada beberapa kawasan.	Terlayannya persampahan pusat pertumbuhan kabupaten	Terlayannya persampahan kawasan komersial dan pelayanan umum di wilayah bagian utara dan selatan kabupaten.		tercapai
	52. Mengurangi keberadaan lingkungan permukiman dan perumahan kumuh dan tidak layak huni.	Luas kawasan permukiman kumuh dan perumahan tidak layak huni	Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh dan perumahan tidak layak huni	Berkurang	Berkurangnya kawasan permukiman kumuh dan perumahan tidak layak huni		tercapai
20	Tersedianya dukungan prasarana sumber daya air pendukung kegiatan produktif						



No.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target Tahun 2025 (Tahap IV2020-2025)	Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	Realisasi (Tahun 2022)	Tercapai/ tidak tercapai
	53. Membangun Prasarana Pengairan	Luas pelayanan irigasi	Luas sawah beririgasi teknis 5.155 Ha (55,56%); setengah teknis 1.421 Ha (15,32%); irigasi lainnya 2.702 Ha (29,13%)	Meningkatnya luas sawah untuk mencapai target 5.000 Ha	Pengembangan sawah irigasi dalam D.I. Batanghari telah direncanakan dalam jangka menengah seluas 1.715 Ha dan dalam jangka panjang 5.000 Ha.		belum tercapai
	- pengembangan jaringan irigasi dalam D.I. Batanghari dan D.I. Kabupaten.						
	- Mengembangkan manajemen air irigasi yang handal.						
21	Tingginya tingkat keterjangkauan (aksesibilitas) antar kawasan di daerah						
	54. Membangun jaringan transportasi antar kawasan.	Terbentuknya struktur jaringan transportasi	Masih perlu dibentuknya struktur jaringan transportasi sesuai dengan rencana tata ruang	Meningkatnya pembangunan jaringan transportasi penghubung antar kawasan	Terbangunnya:		tercapai
	- Mengembangkan akses menuju pusat-pusat kegiatan pelayanan dan kawasan pertanian.				- akses jalan lingkaran utara dan selatan Kabupaten Dharma Raya serta ruas jalan lingkaran Sungai Batanghari		tercapai



No.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target Tahun 2025 (Tahap IV2020-2025)	Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	Realisasi (Tahun 2022)	Tercapai/ tidak tercapai
	- Membangun prasarana terminal pada pusat perdagangan.				- Akses menuju pusat-pusat kegiatan pelayanan.		tercapai
	- Mengembangkan moda transportasi sungaiBatanghari sebagai bagian atraksi wisata alam dan budaya.				- Akses dari dan menuju kawasan pertanian.		tercapai
	- mengkaji lebih lanjut peluang alternatif moda transportasi udara dan sungai.				- Prasarana terminal pada pusat perdagangan.		tercapai
					- Moda transportasi sungaiBatanghari sebagai bagian atraksi wisata alam dan budaya.		tercapai
					Mengkaji lebih lanjut peluang alternatif moda transportasi udara dan sungai.		tercapai
22	Terjalannya konektivitas wilayah Kabupaten Dharma Raya dengan kabupaten sekitarnya dan dengan pusat kegiatan ekonomikoridor Pulau Sumatera						



No.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target Tahun 2025 (Tahap IV2020-2025)	Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	Realisasi (Tahun 2022)	Tercapai/ tidak tercapai
	55. Membangun jaringan transportasi antar wilayah untuk akses ekonomi menuju koridor timur Pulau Sumatera dan kabupaten berbatasan.	Keterkaitan akses	Belum terbentuknya struktur jaringan jalan menghubungkan kabupaten berbatasan dan kawasan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera.	Pembangunan jaringan jalan lingkar dan akses menuju kabupaten berbatasan	- Akses menghubungkan kabupaten Dharmasraya dengan kawasan pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera sebagai sentra pengembangan perkebunan dan lumbung energi (batu bara).	adanya akses menuju sentra-sentra ekonomi	tercapai
					- Mengembangkan akses jalan lingkar utara dan selatan Kabupaten Dharmasraya menghubungkan pusat-pusat kegiatan wilayah dan mengurangi beban jalan Lintas Sumatera.	adanya perbaikan dan pemeliharaan jalan lintas suatera	
					- Mengembangkan akses menuju wilayah Kabupaten yang berbatasan (Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Sijunjung; Kabupaten Tebo; Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Bungo)	terbangunnya jalan Dharmasraya-Solok Selatan	
Misi 6 : Menegakkan kehidupan beragama dan beradat sebagai normasosial dan semangat membangunserta melestarikan identitas daerah.							
23	Tetap berperannya adat dan tradisiserta lestarnya identitas daerah						



No.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target Tahun 2025 (Tahap IV2020-2025)	Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	Realisasi (Tahun 2022)	Tercapai/ tidak tercapai
	56. Memperkuat peran adat dalam pengelolaan tanah ulayat dan peri kehidupan masyarakat.	Kasus sengketa tanah ulayat	Kecenderungan bergesernya pengelolaan tanah ulayat dan potensi konfliknya dimasa depan dan berkurangnya peran fungsional rumah gadang dan ninik mamak.	Berkurangnya kasus sengketa tanah ulayat dan berfungsinya rumah gadang sebagai pusat organisasi sosial	Berperannya norma dan kelembagaan adat dalam pengelolaan tanah ulayat dan adat		tercapai
					Berfungsinya rumah gadang sebagai pusat organisasi sosial		tercapai
		Berfungsinya rumah gadang sebagai pusat organisasi sosial					
	57. Melestarikan situs budaya dan pemanfaatannya sebagai objek wisata.	Pelestarian kawasan dan situs cagar budaya		Pemeliharaan dan Pengembangan kawasan dan situs	Terwujudnya kawasan cagar budaya dan pelestarian situs budaya.		tercapai
24	Mewujudkan kehidupan yang religius						
	58. Mengembangkan kegiatan keagamaan di sekolah dan nagari.	Pengembangan kegiatan keagamaan	Program kegiatan masih terbatas	Peningkatan kegiatan dengan target sekolah dan nagari	Berkembangnya kegiatan keagamaan di sekolah dan nagari	cukup berkembangnya aktivitas keagamaan, diantaranya gerakan subuh berjamaah, dan majlis taklim	tercapai



No.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target Tahun 2025 (Tahap IV2020-2025)	Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	Realisasi (Tahun 2022)	Tercapai/ tidak tercapai
	Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pembangunan yang andal dan maju serta melibatkan semua potensi peran kelembagaan daerah yang mampu membangun manfaat yang besar, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan.						
25	Terbangunnya sistem perencanaan prioritas pembangunan daerah yang baku dan konsisten						
	59. Menyusun dan menyelenggarakan standar prosedur dan metodabakusebagai pedoman penentuan prioritas pembangunan	Perbandingan antara program prioritas diusulkan nagaridan penganggaran	Usulan program prioritas nagari belum baku disaring dalam prosedur penganggaran	Pelaksanaan secara konsisten	Terpadunya perencanaanpembangunan dan penganggaran pembangunan	SIPD terintegrasi perencanaan dan penganggaran	tercapai
26	Tersedianya sistem informasi pengelolaan pembangunan daerahdaerah yang akurat untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan						
	60. Membangun basis data dan informasi pembangunan nagari.	Data dan informasi nagariyang akurat dan relevan untuk perencanaan	Basis data dan informasi dinagari masih sangat kurang	Peningkatan kelengkapan data dan informasi	Tersedianya informasi pembangunan daerah berbasis nagari yang akurat dan relevan untuk dasar penyelenggaraan pembangunan		tercapai



No.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target Tahun 2025 (Tahap IV2020-2025)	Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	Realisasi (Tahun 2022)	Tercapai/ tidak tercapai
	61. Membangun sistem informasi pembangunan kabupaten berbasis teknologi informasi.	Penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data berbasis teknologi informasi	Data dan informasi belum terkoordinasi pada satu satuan kerja	Pemantapan sistem informasi	Berjalannya sistem informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi	Dharma Raya sudah menggunakan SIPD	tercapai
27	Berkembangnya investasi pembangunan berbasis kemandirian daerah						
	62. Membangun pola investasi usaha yang melibatkan potensi pengelolaan dan pembiayaan yang ada di daerah	Pola investasi yang mendukung kemandirian ekonomi	Pola umum investasi skala besar hanya oleh swasta	Berkembangnya investasi dengan modal daerah/masyarakat	Berkembangnya pola investasi yang melibatkan berbagai potensi sumber daya daerah/masyarakat.		tercapai
28	Terbangunnya mekanisme pengendalian tata ruang yang efektif						
	63. Mengefektifkan aspek perijinan, pengawasan dan sanksi dalam pengendalian tata ruang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman, alih fungsi lahan sawah dan kawasan hutan, serta lokasi kegiatan pertambangan.	Penyimpangan pemanfaatan ruang	Masih terdapat penyimpangan pemanfaatan ruang	Berkurangnya kasus penyimpangan	Efektifnya aspek pengendalian tata ruang (perijinan, pengawasan dan sanksi).		tercapai



2.6. TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1. Proyeksi Kependudukan

A. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Tabel 2.29 dan tabel 2.30.

Tabel 2- 35 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya

Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
239.920	248.110	268.020	287.200	303.347	317.246

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Data BPS Kabupaten Dharmasraya

Proyeksi penduduk Kabupaten Dharmasraya didasarkan pada data BPS yang terdapat dalam buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat 2020-235 dan berpedoman pada skenario moderat yaitu pertumbuhan penduduk tahun 2021 - 2025 yaitu 1,8% akan mengalami penurunan 5 tahun berikutnya 2026 – 2030 menjadi 1,6%, 5 tahun berikutnya 2031 – 2035 yaitu 1,3%, 5 tahun berikutnya 2036 – 2040 yaitu 1,1% dan 5 tahun berikutnya dari tahun 2041 – 2045 menjadi 0,9% sehingga diperkirakan penduduk Kabupaten Dharmasraya mencapai 317.246 jiwa pada tahun 2045. Dengan demikian diperkirakan pertambahan jumlah penduduk dari tahun 2023 sampai tahun 2045 sebanyak lebih kurang 77.326 jiwa atau bertambah sekitar 32,23%.

Tabel 2- 36 Proyeksi Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 - 2045

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	2021	231.590
2	2022	235.780
1	2023	239.920
2	2024	244.030
3	2025	248.110
4	2026	252.150
5	2027	256.170
6	2028	260.150
7	2029	264.100
8	2030	268.020
9	2031	271.900
10	2032	275.750
11	2033	279.600
12	2034	283.420
13	2035	287.200
14	2036	290.359
15	2037	293.553
16	2038	296.782
17	2039	300.047



No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)
18	2040	303.347
19	2041	306.077
20	2042	308.832
21	2043	311.612
22	2044	314.416
23	2045	317.246

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Tahun 2023

Jumlah penduduk tahun 2021 sampai tahun 2035 merupakan data dari Proyeksi Penduduk Kabupaten Kota yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Sumatera Barat. Proyeksi penduduk tahun 2036 hingga 2045 dilakukan dengan meneruskan kecenderungan penurunan pertumbuhan sebelumnya, yaitu 2036-2040 pertumbuhan penduduk 1,1% dan 2041-2045 pertumbuhan penduduk 0,9%.

Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Dharmasraya

Proyeksi penduduk Kabupaten Dharmasraya didasarkan pada data Dukcapil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 yang memuat data penduduk tahun 2018-2022 (tabel 2-159) menjadi dasar untuk proyeksi sampai tahun 2045. Sama dengan proses proyeksi pada data BPS, yang berpedoman pada data terakhir Dukcapil tahun 2022 maka digunakan skenario moderat pertumbuhan penduduk tahun 2021 - 2025 yaitu 1,8% akan mengalami penurunan 5 tahun berikutnya 2025 – 2030 menjadi 1,6%, 5 tahun berikutnya 2031 – 2035 yaitu 1,3%, 5 tahun berikutnya 2036 – 2040 yaitu 1,1% dan 5 tahun berikutnya dari tahun 2041 – 2045 menjadi 0,9% sehingga diperkirakan penduduk Kabupaten Dharmasraya mencapai 307.913 jiwa pada tahun 2045. Dengan demikian diperkirakan pertambahan jumlah penduduk dari tahun 2023 sampai tahun 2045 sebanyak lebih kurang 74.994 jiwa atau bertambah sekitar 32,20%. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan data dari Dinas Dukcapil dapat dilihat pada tabel 2.31 dan Tabel 2.32..

Tabel 2- 37 Jumlah Penduduk berdasarkan Data Dinas Dukcapil

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sungai Rumbai	20.022	20.487	21.650	22.591	22.720
2	Koto Besar	24.254	24.404	26.373	27.387	27.457
3	Asam Jujuhan	7.092	9.285	7.787	8.295	8.493
4	Koto Baru	28.637	29.331	30.269	32.208	32.729
5	Koto Salak	16.669	16.747	17.217	17.729	17.771
6	Tiumang	10.597	11.217	12.813	13.193	13.295
7	Padang Laweh	8.124	8.207	6.003	6.335	6.472
8	Sitiung	26.038	26.511	27.107	28.139	28.523
9	Timpeh	14.532	15.359	16.293	17.252	17.457
10	Pulau Punjung	39.909	39.167	41.953	43.993	44.559
11	Sembilan Koto	12.807	13.577	8.737	9.143	9.325
Jumlah		208.681	214.292	216.202	226.265	228.801
Pertumbuhan		1,16	2,69	0,89	4,65	1,12

Sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2023



Tabel 2- 38 Proyeksi Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 - 2045 berdasarkan Data Dukcapil

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	2021	226.265
2	2022	228.801
3	2023	232.919
4	2024	237.112
5	2025	241.380
6	2026	245.242
7	2027	249.166
8	2028	253.153
9	2029	257.203
10	2030	261.318
11	2031	264.715
13	2032	268.157
14	2033	271.643
15	2034	275.174
16	2035	278.751
17	2036	281.818
18	2037	284.918
19	2038	288.052
20	2039	291.220
21	2040	294.424
22	2041	297.074
23	2042	299.747
24	2043	302.445
25	2044	305.167
26	2045	307.913

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Tahun 2024

B. Distribusi Penduduk

1. Sebaran Penduduk dimasa Depan berdasarkan Data BPS

Sebaran penduduk Kabupaten Dharmasraya diperkirakan masih paling banyak pada Kecamatan Pulau Punjung, Koto Baru, Sitiung dan Koto Besar. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2-33.

Tabel 2- 39 Perkiraan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya sampai Tahun 2045

No	Kecamatan	Tahun					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Koto Baru	33.924	35.082	37.897	40.609	42.892	44.857
2	Pulau Punjung	47.814	49.447	53.415	57.237	60.455	63.225
3	Sungai Rumbai	23.692	24.501	26.467	28.361	29.956	31.328
4	Sitiung	29.794	30.811	33.283	35.665	37.670	39.396
5	Sembilan Koto	9.886	10.223	11.043	11.834	12.499	13.072
6	Timpeh	17.821	18.430	19.909	21.333	22.533	23.565



No	Kecamatan	Tahun					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
7	Koto Salak	18.417	19.046	20.574	22.046	23.286	24.353
8	Tiumang	13.776	14.246	15.389	16.490	17.418	18.216
9	Padang Laweh	6.783	7.015	7.577	8.120	8.576	8.969
10	Asam Jujuhan	9.796	10.131	10.944	11.727	12.386	12.954
11	Koto Besar	28.217	29.180	31.521	33.777	35.676	37.311
Jumlah		239.920	248.110	268.020	287.200	303.347	317.246

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Tahun 2024

Perhitungan dilakukan dengan menganggap proporsi penduduk setiap kecamatan sama dengan proporsi tahun 2022.

2. Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan berdasarkan Data BPS

Gejala meningkatnya penduduk perkotaan di perkiraan juga akan terjadi di Kabupaten Dharmasraya. Kawasan perkotaan akan semakin meluas. Urbanisasi yang akan terjadi karena faktor migrasi dan juga disebabkan tingginya perubahan fungsi kawasan menjadi kawasan perkotaan di sepanjang jalur utama (Lintas Tengah). Kawasan-kawasan perkotaan tersebut diperkirakan akan menjadi pusat pelayanan jasa utama dimasa yang akan datang. Kecamatan yang diperkirakan mengalami proses urbanisasi tinggi adalah Sungai Rumbai, Koto Baru, Sitiung dan Pulau Punjung. Namun 20 tahun ke depan diperkirakan nagari yang masih bersifat perdesaan saat ini sebahagian akan menjadi nagari yang bersifat perkotaan terutama pada ibukota kecamatan. Saat ini (2022), jumlah penduduk perkotaan kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel 2-34.

Tabel 2- 40 Jumlah Penduduk Perkotaan Tahun 2022 Berdasarkan Data BPS

No	Kecamatan	Perkotaan	Jumlah Penduduk tahun 2022
1	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai (seluruh nagari)	23.284
2	Koto Besar	Koto Gadang	5.514
		Koto Tinggi	3.519
		Koto Laweh	3.701
		Koto Ranah	5.458
3	Sitiung	Nagari Sitiung	8.137
4	Pulau Punjung	Nagari IV Koto P. Punjung	9.930
		Nagari Sungai Dareh	8.590
		Nagari Sungai Kambut	9.537
		Nagari Gunung Selasih	4.507
		Nagari Sikabau	9.796
Jumlah			91.973

Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya dalam Angka Tahun 2023

Pada tabel 2-34 terlihat proporsi penduduk perkotaan di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2022 sekitar 39,19% dari jumlah total penduduk kabupaten. Proporsi penduduk perkotaan ini untuk wilayah kabupaten dengan basis ekonomi sumberdaya alam akan bertambah, tetapi tidak sebanyak yang berada di wilayah kota administrasi, sehingga diperkirakan proporsi penduduk perkotaan Dharmasraya tahun 2045 sebanyak 45% dari total penduduk. Dengan proporsi tersebut penduduk perkotaan Kabupaten Dharmasraya cukup besar, meskipun tidak berbeda jauh dengan proporsi penduduk kabupaten lainnya secara nasional sehingga sistem perkotaannya perlu ditata untuk mengantisipasi gejala urbanisasi dan pelayanan perkotaan.



Tabel 2- 41 Jumlah Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Dharmasraya

Tahun	Penduduk Perkotaan		Penduduk Perdesaan		Jumlah Penduduk
	Jumlah (jiwa)	Proporsi (%)	Jumlah (jiwa)	Proporsi (%)	
2022	91.973	39,19	145.895	60,81	239.920
2025	101.725	41	146.385	59	248.110
2030	112.568	42	155.452	58	268.020
2035	123.496	43	163.704	57	287.200
2040	133.473	44	169.874	56	303.347
2045	142.761	45	174.485	55	317.246

Sumber :Hasil Analisis.Bapperida Tahun 2024

3. Sebaran Penduduk dimasa Depan Berdasarkan Data Dukcapil

Sebaran penduduk berdasarkan proyeksi data Dukcapil dapat dilihat pada tabel 2-36

Tabel 2- 42 Perkiraan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya sampai Tahun 2045 Berdasarkan Data Dukcapil

No	Kecamatan	Tahun					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Koto Baru	32.934	34.130	36.949	39.414	41.630	43.538
2	Pulau Punjung	46.419	48.105	52.079	55.553	58.677	61.365
3	Sungai Rumbai	23.001	23.837	25.806	27.527	29.075	30.407
4	Sitiung	28.924	29.975	32.451	34.616	36.562	38.237
5	Sembilan Koto	9.597	9.946	10.767	11.486	12.131	12.687
6	Timpeh	17.301	17.930	19.411	20.706	21.870	22.872
7	Koto Salak	17.880	18.529	20.060	21.398	22.601	23.636
8	Tiumang	13.374	13.860	15.004	16.005	16.905	17.680
9	Padang Laweh	6.585	6.824	7.388	7.881	8.324	8.705
10	Asam Jujuhan	9.511	9.856	10.670	11.382	12.022	12.573
11	Koto Besar	27.393	28.388	30.733	32.783	34.627	36.213
Jumlah		232.919	241.380	261.318	278.751	294.424	307.913

Sumber :Hasil Analisis.Bapperida Tahun 2024

C. Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2023 sebesar 121.680 jiwa atau 50,71% dan jumlah penduduk perempuan sebesar 118.250 atau 49,29%, sehingga rasio jenis kelamin Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 sebesar 103. Angka rasio jenis kelamin Kabupaten Dharmasraya diperkirakan hingga tahun 2045 terus menurun, sehingga pada tahun 2045 diproyeksikan rasio jenis kelamin sebesar 101 dimana persentase penduduk laki-laki 50,29% dan persentase penduduk perempuan sebesar 49,71% (seperti terlihat pada Tabel 2.37).

Tabel 2- 43 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki- Laki	121.680	125.600	134.900	143.720	152.585	159.558
Perempuan	118.250	122.550	133.120	143.490	150.762	157.688
Rasio	103	102	101	100	101	101

Sumber :Hasil Analisis.Bapperida Tahun 2024

D. Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

Proyeksi penduduk Kabupaten Dharmasraya berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel

Tabel 2- 44 Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 – 14 Tahun	62.330	63.200	66.260	68.910	69.770	72.967
15 – 64 Tahun	164.890	170.690	182.870	193.840	203.242	212.555
>65 Tahun	12.710	14.260	18.890	24.460	30.335	31.725
Angka Ketergantungan	46	45	47	48	49	49

Sumber :Hasil Analisis.Bapperida Tahun 2024

Penduduk Usia Produktif

Berdasarkan data pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya menurut kelompok umur diketahui bahwa kelompok umur terbanyak berada pada usia rata-rata penduduk adalah 0 - 4 tahun dengan jumlah terbanyak yakni 21.660 jiwa atau 9,03% dari total seluruh penduduk. Penduduk yang tergolong usia produktif yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah 164.890 jiwa atau 68,72% dari total penduduk, sedangkan yang tergolong ke dalam usia tidak produktif yaitu dengan jumlah 75.040 jiwa atau 31,28% dari jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya proyeksi jumlah penduduk usia produktif dapat dilihat pada tabel 2-166 pada baris kelompok umur 15 – 64 tahun.

Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Angka ketergantungan penduduk pada tahun 2023 yaitu sebesar 46 dan diproyeksikan akan mengalami peningkatan pada tahun 2045 yaitu sebesar 49.

Penduduk Usia Tua

Penduduk usia tua atau penduduk yang berusia 65 tahun keatas pada tahun 2023 sebesar 12.710 jiwa atau 5,3% dari jumlah penduduk keseluruhan. Pada tahun 2045 diproyeksikan penduduk usia tua sebesar 31.725 jiwa atau 10% dari jumlah penduduk.

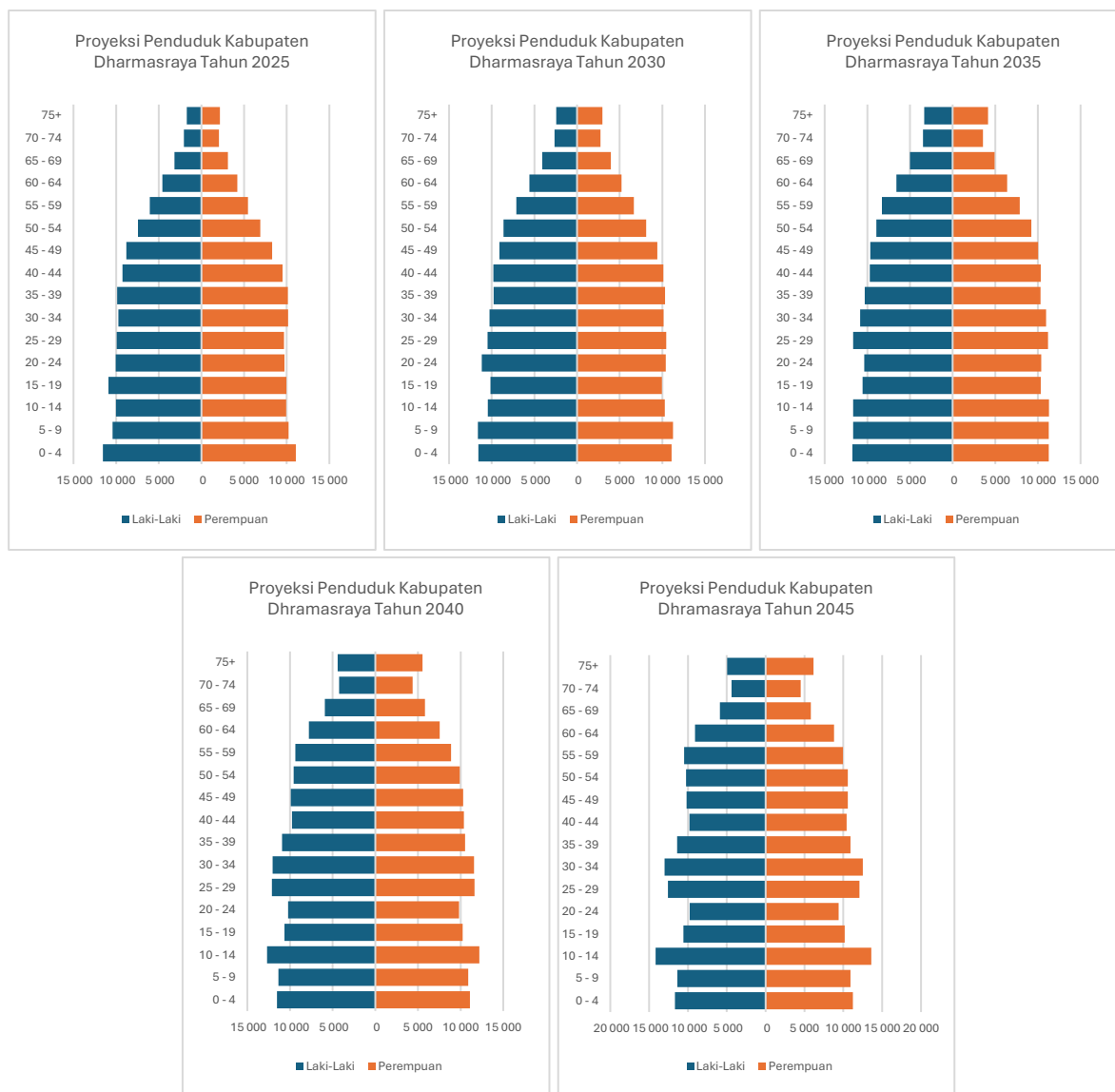
Bonus Demografi

Bonus demografi terjadi pada saat 100 orang usia angkatan kerja hanya menanggung kurang dari 50 orang yang tidak bekerja, yaitu anak-anak dan orang tua, maka dimulailah periode bonus demografi tersebut. Jika dilihat dari proyeksi penduduk Kabupaten Dharmasraya dan kondisi saat ini bonus demografi telah terjadi (2023) dan akan berlanjut sampai tahun rencana 2045, dimana angka ketergantungan kurang dari 50 (tabel 2-166).

Selanjutnya, akan terjadi jendela peluang (*window of opportunity*), yaitu kondisi ketika angka ketergantungan berada pada tingkat terendah, yaitu 44 per 100 pekerja, yang diperkirakan akan terjadi di Indonesia selama 10 tahun mulai dari 2020. Penurunan rasio ini disebabkan oleh menurunnya jumlah anak yang dimiliki oleh keluarga di Indonesia. Hal ini membuat beban yang ditanggung penduduk usia produktif

makin sedikit. Namun Kabupaten Dharmasraya sepertinya tidak mengalami *window opportunity* disebabkan angka ketergantungan terendah dicapai pada angka 45. Untuk lebih jelasnya Proyeksi Piramida Penduduk Tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045 dapat dilihat pada Gambar 2.51.

Gambar 2- 56 Proyeksi Piramida Penduduk Tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045



2.6.2. Proyeksi Sarana dan Prasarana

A. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal dan Permukiman

Pada dasarnya sebaran kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu permukiman yang tumbuh tanpa perencanaan atau permukiman yang tidak teratur dan permukiman yang telah direncanakan atau permukiman yang teratur. Permukiman yang tumbuh tidak teratur telah berkembang lama seiring dengan perkembangan kota. Kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya terdistribusi secara merata di kecamatan-kecamatan yang ada, dengan tingkat kepadatan yang bervariasi. Untuk kepadatan tinggi sebagian besar berada di kawasan pusat kota, sedangkan permukiman dengan kepadatan sedang hingga rendah letaknya menyebar dan berada jauh dari pusat kota. Sejalan dengan perkembangan penduduk, maka sarana perumahan yang ada diperlukan penambahan dan pengaturan baik dari kondisi fisik maupun penyebaran dan tata letaknya.

Berdasarkan data Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya. Jumlah rumah yang ada di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 sebanyak 58.695 unit. Dalam menghitung tingkat kebutuhan rumah sampai tahun 2025 menggunakan asumsi bahwa tiap keluarga terdiri dari 4 jiwa membutuhkan 1 unit rumah, maka pada masa yang akan datang berdasarkan proyeksi penduduk sampai tahun 2045, diperkirakan jumlah rumah yang dibutuhkan adalah sebanyak 76.978 unit rumah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2-39** di bawah ini.

Tabel 2- 45 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Dharmasraya Sampai Tahun 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	239.920	248.110	268.020	287.200	303.347	317.246
Proyeksi Kebutuhan Rumah	58.695	60,345	65,330	69,688	73,606	76,978

Sumber : Dinas Dukcapil, Dinas Perkimtan dan Hasil Analisis Bapperida 2024

B. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Proyeksi kebutuhan air minum di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2- 46 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Dharmasraya Sampai Tahun 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	239.920	248.110	268.020	287.200	303.347	317.246
Proyeksi Kebutuhan Air Minum						

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Tahun 2024

Pelayanan air minum di Kabupaten Dharmasraya oleh UPT SPAM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya yaitu unit Koto Baru dan unit Pulau Punjung. Sumber air minum yang dikelola oleh UPT SPAM ini bersumber dari Batang Siat untuk unit Koto Baru dan Batang Deli dan Batang Mimpis untuk unit Pulau Punjung. Sementara itu kebutuhan air minum, khususnya bagi masyarakat perdesaan dilayani juga oleh pasokan air minum yang dibangun melalui Program PAMSIMAS.

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air minum, maka perlu dilakukan pengembangan jaringan baik jaringan perpipaan maupun non perpipaan. Sesuai dengan target SDG's tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak (100%). Saat ini Tingkat pelayanan air minum di Kabupaten Dharmasraya sebesar 58,84% yang terdiri dari jaringan perpipaan sebesar 22,64% dan jaringan bukan perpipaan sebesar 37,20%. Artinya masih terdapat sebesar 40,16% penduduk yang belum mendapatkan pelayanan air minum.

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa sampai tahun 2045, di Kabupaten Dharmasraya, kebutuhan air minum yaitu 548.85 liter/detik. Berdasarkan standar kebutuhan air minum, kapasitas air minum 1 liter/detik dapat melayani 1000 jiwa. Untuk lebih jelasnya perkiraan kebutuhan air bersih di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 2-41**.



Tabel 2- 47 Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Kabupaten Dharmasraya

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	239.920	248.110	268.020	287.200	303.347	317.246
Proyeksi Kebutuhan Air Minum						
Tingkat Sambungan Rumah (SR) %	22.64	35	45	55	65	75
Jumlah sambungan rumah	53,821	84,483	117,593	153,313	191,376	230,935
Saluran rumah						
- Tingkat Pelayanan (%)	59.84	70	100	100	100	100
	32,206	59,138	117,593	153,313	191,376	230,935
- Jumlah sambungan Rumah (SR)	6,441	11,828	23,519	30,663	38,275	46,187
- Asumsi Kebutuhan air (120 l/org/hari)	120	120	120	120	120	120
- Kebutuhan air (m3)	74.75	117.34	163.32	212.93	265.80	320.74
Hidran umum	5,382	8,448	11,759	15,331	19,138	23,093
- Tingkat layanan (300 Jiwa/HU)	17.94	28.16	39.20	51.10	63.79	76.98
Kebutuhan Domestik (l/det)	92.69	145.50	202.52	264.04	329.59	397.72
Keb. non Domestik (20% Keb.Domestik)	18.54	29.10	40.50	52.81	65.92	79.54
Keb.Domestik & Keb. non Domestik	111.23	174.60	243.03	316.85	395.51	477.27
Kebocoran (15%) l/det	16.68	26.19	36.45	47.53	59.33	71.59
Total Kebutuhan (l/det)	127.91	200.79	279.48	364.37	454.84	548.85

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dan Hasil Analisis Bapperida Tahun 2024

C. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Jaringan listrik di Kabupaten Dharmasraya dikelola oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Solok yang terdiri dari Ranting Sitiung dan Ranting Sungai Rumbai. Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) Provinsi Jambi - Provinsi Sumatera Barat, saluran udara tegangan tinggi (SUTT) PLTP Muaro Labuh – Sungai Rumbai yang melewati Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Koto Besar serta saluran udara tegangan arus searah (SUTTAS) Provinsi Jambi - Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Kabupaten Dharmasraya, yaitu :

1. Tahun 2018 Program listrik pedesaan (Lisdes), PLN menyambungkan jaringan listrik bagi 58 rumah dari total 60 rumah yang ada di Jorong Lubuk Labu Nagari Banai, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya (100% teraliri listrik)
2. Tahun 2019 Pembangunan Gardu Induk (GI) Sungai Rumbai oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Sumatera Barat Kapasitas 20 kV. Keberadaan GI ini dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap listrik di Kabupaten Dharmasraya dan sekitarnya
3. Program Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) di Bendungan Batanghari Batu Bakawik dengan Kapasitas 5 Megawatt (MW)

Pelayanan jaringan listrik belum menjangkau seluruh nagari. Sedangkan masyarakat yang belum mendapat pelayanan listrik merupakan masyarakat yang tinggal di permukiman yang jauh dari pusat-pusat permukiman dan ada juga karena kemampuan ekonomi masyarakat untuk membayar biaya pelayanan listrik. Untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat menggunakan energi listrik lainnya baik melalui jasa



penyediaan energi listrik swasta maupun secara individu berupa jenset. Untuk itu perlu perluasan jaringan listrik untuk melayani jorong-jorong yang belum mendapatkan pelayanan listrik.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi penduduk di wilayah ini, maka kebutuhan akan pelayanan listrik semakin meningkat. Pelayanan listrik saat ini belum maksimal. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan pelayanan melalui penambahan gardu induk dan kapasitas terpasang serta mengembangkan sumber energi alternatif. Dalam hal kemungkinan pemanfaatan sumberdaya air (mikro hidro), pemanfaatan energi ini selain lebih murah, juga dapat menjangkau tempat-tempat yang terpencil. Adapun kebutuhan jaringan Listrik di Kabupaten Dharmasraya sampai tahun 2045 dapat dilihat pada tabel 2.42 berikut:

Tabel 2- 48 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Dharmasraya

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	239.920	248.110	268.020	287.200	303.347	317.246
Jumlah Rumah	58695	60345	65329.5	69687.75	73606	76978.25
Proyeksi Kebutuhan Listrik (Kwh)	46356.18	47069.10	50957.01	54356.45	57412.68	60043.04

Sumber : Hasil Analisis Bapperida , Tahun 2024

D. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Secara umum pengelolaan persampahan saat ini di Kabupaten Dharmasraya dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melalui UPT Persampahan, dan juga masih ada yang dikelola secara individual. Sistem pengelolaan sampah saat ini yang dilakukan oleh UPT Persampahan melayani Kawasan permukiman pusat kota yaitu

Pengelolaan sampah secara individual yaitu dengan cara dibakar, ditimbun dan dibuang ke lahan-lahan kosong yang ada di sekitar pekarangan, bahkan ada yang membuang ke sungai. Sedangkan untuk sampah pasar dikelola oleh pengelola pasar. Untuk lebih jelasnya Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.43

Tabel 2- 49 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Dharmasraya

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	239.920	248.110	268.020	287.200	303.347	317.246
Proyeksi Timbulan Sampah l/org/hari	2344.68	2380.73	2577.38	2749.32	2878.14	3036.95
- Domestik (3 l/org/hari)	1953.90	1983.95	2147.82	2291.10	2419.92	2530.79
- Non Domestik (0.6 l/org/hari)	390.78	396.79	429.56	458.22	458.22	506.16

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Tahun 2024



E. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:81/MENKES/SK/II/2004 tentang pedoman penyusunan perencanaan sumber daya manusia kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten/kota serta rumah sakit terdapat beberapa model puskesmas, yaitu :

1. Model Puskesmas di Daerah Terpencil/daerah penduduk jarang dan kegiatan rendah.
2. Model Puskesmas Pedesaan : puskesmas terletak dalam kecamatan dengan penduduk 20.000 jiwa dengan output puskesmas 35.000 jiwa per tahun.
3. Model puskesmas di daerah perkotaan dengan penduduk padat, dengan output puskesmas per tahun 60.000.
4. Model puskesmas perawatan yang jauh hubungan daratnya dengan RSU terdekat.
5. Model puskesmas perawatan di daerah Kepulauan dengan sarana perhubungan laut yang sulit.
6. Model puskesmas perawatan di daerah strategis.

Dari 6 model puskesmas di atas, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan Kabupaten Dharmasraya membutuhkan jenis puskesmas puskesmas perawatan dan perawatan di daerah strategis. Semenatra analisis yang dilakukan menggunakan SNI 03-1733-2004, kebutuhan sarana keehatan sampai tahun 2045 dapat dilihat pada tabel 2.44 berikut:

Tabel 2- 50 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Sampai Tahun 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	239.920	248.110	268.020	287.200	303.347	317.246
Fasilitas Kesehatan						
- Rumah Sakit	2	2	2	2	2	3
- Puskesmas	15	10	11	12	12	13
- Puskesmas Pembantu	43	15	16	17	18	19
- Apotek	41	8	9	9	10	10
- Toko Obat	15	8	9	9	10	10
- Praktek Dokter	161	48	52	56	59	62

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dan Hasil Analisis Bapperida Tahun 2024

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, bahwa 1 kecamatan harus memiliki 1 puskesmas. Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas.

F. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Jenis dan jumlah sarana pendidikan yang ada saat ini di Kabupaten Dharmasraya meliputi sekolah PAUD (TK, RA dan Kelompok Belajar), Sekolah Dasar (SD/MI), SMP/MTS dan SMA/MA. TK dan SD merupakan pelayanan pendidikan skala lingkungan. Sebaiknyapada setiap RW atau jorong berdiri sebuah sekolah PAUD (pendidikan anak usia Dini) sesuai yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.Sedangkan untuk pendidikan Tingkat SD/MI harus tersedia pada setiap penduduk yang berjumlah 2.000 jiwa. Jarak tempuh maksimum dengan jalan kaki adalah 3 km dengan lintasan yang tidak membahayakan (Permen Pendidikan Nasional No 24 Tahun 2007).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana, jika dalam satu SMP/MTS memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24

rombongan belajar untuk melayani maksimum 2000 jiwa maka 1 kecamatan minimum dilayani oleh 1 SMP/MTS atau jika permukimannya terpecah dengan banyak penduduk >1000 jiwa dilayani oleh satu SMP/MTS dalam jarak tempuh peserta didik berjalan kaki maksimum 6 Km. Dalam hal ini ditemui di Kabupaten Dharmasraya permukiman-permukiman yang tersebar yang memerlukan tambahan SMP/MTS walaupun sudah ada satu SMP/MTS di kecamatan yang terlingkup di Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan jarak maksimum jalan kaki 6 Km, maka diperlukan penambahan SMP/MTS di setiap kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana, jika dalam satu SMA/MA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar untuk melayani maksimum 6000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar yang telah ada atau penambahan SMA/MA baru.

Sarana pelayanan yang merupakan skala wilayah yaitu sarana SMP/MTS dan SMA/MA. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan standar kebutuhan dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Tahun 1987 dan SNI 03-1733-2004, kebutuhan SMP/MTS sampai tahun 2045 dan SMA/MA masing-masing 64 unit. Untuk perguruan tinggi saat ini sudah ada 3 Perguruan Tinggi (PT) di Kabupaten Dharmasraya yaitu Universitas Andalas Kampus III, Universitas Dharmas Indonesia dan STITNU Sakinah Dharmasraya. Dari hasil analisis diperoleh bahwa sampai tahun 2045 membutuhkan 4 perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya proyeksi kebutuhan sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel 2-45 berikut:

Tabel 2- 51 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Sampai Tahun 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	239.920	248.110	268.020	287.200	303.347	317.246
Fasilitas Pendidikan						
- PAUD (TK/RA dan KB)	306	241	261	279	294	308
- SD/ MI	177	151	163	174	184	192
- SMP/ MTs	58	50	54	58	61	64
- SMA/ MA/ SMK	40	50	54	58	61	64
- Perguruan Tinggi	3	3	4	4	4	4

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, Kemenag Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, dan Hasil Analisis Bapperida Tahun 2024

2.7. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tahun 2023-2043, Kabupaten Dharmasraya memiliki tiga pusat kegiatan perkotaan yaitu: Kawasan Perkotaan Pulau Punjung, Kawasan Pusat Pelayanan Kegiatan Masyarakat di Kawasan Gunung Medan, dan Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai. Selain pengembangan sentra kegiatan perkotaan, terdapat juga beberapa sentra pengembangan kegiatan perdesaan pertanian, pariwisata dan industri.

Dari berbagai sentra kegiatan tersebut, dalam RTRW Kabupaten Dharmasraya ditetapkan beberapa kawasan pengembangan, yaitu: a) Kawasan Ibukota Kabupaten Pulau Punjung, b) Kawasan Koridor

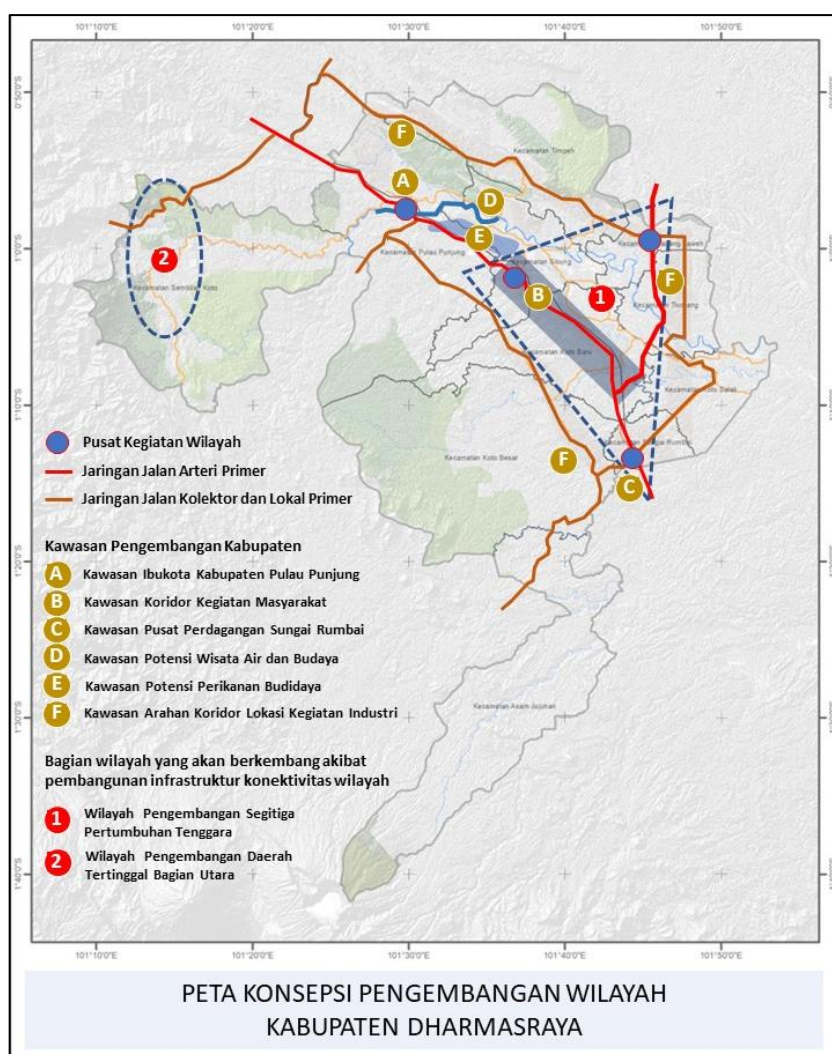
Kegiatan Masyarakat, c) Kawasan Pusat Perdagangan Sungai Rumbai, d) Kawasan Potensi Wisata Air dan budaya, e) Kawasan Potensi Perikanan Budidaya, dan f) Kawasan Koridor Lokasi Kegiatan Industri.

Wilayah bagian utara dan tenggara Kabupaten Dharmasraya akan berkembang dimasa depan dengan adanya pembangunan konektivitas wilayah. Pembangunan dua wilayah ini didorong oleh:

- Pembangunan jalan feeder tol Dharmasraya – Rengat di wilayah bagian selatan. Konektivitas baru ini akan meningkatkan posisi Kabupaten Dharmasraya sebagai simpul konektivitas wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat di bagian tenggara yang akan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi dan pelayanan di beberapa kecamatan wilayah tenggara kabupaten sebagai wilayah segitiga pertumbuhan tenggara. Perkembangan wilayah ini akan mendorong perkembangan kawasan perkotaan Padang Laweh. Dalam segitiga pertumbuhan tenggara terdapat tiga pusat kegiatan yaitu: Pusat Pelayanan Kegiatan Masyarakat di Kawasan Gunung Medan, Pusat Perkotaan Sungai Rumbai, dan Pusat perkotaan Padang Laweh.
- Pembangunan jalan kolektor primer Alahan Panjang – Kiliran Jao. Jalan yang melewati Kecamatan Sembilan Koto ini akan membuka keterisoliran wilayah dan membuka peluang berkembangnya kegiatan ekonomi di Kecamatan Sembilan Koto.

Konsepsi pengembangan pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada gambar 2.52 berikut ini.

Gambar 2- 57 Peta Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Dharmasraya





2.7.1. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten

A. Sistem Jaringan Transportasi

Posisi Kabupaten Dharmasraya akan menjadi penting dalam lingkup wilayah Sumatera Bagian Tengah dengan akan dibangunnya feeder tol Dharmasraya – Rengat. Konektivitas ini akan menjadi penghubung antara Jalan Lintas Tengah dengan Lintas Timur Sumatera. Integrasi wilayah semakin kuat dengan semakin terjalinnya konektivitas dengan kabupaten tetangga seperti Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Di wilayah Kabupaten Dharmasraya sendiri telah direncanakan dan ruas jalan utama kabupaten seperti: Ruas Jalan Lingkar Utara dan Lingkar Selatan Kabupaten Dharmasraya, Ruas Jalan Lingkar Sungai Batanghari dan Ruas Jalan penghubung antar Pusat - Pusat Kegiatan Kabupaten. Untuk meningkatkan akses penghubung Sungai Batanghari telah direncanakan juga beberapa jembatan.

Untuk sektor transportasi, di Kabupaten Dharmasraya direncanakan pembangunan terminal tipe A di Sungai Rumbai sebagai kawasan strategis perbatasan Provinsi Sumatera Barat selain terminal tipe B di kawasan Pulau Punjung. Dimasa depan direncanakan juga pengembangan Bandara Udara pengumpan yang rencana lokasinya di Kecamatan Koto Besar (atau Kecamatan lain yang sesuai dengan kajian lebih lanjut). Demikian juga kemungkinan di masa depan peluang perkembangan kabupaten karena akan dilewati oleh rencana jalur kereta api Padang Tarok – Lubuk Linggau.

B. Sistem Jaringan Energi

Rencana sistem jaringan prasarana energi di kabupaten yaitu pembangunan sistem jaringan transmisi antar wilayah, pembangunan jaringan distribusi menuju kecamatan yang belum terlayani dan memanfaatkan sumber pembangkit energi alternatif untuk mendukung kesinambungan pasokan listrik.

Rencana pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan tersebut meliputi pembangunan: (a) pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), (b) Jaringan transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) Provinsi Jambi - Provinsi Sumatera Barat, (c) saluran udara tegangan tinggi (SUTT) PLTP Muaro Labuh – Sungai Rumbai, (d) saluran udara tegangan arus searah (SUTTAS) Provinsi Jambi - Provinsi Sumatera Barat, dan (e) pengembangan gardu listrik GITET Sungai Rumbai.

C. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi di kabupaten yaitu pengembangan jaringan telekomunikasi selular melalui: (a) pembangunan tower BTS bersama baru pada wilayah yang belum mendapatkan pelayanan jaringan telekomunikasi (*Blank Spot Area*) dan (b) pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel fiber optic terutama untuk pelayanan pusat kegiatan utama kabupaten. Dalam jangka panjang perlu diarahkan penggunaan layanan telekomunikasi teknologi nirkabel yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya

D. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air dengan mengembangkan sistem jaringan irigasi dan membangun sistem pengendalian banjir.

Rencana pengembangan sistem jaringan irigasi untuk perluasan dan peningkatan produktifitas tanaman pangan lahan basah yaitu: (a) peningkatan pengairan jaringan irigasi primer pada Daerah Irigasi (DI) Batanghari, (b) pengembangan jaringan irigasi kabupaten untuk mendukung ekstensifikasi lahan persawahan, (c) peningkatan jaringan irigasi kabupaten pada Daerah Irigasi (DI) yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, dan (d) pemeliharaan dan peningkatan jumlah embung di beberapa kecamatan

Pengendalian Banjir dilakukan dengan: (a) normalisasi sungai, peninggian parapet/talut/tanggul, mengembangkan pompa air pencegah banjir di kecamatan yang rawan banjir, (b) konservasi kawasan sempadan sungai besar dan sungai kecil serta kawasan tangkapan air, dan (c) penertiban PETI.

E. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Penyediaan air minum (SPAM) meliputi jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Rencana peningkatan pelayanan air bersih kawasan perkotaan di Kabupaten Dharmasraya meliputi: peningkatan SPAM Sitiung menjadi 40 l/dt untuk melayani Gunung Medan dan Sungai Duo, peningkatan SPAM Koto Baru menjadi 10 lt/dt untuk melayani kawasan Koto Baru, peningkatan SPAM Koto Agung melayani Sitiung Blok B., pembangunan SPAM Padang Laweh dengan sumber Batang Timpeh dengan kapasitas 20 l/dt untuk pelayanan kawasan Padang Laweh, pembangunan SPAM Sungai Rumbai dengan sumber Sungai Betung untuk pelayanan kawasan Sungai Rumbai dan pengembangan SPAM pedesaan di Kecamatan Timpeh, Kec.Tiumang, Kec.Koto Salak, Kec.Koto Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto.

2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Rencana pengembangan instalasi pengolahan limbah di Kabupaten Dharmasraya yaitu pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kecamatan Sitiung didukung peningkatan sarana pendukung armada truk tinja.

3. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Rencana pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan limbah industri, limbah medis, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kecamatan Sitiung.

4. Sistem Jaringan Persampahan

Rencana pengelolaan persampahan terdiri dari: (a) mengembangkan tiga zona pelayanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yaitu: bagian utara di Kecamatan Sitiung, bagian selatan di Kecamatan Koto Baru dan bagian selatan di Kecamatan Timpeh, (b) Pengembangan pelayanan persampahan pada pusat kegiatan lingkungan kecamatan yang belum terlayani dengan pelayanan akses dasar dan TPA reduksi, dan (c) Mengembangkan Tempat Pengelolaan Sampah dengan metoda reuse, reduce, recycle (TPS3R) atau 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, and Replant) di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru, dan Kecamatan Sungai Rumbai.

5. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Rencana kesiapan daerah menghadapi bencana meliputi: (a) penyediaan jalur evakuasi bencana meliputi: Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Tiumang; dan Kecamatan Koto Salak, (b) Penyediaan tempat evakuasi bencana di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh; dan, Kecamatan Koto Besar, dan (c) membangun kesiapan Sistem Mitigasi Bencana.

2.7.2. Pengembangan Sarana Permukiman

A. Rencana Pengembangan Sarana Pendidikan

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat SMP/MTS sebanyak 46 unit dan SMU/MA sebanyak 22 Unit. Kecamatan yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan SMA/MA yaitu Asam Jujuhan, Tiumang, Padang Laweh, dan Sembilan Koto yang perlu diprioritaskan penyediaannya. Kendala yang dihadapi adalah tersebarnya penduduk pada area yang luas sehingga jarak menjadi kendala utama pelayanan. Untuk lebih jelasnya Perkiraan Jumlah Sarana Pendidikan Pelayanan Skala Wilayah Menurut Kecamatan Sampai Tahun 2043 dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2- 52 Perkiraan Jumlah Sarana Pendidikan Pelayanan Skala Wilayah Menurut Kecamatan Sampai Tahun 2043

No	Kecamatan	SLTP/Sederajat				SLTA/Sederajat			
		SLTP	MTs	Jumlah (eksisting)	Tambahan (2043)	SLTA	MA	Jumlah	Tambahan (2043)
1	Sungai Rumbai	2	1	3	1	1	-	1	4
2	Koto Besar	3	1	4	1	1	-	1	5
3	Asam Jujuhan	1	-	1	1	-	-	-	2
4	Koto Baru	4	4	8	1	-	3	3	4
5	Koto Salak	2	-	2	2	2	-	2	2
6	Tiumang	1	1	2	1	-	-	-	3
7	Padang Laweh	1	-	1	2	-	-	-	1
8	Sitiung	3	4	7	1	1	4	5	2
9	Timpeh	4	1	5	1	1	1	2	2
10	Pulau Punjung	7	3	10	1	2	2	4	6
11	Sembilan Koto	3	-	3	1	-	-	-	2
Jumlah		31	15	46	13	12	10	22	33

Sumber tabel: RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043

Prioritas pengembangan sarana pendidikan SLTP/ sederajat yaitu menambah sekolah mengikuti kebutuhan pertambahan penduduk dalam jarak pelayanan. Prioritas penyediaan SLTA/ sederajat yaitu pada kecamatan yang belum memilikinya seperti di Kecamatan Asam Jujuhan, Tiumang, Padang Laweh, dan Sembilan Koto. Di kawasan bagian utara Kecamatan Timpeh perlu disediakan sarana SLTA mengingat jauhnya akses menuju SLTA di Tabek Payubarangan.

B. Pengembangan Sarana Kesehatan

RSUD di Pulau Punjung menjadi pusat pelayanan kesehatan kabupaten, tetapi karena jarak yang cukup jauh maka Rumah Sakit Tipe D Sungai Rumbai menjadi pusat pelayanan kesehatan wilayah di



bagian selatan Kabupaten Dharmasraya. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan diperkirakan akan dibutuhkan penambahan Puskesmas berdasarkan pertambahan penduduk yaitu di kecamatan Koto Baru, Koto Besar dan Sitiung. Selain itu dimasa depan diperkirakan dibutuhkan penambahan 1 Rumah Sakit lagi dengan meningkatkan status Puskesmas Perawatan berdasarkan pertimbangan radius pelayanan dengan kemungkinan lokasi di Kecamatan Koto Baru atau Kecamatan Padang Laweh (seperti terlihat pada Tabel 2.51).

Tabel 2- 53 Rencana Peningkatan Fasilitas Kesehatan (Penyesuaian dengan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2043 (Jiwa)	Jumlah eksisting (Puskesmas dan Rumah Sakit)	Rencana Peningkatan
1	Sungai Rumbai	31.070	1 RSUD tipe D	Pusat pelayanan kesehatan wilayah bagian selatan
2	Koto Besar	36.983	1 puskesmas non perawatan	Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas
3	Asam Jujuhan	12.831	1 puskesmas perawatan	Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas perawatan
4	Koto Baru	44.468	1 puskesmas perawatan	Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas perawatan/ Alternatif peningkatan menjadi RSUD
5	Koto Salak	24.121	1 puskesmas non perawatan	Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas
6	Tiumang	18.051	1 puskesmas non perawatan	Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas
7	Padang Laweh	8.900	1 puskesmas perawatan	Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas perawatan/ Alternatif peningkatan menjadi RSUD
8	Sitiung	39.059	3 puskesmas (2 perawatan dan 1 non perawatan)	Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas perawatan
9	Timpeh	23.366	1 puskesmas perawatan	Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas perawatan
10	Pulau Punjung	62.676	2 puskesmas (1 perawatan, 1 non perawatan) 1 RSUD	Peningkatan kualitas pelayanan RSUD
11	Sembilan Koto	12.957	1 puskesmas perawatan	Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas perawatan

Sumber: Penyesuaian dengan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

C. Pengembangan Sarana Olahraga dan Rekreasi

Rencana sarana olah raga dan rekreasi Kabupaten Dharmasraya berdasarkan hirarki pelayanan. Rencana tersebut yaitu (a) melengkapi sarana prasarana kompleks kegiatan olah raga kabupaten di Kecamatan Koto Baru, dan (b) membangun kawasan olah raga dan rekreasi sub wilayah dengan komponen stadion mini dan sarana olahraga outdoor dan gedung olah raga (GOR) di kecamatan Pulau Punjung, Sungai Rumbai, dan Padang Laweh, dan (c) membangun kawasan olah raga dan rekreasi tingkat kecamatan dengan komponen RTH dengan beberapa fasilitas olah raga outdoor di setiap ibukota kecamatan lainnya.



D. Pengembangan Sarana Perekonomian

a. Pasar

Distribusi prasarana pasar di Kabupaten Dharmasraya sudah tersebar di seluruh kecamatan yang ada, tetapi belum ada pasar yang representatif dan pasar wilayah. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas pasar melalui pembangunan sarana dan prasarana pasar sesuai dengan kelas pasar.

- 1) Pasar Kelas I sebagai pusat perdagangan dalam lingkup pelayanan Kabupaten Dharmasraya. Sarana perdagangan pasar kelas I sebanyak 4 unit yaitu Pasar Pulau Punjung, Pasar Sikabau, Pasar Koto Baru dan Pasar Sungai Rumbai. Pasar ini perlu dikembangkan menjadi pasar kabupaten yang representatif dengan peningkatan kualitas pasar.
- 2) Pasar kelas II sebagai pusat pelayanan perdagangan sub wilayah kabupaten yang melayani beberapa kecamatan di Sialang Gaung Koto Baru, Pasar Sitiung, Koto Agung Sitiung, dan Kurnia Koto Salak Sungai Rumbai. Perlu ditingkatkan kelengkapan sarana pendukung pasar seperti toilet, tempat sampah dan sarana parkir. Pasar perbatasan di Kecamatan Tiumbang direkomendasikan untuk diprioritaskan peningkatan kelasnya dari Pasar kelas III menjadi Pasar kelas II yang juga melayani wilayah pedesaan di provinsi tetangga.

Pasar kelas III melayani wilayah kecamatan (beberapa nagari). Prioritas pengembangan pasar adalah melengkapi ketersediaan sarana pasar.

b. Perbankan

Dari sebelas kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, baru enam kecamatan yang memiliki bank, yaitu Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Sungai Rumbai, Koto Besar, Koto Salak. Kecamatan Koto Baru memiliki bank paling banyak yaitu 10 unit. Dimasa depan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi perlu didorong pemerataan pelayanan perbankan di kecamatan lainnya.

E. Pengembangan Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Pelayanan pemerintahan mengingat faktor geografis wilayah yang luas bisa didekonsentrasi. Kabupaten Dharmasraya dengan kondisi bentangan yang memanjang juga telah melakukan hal yang sama. Pelayanan pemerintahan dan pelayanan umum selain di Ibukota Kabupaten Pulau Punjung juga dikonsentrasikan di Pusat Kegiatan Masyarakat di Kecamatan Sitiung untuk mendekatkan pelayanan kabupaten.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. PERMASALAHAN

Bab 3. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi berdasarkan capaian pembangunan daerah, serta memuat isu strategis yang akan mempengaruhi kebijakan jangka panjang daerah



Permasalahan pembangunan ditunjukkan oleh berbagai indikator pembangunan dan fenomena yang terungkap di daerah dalam berbagai aspek pembangunan seperti kesejahteraan penduduk, ekonomi, budaya dan lingkungan.

3.1.1. Kesehatan

Tingkat kesehatan penduduk khususnya ibu dan anak Kabupaten Dharmasraya cukup baik terlihat dari indikator Angka kematian bayi (AKB berdasarkan SP 2020: 18,3) berada pada ranking 4 dari 12 kabupaten di Sumbar, Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI 2023: 84,22 dengan 3 kasus kematian), dan Indeks prevalensi stunting (7,6) yang jauh dibawah rata-rata provinsi. Dengan kondisi seperti ini tetap perlu terus dilakukan prioritas program untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Angka keberhasilan pengobatan TBC Kabupaten Dharmasraya lebih tinggi dari rata-rata provinsi dan nasional sementara cakupan penemuan dan pengobatan TBC meskipun fluktuatif angkanya tetapi rata-rata masih lebih tinggi dari provinsi Sumbar.

Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk Dharmasraya relatif sama dengan UHH Provinsi Sumbar yang berada diatas rata-rata nasional menunjukkan tingkat kesehatan yang relatif tinggi.

Sementara masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu tingkat kelahiran di kabupaten yang tinggi dimana Angka TFR kabupaten (2,6) masih lebih tinggi dari rata-rata nasional (2,19). Hal ini menunjukkan bahwa program pengendalian kelahiran seperti Keluarga Berencana perlu mendapat prioritas untuk ditingkatkan.

3.1.2. Pendidikan

Meskipun PDRB perkapita dan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Dharmasraya lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sumbar akan tetapi angka IPM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 lebih rendah sebesar 73,87 (UHH SP.2020). Angka IPM Kabupaten yang lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat (75,64). Penurunan ini terjadi mulai pada

tahun 2016 dimana setelah sebelumnya lebih tinggi kemudian turun menjadi lebih rendah. Dengan mengamati komponen IPM yang terdiri dari pendapatan per kapita, Usia Harapan Hidup, lama sekolah dan tingkat buta huruf maka faktor penyebab utama nilai IPM Kabupaten Dharmasraya menjadi lebih rendah dari Provinsi yaitu angka rata-rata lama sekolah yang rendah.

Angka partisipasi dalam setiap jenjang pendidikan yang masih rendah menunjukkan permasalahan penting di sektor pendidikan. Masalah di sektor pendidikan ini terkait dengan masalah pemerataan akses pelayanan, kualitas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan dan jaminan keberlangsungan pendidikan bagi anak usia sekolah. Program pendidikan wajib belajar 13 tahun yang akan diterapkan menjadi tantangan untuk berhasil dijalankan di Kabupaten Dharmasraya.

3.1.3. Perlindungan Sosial

A. Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen untuk menghadirkan program perlindungan lintas sektoral terintegrasi dan berkesinambungan melalui penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2022 dengan indeks perlindungan anak sebesar 76,41. Angka ini lebih tinggi dari capaian provinsi (70,01) dan nasional (75,21). Kabupaten Dharmasraya telah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai KLA tingkat Madya, sehingga untuk tahun ini pemerintah setempat berupaya untuk mengoptimalkan peranan pemangku kepentingan yang ada untuk meningkatkan capaian menjadi KLA tingkat Nindya, dengan berbagai program seperti rumah ibadah ramah anak melalui masjid ramah anak.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada tingkat nagari atau desa sebagai sarana advokasi dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Salah satu hasilnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus yang dialami anak sebagai korban kekerasan kepada lembaga layanan perlindungan anak, tetapi kasus yang dilaporkan bersifat parsial dan masih banyak permasalahan terhadap anak yang terjadi tapi enggan dilaporkan. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan lagi advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak melalui gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat terutama pada tingkat nagari dengan melibatkan berbagai pihak.

B. Tingkat Kemiskinan

Kabupaten Dharmasraya cukup berhasil mengurangi tingkat kemiskinan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Dharmasraya lebih tinggi dari Sumbar sampai pertengahan periode 2000 tetapi kemudian berhasil berkurang menyamai tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat. Tingkat kemiskinan Sumbar jauh lebih rendah dari rata-rata nasional. Penurunan kemiskinan lebih lanjut akan menghadapi tantangan dalam mengentaskan kemiskinan pada kantong-kantong kemiskinan di kawasan relatif terisolir dan penduduk di sektor pertanian tuna lahan.

C. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditingkat nasional masih rendah dan cakupan Provinsi Sumatera Barat lebih rendah. Sementara cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Dharmasraya menunjukkan peningkatan yang tinggi tetapi masih

dbawah cakupan Provinsi Sumatera Barat. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan sosial ketenagakerjaan yaitu masih rendahnya komitmen sektor formal dan kondisi besarnya proporsi tenaga kerja non formal, sehingga perlu komitmen cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih luas.

D. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Saat ini pekerja disektor formal yang menyandang disabilitas sangat rendah. Hal ini dikarenakan daya serap dan kemauan para penyandang untuk memasuki sektor formal. Dimasa yang akan datang dibutuhkan sosialisasi dan keberpihakan berbagai pihak terutama yang bergerak disektor formal untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kapasitasnya.

E. Jaminan Lapangan Kerja yang layak

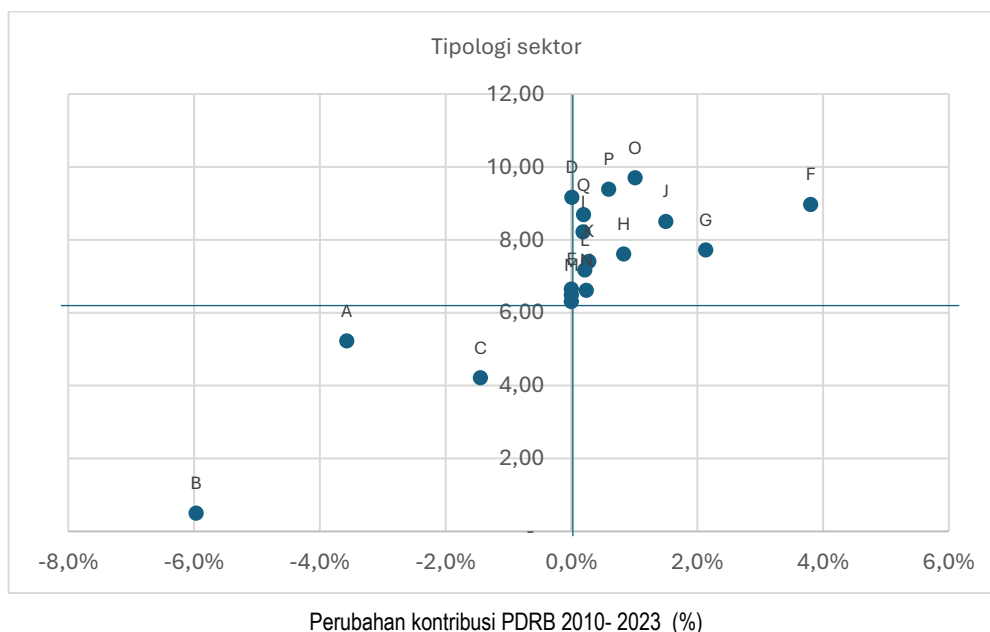
Perkembangan tingkat pengangguran Kabupaten Dharmasraya menunjukkan pola U. Tingkat pengangguran terbuka menurun dalam periode 2007-2014. Pada periode ini tingkat pengangguran Kabupaten Dharmasraya lebih rendah dari tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Ini terjadi pada era boom komoditi mulai tahun 2000-an. Akan tetapi sejak berakhirnya boom komoditi mulai pada tahun 2015, terlihat tingkat pengangguran terbuka secara konsisten meningkat kembali hampir menyamai tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Saat ini angka tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Dharmasraya masih berada pada angka 6,22% sehingga jaminan lapangan kerja yang layak di Kabupaten Dharmasraya masih menjadi tantangan pembangunan daerah serta perlu diatasi karena masih sedikitnya jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pada jangka panjang tingkat pengangguran ini harus ditekan seminimal mungkin.

3.1.4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Perkembangan sektor ekonomi Kabupaten Dharmasraya (berdasarkan harga berlaku) dapat dibagi atas dua tipe.

- Tipe 1: Sektor dengan pertumbuhan ekonomi rendah (dibawah rata-rata kabupaten) dengan kontribusi ekonomi berkurang. Terdapat tiga sektor tipe ini yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan.
- Tipe 2: Sektor dengan pertumbuhan ekonomi tinggi (diatas rata-rata kabupaten) dengan kontribusi ekonomi meningkat. Sektor yang termasuk tipe ini yaitu sektor selain ketiga sektor tipe 1.

Gambar 3- 1 Matriks Tipologi Sektor Berdasarkan Laju Pertumbuhan dan Perubahan Kontribusi PDRB tahun 2010-2023



Keterangan:

- | | |
|--|---|
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum |
| B. Pertambangan dan Penggalan | J. Informasi dan Komunikasi |
| C. Industri Pengolahan | K. Jasa Keuangan dan Asuransi |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | L. Real Estat |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | M. Jasa Perusahaan |
| F. Konstruksi | O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | P. Jasa Pendidikan |
| H. Transportasi dan Pergudangan | Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial |
| | R. Jasa lainnya |

Sumber : Analisis Bapperida Tahun 2024

Kontribusi sektor primer dalam PDRB (pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalan) yang menjadi sektor basis kabupaten selama 2010-2022 terus menurun. Kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan dari 31,1% menjadi 27,5% (-3,6%), dan sektor pertambangan dan penggalan sebesar -6,0%. Laju pertumbuhan kedua sektor tersebut masing-masingnya hanya 5,23% dan 0,50%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya yang selama ini bertumpu pada sektor primer dimasa depan akan mengalami perlambatan dimana sektor pertanian kontribusi dan pertumbuhannya akan melambat sementara sektor pertambangan dan penggalan stagnan dan akan menurun. Akibat tidak berkembangnya kegiatan lanjutan sektor pertanian menyebabkan tidak terserapnya tenaga kerja sektor formal maupun informal, sehingga perlu peningkatan kegiatan industri pengolahan berbasis pertanian agar terjadi penyerapan tenaga kerja secara formal dan informal.

Demikian juga sektor sekunder industri pengolahan yang menjadi salah satu ukuran keberhasilan daerah dalam melakukan transformasi ekonomi ternyata dalam periode yang sama juga mengalami penurunan kontribusi (-1,4%) dengan laju pertumbuhan lambat (4,22%). Sementara kontribusi sektor dengan kontribusi meningkat paling besar yaitu sektor konstruksi (3,8%) dan sektor perdagangan dan jasa (2,1%). Sektor-sektor jasa lainnya seperti administrasi pemerintahan dan pendidikan juga menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pertumbuhan sektor basis (pertanian, pertambangan dan industri) yang melambat dengan kontribusi PDRB berkurang menandakan bahwa dimasa depan Kabupaten Dharmasraya perlu berinovasi dan bertransformasi mengembangkan sumber daya alam komoditi pertanian dan industri hasil pertanian yang bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi. Perubahan ekonomi global dengan menurunnya permintaan hasil perkebunan sawit dan karet sangat berpengaruh terhadap Kabupaten Dharmasraya dengan basis ekonomi perkebunan. Dengan penurunan permintaan tersebut, kegiatan industri tidak berkembang. Ketidakpastian pasar dan harga internasional dari komoditi perkebunan menjadi masalah yang perlu diantisipasi di masa depan. Pengembangan sektor industri, diversifikasi komoditi hortikultura dan membangun ketahanan pangan lokal berdasarkan permintaan lokal menjadi alternatif solusi pembangunan ekonomi.

3.1.5. Penerapan ekonomi hijau

Ekonomi hijau memberi perhatian untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merugikan lingkungan serta memperbaiki kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kabupaten Dharmasraya dengan basis ekonomi perkebunan monokultur sawit menyebabkan kualitas lingkungan menjadi menurun karena karakteristik komoditi ini yang menurunkan kualitas hara dan mengurangi ketersediaan air serta mendorong banyaknya alihfungsi kawasan hutan. Demikian juga eksploitasi bahan tambang yang tidak terbarukan juga mengancam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dimasa depan, di diversifikasi komoditi dan mata pencaharian penduduk perlu dilakukan dengan mendorong perkembangan ekonomi hijau. Percepatan pembangunan di sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perikanan serta ekonomi kreatif menjadi alternatif untuk mewujudkan ekonomi hijau.

Perhatian perlu diberikan kepada sektor ekonomi kreatif. Rasio sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 hanya 0,69%, jauh dibawah rasio Provinsi Sumatera Barat 3,22%. Program percepatan pengembangan industri kecil seperti kriya dan kuliner pengolahan hasil pertanian dan pariwisata perlu diprioritaskan dimasa depan.

3.1.6. Transformasi digital

Transformasi digital membutuhkan sistem pengolahan informasi, infrastruktur teknologi (jaringan dan pusat data) dan sumberdaya manusia yang melek teknologi untuk mengoperasikannya. Kemampuan transformasi digital untuk mengkoordinasikan data pembangunan akan memudahkan kegiatan manajemen pemerintahan. Masalah transformasi digital menyangkut masalah penataan sistem manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi dan peningkatan literasi teknologi digital oleh masyarakat. Saat ini pelayanan teknologi digital di masyarakat baru meliputi 46,9% dari kebutuhan masyarakat. Ini artinya belum separoh dari kebutuhan masyarakat belum terpenuhi.

Masalah dalam penataan sistem manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi meliputi berbagai aspek seperti infrastruktur yang tidak merata, keterbatasan sumber daya manusia terampil, dan hambatan budaya terhadap perubahan. Konektivitas internet dan kurangnya akses teknologi menghambat implementasi. Pendanaan yang terbatas juga menjadi faktor penghambat dalam pengembangan sistem Teknologi Informasi. Kesenjangan literasi digital masih cukup tinggi. Masih banyak wilayah terpencil dan pedesaan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur digital seperti konektivitas internet yang buruk dan kurangnya akses terhadap perangkat teknologi, sehingga kedepannya tidak ada lagi daerah tidak mendapatkan sinyal di Kabupaten Dharmasraya.



Dengan konektivitas wilayah yang telah terbangun dan direncanakan dibangun, kabupaten Dharmasraya akan semakin terintegrasi dengan tujuh kabupaten yang berbatasan di wilayah Sumatera Bagian Tengah. Dalam lima sampai sepuluh tahun lagi diharapkan konektivitas wilayah akan semakin tinggi. Kabupaten Dharmasraya akan menjadi daerah lintasan antara wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur Pulau Sumatera.

Perkembangan integrasi konektivitas perlu diikuti dengan integrasi kegiatan ekonomi dengan wilayah sekitar. Dengan posisi strategisnya konektivitas yang semakin terjalin akan mendorong interaksi perekonomian regional. Pengembangan jalan regional yang menghubungkan antara pantai barat dan pantai timur Sumatera akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah. Integrasi wilayah ini tidak hanya akan mempercepat arus barang dan jasa, tetapi juga membuka peluang berkembangnya pasar, sarana pendukung pertanian, akses yang lebih luas bagi produk-produk lokal dan berkembangnya fasilitas pendidikan dan kesehatan skala regional. Kabupaten Dharmasraya perlu menyiapkan berbagai fasilitas pendukung perdagangan, pertanian serta pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala regional yang mengintegrasikan wilayah perbatasan.

3.1.7. Integrasi Pengembangan Wilayah

Perekonomian Kabupaten Dharmasraya yang berbasis pertanian dan perkebunan membutuhkan integrasi dengan wilayah sekitar (untuk penyediaan bahan baku) agar tercapai skala ekonomi dan membutuhkan jaringan transportasi untuk ekspor dalam lingkup regional. Saat ini bahan baku yang tersedia umumnya diolah diluar Kabupaten Dharmasraya (pertanian lahan basah) sehingga nilai tambah diperoleh oleh wilayah sekitar diluar Kabupaten Dharmasraya. Dimasa yang akan datang dibutuhkan pengintegrasian ekonomi mulai dari bahan baku sampai hilirisasi agar nilai tambah diperoleh oleh Kabupaten Dharmasraya dan sekaligus mendukung terjadinya ekonomi yang berintegrasi secara domestik dan regional secara bersamaan. Perkembangan ekonomi yang terintegrasi ini membutuhkan ruang dan sarana prasarana terkait dengan peningkatan kebutuhan akan permukiman yang merupakan kebutuhan lanjutan jika ekonomi berkembang. Salah satu kebutuhan lebih lanjut adalah berupa sarana dan prasarana hunian yang layak dan terjangkau.

Posisi Kabupaten Dharmasraya yang terletak di perbatasan provinsi yang dilewati jalan regional Lintas Tengah Sumatera menjadikan perannya penting bagi keamanan wilayah. Lalu lintas kriminalitas dan penyelundupan barang terlarang bisa dicegah pada pintu masuk wilayah seperti di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu karena posisi di perbatasan, daerah juga rawan untuk kegiatan kriminalitas antar daerah. Pencegahan kriminalitas dan penguatan koordinasi keamanan antar daerah dan antar instansi perlu ditingkatkan.

Posisi Kabupaten Dharmasraya yang terletak di jalur regional Lintas Tengah Sumatera menjadikan kabupaten bisa berperan penting bagi penanganan kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Rumah sakit di kabupaten masih kurang memadai untuk menangani korban kecelakaan berat. Peningkatan rumah sakit daerah menjadi rumah sakit rujukan untuk kecelakaan lalu lintas atau trauma center perlu diupayakan.

Dengan posisi strategis Kabupaten Dharmasraya yang berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi serta Kabupaten Solok, Solok Selatan serta Kabupaten Sijunjung maka posisi tersebut menjadi jalur lintas bagi demand pariwisata bagian selatan terutama Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga ceruk tersebut dapat dimanfaatkan Kabupaten Dharmasraya mengembangkan supply (atraksi) wisata sebelum menuju ke Solok dan Pesisir Selatan sebagai pusat pariwisata Sumatera Barat Bagian Selatan. Oleh sebab itu perlu didukung aksesibilitas yang tinggi menuju kawasan tersebut.



3.1.8. Perdesaan dan Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Beberapa nagari di Kabupaten Dharmasraya seperti Pulau Punjung, Sungai Rumbai, Sitiung dan Koto besar akan tumbuh menjadi kawasan perkotaan pusat pertumbuhan ekonomi. Kota-kota ini perlu dilengkapi dengan kawasan dan sarana prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa untuk mendukung investasi. Terbukanya akses regional pantai timur dan pantai barat melewati Kabupaten Dharmasraya membawa peluang ekonomi untuk menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pertumbuhan di tenggara Sumatera Barat.

Kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi membutuhkan fokus pada pengembangan komoditi unggulan sebagai penggerak pertumbuhan kawasan. Kabupaten Dharmasraya masih perlu menemukan dan mengembangkan potensi kawasan perdesaan dengan komoditi unggulan masing-masing selain sawit dan karet.

3.1.9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Prestasi Kabupaten Dharmasraya Sejak tahun 2015 selama 8 (delapan) kali berturut-turut menerima WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Nilai reformasi birokrasi Kabupaten Dharmasraya terus meningkat setiap tahun meskipun masih belum tinggi dengan kategori nilai CC. Pembinaan regulasi dan tata kelola pemerintahan masih perlu ditingkatkan.

Masalah dalam regulasi dan tata kelola pemerintahan daerah meliputi berbagai hal seperti tumpang tindih peraturan dan birokrasi yang kompleks yang mengakibatkan hambatan terhadap investasi dan perkembangan ekonomi daerah. Selain itu kurangnya kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi yang belum terintegrasi mengakibatkan inefisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Berbagai program dibutuhkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan seperti melakukan harmonisasi regulasi untuk memastikan konsistensi kebijakan dan meneruskan reformasi birokrasi untuk menyederhanakan struktur organisasi dan prosedur administratif. Kompetensi aparatur daerah perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan. Demikian juga pengembangan dan integrasi sistem informasi yang lebih baik akan meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik serta mendukung kebijakan publik yang tepat.

3.1.10. Hukum Berkeadilan dan Keamanan Daerah

Akses pelayanan hukum yang inklusif dibutuhkan untuk mewujudkan pemerataan keadilan oleh sebab itu dibutuhkan penyusunan produk hukum yang inklusif yang melibatkan semua stakeholders terutama kelompok masyarakat. Perlu diidentifikasi kebutuhan produk hukum terutama yang terkait dengan kewenangan daerah dan penilaian produk tersebut, apakah sudah mencerminkan keadilan atau belum. Dengan demikian keamanan daerah akibat dari produk hukum yang berkeadilan akan mudah dilakukan

3.1.11. Stabilitas Ekonomi Makro

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya pada 2000 – 2014 rata-rata lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Sumatera Barat. Hal ini dipicu oleh “comodity boom” perkebunan dan pertambangan. Akan tetapi dengan berakhirnya boom komoditi tersebut dan diiringi kemudian dengan merosotnya harga komoditi sawit, karet dan hasil tambang maka laju pertumbuhan ekonomi kabupaten kemudian menurun hampir menyamai pertumbuhan rata-rata Sumatera Barat dan nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya yang selama ini bergantung pada pertumbuhan sub sektor perkebunan khususnya komoditi sawit dan sub sektor pertambangan ini dimasa depan tidak bisa terlalu diharapkan banyak untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Era “comodity boom” perkebunan sudah berakhir dan sumberdaya pertambangan daerah akan berkurang dan habis. Untuk menghasilkan stabilitas ekonomi daerah, dimasa depan perlu dikembangkan komoditi pertanian berbasis permintaan lokal dan industri berbasis pertanian yang tahan terhadap guncangan fluktuasi ekonomi.

B. Ketimpangan Ekonomi

Mengatasi ketimpangan ekonomi yang melebar sangat penting untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebelum 2015, ketimpangan ekonomi Kabupaten Dharmasraya dengan indikator Indeks Gini tetap terjaga lebih rendah dari Nasional dan Sumbar. Sumberdaya lahan yang luas dan peluang ekonomi yang besar menjadikan kemakmuran bagi semua lapisan penduduk menjadi lebih merata. Akan tetapi terlihat bahwa sejak 2017 Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya mulai cenderung meningkat.

Ketimpangan akan menurun dengan terbuka luasnya peluang lapangan pekerjaan di sektor pertanian. Akan tetapi ketimpangan ekonomi juga berasal dari ketimpangan akses terhadap lahan. Indeks Gini yang meningkat menunjukkan juga distribusi penguasaan lahan yang semakin timpang dan peluang kerja yang sempit bagi sebagian penduduk perdesaan. Di masa depan pemerataan distribusi lahan pertanian dan membuka peluang akses pekerjaan bagi penduduk tuna lahan disektor pertanian dimana mereka dapat memanfaatkan lahan untuk budidaya pertanian akan menurunkan angka Indeks Gini dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

3.1.12. Kerjasama Antar Wilayah

Kerjasama antara wilayah dan instansi perlu dilakukan dalam penyediaan prasarana, konservasi kawasan dan situs bersejarah, pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Kerjasama antar wilayah tersebut meliputi pembangunan konektivitas jaringan jalan pada daerah berbatasan dan kerjasama pengembangan badan usaha ekonomi daerah dan nagari dengan lembaga ekonomi di daerah lain. Sementara kerjasama antar lembaga bisa dilakukan dengan menjalin kerjasama seperti pengelolaan dan penelitian kawasan dan situs bersejarah dengan lembaga pelestarian cagar budaya dan perguruan tinggi, pengembangan pendidikan tinggi dan vokasional dengan perguruan tinggi, dan kerjasama mensinergikan upaya pelestarian dan pengendalian kerusakan lingkungan serta kerjasama dan koordinasi pengelolaan DAS Batang Hari.

3.1.13. Beagama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kabupaten Dharmasraya meskipun dengan etnis yang heterogen memiliki basis adat dan agama yang menjadi modal sosial yang kuat untuk membangun. Akan tetapi beberapa masalah agama dan budaya perlu menjadi catatan untuk membangun kehidupan yang harmonis dimasa depan. Masalah perbedaan cara pandang dan pemahaman keagamaan kadang-kadang bisa memicu ketegangan sosial. Pemahaman keagamaan yang inklusif dan toleran dan adanya lembaga yang memayungi kehidupan keagamaan menjadi dasar bersama untuk mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis.

Generasi muda sangat rentan terhadap pergeseran nilai budaya yang didorong oleh teknologi informasi. Kurangnya ruang ekspresi dan sosialisasi menyebabkan mereka mudah terpengaruh oleh hal-hal yang memberi mudarat. Oleh karena itu dibutuhkan wadah ruang dan lembaga untuk memperkuat identitas, menanamkan nilai dan berekspresi bagi mereka.



Kabupaten Dharmasraya memiliki akar historis budaya dimana namanya diambil dari Kerajaan Dharmasraya yang pernah jaya setelah kerajaan Sriwijaya runtuh dimana Dharmasraya menjadi kerajaan terbesar di Sumatera. Identitas budaya ini menjadi aset budaya yang perlu dilestarikan dan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Berbagai kegiatan konservasi dan festival berdasarkan jejak historis masa lalu perlu diteruskan dan ditambah.

3.1.14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

Indeks ketimpangan gender menurun di Kabupaten Dharmasraya selama 3 tahun terakhir, namun masih tinggi jika dibanding dengan rata-rata Sumatera Barat. Akar penyebab ketidaksetaraan gender adalah bias gender dan norma-norma sosial yang membatasi hak dan peluang perempuan, serta pola pikir keunggulan komparatif antara laki-laki dan perempuan. Bias gender mempengaruhi terjadinya kesenjangan gender dan ketidaksetaraan gender di berbagai bidang seperti pendidikan, pasar tenaga kerja dan akses keuangan. Oleh karena itu dibutuhkan program kesetaraan gender yang meliputi program penguatan gender dan budaya.

Akan tetapi kalau dilihat dari TPAK perempuan tahun 2023, kinerja Kabupaten Dharmasraya (60,02%) lebih baik dari rata-rata Provinsi Sumatera Barat (56,94%) dan nasional (54,42%). Artinya TPAK kabupaten sudah cukup baik, akan tetapi kalau dilihat dari perspektif kesetaraan gender, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih perlu ditingkatkan.

3.1.15. Lingkungan Hidup Berkualitas

Nilai Indeks kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya rendah diukur dari variabel kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan. Hal ini menandakan bahwa dibutuhkan pengendalian dalam pembangunan yang bisa merusak lingkungan hidup. Menjaga kualitas lingkungan dilakukan dengan mengendalikan permasalahan yang ditimbulkan oleh:

- a) perubahan fungsi hutan untuk kegiatan pertanian,
- b) pemanfaatan sempadan sungai untuk kegiatan pertambangan yang tidak terkendali, dan kegiatan
- c) pertambangan yang tidak mematuhi kaidah pemanfaatan dan restorasi, dan
- d) Masih lemahnya kelembagaan dan aturan pengendalian tambang liar yang mencemari tanah dan sungai.

Meskipun luas kawasan hutan Kabupaten Dharmasraya tercatat 88.582 Ha (30,32% dari luas wilayah) akan tetapi luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya hanya 58,757 Ha (20,11%). Luas tutupan hutan yang sempit ini menjadi masalah lingkungan hidup yang penting untuk diperhatikan dimasa depan karena berdampak luas terhadap kualitas lingkungan keseluruhan. Alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan perlu dikendalikan dengan ketat. Sementara pemulihan kawasan hutan perlu dilakukan secara bertahap. Langkah yang perlu dilakukan adalah mempertahankan hutan yang ada dengan cara pemanfaatan hasil hutan non kayu sehingga mencegah pengurangan tutupan lahan dan erosi sehingga tidak terjadi kekritisian lahan dan hutan menjadi lestari..

Luas tutupan hutan yang sempit ini menjadi masalah lingkungan hidup yang penting untuk diperhatikan dimasa depan karena berdampak luas terhadap kualitas lingkungan keseluruhan. Alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan perlu dikendalikan dengan ketat. Sementara pemulihan kawasan hutan perlu dilakukan secara bertahap. Langkah yang perlu dilakukan adalah mempertahankan hutan yang ada



dengan cara pemanfaatan hasil hutan non kayu sehingga mencegah pengurangan tutupan lahan dan erosi sehingga tidak terjadi kekritisian lahan dan hutan menjadi lestari.

Lingkungan permukiman sebagai cerminan lingkungan budidaya yang dihuni manusia membutuhkan infrastruktur dan sarana pelayanan yang memadai. Infrastruktur permukiman seperti jalan lingkungan, penyediaan air minum layak dan aman, sanitasi aman serta hunian layak membutuhkan perhatian yang lebih mengingat kondisi saat ini penyediaan infrastruktur dan sarana permukiman tersebut masih perlu ditingkatkan.

Sebagai wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan Sumatera Barat Bagian Tenggara, Kabupaten Dharmasraya perlu melengkapi sarana dan prasarana pelayanan yang bersifat wilayah, salah satunya pelayanan dan pengolahan persampahan dan pengolahan limbah tinja dan limbah B3.

3.1.16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Sistem interkoneksi regional telah menghadirkan distribusi energi antar wilayah. Permasalahan ketahanan energi di kabupaten masih relevan menjadi isu lokal. Pada daerah perdesaan yang jauh dengan topografi yang sulit diakses, potensi energi lokal bisa dimanfaatkan untuk menyediakan energi yang murah dan berkelanjutan.

Ketersediaan air bersih untuk kebutuhan pengairan pertanian dan kebutuhan permukiman masih menjadi masalah prioritas untuk ditangani di Kabupaten Dharmasraya. Masih cukup rendahnya ketersediaan air bersih tersebut menyebabkan perlunya percepatan peningkatan produksi air. Prasarana irigasi dengan kondisi baik sebesar 79,76 % sementara masih cukup banyak hamparan sawah yang membutuhkan pengairan irigasi. Pemenuhan pengairan irigasi yang sangat vital bagi produksi pertanian masih perlu terus ditambah dan direhabilitasi agar mencapai kondisi ideal untuk melayani lahan produktif yang masih membutuhkan

Ketahanan pangan menjadi isu nasional untuk negara sebesar Indonesia. Ditingkat lokal, fluktuasi harga pangan menjadi salah satu pendorong perlunya memperkuat ketahanan pangan lokal. Penguatan ketahanan pangan ini membutuhkan sistem pendukung budidaya persawahan seperti pengairan berupa irigasi dan embung, penyediaan pupuk dan bantuan peralatan untuk pengolahan lahan tidur dan alihfungsi lahan menjadi sawah. Selain pengembangan lahan sawah perlu dilakukan diversifikasi komoditi hortikultura.

3.1.17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

IRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 (137,7) termasuk rendah diantara kabupaten di Sumatera Barat. Meskipun tingkat kerawanan bencana daerah termasuk rendah dibandingkan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat tetapi fokus terhadap kerawanan bencana banjir perlu menjadi perhatian. Kerawanan bencana alam banjir terdapat di Kecamatan Timpeh, Sembilan Koto dan Pulau Punjung yang berdampak terhadap permukiman yang luas. Dimasa depan, daerah rawan banjir yang luas akibat intensitas hujan ekstrim akan terjadi dalam kala ulang yang lebih singkat. Antisipasi perlu dilakukan dengan menjaga tutupan lahan hutan dan membangun struktur penanggulangan banjir pada tempat-tempat penting

Fluktuasi iklim global yang semakin ekstrim antara musim hujan dan musim kemarau membutuhkan antisipasi selain terhadap banjir juga dalam penyediaan air baku untuk pertanian dan air minum.. Untuk mengatasi gap penyediaan air baku untuk pertanian dan air minum berbagai upaya perlu dilakukan dengan percepatan pembangunan bendung dan embung.

3.2. ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis pembangunan adalah simpul dari topik pembangunan yang menjadi agenda pembangunan dimasa depan.

3.2.1. Isu Strategis Pembangunan Nasional

Isu strategis nasional yang relevan diadopsi dalam rencana pembangunan Kabupaten Dharmasraya yaitu hilirisasi, ketahanan pangan dan pembangunan berwawasan lingkungan. Kecilnya rasio sektor industri dalam PDRB menjadi dasar untuk meningkatkan hilirisasi komoditi pertanian dan pertambangan. Ketahanan pangan di kabupaten dilakukan melalui intensifikasi, refungsi sawah dan pencetakan sawah baru. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan menjadi pedoman kabupaten untuk mempertahankan tutupan hutan dan kelestarian ekosistem DAS Batanghari.

3.2.2. Isu Strategis Regional Sumatera Barat

Peluang untuk mengembangkan wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan terbukanya akses wilayah. Posisi Kabupaten Dharmasraya yang terletak di perbatasan tenggara Provinsi Sumatera Barat mempunyai keunggulan lokasi karena berada pada titik simpul jalur penghubung wilayah antara Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Pulau Sumatera. Pengembangan dua akses jalan wilayah akan memicu pengembangan wilayah Kabupaten Dharmasraya. Dua akses tersebut yaitu:

- 1) Akses bebas hambatan Dharmasraya – Kuansing – Rengat
Akses jalan ini membuka hubungan antara jalan arteri primer lintas tengah dan lintas timur di wilayah tengah Pulau Sumatera. Pengembangan akses ini akan menjadikan kawasan tenggara Kabupaten Dharmasraya akan berpeluang berkembang sebagai simpul perdagangan dan jasa antar wilayah yang meliputi kabupaten berbatasan seperti Kabupaten Kerinci, Bungo, dan Solok Selatan.
- 2) Akses Lintas Selatan Alahan Panjang – Kiliran Jao
Akses ini akan membuka akses yang dekat antara Provinsi Riau melalui Kiliran Jao dengan Kabupaten Solok Selatan dan Pesisir Selatan yang akan mengembangkan kegiatan perdagangan dan pariwisata antar wilayah. Pengembangan jalur ini juga akan membuka keterisoliran Kecamatan Sembilan Koto.

3.2.3. Isu Strategis Jangka Panjang Daerah

Isu-isu strategis Kabupaten Dharmasraya dalam jangka panjang yaitu:

- 1) Kesehatan untuk Semua
Meskipun berbagai indikator kesehatan di Kabupaten Dharmasraya sudah relatif lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Barat akan tetapi target peningkatan kualitas taraf kesehatan untuk semua masih perlu dilakukan dengan pemerataan akses kesehatan untuk masyarakat berpendapatan rendah, mengurangi tingkat kelahiran yang masih tinggi, dan penanganan kesehatan sanitasi lingkungan yang layak.
- 2) Pendidikan Berkualitas yang Merata
Partisipasi pendidikan di Kabupaten Dharmasraya menjadi masalah penting pembangunan. Anak-anak, remaja dan pemuda perlu diberi pendidikan yang layak dengan proporsi yang

semakin besar untuk setiap jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Berbagai program pembangunan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan perlu dilakukan

3) Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan perlindungan anak perlu dibangun menyasar kantong-kantong kemiskinan di kabupaten. Program ini membutuhkan program terpadu dan melibatkan dukungan masyarakat luas. Oleh karena itu program perlindungan sosial dilakukan bukan saja sebagai program sektoral tetapi juga sebagai gerakan sosial. Sementara mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Dharmasraya membutuhkan upaya yang kreatif dan serius mengingat kendala besarnya proporsi tenaga kerja non formal dan banyaknya lapangan kerja di sektor usaha mikro dan kecil. Stagnannya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian perkebunan dan pertambangan sehingga laju penyerapan tenaga kerja akan berkurang menjadi kendala untuk mewujudkan jaminan sosial dimasa depan.

4) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Dimasa depan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya tidak bisa lagi terlalu bergantung pada pertumbuhan sektor pertanian perkebunan, pertambangan sehingga dimasa depan Kabupaten Dharmasraya perlu berinovasi dan bertransformasi mengembangkan sumber daya alam dari komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan dan industri hasil pertanian yang bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sektor industri, diversifikasi komoditi hortikultura dan membangun ketahanan pangan lokal berdasarkan permintaan lokal menjadi alternatif solusi pembangunan ekonomi. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, dimana sektor pertanian mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB, namun disisi lain sektor lain mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertanian. Sesuai dengan karakteristik Kabupaten Dharmasraya yang bertumpu pada sektor pertanian maka sektor yang terkait dengan pengolahan hasil pertanian perlu ditingkatkan.

5) Penerapan Ekonomi Hijau (disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten/Kota)

Kabupaten Dharmasraya perlu mendiversifikasi ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian perkebunan monokultur sawit dan pertambangan. Percepatan pembangunan di sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perikanan serta ekonomi kreatif menjadi alternatif untuk mewujudkan ekonomi hijau dimasa depan. Program pembangunan untuk diversifikasi produk pertanian hijau dan percepatan pengembangan industri kecil seperti kriya dan kuliner pengolahan hasil pertanian dan pariwisata perlu diprioritaskan dimasa depan.

6) Transformasi Digital

Transformasi digital perlu menjadi program percepatan pembangunan daerah. Penataan sistem manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi dan membangun literasi digital masyarakat secara merata menjadi keharusan untuk membangun daerah yang maju dimasa depan.



7) Integrasi Pengembangan Wilayah

Dengan Perkembangan interkoneksi wilayah yang menghubungkan antara pantai barat dan pantai timur Sumatera maka membuka peluang untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pertumbuhan wilayah. Integrasi wilayah ini membuka peluang berkembangnya pasar, sarana pendukung pertanian, akses yang lebih luas bagi produk-produk lokal dan berkembangnya fasilitas pendidikan dan kesehatan skala regional. Kabupaten Dharmasraya perlu menyiapkan berbagai fasilitas pendukung perdagangan, pertanian serta pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala regional yang mengintegrasikan wilayah perbatasan.

8) Perdesaan dan Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Dharmasraya perlu membangun kemandirian dalam pelayanan perkotaan. Kabupaten Dharmasraya perlu membangun kemandirian dalam pelayanan kesehatan, pendidikan (menengah, vokasi dan pendidikan tinggi), serta sarana rekreasi dan belanja di kawasan perkotaan untuk mengurangi kebocoran konsumsi penduduk dan untuk melayani kabupaten yang berbatasan seperti Kabupaten Solok Selatan, Pesisir Selatan, Kerinci, Bungo, dan Kuantan Singingi.

9) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Reformasi birokrasi untuk menyederhanakan struktur organisasi dan prosedur administratif dan meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik perlu didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memastikan adanya harmonisasi regulasi dan dukungan aparatur daerah yang kompeten. Reformasi birokrasi dan dukungan tata kelola pemerintahan perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Kompetensi aparatur didukung transformasi digital menjadi titik kritis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

10) Keamanan Wilayah

Dengan posisi di perbatasan, Kabupaten Dharmasraya rawan untuk kegiatan kriminalitas antar daerah. Kabupaten Dharmasraya memiliki peran penting bagi keamanan wilayah lintas provinsi. Pencegahan kriminalitas lintas provinsi dan penyelundupan barang terlarang bisa dilakukan pada pintu masuk wilayah seperti di Kabupaten Dharmasraya. Pencegahan kriminalitas dan penguatan memerlukan peningkatan kapasitas dan koordinasi keamanan antar daerah dan antar instansi.

Mengingat posisi Kabupaten Dharmasraya di jalur regional Lintas Tengah Sumatera menjadikan kabupaten bisa berperan penting bagi penanganan kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Peningkatan rumah sakit daerah menjadi rumah sakit rujukan untuk kecelakaan lalu lintas atau trauma center perlu diupayakan.

11) Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya dimasa depan dilakukan dengan mengembangkan produksi daerah yang tahan guncangan ekonomi global. Pertanian berbasis perkebunan dan pertambangan yang rentan terhadap guncangan permintaan pasar global perlu diseimbangkan dengan pengembangan komoditi pertanian berbasis permintaan lokal dan industri berbasis pertanian yang tahan terhadap guncangan fluktuasi ekonomi.



Ketimpangan ekonomi berdasarkan indikator Indeks Gini sudah lebih rendah dari Provinsi sumbar dan Nasional akan tetapi pemerataan ekonomi dan kesejahteraan dengan meningkatkan akses lahan untuk masyarakat tuna lahan akan mempercepat pengurangan ketimpangan ekonomi lebih lanjut.

12) Kerjasama Antar Wilayah dan Lembaga

Kerjasama antara wilayah dan instansi menjadi dasar membangun daerah dengan mensinergikan berbagai potensi yang ada diluar daerah. Kerjasama perlu dilakukan dalam penyediaan prasarana, konservasi kawasan dan situs bersejarah, pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Kerjasama antar wilayah tersebut meliputi pembangunan konektivitas jaringan jalan pada daerah berbatasan, kerjasama seperti pengelolaan dan penelitian kawasan dan situs bersejarah, pengembangan pendidikan tinggi dan vokasional, dan kerjasama mensinergikan upaya pelestarian dan pengendalian kerusakan lingkungan serta kerjasama dan koordinasi pengelolaan DAS Batang Hari.

13) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju (disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten/Kota)

Dua isu strategis dalam aspek beragama dan berkebudayaan yaitu, pertama, pentingnya memperkuat nilai agama dan budaya bagi generasi muda. Nilai agama penting ditanamkan pada generasi muda untuk menjaga akhlak dan menghindari perilaku menyimpang dipadukan. Penanaman nilai agama dipadukan dengan memperkuat identitas budaya yang menjadi jati diri putra daerah. Untuk itu berbagai wadah perlu dikembangkan di tingkat nagari. Fasilitas untuk mewujudkan potensi diri/ekspresi diri dan sosialisasi dalam bentuk kegiatan budaya dan agama perlu cukup disediakan.

Kedua, pentingnya membangun dengan bertumpu pada aset multikultural penduduk Dharmasraya. Penduduk Kabupaten Dharmasraya multietnis terutama Minangkabau dan Jawa dilatarbelakangi sejarah Kerajaan Dharmasraya. Kekayaan budaya yang ada menjadi dasar untuk pengembangan berbagai produk budaya yang bisa dimanfaatkan sebagai potensi ekonomi dan pariwisata.

14) Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Ketimpangan gender yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi menjadi salah satu isu penting pembangunan daerah. Ketimpangan terjadi pada dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan di sektor pendidikan. Perlu program prioritas untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan akses perempuan dalam pendidikan. Akan tetapi disisi lain, angka TPAK perempuan kabupaten yang sudah relatif baik dibanding rata-rata provinsi menjadi modal untuk mempercepat pengurangan ketimpangan gender.

15) Lingkungan Hidup Berkualitas

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, penting diagendakan pengelolaan kelestarian alam untuk kesejahteraan bersama. Beberapa isu pembangunan yaitu:

- Sungai Batanghari memberi kehidupan bagi kawasan sepanjang DAS Batanghari sehingga perlu dilihat dari dua sisi yaitu pemanfaatan potensi alam dan konservasi,

- Sungai Batanghari dan sungai kecil lainnya yang menjadi sumber irigasi dan air bersih, potensi air bakunya perlu ditingkatkan ketersediaannya dimasa depan mengingat cuaca ekstrim yang menyebabkan kekeringan yang semakin meningkat,
- Area DAS perlu dipertahankan fungsi ekologisnya dimana kawasan hutan minimal 30 % dari luas wilayah perlu dipenuhi. Untuk itu, kegiatan konservasi perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga nilai jasa lingkungan dan pemulihan lahan kritis.
- kawasan sepanjang sungai Batanghari dikembangkan untuk berbagai kegiatan ekonomi hijau seperti sebagai kawasan wisata yang dipadukan dengan wisata sejarah dan pertanian minapolitan.
- Peningkatan kualitas permukiman layak huni
- Pengelolaan sampah dari sumber sampah sampai pada pengelolaan akhir sampah
- Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi layak.

16) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Kebutuhan energi di kabupaten secara umum telah mencukupi akan tetapi pada daerah perdesaan yang jauh dengan topografi yang sulit diakses, potensi energi lokal bisa dimanfaatkan untuk menyediakan energi yang murah dan berkelanjutan. Ketersediaan air bersih untuk permukiman masih rendah masih menjadi masalah prioritas untuk ditangani. Sementara pemenuhan pengairan irigasi yang sangat vital bagi produksi pertanian masih perlu terus ditambah dan direhabilitasi agar mencapai kondisi ideal layanan area pertanian.

Kabupaten Dharmasraya perlu memperkuat ketahanan pangan lokal. Ketahanan pangan menjadi isu nasional untuk negara sebesar Indonesia. Ditingkat lokal, Ketidakpastian pasar ekspor komoditi perkebunan sawit dan karet menjadi salah satu pendorong perlunya memperkuat ketahanan pangan lokal. Penguatan ketahanan pangan membutuhkan sistem pendukung budidaya persawahan seperti pengairan berupa irigasi dan embung, penyediaan pupuk dan bantuan peralatan untuk pengolahan lahan tidur dan alihfungsi lahan menjadi sawah. Selain pengembangan lahan sawah, diversifikasi komoditi pertanian wilayah melalui pengembangan hortikultura perlu dilakukan.

17) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

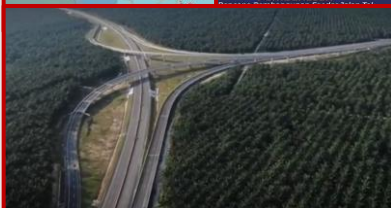
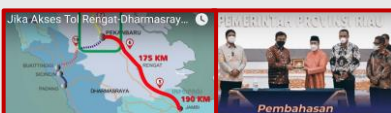
IRB Kabupaten Dharmasraya termasuk lebih rendah diantara kabupaten di Sumatera Barat. Akan tetapi tingkat kerawanan bencana daerah termasuk rendah dibandingkan daerah lain. IRB Kabupaten Dharmasraya perlu ditingkatkan terutama mengantisipasi kerawanan bencana banjir yang rawan terjadi di Kecamatan Timpeh, Sembilan Koto dan Pulau Punjung.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1. VISI DAERAH TAHUN 2025-2045

Bab 4. Visi dan Misi

Memuat visi dan misi dalam dokumen RPJPD untuk menggambarkan keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang atau hingga tahun 2045



Visi adalah gambaran perwujudan masa depan yang diinginkan. Visi dan Misi Kabupaten Dharmasraya pada RPJPD Tahun 2025-2045 mengacu pada visi dan misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

1. Visi dan Misi RPJPN Tahun 2025-2045

Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 termuat visi Indonesia yaitu **“NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”**, dengan 8 misi yaitu:

- 1) Mewujudkan Transformasi Sosial
- 2) Mewujudkan Transformasi Ekonomi
- 3) Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
- 4) Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
- 5) Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
- 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- 8) Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan untuk Mengawal Indonesia Emas

2. Visi dan Misi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2045 mendatang yaitu: **“SUMATERA BARAT MADANI, MAJU DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA”**

Berdasarkan kepada visi jangka panjang daerah, untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan yang mengacu kepada agenda pembangunan jangka panjang nasional yaitu:

- 1) Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 2) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif;



- 4) Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah;
- 5) Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan;
- 6) Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan;
- 7) Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
- 8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah.

Visi jangka panjang Kabupaten Dharmasraya sampai pada tahun 2045 yaitu: **“DHARMASRAYA MAJU YANG BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN”**.

Pengertian dari alternatif visi

- Maju : Optimalisasi pemanfaatan kekayaan aset ekonomi untuk kemakmuran daerah
- Berbudaya : Masyarakat yang cerdas berlandaskan iman dan taqwa serta memiliki identitas budaya yang kuat
- Berkelanjutan : Pembangunan dengan menjaga kelestarian lingkungan

Visi RPJPD Kabupaten Dharmasraya mencerminkan potensi dan karakteristik daerah serta keselarasan dengan visi nasional yang mengandung visi “maju” dan “berkelanjutan”.

Penyelarasan visi RPJPD Kabupaten Dharmasraya dengan visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJP Nasional dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4- 1 Hasil Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Dharmasraya dengan Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJP Nasional

Visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045	Visi RPJP Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045	Visi RPJP Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 – 2045
(1)	(2)	(3)
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	SUMATERA BARAT MADANI, MAJU DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA	DHARMASRAYA MAJU, YANG BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Hasil Analisis Bapperida Tahun 2024

Dalam visi RPJPD ditetapkan 5 (lima) sasaran dari visi, indikatornya dan target pencapaian pada tahun 2045. Penetapan target dari masing-masing indikator tersebut disinkronisasikan dan ditetapkan bersama antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat. Rincian hasil penyelarasan sasaran visi, indikator dan target dapat dilihat pada tabel 4-2 berikut ini.



Tabel 4- 2 Penyelarasan Sasaran, Indikator dan Target Visi RPJP Nasional, Provinsi Sumatera Barat dengan RPJPD Kabupaten Dharmasraya

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045				RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045				RPJP Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5.500	23.000-30.300	Peningkatan Pendapatan per Kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	58,32	336,86	Peningkatan Pendapatan per Kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	60	331,36
		b. Kontribusi PDB maritim	7,6	15,0		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	29,73	70,06		-		
		c. Kontribusi PDRB Manufaktur (%)	20,8	28		c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	8,53	11,92		c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	5,37	9,76
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Kemiskinan dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	4,50 – 5,10	0,04- 0,54	Kemiskinan dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	3,94-4,46	0,02- 0,33
		b. Rasio Gini (indeks)	0,379 – 0,382	0,377- 0,320		b. Rasio gini (Indeks)	0,274	0,216		b. Rasio gini (Indeks)	0,168	0,092
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,58		a.		
						b. Kontribusi PDRB Kabupaten Mnetawai terhadap PDRB Provinsi	1,94	2,16				
						c. Pertumbuhan Ekonoomi (%)	5,4	5,0		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,25	5,04



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045				RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045				RPJP Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Peingkatan daya saing daerah	a. Indeks Daya Saing Daerah	3,58	5,00	Peingkatan daya saing daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4	4,6
										Indeks Daya Saing Daerah	3,25	4,75
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,54 (2022)	0,73	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,58	0,76	Daya saing sumber daya manusia meningkat	a. Indeks Pembangunan Manusia	76,03	88,62
										b. Tingkat produktivitas tenaga kerja	103,30	167,29
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	52,62	91,21	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,82	79,82

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Tahun 2024



Tabel 4- 3 Sasaran, Indikator dan Target Visi RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045

No.	Sasaran Visi	Indikator	Target				
			2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan Pendapatan per Kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	60	140,47	223,45	306,37	331,4
		c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	5,37	6,47	7,57	8,66	9,76
2	Kemiskinan dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	3,94-4,46	2,72-3,18	1,67-2,07	0,77-1,12	0,02-0,33
		b. Rasio gini (Indeks)	0,168	0,145	0,180	0,108	0,092
		c. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,25	5,95	6,02	5,52	5,04
3	Peningkatan daya saing daerah	a. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4	4,2	4,3	4,4	4,6
		b. Indeks Daya Saing Daerah	3,25	3,6	4	4,5	4,75
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	a. Indeks Pembangunan Manusia	76,03	79,33	82,52	85,61	88,62
		b. Tingkat produktivitas tenaga kerja	103,30	121,01	137,50	152,89	167,29
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,82	73,88	74,94	76	79,82

Sumber : Hasil Analisisi Bapperida Tahun 2024



4.2. MISI DAERAH TAHUN 2025-2045

Misi adalah agenda untuk yang ditetapkan untuk mencapai visi daerah. Terdapat delapan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Dharmasraya.

1. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia berkualitas yang terdidik, sehat dan sejahtera.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi daerah bertumpu pada kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi dan ketahanan ekonomi lokal.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pembangunan yang maju.
4. Memantapkan keamanan daerah tangguh melalui penegakan supremasi hukum, kerukunan dan ketertiban masyarakat, serta stabilitas ekonomi makro daerah.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui penegakan nilai “ABS-SBK”, pelestarian aset budaya dan ekologi.
6. Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan.
7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan di Wilayah Tenggara Sumatera Barat.
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah

Misi 1 : Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia berkualitas yang terdidik, sehat dan sejahtera

Maju dan sejahteranya suatu wilayah membutuhkan kualitas sumberdaya manusia yang terdidik dan sehat. Oleh sebab itu misi pertama dalam RPJPD ini berkonsentrasi pada transformasi sosial agar masyarakat menjadi terdidik, sehat dan sejahtera.

Misi 2 Mewujudkan transformasi ekonomi daerah bertumpu pada kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi dan ketahanan ekonomi lokal.

Dengan terjadinya transformasi sosial diharapkan diikuti dengan terjadinya transformasi kegiatan ekonomi yang saat ini masih bertumpu pada pertanian dan perkebunan menjadi kegiatan ekonomi yang bernilai tambah tinggi dengan adanya hilirisasi sehingga membentuk ketahanan ekonomi lokal

Misi 3 Mewujudkan transformasi tata kelola pembangunan yang maju.

Transformasi sosial dan ekonomi perlu diiringi dengan tata kelola yang semakin maju. Oleh sebab itu transformasi tata kelola menjadi misi ketiga untuk mencapai Dharmasraya Maju yang berbudaya dan berkelanjutan.

Misi 4 Memantapkan keamanan daerah tangguh melalui penegakan supremasi hukum, kerukunan dan ketertiban masyarakat, serta stabilitas ekonomi makro daerah.

Kepastian penegakan supremasi hukum kerukunan masyarakat dan stabilitas ekonomi makro merupakan persyaratan bagi Kabupaten Dharmasraya untuk menjadi Kabupaten Maju yang Berbudaya dan Berkelanjutan. Supremasi hukum menjamin terjadinya peningkatan peradaban (civilization) dan stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat untuk mencapai keberlanjutan.

Misi 5 Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui penegakan nilai “ABS-SBK”, pelestarian aset budaya dan ekologi.

Melalui ketahanan budaya Kabupaten Dharmasraya dapat menangkal efek negatif dari budaya global yang negatif sehingga ciri-ciri budaya lokal semakin berkembang dengan kesepakatan bersama berupa



penegakan nilai ABS-SBK. Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari berbagai suku perlu melestarikan aset dan lingkungan budaya yang ada sehingga diperoleh ketahanan sosial budaya dan lingkungan yang kondusif.

Misi 6 Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan.

Ketimpangan antar wilayah terutama perdesaan dan perkotaan perlu dipersempit dengan cara membangun wilayah secara merata di Kabupaten Dharmasraya, begitu juga dengan sasaran pembangunan baik manusia dan alam perlu dilakukan dengan prinsip keadilan yang berkelanjutan

Misi 7 Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan di Wilayah Tenggara Sumatera Barat

Posisi Kabupaten Dharmasraya yang berada di Tenggara Sumatera Barat perlu dikukuhkan dengan menjadikan Kabupaten Dharmasraya menjadi pusat pertumbuhan wilayah. Oleh sebab itu dibutuhkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mewujudkannya.

Misi 8 Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah

Sebagai Kabupaten yang lebih muda dari kabupaten-kabupaten lainnya di provinsi Sumatera Barat karena kabupaten Dharmasraya sebagai kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Sijunjung maka saat ini kesinambungan pembangunan daerah sangat dibutuhkan untuk mencapai kemajuan dan kemandirian sehingga rakyat menjadi sejahtera.

Berikut tabel keterkaitan antara visi dan misi daerah:

Tabel 4- 4 Keterkaitan Antara Visi dan Misi Daerah

Visi	Misi	Pokok Visi
Dharmasraya Maju Yang Berbudaya Dan Berkelanjutan	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia berkualitas yang terdidik, sehat dan sejahtera.	Maju
	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah bertumpu pada kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi dan ketahanan ekonomi lokal.	Maju
	Mewujudkan transformasi tata kelola pembangunan yang maju.	Maju
	Memantapkan keamanan daerah tangguh melalui penegakkan supremasi hukum, kerukunan masyarakat, dan stabilitas ekonomi makro daerah.	Maju
	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui penegakan nilai "ABS-SBK", pelestarian aset budaya dan ekologi.	Berbudaya
	Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan.	Maju
	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan di tenggara Sumbar.	Maju dan Berkelanjutan
	Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah	Maju dan Berkelanjutan

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Tahun 2024



Penyelarasan Misi pembangunan Kabupaten Dharmasraya dengan misi nasional dan provinsi sampai tahun 2045 dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4- 5 Hasil Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Dharmasraya dengan visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJP Nasional

No	Misi RPJP Nasional Tahun 2025-2045	Misi RPJP Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045	Misi RPJP Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 – 2045
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Transformasi Sosial	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia berkualitas yang terdidik, sehat dan sejahtera.
2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan;	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah bertumpu pada kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi dan ketahanan ekonomi lokal.
3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif;	Mewujudkan transformasi tata kelola pembangunan yang maju.
4	Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah;	Memantapkan keamanan daerah tangguh melalui penegakkan supremasi hukum, kerukunan masyarakat, dan stabilitas ekonomi makro daerah.
5	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan;	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui penegakan nilai “ABS-SBK”, pelestarian aset budaya dan ekologi.
6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan;	Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan.
7	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan di tenggara Sumbar.
8	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan untuk Mengawal Indonesia Emas	Mewujudkan kestinambungan pembangunan daerah.	Mewujudkan kestinambungan pembangunan daerah

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Tahun 2024



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab 5. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

menguraikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD, serta menjelaskan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang atau hingga tahun 2045



Perumusan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 dirumuskan dan disusun merujuk kepada 8 misi pembangunan nasional dan penyelarasan dengan aspek transformasi menuju Indonesia emas 2045 Provinsi Sumatera Barat.

Arah kebijakan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah berfungsi sebagai berikut:

Pengarahan Sumber Daya: Arah kebijakan berfungsi untuk mengarahkan sumber daya yang ada, baik manusia, modal, maupun alam, agar dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Penyelesaian Masalah: Membantu dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan yang ada dan mengantisipasi isu strategis yang mungkin muncul di masa depan.

Penghubung Visi dan Aksi: Menjadi penghubung antara visi pembangunan daerah dengan aksi atau program yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan selaras dengan visi jangka panjang daerah.

Pembentukan Kerangka Kerja: Menyediakan kerangka kerja bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan rencana aksi dan program-program pembangunan.

Pengambilan Keputusan Strategis: Arah kebijakan membantu pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak pada pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan setiap tahap dilakukan untuk mencapai visi dan misi jangka panjang sehingga setiap tahapan perlu penekanan :

- Tahap 1 Perkuatan fondasi transformasi
- Tahap 2 Akselerasi Transdformasi
- Tahap 3 Ekspansi Global
- Tahap 4 Perwujudan Indonesia Emas



Arah (tujuan pembangunan RPJP Kabupaten Dharmasraya tahun 2025-2045 seperti terlihat pada tabel 5-1 berikut ini.

Tabel 5- 1 Arah (Tujuan) Kebijakan Pembangunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045

No	Transformasi Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan	
(1)	(2)	(3)	
	Landasan Transformasi		
1	Transformasi sosial menuju sumberdaya manusia berkualitas yang terdidik, sehat dan sejahtera.	1	Kesehatan untuk semua
		2	Pendidikan yang berkualitas yang merata
		3	Lingkungan hidup berkualitas
2	Transformasi ekonomi daerah bertumpu pada kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi dan ketahanan ekonomi lokal.	4	Ippek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi
		5	Dukungan infrastruktur kewilayahan
3	Transformasi tata kelola pembangunan yang maju.	6	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
4	Memantapkan keamanan daerah tangguh melalui penegakkan supremasi hukum, kerukunan masyarakat, dan stabilitas ekonomi makro daerah.	7	Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial
		8	Stabilitas ekonomi makro daerah
5	Ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui penegakan nilai “ABS-SBK”, pelestarian aset budaya dan ekologi.	9	Ketahan sosial dan budaya
		10	Ketahanan ekologi
	Kerangka Implementasi Transformasi		
6	Membangun wilayah dengan merata dan berkeadilan.		
7	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan di tenggara Sumbar.		
8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah.		

5.1. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah adalah tahapan dan prioritas dalam menjalankan misi pembangunan yang diselaraskan dengan arah kebijakan transformasi pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat.

Arah kebijakan pembangunan dirinci untuk setiap misi pembangunan pada setiap tahapan pembangunan lima tahunan.



Tabel 5- 2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah berdasarkan Misi Dan Lima Tahunan

No.	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia berkualitas yang terdidik, sehat dan sejahtera	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan lebih tinggi.	Penguatan daya saing SDM dan pemerataan kesejahteraan	Pemantapan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing sebagai basis pembangunan.
2	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah bertumpu pada kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi dan ketahanan ekonomi lokal.	Peningkatan produktifitas dan diversifikasi komoditi bernilai tambah tinggi dan mewujudkan dukungan infrastruktur pendukung ketahanan pangan lokal	Penguatan sistem agribisnis komoditi strategis dan unggulan	Pengembangan daya saing komoditi dan produk strategis dan unggulan daerah berorientasi pasar di luar wilayah	Pemantapan pembangunan daerah berbasis komoditi strategis dan unggulan
3	Mewujudkan transformasi tata kelola pembangunan yang maju.	Peningkatan sumberdaya manusia (SDM) ASN, penataan kelembagaan dan regulasi pembangunan, serta digitalisasi pengelolaan pemerintahan.	Peningkatan koordinasi dan efisiensi pengelolaan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi.	Peningkatan integrasi pengelolaan pembangunan antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha	Pemantapan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif
4	Memantapkan keamanan daerah tangguh melalui penegakkan supremasi hukum, kerukunan masyarakat, dan stabilitas ekonomi makro daerah.	Peningkatan kinerja kelembagaan untuk mewujudkan daerah yang aman, rukun dan bebas korupsi serta stabilitas ekonomi makro daerah.	Pemantapan supremasi hukum keamanan, kerukunan dan stabilitas ekonomi makro daerah.	Peningkatan integrasi kelembagaan keamanan, kerukunan dan stabilitas ekonomi makro daerah.	Pemantapan integrasi kelembagaan keamanan, kerukunan dan stabilitas ekonomi makro daerah.



No.	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui penegakan nilai “ABS-SBK”, pelestarian aset budaya dan ekologi	Peningkatan internalisasi nilai ABS-SBK, serta peningkatan pelestarian aset budaya dan pelestarian lingkungan.	Pemantapan internalisasi nilai ABS-SBK, serta pemantapan pelestarian dan pemanfaatan aset budaya dan lingkungan.	Pemantapan budaya hidup ABS-SBK dan optimalisasi pemanfaatan aset budaya dan jasa lingkungan sebagai aset pembangunan daerah.	Pemantapan fungsi sosial budaya dan ekologi sebagai kabupaten yang regius, berbudaya dan alam lestari
6	Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan	Peningkatan pemerataan pembangunan ekonomi dan dukungan infrastruktur antar kecamatan.	Pemantapan pemerataan pembangunan ekonomi dan dukungan infrastruktur antar kecamatan.	Optimalisasi potensi pembangunan wilayah berdasarkan keunggulan potensi masing-masing kecamatan.	Pemantapan pemerataan pembangunan wilayah kabupaten
7	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan di tenggara Sumbar	Peningkatan konektivitas antar sub wilayah dan kelengkapan sarana dan prasarana.	Pemantapan konektivitas antar sub wilayah dan kelengkapan sarana dan prasarana.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana prioritas pendukung kegiatan sosial dan ekonomi intra wilayah dan antar wilayah di tenggara Sumatera Barat	Pemantapan pembangunan sarana dan prasarana prioritas pendukung kegiatan sosial dan ekonomi intra wilayah dan antar wilayah di tenggara Sumatera Barat
8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah	Pembangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pembangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pembangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pembangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Tahun 2024



Arah kebijakan daerah Tahun 2025-2045 ditetapkan berdasarkan penyelarasan dengan arah kebijakan nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 pada lampiran II Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 600.1/176/SJ dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Pada lampiran II yang memuat Arah Kebijakan Transformasi untuk Provinsi Sumatera Barat yang telah disesuaikan dengan kebijakan kewilayahan Kabupaten Dharmasraya. Arah kebijakan untuk setiap aspek transformasi pembangunan diuraikan pada tabel berikut ini 5.3 dan tabel 5.4..

Tabel 5- 3 Persandingan Arah Pembangunan RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Sumatera Barat, dan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045

Arah Pembangunan Nasional	Arah Pembangunan Provinsi	Arah Pembangunan Kabupaten Dharmasraya
1	2	3
Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua
Pendidikan Berkualitas	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata
Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau
Transformasi Digital	Transformasi Digital	Transformasi Digital
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional, dan Kepemimpinan Indonesia	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial	Hukum Berkeadilan, dan Keamanan Daerah
Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro
Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	Kerjasama antar wilayah
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber :

Tabel 5- 4 Arah Kebijakan Daerah Tahun 2025-2045

NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025 – 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Transformasi Sosial	1-Kesehatan Untuk Semua	1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.



NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025 – 2045	
			2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau 3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. 4. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. 5. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. 6. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. 7. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
	2- Pendidikan Berkualitas yang Merata		8. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 9. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. 10. Pemerataan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. 11. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 12. Penyelenggaraan pendidikan yang sesuai SKM dan standar pelayanan 13. Penguatan pendidikan bermuatan lokal, berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy 14. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. 15. Dukungan penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf nasional. 16. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.
	3- Perlindungan Sosial yang Adaptif		17. Percepatan pembangunan dan pengurangan kemiskinan 18. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, dan rentan 19. Pemenuhan hak dan perlindungan disabilitas dan lansia
			1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.



ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025 – 2045			
NO	TRANSFORMASI		
2	Transformasi Ekonomi	Lingkungan Hidup Berkualitas	2. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
			3. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak
		4- IPTEK , Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	4. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
			5. Penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi pertanian
			6. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional dan regional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan.
		5-Penrapan Ekonomi Hijau	7. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan dukungan sumber daya air pertanian
			8. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan penguatan sistem agribisnis
		6- Transformasi Digital	
		Infrastruktur Kewilayahan	9. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya kegiatan ekonomi wilayah
			10. Percepatan penyediaan infrastruktur, energi, Sumber daya air dan telekomunikasi
			11. Penguatan sarana dan prasarana perkotaan sebagai pusat pelayanan
			12. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan
			13. Peningkatan kapasitas penanganan bencana
			14. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu
			15. Peningkatan cakupan dan kecepatan akses internet selular dan terestrial
			16. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif
			17. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Dharmasraya pada ruas: (1) Dharmasraya - Rengat dan (2) Solok - Sawahlunto - Muaro Sijunjung - Pulau Punjung serta membangun konektivitas



NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025 – 2045	
			wilayah dengan Alahan Panjang- Kiliran Jao dan Solok Selatan/ Kerinci-Dharmasraya
			18. Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik) pada ruas Padang Tarok - Lubuk Linggau (KA Trans Sumatera)
			19. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.
			20. Peningkatan produktivitas dan keterkaitan UMKM melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
			21. Peningkatan produktivitas BUM-Nag
3	Transformasi Tata Kelola	Regulasi dan Tata Kelola Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif	22. Pembangunan transparansi informasi publik
			23. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik yang prima
4	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Hukum Berkeadilan, Keamanan nasional Tangguh dan Demokrasi Susbstansial	24. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan penyakit masyarakat
		Stabilitas Ekonomi Makro	25. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
			26. Penguatan pengendalian inflasi daerah.
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Ketahan Sosial dan Budaya	27. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila.
			28. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
			29. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
			30. Pemenuhan hak dan perlindungan anak dan perempuan serta pemberdayaan perempuan
			31.
			32. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan
			33. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.



NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025 – 2045	
		Ketahanan Ekologi	34. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. 35. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis. 36. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum kebencanaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya dan mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana.
6	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan		37. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. 38. Percepatan pelaksanaan reforma agraria. 39. Penyelarasan kebijakan penataan ruang dan pembangunan daerah 40. Pembangunan yang selaras dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana kawasan strategis
7	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan		41. Pembangunan dan pemerataan prasarana; (1) transportasi (2) energi (3) telekomunikasi (4) irigasi (5) air minum (6) persampahan (7) drainase (8) sanitasi 42. Penataan kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan 43. Pembangunan dan pemerataan sarana (1) pendidikan (2) kesehatan (3) perdagangan dan jasa (4) sarana pelayanan publik lainnya
8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan		44. Pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung

Sumber : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 600.1/176/SJ dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024, dan hasil analisis Bapperida Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Selain dilakukan penyelarasan dengan RPJPN, juga dilakukan penyelarasan dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/38/III/P2EPD/BAPPEDA-2024 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dimana penyelarasan tersebut disepakati dalam bentuk indikator utama pembangunan target serta arah kebijakan sesuai dengan indikator utama pembangunan. Untuk lebih jelasnya arah kebijakan berdasarkan indikator utama pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 5.4.



Tabel 5- 5 Arah Kebijakan Daerah Berdasarkan Indikator Utama Pembangunan Tahun 2025-2045

No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi 1	Transformasi Sosial				
IE1	Kesehatan untuk Semua				
1.	Usia Harapan Hidup (UHH)*	1. Peningkatan Kualitas dan jangkauan sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. 2. Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN. 3. Peningkatan Kualitas kompetensi Tenaga Kesehatan. 4. Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan 5. Pelayanan kesehatan khusus bagi Lansia	1. Pemerataan pelayanan dan jangkauan kesehatan yang berkualitas. 2. Pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi. 3. Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat 4. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pelayanan kesehatan; 5. Pemerataan pelayanan kesehatan khusus bagi Lansia	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional. 2. Mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik global. 3. Pemerataan pelayanan kesehatan bersifat promotif dan kuratif khusus bagi Lansia	1. Mewujudkan pelayanan dan jangkauan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas. 2. Mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang masing-masing. 3. Mewujudkan edukasi kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif. 4. Pelayan prima untuk Lansia
2	Kesehatan Ibu dan Anak				
a	Angka Kematian Ibu	1. Peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. 2. Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN. 3. Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan. 4. Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI;	1. Pemerataan pelayanan kesehatan kesehatan yang berkualitas. 2. Pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi. 3. Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. 4. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional. 2. Mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik global;	1. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas. 2. Mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang masing-masing. 3. Mewujudkan edukasi kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif.



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5. Pemantapan program Keluarga berencana	efisiensi administrasi pelayanan kesehatan ; 5. Pemerataan jangkauan layanan kesehatan pra dan pasca ibu melahirkan	3. Pemerataan jangkauan sarana dan prasarana kesehatan pra dan pasca ibu melahirkan	4. Mewujudkan pelayanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan yang berkualitas dan berkeadilan;
b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	1. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. 2. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi nakes yang berkualitas. 3. Peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. 4. Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	1. Percepatan Penurunan Stunting dan pencegahan Stunting 2. Pemerataan tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi. 3. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. 4. Percepatan peranan lintas sektor dan lintas sektor dalam keterlibatan penanganan stunting	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. 2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. 3. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompaten dengan standar internasional	1. Mewujudkan akses layanan kesehatan universal. 2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. 3. Mewujudkan kualitas SDM berkualitas dengan keterpenuhan gizi masyarakat
3.	Penanganan Tuberkulosis:				
a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	1. Peningkatan Komitmen dan Kepemimpinan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Peningkatan Upaya Promosi dan Pencegahan, Pemberian Pengobatan pencegahan TBC dan Pengendalian Infeksi;	1. Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi;	1. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi; 2. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC;	1. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 2. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien;



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Peningkatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi tuberculosis; 4. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 5. Peningkatan skrining Tuberkulosis dimulai dari level Nagari, Kecamatan, Kabupaten Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC.	3. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC; 4. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 5. Penguatan screening TBC dimulai untuk setiap tingkatan dimulai dari jorong, nagari, kecamatan, kabupaten/kota dalam sehingga dapat mewujudkan wilayah bebas TBC.	3. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 4. Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan masyarakat;	3. Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan masyarakat.
b)	Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (treatment success rate)	1. Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; 3. Peningkatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC;	1. Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi; 3. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC;	1. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; 2. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 3. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 4. Penguatan surveilans aktif tuberculosis berbasis layanan dan Masyarakat;	1. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 2. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 3. Penguatan surveilans aktif tuberculosis berbasis layanan dan masyarakat;



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 5. Peningkatan screening TBC untuk setiap tingkatan dimulai dari jorong, nagari, kecamatan, kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC.	4. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 5. Penguatan screening TBC dimulai untuk setiap tingkatan dimulai dari jorong, nagari, kecamatan, kabupaten/kota dalam sehingga dapat mewujudkan wilayah bebas TBC.		
4.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	1. Meningkatkan cakupan Kepesertaan JKN ; 2. Meningkatkan jumlah peserta di kelompok peserta Non-PBI; 3. Penguatan sustainabilitas keuangan melalui perluasan kesertaan; 4. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan prosedur medis untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta JKN melalui kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RS pemerintah maupun swasta; 5. Meningkatkan kolaborasi antara BPJS kesehatan, pemerintah pusat, pemerintah daerah,	1. Peningkatan Cakupan dan Aksesibilitas bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang sulit dijangkau; 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui peningkatan standar kompetensi tenaga medis, infrastruktur fasilitas kesehatan, dan sistem rujukan; 3. Digitalisasi dan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, klaim, pelayanan kepada peserta, monitoring, dan evaluasi program JKN; 4. Edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional ; 2. Mengembangkan produk dan layanan asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pasar global.	1. Memastikan seluruh penduduk Kabupaten Dharmasraya mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui program JKN, tanpa terkecuali; 2. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan teknologi medis, untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat; 3. Fokus pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan melalui edukasi, vaksinasi, dan program deteksi dini untuk mengurangi angka kesakitan



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		sektor swasta dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN; 6. Pengawasan dan penegakan hukum: memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakkan hukum terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan dan peserta JKN untuk memastikan integritas dan transparansi program	pentingnya asuransi kesehatan dan pencegahan penyakit; 5. Melakukan program edukasi dan kampanye literasi kesehatan yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program JKN; 6. Membangun kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi profesi, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN; 7. Meningkatkan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan akuntabilitas, integritas, dan transparansi program JKN		dan kematian akibat penyakit tertentu; 4. Menerapkan inovasi dan teknologi terbaru dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti telemedicine untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program JKN; 5. Meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi marginal; 6. Memperkuat mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program JKN; 7. Membangun kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan dan pengembangan program JKN; 8. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui program pendidikan, pelatihan,



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					dan pengembangan profesionalisme.
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata				
5.	Hasil Pembelajaran:				
a	persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	1. Penguatan kurikulum pendidikan dan kualitas pembelajaran anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter serta keterampilan, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan.	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics); 4. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK; 5. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
b	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	1. Penguatan kurikulum pendidikan dan kualitas pembelajaran anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter serta keterampilan, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan.	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics); 4. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK; 5. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
c	Harapan Lama Sekolah	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;	1. Penguatan kurikulum pendidikan dan kualitas pembelajaran anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	3. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	karakter serta keterampilan, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan.	kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics); 4. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK; 5. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
6.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	1. Penguatan kurikulum pendidikan dan kualitas pembelajaran anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter serta keterampilan, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah);	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology,



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.		2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan.	Engineering, Arts, and Mathematics); 4. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK; 5. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
7.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan industri 2. Penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, dengan fokus pada pengembangan keterampilan teknis, pemecahan masalah, dan kreativitas 3. Kolaborasi dalam penyelenggaraan program	1. Mendorong diversifikasi bidang keahlian dan pengembangan teknologi baru 2. Memberikan dukungan kepada investasi dalam pengembangan teknologi dan inovasi 3. Penerapan sistem pendidikan dan pelatihan sepanjang hayat, serta penyediaan layanan penempatan kerja dan konseling karir	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan 2. Peningkatan kesetaraan gender dan inklusi di tempat kerja untuk memastikan bahwa semua lulusan memiliki peluang yang sama untuk berkarier di bidang keahlian menengah tinggi 3. Menciptakan tenaga kerja yang terampil, adaptif, dan berdaya saing global	1. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global 2. Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 3. Penyelenggaraan dan peningkatan akses pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		magang dan pelatihan kerja untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa 4. Meningkatkan fleksibilitas pendidikan dan mobilitas tenaga kerja			berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif				
8.	Tingkat Kemiskinan	1. Penanggulangan kemiskinan melalui program-program pemenuhan kebutuhan dasar baik berupa uang, pangan, bantuan biaya pendidikan, bantuan sosial kesehatan. 2. Peningkatan cakupan pemberdayaan masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan. 3. Perluasan program pengembangan kesempatan kerja padat karya 4. Peningkatan program kredit-kredit kerakyatan dan usaha bersama 5. Penyediaan dan perbaikan perumahan golongan miskin 6. Membina kesetiakawanan sosial masyarakat untuk pemberantasan kemiskinan	1. Melanjutkan program-program lima tahunan pertama dengan cakupan yang lebih luas 2. Penyerapan tenaga kerja daerah untuk pengurangan pengangguran yang akan menyebabkan kemiskinan 3. Penyerapan tenaga kerja pada pembangunan infrastruktur perdesaan 4. Pengembangan program-program kemandirian di masyarakat miskin melalui komoditas pangan berbasis kearifan lokal	1. Melanjutkan program-program lima tahunan pertama dengan cakupan yang lebih luas 2. Membangun sistem informasi untuk menjamin tercakupnya data pemberantasan masyarakat miskin mulai dari jorong, nagari, kecamatan, dan kabupaten	Terpantaunya kondisi masyarakat miskin melalui sinergi sistem informasi di pemerintah dan masyarakat sehingga setiap kondisi kemiskinan dapat ditanggulangi lebih awal baik oleh pemerintah maupun masyarakat



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	Penguatan sistem internal manajemen berupa ; pendataan, kelembagaan/penataan institusi, penyediaan data dan informasi, penguatan kepesertaan/akuisisi dan peningkatan kebijakan yang inklusif	<i>Good governance</i> untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam mencapai target cakupan kepesertaan	Penguatan dan penyesuaian sistem dengan manufaktur teknologi ; menjaga eksistensi peran lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan	Pemantapan sistem berupa (1) sistem jaminan sosial ketenagakerjaan universal, dan (2) evaluasi program berjalan dan berprinsip mewujudkan program yang adaptif dan inovatif
10.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Optimalisasi kebijakan yang responsif terhadap penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan promosi hak penyandang disabilitas sebagai manusia utuh yang bermartabat	Meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas untuk kemandirian yang bermartabat, memiliki hak dan akses yang sama dalam pelayanan publik, serta inklusivitas dalam berbagai aspek pembangunan	Penyandang disabilitas berdaya untuk membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi	Memastikan keberlanjutan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan ekonomi yang inklusif
Misi 2	Transformasi Ekonomi				
IE4	Ippek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi				
11.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	1. Pengenalan produk unggulan untuk dikembangkan menjadi industri UMKM setiap kecamatan 2. Promosi produk unggulan untuk pasar domestik dan provinsi 3. Pemberian bantuan peralatan industri berbasis pangan 4. Penyediaan infrastruktur industri pada lokasi-lokasi industri berbasis pangan	1. Pemantapan industri unggulan berbasis pangan 2. Perluasan jejaring pasar industri berbasis pangan 3. Berkembangnya kegiatan industri dan jasa ikutan untuk memperkuat kemandirian industri pangan	1. Berkembangnya industri penunjang lainnya berbasis komoditi pertanian non pangan 2. Pemasaran produksi kegiatan industri pangan sudah mulai dalam kondisi stabil dan terkait dengan kegiatan sektor lainnya seperti pariwisata	Industri berbasis pertanian berkembang



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Pengembangan Pariwisata				
a	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1. Integrasi konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial. 2. Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism) 3. Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal. 4. Inovasi pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan nusantara. 5. Penguatan integrasi pengembangan pariwisata halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan	1. Pengembangan digitalisasi berbasis inovasi dan teknologi pariwisata berdaya saing nasional. 2. Pengembangan SDM pariwisata yang kreatif dan inovatif. 3. Inovasi pengembangan aktifitas dan pengalaman wisatawan (local and authentic experiences). 4. Penguatan promosi pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi. 5. Inovasi pengembangan kreatif hub pada setiap destinasi unggulan.	1. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan. 2. Peningkatan inovasi pengembangan ekonomi kreatif berkualitas dan berkelanjutan. 3. Pengembangan industri kreatif dan budaya kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan. 4. Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan penerapan blue, green dan sirkuler ekonomi, digitalisasi dan kemajuan teknologi. 5. Inovasi Pengembangan kota kreatif berbasis kreatifitas talenta dan ekonomi budaya untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata.	1. Inovasi Pengembangan kolaborasi dan partnership dalam mengembangkan bisnis pariwisata. 2. Pengembangan ekonomi pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya 3. Peningkatan partisipasi pada rantai pasok ekonomi kreatif.
13.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Peningkatan ekosistem ekonomi kreatif	Pemaksimalan kolaborasi multipihak untuk inovasi pemasaran dan produk ekonomi kreatif	Standardisasi produk ekonomi kreatif	Internasionalisasi usaha ekonomi kreatif



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD				
a	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian	1. Pemetaan Usaha Mikro (bagian dari UMKM yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota) berdasar kategori informal.formal, kebutuhan, dan profil pemilik usaha. 2. Perumusan kebijakan usaha mikro berdasarkan kebutuhan dan karakteristik usaha mikro. 3. Peningkatan inovasi produk dan pemasaran usaha mikro. 4. Peningkatan efektifitas teknologi untuk usaha mikro. 5. Peningkatan kompetensi Usaha Mikro dengan pelatihan berbasis aspirasi pelaku usaha. 6. Penguatan kluster inovasi logam. 7. Peningkatan literasi dan akses keuangan/permodalan.	1. Pemaksimalan kolaborasi usaha mikro dan usaha besar. 2. Peningkatan produk hasil hilirisasi pertanian oleh usaha mikro. 3. Fasilitasi ekspansi pasar. 4. Penguatan usaha mikro unggulan. 5. Pemaksimalan kluster industri logam dan makanan sebagai pusat inovasi dan pemasaran. 6. Fasilitasi ekspansi pasar. 7. Pendampingan dan inkubasi melibatkan multipihak (konsep <i>hexa helix</i>).	1. Integrasi usaha mikro berbasis nagari dan dengan pihak luar dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan. 2. Kolaborasi dan skalabilitas untuk ekspansi pasar regional dan nasional.	1. Pemaksimalan potensi usaha mikro bertumbuh tinggi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. 2. Internasionalisasi UKM.
b	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Pemaksimalan peran IKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui inovasi	Peningkatan skala bisnis dan implementasi strategi bisnis IKM	Peningkatan kuantitas dan kualitas IKM yang secara maksimal mampu memanfaatkan potensi daerah	Peningkatan jumlah IKM yang mampu menjadi usaha berbasis teknologi untuk mencapai daya saing tinggi
c	Rasio Kewirausahaan Daerah	Penguatan kebijakan kewirausahaan, kompetensi, dan pendidikan kewirausahaan	Implementasi inovasi dan kolaborasi dan penguatan ekonomi kewirausahaan	Pertumbuhan bisnis tinggi dan penguatan untuk internasionalisasi	Penguatan wirausaha berbasis teknologi dan internasionalisasi



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
d	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1. Pemaksimalan peran perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan Koperasi dan UMKM sebagai pembina yang menekankan aspek tata kelola (governance) dan sumber daya manusia koperasi. 2. Pelatihan untuk sumber daya manusia koperasi berdasarkan kebutuhan koperasi. 3. Penguatan peran multipihak (misalnya universitas dan dunia industri) untuk meningkatkan aspek strategi dan inovasi bisnis koperasi. 4. Penguatan koperasi melalui adopsi dan implementasi inovasi digital. 5. Peningkatan kualitas koperasi yang bisa berperan sebagai koperasi contoh (role model) untuk koperasi produksi dan jasa. 6. Peningkatan kontribusi kaum muda untuk berkiprah dalam organisasi bisnis koperasi.	1. Peningkatan peran kaum muda sebagai pengelola dan anggota koperasi. 2. Peningkatan jumlah usaha rintisan berbentuk koperasi. 3. Peningkatan efektifitas implementasi teknologi digital pada organisasi dan operasional bisnis koperasi. 4. Peningkatan produktifitas koperasi yang disumbang oleh semakin banyak dan berkualitasnya sumber daya manusia pengelola koperasi.	1. Koordinasi untuk pengembangan skala usaha koperasi unggulan. 2. Fasilitasi koperasi unggulan berbasis potensi daerah dan inovasi untuk meraih pasar lokal, nasional dan internasional. 3. Peningkatan capaian inovasi teknologi koperasi.	1. Pengembangan koperasi sebagai entitas bisnis yang kompetitif dengan memiliki sumber daya manusia berbasis pengetahuan. 2. Penguatan koperasi sebagai entitas bisnis melalui jejaring dan kemitraan bisnis di tingkat nasional dan internasional.
e	Return on Aset (ROA) BUMD*	Perintisan dan penguatan sumber dana	Kerjasama antar pemerintah daerah	Ekspansi dan transformasi digital	Pemantapan capaian kinerja BUMD.



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial. 2. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 3. Pemberian bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang. 4. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.	1. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. 2. Peningkatan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat. 3. Peningkatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan melakukan pembinaan baik bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM dan IKM 4. Pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. 5. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) Nasional yang berdaya saing	1. Membangun dan perbaikan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. 2. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat. 3. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. 4. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan cyber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, tinggi serta kepemimpinan digital)	1. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. 2. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat. 3. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 4. Pemberian bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang 5. Pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. 6. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Penguatan SDM	Akselerasi Kelembagaan	Mengkokohkan Regulasi dan Penyadaran Masyarakat	Pengakuan dan Kontributif
		1. Penguatan akses pendidikan dan pelatihan; memastikan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta mengembangkan program pelatihan keterampilan yang menguntungkan perempuan. 2. Pengembangan kebijakan keluarga; mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di rumah tangga.	1. Inklusi perempuan disektor formal dan informal; mendorong sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung perempuan, termasuk kebijakan pengurangan kesenjangan gaji dan peningkatan akses perempuan ke posisi kepemimpinan 2. Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK); memberikan dukungan khusus kepada perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan memberikan akses ke modal, pelatihan, dan jaringan.	1. Penguatan perlindungan hukum; meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan di tempat kerja, termasuk penegakan hukum terhadap pelecehan seksual dan diskriminasi gender. 2. Kampanye penyadaran masyarakat; melanjutkan kampanye penyadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja dan menginspirasi perubahan budaya yang positif	Pengakuan dan Apresiasi; Mengakui kontribusi signifikan perempuan dalam angkatan kerja dan memperingati pencapaian mereka dalam mencapai kesetaraan gender.
17.	Indeks Inovasi Daerah	1. Mendorong pendirian pusat inovasi lokal dan pelatihan kreativitas untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan	1. Menggalakkan pembentukan kluster inovasi sektor-sektor unggulan dan memfasilitasi program akselerator untuk mempercepat pengembangan solusi inovatif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	1. Mendorong kerjasama regional dan internasional dalam riset dan pengembangan, serta memperluas jejaring kolaborasi antar kabupaten dan kota dengan lembaga inovasi global untuk meningkatkan daya saing	1. Memfasilitasi akses pembiayaan dan sumber daya bagi start-up dan usaha kecil menengah yang berfokus pada inovasi, serta membangun platform kolaborasi antar dan intra kabupaten dan kota untuk berbagi pengalaman



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Penciptaan ekosistem dan budaya inovasi yang inklusif dan kolaboratif	2. Percepatan inovasi sebagai katalisator kesejahteraan masyarakat	sektor unggulan daerah di pasar global, 2. Penguatan inovasi untuk daya saing sektor unggulan daerah pada rantai jaringan global	dan sumber daya dalam mengimplementasikan solusi inovatif berkelanjutan, 2. Perwujudan daerah berdaya saing tinggi berbasis inovasi berkelanjutan
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau				
18.	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau				
a	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1. Pembangunan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berpedoman kepada pengembangan ekonomi hijau 2. Input yang digunakan untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan hasil dari pengembangan ekonomi hijau	Akselerasi pengembangan ekonomi hijau pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Pemantapan pembangunan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengacu pada pembangunan ekonomi hijau	Pembangunan ekonomi hijau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
b	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja melalui : 1) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi 2) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi melalui : 1) Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh melalui: 1) Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon 2) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kabupaten, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global 3) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui Ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform 4) Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global	2) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Kabupaten Dharmasraya 3) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) 4) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian	regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya	



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5) Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis 6) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian			
IE6	Transformasi Digital				
19.	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk inovasi	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk daya saing	Transformasi layanan pemerintahan dan inovasi bisnis berbasis digital
		1. Sinergitas kegiatan pembangunan TIK di Kabupaten Dharmasraya 2. Intensifikasi literasi digital masyarakat 3. Pemaksimalan layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi 4. Pendampingan dan edukasi TIK bagi yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah 5. Pendampingan pelaku usaha untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif	1. Koordinasi multipihak untuk menjamin ketersediaan infrastruktur TIK berkualitas dan merata 2. Koordinasi multipihak untuk menjamin keamanan dalam penggunaan teknologi digital 3. Pendampingan koperasi dan usaha kecil menengah untuk menjadikan teknologi digital sebagai bagian dari strategi inovasi 4. Peningkatan jumlah masyarakat yang menguasai kemampuan TIK melalui inkubasi dan pelatihan	1. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK 2. Pendampingan TIK untuk inovasi dan internasionalisasi koperasi dan usaha mikro/UMKM 3. Fasilitasi interaksi dan layanan sektor publik yang memberikan ruang besar bagi partisipasi publik dalam pembangunan	1. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK 2. Koordinasi pemaksimalan efektifitas layanan pemerintahan berbasis digital dalam upaya meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan pemerintahan, serta memanfaatkan potensi inovasi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 3. Peningkatan wirausaha berbasis teknologi yang mampu meningkatkan jejaring kemitraan bisnis dan pasar melalui capaian inovasi TIK



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1E7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				
20.	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja :	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi :	Perkonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh : Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional
		(1) Penguatan proses bisnis usaha mikro melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. (2) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui lmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama	(1) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. (2) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Barat. (3) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan		



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		& pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. (3) Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). (4) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.		
21.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHK)	Penguatan Landasan Transformasi (Modal Dasar); 1. Meningkatkan Infrastruktur: Investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan jaringan telekomunikasi yang dapat meningkatkan daya tarik bagi investor. Infrastruktur yang memadai akan mendorong terciptanya lingkungan bisnis dan iklim investasi yang kondusif yang apda akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Meningkatkan Kemudahan Berbisnis: Meningkatkan kemudahan berbisnis dengan memperbaiki regulasi, mengurangi birokrasi, dan menyederhanakan	(Akselerasi transnformasi) Meningkatkan Promosi Investasi: Melalui promosi dan fasilitasi investasi akan dapat mempercepat aliran modal asing ke dalam sektor-sektor usaha unggulan daerah. Penguatan Pendampingan Investasi: penguatan layanan pendampingan investasi bagi investor baru, termasuk dukungan dalam proses perizinan dan integrasi dengan jaringan bisnis lokal, dapat mempercepat waktu penyelesaian investasi yang apad akhirnya akan meningmatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi		



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		proses perizinan akan dapat menarik investor untuk berinvestasi di wilayah Dharmasraya 3. Mendorong Pemberdayaan Pengusaha Lokal: Mendorong pengusaha lokal untuk berinvestasi dan berkembang dapat membantu memperkuat basis ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing daerah. 4. Meningkatkan investasi bidang Pendidikan dan Pelatihan			
22.	Ekspor Barang dan Jasa	Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke I (Penguatan Landasan Transformasi (Modal Dasar); 1. Mendorong diversifikasi produk dan pasar: mendorong pelaku bisnis untuk diversifikasi produk dan pasar ekspor mereka. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan insentif atau dukungan finansial bagi perusahaan yang berinovasi dan memperluas keberadaannya di berbagai pasar. 2. Mendorong penguatan regulasi sertifikasi dan Standarisasi: Memastikan bahwa produk yang diekspor memenuhi standar internasional untuk dapat	Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke II (Akselerasi transformasi) 1. Meningkatkan fasilitas Keuangan untuk ekspor: Menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap fasilitas keuangan seperti kredit ekspor, asuransi kredit, dan jaminan investasi dapat membantu mengurangi risiko dan memfasilitasi perdagangan internasional. 2. Mendorong Riset dan Pengembangan (R&D): Mendukung kegiatan riset dan pengembangan untuk	Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke III (Ekspansi dan Transformasi Digital) 1. Pengembangan Infrastruktur Digital: mendorong Investasi dalam infrastruktur digital seperti broadband tingkat tinggi dan teknologi 5G untuk memastikan aksesibilitas dan kecepatan internet yang memadai, membantu perusahaan dalam melakukan transaksi online dan komunikasi lintas batas. 2. Mendorong peningkatan Promosi Ekspor Digital: Mendorong dan mendukung upaya promosi ekspor digital melalui	Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke IV (Pemantapan Capaian Visi Pembangunan) 1. Mendorong Pengurangan Hambatan Perdagangan: Berupaya untuk mengurangi hambatan perdagangan, termasuk tarif dan hambatan non-tarif, melalui perundingan dan implementasi perjanjian perdagangan bebas dengan mitra dagang potensial 2. Mendorong Peningkatan Efisiensi Logistik: mendorong upaya untuk terus mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur logistik untuk



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		meningkatkan kepercayaan konsumen internasional dan membuka akses ke pasar global yang lebih luas.	meningkatkan kualitas produk dan layanan ekspor, sekaligus menciptakan produk baru yang dapat diminati di pasar internasional. 3. Mendorong Pengembangan Pasar Baru: Mendorong perusahaan untuk menjelajahi dan memasuki pasar-pasar baru, dengan memberikan dukungan keuangan, informasi pasar, dan bantuan lainnya untuk membantu perusahaan mengidentifikasi peluang di pasar internasional. Fasilitasi Keuangan untuk Ekspor: membantu peningkatan akses yang mudah dan terjangkau terhadap fasilitas keuangan seperti kredit ekspor dan asuransi kredit guna membantu melindungi perusahaan dari risiko pembayaran dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk menawarkan syarat pembayaran yang lebih baik kepada pelanggan internasional	kampanye pemasaran online, kehadiran di platform e-commerce internasional, dan penggunaan media sosial. 3. Mendorong Peningkatan Keamanan Data: Menetapkan kebijakan dan regulasi yang menjamin keamanan data pelanggan dan perusahaan dalam transaksi ekspor digital. Membangun kepercayaan terhadap keamanan data adalah kunci untuk kesuksesan ekspor digital. Mengembangkan Sertifikasi Digital: Membangun sistem sertifikasi digital untuk memastikan keamanan dan kualitas produk dalam perdagangan internasional.	memastikan rantai pasok ekspor berjalan dengan efisien. Jaringan transportasi, dan teknologi informasi merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing. 3. Penguatan kepatuhan terhadap Standar Internasional: Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar internasional, baik untuk kualitas produk maupun keamanan, untuk memastikan bahwa produk ekspor memenuhi persyaratan pasar internasional. Mendorong penguatan prinsip Keberlanjutan dan Ramah Lingkungan: Memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam kebijakan ekspor. Produk yang dihasilkan secara berkelanjutan adalah produk yang ramah lingkungan dan meningkatkan daya saing produk ekspor berbasis ekonomi hijau
IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	1. Penguatan regulasi dan kelembagaan sektor perumahan dan kawasan permukiman 2. Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh diperkotaan dan perdesaan. 3. Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan bencana. 4. Meningkatkan rumah layak huni yang diprioritaskan di kawasan perkotaan dan perdesaan. 5. Menyiapkan skema pembangunan public housing (seperti rumah susun dan kawasan perumahan tapak) dan social housing (perumahan berbasis masyarakat dengan dukungan stimulan dan subsidi pemerintah) yang terjangkau berikut skema pembiayaan dan kelembagaan pembangunan perumahan. 6. Peningkatan peran developer dalam pembangunan melalui kemudahan regulasi dan kebijakan subsidi.	1. Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui rehabilitasi rumah dan subsidi perumahan dari pemerintah daerah. 2. Membangun perumahan melalui berbagai skema perumahan (housing schemes) berbentuk public housing di kawasan cepat tumbuh perkotaan dan perdesaan. 3. Mengembangkan prasarana kawasan permukiman di kawasan cepat tumbuh di kawasan perkotaan dan perdesaan. 4. Mengembangkan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan yang terpadu dan merata bagi seluruh wilayah	Pengoptimalan program pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara menyeluruh melalui dukungan kebijakan	Pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman selaras dengan rencana tata ruang



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
b	Persentase Desa Mandiri	1. Percepatan pengembangan infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor strategis 2. Pemenuhan kebutuhan energi dan infrastruktur 3. Percepatan pembangunan dan daya saing desa, peningkatan kualitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana 4. Peningkatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan 5. Peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman 6. Pengembangan kemandirian ekonomi lokal	1. Peningkatan infrastruktur desa. 2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia 3. Peningkatan regulasi dan ekonomi. 4. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan 5. Pemantapan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk kemandirian nagari	1. Peningkatan infrastruktur desa. 2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia 3. Peningkatan regulasi dan ekonomi 4. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan 5. Pemantapan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk kemandirian nagari	1. Nagari yang berkualitas dan berkembang 2. Pemantapan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat desa
Misi 3	Transformasi Tata Kelola				
IE9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif				
24.	Indeks Reformasi Hukum	Mempercepat proses harmonisasi regulasi dan peningkatan	Mempercepat proses harmonisasi regulasi dan peningkatan	Mengintensifkan kerja sama regional dan internasional serta	Mendorong kemandirian dalam pembentukan regulasi, penyesuaian dengan standar



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kompetensi ASN untuk merespons perubahan sosial dan ekonomi.	kompetensi ASN untuk merespons perubahan sosial dan ekonomi.	meningkatkan infrastruktur regulasi digital.	internasional, inovasi regulasi, serta penguatan monitoring dan evaluasi.
25.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Dharmasraya. - Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE. -Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE). - Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat. -Tersedianya layanan publik yang terintegrasi - Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan. 2. Interoperabilitas:- Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem.-	1. Pengotomatisan Proses: - Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. - Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan. 2. Penggunaan Teknologi Baru: - Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti Internet of Things (IoT) untuk perwujudan Smart City menuju Smart Region, penggunaan Block Chain untuk pengamanan data.- Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis cloud.- Tersedianya Big Data 3. Peningkatan Keamanan Siber - Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang lebih maju - Kolaborasi Pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber 4. Perluasan literasi digital kepada Masyarakat.	1. Pengotomatisan Proses: - Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. - Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan. 2. Penggunaan Teknologi Baru: - Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti Internet of Things (IoT) untuk perwujudan Smart City menuju Smart Region, penggunaan Block Chain untuk pengamanan data. - Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis cloud. - Tersedianya Big Data 3. Peningkatan Keamanan Siber: - Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang lebih maju. -Kolaborasi Pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber 4. Perluasan literasi digital kepada Masyarakat	1. Inklusi Digital: - Memastikan aksesibilitas SPBE bagi semua lapisan masyarakat. 2. Pengembangan Kapabilitas Pemerintah: - Meningkatkan kapabilitas internal pemerintah dalam mengelola dan memelihara sistem SPBE.



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya Government System Bus yang handal. 3. Keamanan Data:- Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. - Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. 4. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan)	5. Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN	5. Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN	
26.	Indeks Pelayanan Publik	1. Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan 2. Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik 5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	1. Percepatan pemerataan digitalisasi pelayanan publik dan SPBE 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda untuk mendukung pelayanan publik berbasis elektronik 3. Penguatan sinergitas tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan 5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	1. Peningkatan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi dan terpadu 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda yang adaptif serta kompetitif untuk mendukung pelayanan publik terintegrasi dan terpadu 3. Peningkatan penyelenggara pelayanan publik yang adaptif dan berdaya saing nasional 4. Peningkatan partisipasi bermakna (meaningful participation) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik	1. Terwujudnya layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan nasional 2. Terwujudnya kinerja perangkat daerah yang adaptif, kompetitif serta berdaya saing nasional dan global 3. Terwujudnya penyelenggara pelayanan publik yang adaptif, kompetitif dan berintegritas berbasis digital 4. Terwujudnya partisipasi bermakna (meaningful participation) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	5. Terwujudnya pemerataan aksesibilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan
27.	Anti Korupsi				
a	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)	Pembenahan proses promosi dan mutasi pegawai yang mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme:	Penguatan upaya pencegahan praktik suap/ gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah: 1) Implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/ pengelolaan gratifikasi di instansi 2) Menegakkan sanksi/ hukuman penerimaan suap/ gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten 3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/ pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/ gratifikasi 4) Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap	Pengembangan pengawasan internal yang inovatif sehingga lebih proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi: 1) Penyelenggaraan audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dalam bentuk penyalahgunaan perjalanan dinas, markup anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan 2) Pengembangan sistem insentif kepada pegawai yang menerapkan perilaku anti korupsi sehingga mendorong seluruh pegawai peduli terhadap gerakan antikorupsi	Perwujudan pencegahan korupsi untuk melahirkan perilaku antikorupsi bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggara pemerintahan daerah: 1. Penyusunan proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan 2. Penguatan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pengembangan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa 4. Pengembangan vendor management system



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal		5. Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan 6. Penyelenggaraan pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan
Misi 4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah				
IE10	Hukum Berkeadilan, dan Keamanan Daerah				
28.	Indeks Reformasi Hukum	Mempercepat proses harmonisasi regulasi dan peningkatan	Mempercepat proses harmonisasi regulasi dan peningkatan	Mengintensifkan kerjasama regional dan internasional serta	Mendorong kemandiriandalam pembentukan regulasi, penyesuaian dengan standar



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kompetensi ASN untuk merespons perubahan sosial dan ekonomi.	kompetensi ASN untuk merespons perubahan sosial dan ekonomi.	meningkatkan infrastruktur regulasi digital di setiap.	internasional, inovasi regulasi, serta penguatan monitoring dan evaluasi.
29.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	1. Peningkatan keprofesionalan aparatur dalam penanganan pelanggaran 2. Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan	Pengembangan kualitas SDM dan Sarpras serta inovasi untuk mendukung keefektifan penegakan peraturan daerah	1. Pemantapan keprofesionalan aparatur dalam penanganan pelanggaran 2. Pemantapan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan	Mewujudkan kelembagaan penyelenggaraan penegakan Perda yang transparan, partisipatif dan terpadu
30.	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketertiban dan ketertiban umum	1. Pengembangan kualitas SDM dan sarana prasarana serta inovasi penyelenggaraan ketertiban dan ketertaman dan ketertiban umum 2. Penguatan prosedur penyelesaian kasus gangguan kamtibmas	1. Penyelenggaraan ketertiban dan ketertaman masyarakat yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan 2. Penguatan transparansi, Partisipasi, Koordinasi dan keterpaduan	1. Pemantapan ketertiban dan ketertaman masyarakat yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan 2. Pemantapan transparansi, Partisipasi, Koordinasi dan keterpaduan 3. Penyelenggaraan ketertiban dan ketertaman masyarakat yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan	Menciptakan Dharma Raya yang tertib, aman dan nyaman
IE11	Stabilitas Ekonomi Makro				
31.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1) Difokuskan pada penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	1) Difokuskan pada peningkatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat	1) Difokuskan pada penguatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat	1) Difokuskan pada pemantapan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Perlu ditingkatkan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah 3) Pengembangan database, pendataan potensi pajak daerah, serta digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis 4) Penegakan disiplin yang lebih baik perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak	menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah 2) Penyempurnaan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis 3) Penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak 4) Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan	menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah 2) Penguatan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis 3) Penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak 4) Penguatan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan	menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah 2) Pemantapan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis 3) Penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak 4) Pemantapan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan
32.	Tingkat Inflasi	1. Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan 2. Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga	1. Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan 2. Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga	Peningkatan kualitas & kuantitas layanan logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah antar wilayah sebagai pendukung Dharma Raya sebagai mandala pengembangan agrikultur sebagai lumbung pangan Sumatera	Pemantapan kualitas & kuantitas layanan logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah antar wilayah sebagai pendukung Dharma Raya sebagai mandala pengembangan agrikultur sebagai lumbung pangan Sumatera



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah 4. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa : percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan peningkatan peran BUMD/BUMDes untuk efisiensi rantai pasok 5. Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah 6. Perlunya data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat atas kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal	3. Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah 4. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa : percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan peningkatan peran BUMD/BUMDes untuk efisiensi rantai pasok 5. Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah 6. Perlunya data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat atas kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal		



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33.	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan				
a	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	Penguatan Struktur dan ketahanan Industri Perbankan termasuk Industri Perbankan Syariah melalui langkah-langkah seperti konsolidasi bank syariah, bank umum syariah (BUS) dan BPRS, serta penguatan Unit Usaha Syariah (UUS) melalui kebijakan spin-off, dan peningkatan efisiensi perbankan syariah melalui sinergi dengan induk.	1. Akselerasi Digitalisasi Perbankan Syariah yang difokuskan pada penyelenggaraan dan ketahanan Teknologi Informasi (TI) perbankan syariah, pengembangan modul TI sesuai karakteristik produk perbankan syariah, serta akselerasi digitalisasi layanan BPRS. 2. Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah melalui penguatan tata kelola syariah (Shariah Governance Framework), pengembangan keunikan produk syariah, penguatan peran perbankan syariah dalam keuangan berkelanjutan (sustainable finance), rebranding perbankan syariah, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) yang mencerminkan nilai-nilai syariah.	Peningkatan Kontribusi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional, melalui upaya meningkatkan literasi dan inklusi perbankan syariah, penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, peningkatan peran perbankan syariah di sektor UMKM, serta penguatan implementasi perlindungan konsumen dan masyarakat di industri perbankan syariah.	Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Perbankan Syariah, yang mencakup akselerasi proses perizinan dan penguatan perizinan yang terintegrasi, pengaturan yang berorientasi pada ketahanan, daya saing dan dampak sosial-ekonomi, dengan memperhatikan <i>best practice</i> dan/atau standar internasional, pengawasan berbasis teknologi untuk deteksi dini dan menjaga integritas sistem perbankan, dan pengembangan industri melalui kerja sama dengan lembaga internasional untuk mengembangkan industri secara berkelanjutan.
b	Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat.	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat.	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat.	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat.



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif. 3. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal. 4. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal. 5. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan.	2. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif. 3. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal. 4. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal. 5. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan.	2. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif. 3. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal. 4. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal. 5. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan.	2. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif. 3. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal. 4. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal. 5. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan.
c	Total Kredit/PDRB	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan. 2. Menyusun kebijakan/regulasi dalam mendukung penjaminan kredit perbankan serta subsidi bunga terutama bagi para pelaku usaha mikro. 3. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan. 4. Memperkuat pembiayaan usaha mikro melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan. 2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan. 3. Memperkuat pembiayaan usaha mikro melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan. 2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan. 3. Memperkuat pembiayaan usaha mikro melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan. 2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan. 3. Memperkuat pembiayaan usaha mikro melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). 4. Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan terhadap Kredit Perbankan
34.	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	1. Penguatan literasi dan edukasi keuangan.	1. Melakukan literasi keuangan.	1. Melakukan pendampingan terhadap sektor jasa keuangan	Mewujudkan kesinambungan dan keberlanjutan sektor jasa



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Menggali potensi di sektor jasa keuangan nonbank, untuk mencapai sistem keuangan domestik yang stabil sesuai dengan kondisi daerah.	2. Mensosialisasikan sektor jasa keuangan yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi daerah. 3. Membuat regulasi yang dapat mendorong akses terhadap lembaga jasa keuangan .	yang sesuai dengan kondisi daerah. 2. Mempermudah akses keuangan sesuai dengan jasa keuangan yang akan dikembangkan.	keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah.
IE12	Kerjasama antar wilayah				
35.	Persentase Kerjasama Antar Daerah yang Ditindaklanjuti	Peningkatan kerjasama sinkronisasi kebijakan pembangunan dengan wilayah tetangga/ regional	Peningkatan cakupan kerjasama antar wilayah tetangga/ regional	Percepatan pembangunan lintas daerah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan yang berkeadilan	Terwujudnya integrasi pembangunan antar wilayah
Misi 5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi				
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				
36.	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	1. Penguatan kelembagaan lokal untuk resolusi konflik sosial 2. Penyelesaian konflik sosial yang berkeadilan	Pemantapan kelembagaan untuk mencegah timbulnya konflik sosial	Mewujudkan kondisi sosial di masyarakat yang berkeadilan serta berkelanjutan	Mewujudkan Kabupaten Dharma Raya multi-etnis yang harmonis
37.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	1) Pengidentifikasian dan penguatan ketahanan sosial budaya dalam menghadapi	1) Transformasi model dan praktek ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal dan	1) Pengembangan model dan praktek ketahanan sosial budaya lokal yang selaras dan	1) Perwujudan ketahanan sosial budaya yang berkelanjutan dan perkembangan kemajuan



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tantangan perubahan sendi-sendi kehidupan di daerah akibat dari disrupsi teknologi 4.0 dan 5.0 2) Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal untuk penguatan keseimbangan kehidupan yang berkelanjutan secara ekologis dan identitas masyarakat berbasis Agama dan Budaya 3) Pemantapan model kebijakan dan implementasi membangun ketahanan keluarga dan lingkungan berbasis kearifan lokal 4) Kebudayaan sebagai salah satu media mempromosikan Geds (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial) 5) Penguatan Pendidikan formal, informal dan non formal yang berbasis budaya lokal untuk meningkatkan nilai dan moral sebagai bagian dari identitas berbangsa 6) Penguatan Kerangka Kebijakan dan implementasi tentang	lingkungan ekologi untuk dapat mempertahankan kesinambungan pembangunan 2) Transformasi implementasi ekonomi budaya melalui nilai, fungsi dan dampak yang signifikan kesejahteraan masyarakat 3) Transformasi nilai dan praktek - pendidikan formal, informal dan non formal, yang berdampak pada peningkatan SDM untuk kemajuan kebudayaan dan masyarakat 4) Transformasi kebijakan dan program warisan budaya yang berbasis digital dan transformasi IT 5) Transformasi media dan praktek ekspresi budaya yang sesuai dengan perkembangan dunia digital dan transformasi IT 6) Transformasi pola dan praktek budaya literasi di tengah masyarakat lokal, daerah, nasional dan internasional, melalui peningkatan kualitas SDM kebudayaan agar tercipta	adaptif dengan perkembangan global dan intervensi kebudayaan dunia 2) Penguatan kebudayaan lokal dalam era digitalisasi untuk menghadapi perubahan global dan lingkungan sebagai respon ketahanan masyarakat terhadap ekspansi dan intervensi budaya global 3) Partisipasi program ekonomi budaya dalam kancah budaya global yang diperankan oleh pelaku budaya 4) Partisipasi SDM hasil transformasi nilai dan praktek pendidikan pada dunia global yang berbasis kepada digitalisasi dan transformasi teknologi 5) Pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber pengembangan jati diri dan ekonomi budaya dalam berlangsungnya komunikasi masyarakat dunia global 6) Partisipasi dan komunikasi kebudayaan daerah dengan kebudayaan global sebagai	bangsa dan negara sebagai negara maju dan beradab 2) Eksistensi kebudayaan lokal yang berdaulat dan berjaya untuk menjalankan fungsi yang signifikan guna menjaga keberlanjutan ekologi dan identitas masyarakat berhadapan dengan globalisasi yang ekspansif 3) Perwujudan tingkat ekonomi budaya di daerah yang maju, terarah dan berkelanjutan untuk kemajuan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat 4) Perwujudan sistem dan SDM kebudayaan yang dihasilkan dari proses transformasi dan ekspansi global sebagai bukti bagi kemajuan bangsa dan sebagai negara maju 5) Perwujudan warisan budaya sebagai jati diri yang bernilai simbolik dan ekonomis untuk menopang kemajuan bangsa 6) Perwujudan Ekspresi budaya yang maju, komunikatif dan fungsional bagi kemajuan



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Ekonomi budaya untuk kesejahteraan masyarakat 7) Penguatan fondasi kebijakan dan implementasi kebijakan bagi keberlanjutan eksistensi warisan budaya luhur sebagai identitas bangsa 8) Penguatan bentuk-bentuk ekspresi budaya berbasis kesukubangsaan dan komunitas sebagai kekuatan identitas dan modal pengembangan kebudayaan 9) Penguatan budaya literasi dalam berbagai bidang praktek dan aktivitas budaya di dalam lingkungan pendidikan, publik, teknologi dan ekonomi	kecerdasan literasi yang signifikan 7) Transformasi gerakan dan praktek budaya literasi dan ekspresi budaya yang responsif terhadap GEDSI	wujud adaptasi dan respon terhadap akulturasi dan asimilasi kebudayaan dunia 7) Penerapan dan partisipasi budaya literasi dalam lingkup ekspansi global, sehingga mampu menciptakan keseimbangan literasi anatar budaya lokal dan budaya global 8) Penerapan kebijakan kesetaraan gender yang diakui di tingkat global tanpa menghilangkan kearifan lokal dan paradigma lokal	bangsa dan kesejahteraan masyarakat 7) Perwujudan budaya literasi yang disesuaikan dengan kemajuan SDM kebudayaan, kualitasdan ekonomi bangsa untuk menopang kemajuan yang berkelanjutan 8) Perwujudan kesetaraan gender di segala bidang kehidupan kebudayaan yang dipraktekkan oleh masyarakat di semua wilayah sehingga menciptakan inklusifitas kebudayaan
38.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Peletakan Pondasi Regulasi Kerukunan Umat Beragama 1) Memperkuat regulasi tentang kerukunan umat beragama sesuai dengan kearifan lokal dan adat istiadat yang menjadi landasan filosofis dalam kehidupan bermasyarakat 2) Penguatan Kebijakan Hukum: Meningkatkan perlindungan hukum bagi minoritas agama	Membentuk Karakter Kerukunan Umat Beragama 1) Menjadikan materi kerukunan beragama yang terintegrasi dalam kearifan lokal diajarkan kepada generasi muda sejak SD Sampai dengan Perguruan Tinggi 2) Penguatan terhadap kelompok dan aliran keagamaan bahwa	Memperkuat Struktur Organ Kerukunan Umat Beragama 1) Pelatihan Kepimipin Agama: Menyelenggarakan program pelatihan bagi pemimpin agama untuk memperkuat keterampilan mereka dalam mempromosikan dialog dan toleransi antaragama 2) Perkuat Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam melakukan	Kolaborasi Elemen Masyarakat untuk Kerukunan Umat Beragama 1) Penggalangan Kemitraan Antaragama: Mendorong kolaborasi antara pemimpin agama dari berbagai kepercayaan untuk mengatasi isu-isu sosial dan ekonomi bersama 2) Pengakuan terhadap Kontribusi Masyarakat Beragama:



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi berbasis agama	pentingnya hidup bersama dan saling menghargai	konsolidasi dan dialog antar umat beragama 3) Edukasi dan dialog berkaitan pemeliharaan kerukunan, toleransi, moderasi beragama, dan wawasan kebangsaan	Menghargai dan mengakui kontribusi positif yang diberikan oleh masyarakat beragama dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif				
39.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	1) Penguatan Layanan Kesejahteraan Keluarga: Fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga 2) Penguatan Resiliensi Keluarga: Program-program pembangunan ketahanan keluarga melalui pelatihan keterampilan, pengembangan keuangan inklusif, dan bantuan sosial untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan 3) Pemberdayaan Partisipasi Keluarga: Mendorong partisipasi aktif keluarga dalam pembangunan melalui program-program sosialisasi, pelatihan kepemimpinan keluarga, dan	1) Integrasi Kebijakan Multisektor: Meningkatkan koordinasi antar sektor dalam pembangunan keluarga untuk memastikan pendekatan holistik dan terintegrasi 2) Inovasi Program Pembangunan Keluarga: Mendorong penggunaan teknologi dan inovasi dalam penyediaan layanan kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi keluarga 3) Penguatan Kapasitas Keluarga: Program-program pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kapasitas keluarga dalam mengelola sumber daya dan mengatasi tantangan	1) Pengembangan Model Pembangunan Keluarga Berbasis Masyarakat: Mendorong adopsi dan adaptasi model-model pembangunan keluarga yang berhasil di tingkat lokal untuk diperluas secara nasional dan regional 2) Kolaborasi Internasional: Memperkuat kerja sama internasional dalam pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya di tingkat regional/global 3) Advokasi dan Diplomasi: Mengadvokasi pentingnya pembangunan keluarga dalam agenda global dan mempromosikan kebijakan pro-keluarga di forum internasional	1) Konsolidasi Pencapaian: Evaluasi dan konsolidasi pencapaian dalam pembangunan keluarga untuk memastikan keberlanjutan dan perbaikan berkelanjutan 2) Inovasi Kelembagaan: Merancang dan mengimplementasikan kelembagaan dan mekanisme yang efektif dalam pembangunan keluarga untuk menyesuaikan dengan tuntutan masa depan 3) Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi: Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk melacak perubahan pembangunan kualitas keluarga dan mengidentifikasi area-area



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pengembangan komunitas berbasis keluarga			yang memerlukan perbaikan lebih lanjut
40.a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	1. Peningkatan edukasi kesehatan dan pencegahan perkawinan dibawah umur 2. Peningkatan dan penguatan perempuan dalam bidang politik, kewirausahaan dan profesional. 3. Peningkatan akses pendidikan inklusif bagi perempuan	1. Peningkatan kesadaran melalui health-promoting behavior untuk perempuan dengan promosi kesehatan 2. Akselerasi peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional. 3. Pemantapan dan akselerasi kualitas pendidikan bagi perempuan melalui kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi profesional	1. Penguatan health promoting behaviour sejalan dengan peningkatan regulasi dan sistem kesehatan global 2. Partisipasi kapasitas perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional di dunia global 3. Penyediaan akses pendidikan global bagi perempuan untuk peningkatan partisipasi di dunia global.	1. Mewujudkan sistem kesehatan global untuk mendukung dan mempertahankan kesehatan perempuan 2. Mewujudkan posisi dan peran perempuan dalam kemajuan tinggi di bidang politik, kewirausahaan dan profesional 3. Mewujudkan sistem pendidikan yang menjamin keberlanjutan peran serta dan kualitas perempuan dalam pembangunan.
b	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Memperkuat pondasi perlindungan anak dengan mengimplementasikan kebijakan lokal yang mendukung hak-hak sipil dan kebebasan anak, mendorong terbentuknya lingkungan keluarga yang stabil dan pengasuhan alternatif yang berkualitas di masing-masing daerah, meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak, menyelenggarakan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang	Mempercepat transformasi dengan mengintensifkan upaya penegakan hukum hak sipil dan kebebasan anak di tingkat lokal, meningkatkan kualitas layanan dan dukungan bagi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di masing-masing daerah, memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak di wilayah ini, meningkatkan mutu pendidikan dan kesempatan budaya bagi anak-, serta memperkuat jaringan perlindungan	Mengembangkan kerjasama dalam perlindungan hak sipil dan kebebasan anak di tingkat lokal, mendukung pengembangan sistem perlindungan keluarga dan alternatif di berbagai daerah, menyediakan akses universal terhadap layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak, mempromosikan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang beragam, serta mengadvokasi perlindungan anak dengan	Mencapai perwujudan Indonesia Emas dengan menjamin perlindungan hak sipil dan kebebasan anak sebagai bagian integral dari masyarakat yang maju, memperkuat sistem perlindungan keluarga yang tangguh dan berkelanjutan di tingkat lokal, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak secara menyeluruh, memberikan pendidikan berkualitas dan kegiatan budaya yang



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kreatif, serta memperkuat sistem perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan di tingkat lokal.	khusus yang responsif di tingkat lokal.	memperkuat peran setiap daerah dalam upaya ini.	mencerminkan identitas masing-masing, serta menjamin perlindungan yang efektif bagi anak-anak dalam situasi khusus.
1E15	Lingkungan Hidup Berkualitas				
41.	Indeks Tutupan Lahan	1. Pemetaan lokasi-lokasi yang rawan konversi lahan hutan menjadi non hutan 2. Restorasi kawasan bekas tambang 3. Pengembangan bibit dan penanaman kembali kawasan hutan yang telah gundul 4. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami 5. Pemanfaatan hasil non hutan dan kegiatan pariwisata dalam upayan pelestarian hutan secara lestari.	1. Akselerasi penanaman hutan kembali terutama di bagian hulu sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari 2. Pengembangan hutan berbasis rakyat	Penghijauan di daerah sub DAS tengah	Pemantapan penghijauan pada DAS hulu tengah dan hilir melalui hutan kerakyatan
42.	Kualitas Lingkungan Hidup				
a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam; 2. Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk	1. Pembudayaan perilaku masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan; 2. Penerapan dan pengembangan teknologi dalam hal pembangunan sistem	1. Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS, serta kawasan konservasi darat dan perairan 2. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan	Penguatan ketahanan lingkungan



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal peningkatan kualitas air dan udara; 3. Pengembangan instrumen kebijakan dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, serta pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan dan pelestarian SDA 4. pembangunan yang mempertimbangkan resiko bencana, daya dukung daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, keanekaragaman hayati, perubahan iklim, berbasis rencana tata ruang.	peringatan dini kualitas lingkungan; 3. Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan hidup melalui kegiatan wisata alam, riverfront/waterfront tourism, penyediaan RTH	lokal dalam menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup	
b	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	1. Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat dan terpusat, serta pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	1. Pemerataan infrastruktur dan peningkatan akses layanan sanitasi. 2. Penguatan kolaborasi dan kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi. 2. Penguatan kolaborasi dan kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman	Penguatan kelembagaan dan kolaborasi serta kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Pengembangan sistem layanan pengelolaan air limbah domestik 3. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah dan antar pemangku kepentingan untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi 4. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.			
c	Pengelolaan Sampah				
-	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam ; 2. Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi termasuk pengolahan limbah B3 3. Pengembangan instrumen regulasi dan kebijakan serta kelembagaan dalam	1. Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan, 2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten disetiap daerah, 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> 4. Semakin berfungsinya TPST untuk mengolah timbulan sampah	1. Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang zero waste. 2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	1. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> , 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah. 4. Peningkatan jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)			lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan)
-	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam ; 2. Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi; 3. Pengembangan instrumen regulasi dan kebijakan serta kelembagaan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah. 4. Perluasan cakupan layanan persampahan di perdesaan dan perkotaan	1. Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan, 2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten disetiap daerah, 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan	1. Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang <i>zero waste</i> 2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>	1. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> , 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan Kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan)
IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan				
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan				



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a	Konsumsi Listrik per Kapita	1. Penuntasan masalah listrik di pedesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan 2. Perumusan kebijakan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk percepatan penyediaan listrik.	1. Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk UMKM dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi 2. Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu 3. Meningkatkan pengembangan dan pengusahaan ketenagalistrikan 4. Meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi, termasuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Pengembangan energi dan sumber daya energi yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di daerah dengan meningkatkan pemanfaatan energi surya.	1. Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (grid) 2. Menciptakan peluang investasi pembangkit listrik berbasis EBT bagi investor lokal maupun asing	1. Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (grid) 2. Menciptakan peluang investasi pembangkit listrik berbasis EBT bagi investor lokal maupun asing



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
b	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan : 1. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 2. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 3. Meningkatkan peran pemuda sebagai regenerasi petani. 4. Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan. 5. Peningkatan kapasitas petani dalam teknologi dan inovasi. 6. Peningkatan jumlah ketersediaan pangan. 7. Pengurangan laju konversi lahan. 8. Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi).	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif : 1. Penguatan sistem pangan lokal, pertanian cerdas iklim serta tatakelola pangan yang inklusif. 2. Pengembangan praktek pertanian berkelanjutan. 3. Peningkatan akses, dan pemanfaatan pangan. 4. Perbaikan pengaturan pola makan. 5. Peningkatan promosi pangan lokal.	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan : 1. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. 2. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis. 3. Perlindungan dan pemulihan sumber daya alam pertanian. 4. Pengembangan kemitraan dan bisnis pertanian inklusif	Mewujudkan Dharmasraya sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan di tingkat regional: 1. Pertanian berbasis ekologi dan sumber daya lokal dengan input rendah. 2. Meningkatkan rantai nilai dan perdagangan pangan yang adil.



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		9. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.			
c	Ketahanan Air				
-	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan dan perdesaan 2. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya 3. Penguatan kebijakan dan regulasi terkait pemanfaatan dan pengelolaan air baku	1. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya 2. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan air minum dan infrastruktur konektivitas intraregion	1. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan air baku dan air minum intraregion; 2. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya	Pemantapan penyediaan air baku dan air minum dan sistem transmisi/ distribusinya;
-	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	1. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum perpipaan pada kawasan perkotaan. 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	1. Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi: pemetaan resiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan. 2. Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi: kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait. 3. Memperkuat Regulasi, kebijakan dan sistem perijinan pembangunan agar sesuai	1. Memantapkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana dengan terpetakannya potensi dan resiko bencana serta kesiapan sistem peringatan dini dan infrastruktur kebencanaan. 2. Memantapkan tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana dan kesiapan komunitas. 3. Mengelola sumberdaya alam kawasan DAS secara berkelanjutan dengan pendekatan konservasi lingkungan	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana. 2. Membangun tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju melibatkan instansi pemerintahan, organisasi non pemerintahan dan komunitas. 3. Memantapkan upaya konservasi lingkungan untuk mengurangi resiko bencana seperti banjir, longsor, abrasi, dan kekeringan di kawasan DAS dalam jangka panjang	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana dengan teknologi maju. 2. Memantapkan tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju di daerah. 3. Mengelola manfaat sumberdaya alam kawasan DAS sesuai dengan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dengan tata ruang serta melakukan konservasi lingkungan di kawasan DAS untuk mengurangi resiko bencana seperti banjir, longsor, abrasi, dan kekeringan dalam jangka panjang			
45	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tangggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2. Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektifikasi, lengeloan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution); 3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi, 3. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah, 4. Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif; 2. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi;	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Arah Kebijakan			
		Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap II (Akselerasi)	Tahap III (Ekspansi Global)	Tahap IV (Perwujudan Indonesia Emas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; 4. Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon			

Sumber : Hasil Analisis Bapperida, Tahun 2024



Tabel 5- 6 Arah Kebijakan Arah Kebijakan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Dharma Raya

No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
01. Usia Harapan Hidup (tahun)	1) Peningkatan Kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. 2) Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN. 3) Peningkatan Kualitas kompetensi Tenaga Kesehatan. 4) Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan 5) Pelayanan kesehatan khusus bagi lansia	1) Pemerataan pelayanan dan jangkauan kesehatan yang berkualitas. 2) Pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi 3) Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat 4) Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pelayanan kesehatan; 5) Pemerataan pelayanan kesehatan khusus bagi Lansia	1) Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional. 2) Mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik global. 3) Pemerataan pelayanan kesehatan bersifat promotif dan kuratif khusus bagi Lansia	1) Mewujudkan Pelayanan Kesehatan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas. 2) Mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang masing-masing. 3) Mewujudkan edukasi kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif. 4) Mewujudkan pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas dan berkeadilan 5) Pelayanan prima untuk Lansia
02.a Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	1) Peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. 2) Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN. 3) Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan. 4) Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI; 5) Pemantapan program Keluarga berencana	1) Pemerataan pelayanan kesehatan kesehatan yang berkualitas. 2) Pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi. 3) Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. 4) Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pelayanan kesehatan; 5) Pemerataan jangkauan layanan kesehatan pra dan pasca ibu melahirkan	1) Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional. 2) Mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik global; 3) Pemerataan jangkauan sarana dan prasarana kesehatan pra dan pasca ibu melahirkan	1) Mewujudkan Pelayanan Kesehatan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas 2) Mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang masing-masing. 3) Mewujudkan edukasi kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif. 4) Mewujudkan pelayanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan yang berkualitas dan berkeadilan
02.b Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	1) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. 2) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi nakes yang	1) Percepatan Penurunan Stunting dan pencegahan Stunting 2) Pemerataan tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi. 3) Pemerataan dan peningkatan akses	1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. 2) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	1) Mewujudkan akses layanan kesehatan universal. 2) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. 3) Mewujudkan kualitas SDM



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	berkualitas. 3) Peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. 4) Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	layanan kesehatan universal 4) Percepatan peranan lintas sektor dan lintas sektor dalam keterlibatan penanganan stunting	3) Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompaten dengan standar internasional	berkualitas dengan keterpenuhan gizi masyarakat
03.a Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	1) Peningkatan Komitmen dan Kepemimpinan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2) Peningkatan Upaya Promosi dan Pencegahan, Pemberian Pengobatan pencegahan TBC dan Pengendalian Infeksi; 3) Peningkatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi tuberkulosis; 4) Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 5) Peningkatan skrining Tuberkulosis dimulai dari level Nagari, Kecamatan, Kabupaten Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC.	1) Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2) Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; 3) Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC; 4) Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 5) Penguatan screening TBC dimulai untuk setiap tingkatan dimulai dari jorong, nagari, kecamatan, kabupaten/kota dalam sehingga dapat mewujudkan wilayah bebas TBC.	1) Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi; 2) Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 3) Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 4) Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan masyarakat;	1) Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 2) Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 3) Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan masyarakat.
03.b Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	1. Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan	1. Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan	1. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; 2. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam	Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 2. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 3. Penguatan surveilans



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	pengendalian TBC dan pengendalian Infeksi;3. Peningkatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC;4. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien;5. Peningkatan screening TBC untuk setiap tingkatan dimulai dari jorong, nagari, kecamatan, kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC	pengendalian infeksi; 3. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC; 4. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 5. Penguatan screening TBC dimulai untuk setiap tingkatan dimulai dari jorong, nagari, kecamatan, kabupaten/kota dalam sehingga dapat mewujudkan wilayah bebas TBC.	rangka eradikasi TBC;3. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien;4. Penguatan surveilans aktif tuberculosis berbasis layanan dan Masyarakat;	aktif tuberculosis berbasis layanan dan masyarakat;
04. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	1) Meningkatkan cakupan Kepesertaan JKN ; 2) Meningkatkan jumlah peserta di kelompok peserta Non-PBI; 3) Penguatan sustainabilitas keuangan melalui perluasan kesertaan; 4) Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan prosedur medis untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta JKN melalui kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RS pemerintah maupun swasta; 5) Meningkatkan kolaborasi antara BPJS kesehatan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN;	1) Peningkatan Cakupan dan Aksesibilitas bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang sulit dijangkau; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui peningkatan standar kompetensi tenaga medis, infrastruktur fasilitas kesehatan, dan sistem rujukan; 3) Digitalisasi dan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, klaim, pelayanan kepada peserta, monitoring, dan evaluasi program JKN; 4) Edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya asuransi kesehatan dan pencegahan	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional ; 2. Mengembangkan produk dan layanan asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pasar global.	1. Memastikan seluruh penduduk Kabupaten Dharmasraya mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui program JKN, tanpa terkecuali; 2. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan teknologi medis, untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat; 3. Fokus pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan melalui edukasi, vaksinasi, dan program deteksi dini untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tertentu; 4. Menerapkan inovasi dan teknologi



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
		penyakit; 5) Melakukan program edukasi dan kampanye literasi kesehatan yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program JKN; 6) Membangun kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi profesi, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN; 7) Meningkatkan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan akuntabilitas, integritas, dan transparansi program JKN		terbaru dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti telemedicine untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program JKN;5. Meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi marginal;6. Memperkuat mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program JKN;7. Membangun kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan dan pengembangan program JKN;8. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme.
05.a.2 Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi	1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; 2) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan	1) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 2) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 3) Peningkatan kualitas guru dan tenaga	1) Penguatan kurikulum pendidikan dan kualitas pembelajaran anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter serta	1) Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2) Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
minimum pada asesmen tingkat nasional	menengah); 3) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 5) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	kependidikan; 4) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	keterampilan, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2) Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 3) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan.	global; 3) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics); 4) Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK; 5) Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
05.a.2.1 a-I Literasi Membaca	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan.4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana,	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global.3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.5.



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.		didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, 6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan
05.a.2.2 a-ii Numerasi	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan.4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global.3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
				untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
05.b Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	1. Penguatan kurikulum pendidikan dan kualitas pembelajaran anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter serta keterampilan, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan.	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics); 4. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK; 5. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
05.c Harapan Lama Sekolah (tahun)	1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; 2) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 3) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik,	1) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 2) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 3) Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; 4) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	1) Penguatan kurikulum pendidikan dan kualitas pembelajaran anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter serta keterampilan, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2) Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan/vokasi	1) Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2) Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 3) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics);



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	hususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 5) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.		berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 3) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan.	4) Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK; 5) Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
06. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	1. Penguatan kurikulum pendidikan dan kualitas pembelajaran anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter serta keterampilan, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan.	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics); 4. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK; 5. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
07. Persentase Pekerja Lulusan	1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan	1. Mendorong diversifikasi bidang keahlian dan pengembangan teknologi	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan 2. Peningkatan	1. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan industri2. Penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, dengan fokus pada pengembangan keterampilan teknis, pemecahan masalah, dan kreativitas 3. Kolaborasi dalam penyelenggaraan program magang dan pelatihan kerja untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa 4. Meningkatkan fleksibilitas pendidikan dan mobilitas tenaga kerja	baru 2. Memberikan dukungan kepada investasi dalam pengembangan teknologi dan inovasi 3. Penerapan sistem pendidikan dan pelatihan sepanjang hayat, serta penyediaan layanan penempatan kerja dan konseling karir	kesetaraan gender dan inklusi di tempat kerja untuk memastikan bahwa semua lulusan memiliki peluang yang sama untuk berkariir di bidang keahlian menengah tinggi 3. Menciptakan tenaga kerja yang terampil, adaptif, dan berdaya saing global	yang siap menghadapi tantangan global 2. Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 3. Penyelenggaraan dan peningkatan akses pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
08. Tingkat Kemiskinan (%)	1. Penanggulangan kemiskinan melalui program-program pemenuhan kebutuhan dasar baik berupa uang, pangan, bantuan biaya pendidikan, bantuan sosial kesehatan.2. Peningkatan cakupan pemberdayaan masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan.3. Perluasan program pengembangan kesempatan kerja padat karya 4. Peningkatan program kredit-kredit kerakyatan dan usaha bersama5. Penyediaan dan perbaikan perumahan golongan miskin6. Membina	1. Melanjutkan program-program lima tahunan pertama dengan cakupan yang lebih luas2. Penyerapan tenaga kerja daerah untuk pengurangan pengangguran yang akan menyebabkan kemiskinan3. Penyerapan tenaga kerja pada pembangunan infrastruktur perdesaan4. Pengembangan program-program kemandirian di masyarakat miskin melalui komoditas pangan berbasis kearifan lokal	1. Melanjutkan program-program lima tahunan pertama dengan cakupan yang lebih luas2. Membangun sistem informasi untuk menjamin tercakupnya data pemberantasan masyarakat miskin mulai dari jorong, nagari, kecamatan, dan kabupaten	Terpantaunya kondisi masyarakat miskin melalui sinergi sistem informasi di pemerintah dan masyarakat sehingga setiap kondisi kemiskinan dapat ditanggulangi lebih awal baik oleh pemerintah maupun masyarakat



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	kesetiakawanan sosial masyarakat untuk pemberantasan kemiskinan			
09. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Penguatan sistem internal manajemen berupa ; pendataan, kelembagaan/penataan institusi, penyediaan data dan informasi, penguatan kepesertaan/akuisisi dan peningkatan kebijakan yang inklusif	Good governance untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam mencapai target cakupan kepesertaan	Penguatan dan penyesuaian sistem dengan manufaktur teknologi ; menjaga eksistensi peran lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan	Pemantapan sistem berupa (1) sistem jaminan sosial ketenagakerjaan universal, dan (2) evaluasi program berjalan dan berprinsip mewujudkan program yang adaptif dan inovatif
10. Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Optimalisasi kebijakan yang responsif terhadap penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan promosi hak penyandang disabilitas sebagai manusia utuh yang bermartabat	Meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas untuk kemandirian yang bermartabat, memiliki hak dan akses yang sama dalam pelayanan publik, serta inklusivitas dalam berbagai aspek pembangunan	Penyandang disabilitas berdaya untuk membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi	Memastikan keberlanjutan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan ekonomi yang inklusif
11. Rasio PDRB Industri Pengolahan	1. Pengenalan produk unggulan untuk dikembangkan menjadi industri UMKM setiap kecamatan2. Promosi produk unggulan untuk pasar domestik dan provinsi3. Pemberian bantuan peralatan industri berbasis pangan4. Penyediaan infrastruktur industri pada lokasi-lokasi industri berbasis pangan	1. Pemantapan industri unggulan berbasis pangan2. Perluasan jejaring pasar industri berbasis pangan3. Berkembangnya kegiatan industri dan jasa ikutan untuk memperkuat kemandirian induatri pangan	1. Berkembangnya industri penunjang lainnya berbasis komoditi pertanian non pangan2. Pemasaran produksi kegiatan industri pangan sudah mulai dalam kondisi stabil dan terkait dengan kegiatan sektor lainnya seperti pariwisata	Industri berbasis pertanian berkembang
12.a Rasio PDRB Akomodasi Mamin	1. Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial.2. Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan	1. Pengembangan digitalisasi berbasis inovasi dan teknologi pariwisata berdaya saing nasional.2. Pengembangan SDM pariwisata yang	1. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan. 2.	1. Inovasi Pengembangan kolaborasi dan partnership dalam mengembangkan bisnis pariwisata. 2. Pengembangan ekonomi pariwisata



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	(Sustainability Tourism)3. Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal. 4. Inovasi pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan nusantara. 5. Penguatan integrasi pengembangan pariwisata halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan	kreatif dan inovatif.3. Inovasi pengembangan aktifitas dan pengalaman wisatawan (local and authentic experiences). 4. Penguatan promosi pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi. 5. Inovasi pengembangan kreatif hub pada setiap destinasi unggulan.	Peningkatan inovasi pengembangan ekonomi kreatif berkualitas dan berkelanjutan. 3. Pengembangan industri kreatif dan budaya kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan.4. Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan penerapan blue, green dan sirkuler ekonomi, digitalisasi dan kemajuan teknologi. 5. Inovasi Pengembangan kota kreatif berbasis kreatifitas talenta dan ekonomi budaya untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata.	sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya.3. Peningkatan partisipasi pada rantai pasok ekonomi kreatif.
13. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	Peningkatan ekosistem ekonomi kreatif	Pemaksimalan kolaborasi multipihak untuk inovasi pemasaran dan produk ekonomi kreatif	Standardisasi produk ekonomi kreatif	Internasionalisasi usaha ekonomi kreatif
14.a Proporsi jumlah UKM non pertanian	1. Pemetaan Usaha Mikro (bagian dari UMKM yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota) berdasar kategori informal.formal, kebutuhan, dan profil pemilik usaha. 2. Perumusan kebijakan usaha mikro berdasarkan kebutuhan dan karakteristik usaha mikro. 3. Peningkatan inovasi produk dan pemasaran usaha mikro. 4. Peningkatan efektifitas teknologi untuk	1. Pemaksimalan kolaborasi usaha mikro dan usaha besar. 2. Peningkatan produk hasil hilirisasi pertanian oleh usaha mikro.3. Fasilitasi ekspansi pasar.4. Penguatan usaha mikro unggulan. 5. Pemaksimalan klaster industri logam dan makanan sebagai pusat inovasi dan pemasaran. 6. Fasilitasi ekspansi pasar. 7.	1. Integrasi usaha mikro berbasis nagari dan dengan pihak luar dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan. 2. Kolaborasi dan skalabilitas untuk ekspansi pasar regional dan nasional. 3. peningkatan kesiapsiagaan bencana usaha kecil menengah	1. Pemaksimalan potensi usaha mikro bertumbuh tinggi sebagai sumber pertumbuhan ekoomi.2. Internasionalisasi UKM. 3. peningkatan kesiapsiagaan bencana usaha kecil menengah



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	usaha mikro. 5. Peningkatan kompetensi Usaha Mikro dengan pelatihan berbasis aspirasi pelaku usaha. 6. Penguatan kluster inovasi logam. 7. Peningkatan literasi dan akses keuangan/permodalan.	Pendampingan dan inkubasi melibatkan multipihak (konsep hexa helix).		
14.b Proporsi jumlah IKM	Pemaksimalan peran IKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui inovasi	Peningkatan skala bisnis dan implementasi strategi bisnis IKM	Peningkatan kuantitas dan kualitas IKM yang secara maksimal mampu memanfaatkan potensi daerah	Peningkatan jumlah IKM yang mampu menjadi usaha berbasis teknologi untuk mencapai daya saing tinggi
14.c Rasio Kewirausahaan	Penguatan kebijakan kewirausahaan, kompetensi, dan pendidikan kewirausahaan	Implementasi inovasi dan kolaborasi dan penguatan ekonomi kewirausahaan	Pertumbuhan bisnis tinggi dan penguatan untuk internasionalisasi	Penguatan wirausaha berbasis teknologi dan internasionalisasi
14.d Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	1. Pemaksimalan peran perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan Koperasi dan UMKM sebagai pembina yang menekankan aspek tata kelola (governance) dan sumber daya manusia koperasi. 2. Pelatihan untuk sumber daya manusia koperasi berdasarkan kebutuhan koperasi. 3. Penguatan peran multipihak (misalnya universitas dan dunia industri) untuk meningkatkan aspek strategi dan inovasi bisnis koperasi. 4. Penguatan koperasi melalui adopsi dan implementasi inovasi digital. 5. Peningkatan kualitas koperasi yang bisa berperan sebagai koperasi	1. Peningkatan peran kaum muda sebagai pengelola dan anggota koperasi. 2. Peningkatan jumlah usaha rintisan berbentuk koperasi. 3. Peningkatan efektifitas implementasi teknologi digital pada organisasi dan operasional bisnis koperasi. 4. Peningkatan produktifitas koperasi yang disumbang oleh semakin banyak dan berkualitasnya sumber daya manusia pengelola koperasi.	1. Koordinasi untuk pengembangan skala usaha koperasi unggulan. 2. Fasilitasi koperasi unggulan berbasis potensi daerah dan inovasi untuk meraih pasar lokal, nasional dan internasional. 3. Peningkatan capaian inovasi teknologi koperasi.	1. Pengembangan koperasi sebagai entitas bisnis yang kompetitif dengan memiliki sumber daya manusia berbasis pengetahuan. 2. Penguatan koperasi sebagai entitas bisnis melalui jejaring dan kemitraan bisnis di tingkat nasional dan internasional.



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	contoh (role model) untuk koperasi produksi dan jasa. 6. Peningkatan kontribusi kaum muda untuk berkiprah dalam organisasi bisnis koperasi.			
14.e ROA BUMD	Perintisan dan penguatan sumber dana	Kerjasama antar pemerintah daerah	Ekspansi dan transformasi digital	Pemantapan capaian kinerja BUMD.
15. Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial. 2. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 3. Pemberian bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang. 4. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.	1. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. 2. Peningkatan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat. 3. Peningkatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan melakukan pembinaan baik bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM dan IKM 4. Pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. 5. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) Nasional yang berdaya saing	1. Membangun dan perbaikan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. 2. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat. 3. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. 4. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan cyber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, tinggi serta kepemimpinan digital)	1. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. 2. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat. 3. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 4. Pemberian bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang 5. Pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. 6. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.
15.b Proporsi Penciptaan	Penguatan infrastruktur dan pendidikan vokasi yang di fokuskan pada : 1)	Pengembangan ekosistem ketenagakerjaan dan peningkatan	Ekspansi dan Diversifikasi Ekonomi yang di fokuskan pada : 1) . Ekspansi	Konsolidasi dan Ketahanan Ekonomi Jangka Panjang dengan fokus pada 1)



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
Lapangan Kerja Formal (%)	Pengembangan infrastruktur ekonomi dan industri melalui pembangunan serta meningkatkan infrastruktur dan sarana serta prasana yang mendukung investasi dari sisi akses, transportasi kawasan serta teknolog informasi, memperkuat insentif kepada investor dalam sektor padat karya, khususnya industri manufaktur, pertanian modern, dan pariwisata. 2) Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi. 3) melakukan reformasi regulasi perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor. 4) Meningkatkan kapasitas UMKM melalui pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan	kualitas SDM yang di fokuskan pada : 1) Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui perluasan program pelatihan keterampilan yang bersertifikasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di pasar kerja formal, serta mendorong perusahaan untuk terlibat dalam program magang dan reskilling. 2) Pengembangan sektor berbasis teknologi melalui mengembangkan industri berbasis teknologi dan mendorong inovasi teknologi di sektor-sektor utama, seperti manufaktur cerdas dan pertanian digital, serta mendorong inkubasi startup teknologi yang bisa menciptakan lapangan kerja formal baru. 3) penguatan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja melalui peningkatan akses pekerja formal terhadap program jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, dan memperbaiki kebijakan terkait upah minimum yang proporsional dengan produktivitas dan tingkat inflasi. 4) Penataan ketenagakerjaan di sektor pertanian dan maritim melalui meningkatkan dukungan guna	sektor industri hijau dan berkelanjutan melalui mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, industri hijau, dan pengelolaan limbah yang mendorong terciptanya pekerjaan formal serta memberikan insentif untuk investasi di sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 2) Diversifikasi ekonomi daerah melalui mendorong pengembangan ekonomi berbasis kluster di berbagai sektor seperti agroindustri, teknologi informasi, pariwisata, dan jasa keuangan serta mengembangkan industri kreatif yang memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai sektor formal. 3) Memperluas Pasar Kerja Formal di Daerah Terpencil melalui mendorong pengembangan infrastruktur ekonomi di daerah terpencil untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja formal di daerah tersebut serta meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di dalam provinsi atau antar kabupaten/kota. 4) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya	Konsolidasi sistem ketenagakerjaan yang inklusif dengan memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, mendapat akses yang setara terhadap lapangan kerja formal serta perbaikan terhadap kebijakan ketenagakerjaan untuk mengakomodasi dinamika baru di pasar kerja. 2) meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan daerah melalui kebijakan diversifikasi ekonomi yang adaptif terhadap perubahan pasar global dan fluktuasi ekonomi serta mengembangkan sektor-sektor yang tahan terhadap krisis, seperti pertanian modern, teknologi kesehatan, dan logistik. 3) Mengembangkan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan membangun sistem pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja, memastikan lulusan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi siap masuk ke lapangan kerja formal dan juga meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	serta memberikan akses permodalan kepada UMKM dengan potensi untuk berkembang ke sektor formal, serta membangun pusat layanan terpadu untuk mendukung pengembangan UMKM menjadi lebih kompetitif. 5) mendorong pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pengembangan sektor pariwisata lokal sebagai penghasil lapangan kerja, dengan peningkatan kualitas SDM serta membangun infrastruktur pendukung.	modernisasi sektor pertanian dan perikanan untuk meningkatkan efisiensi dan menarik pekerja formal serta melakukan diversifikasi produk dan meningkatkan nilai tambah dari sektor primer tersebut. 5) Digitalisasi sektor publik dan swasta melalui peningkatan penggunaan teknologi dalam administrasi publik dan sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan pekerjaan baru yang lebih modern.	alam berkelanjutan melalui mendorong investasi pada sektor ekstraktif dengan pendekatan berkelanjutan dan menciptakan pekerjaan formal yang lebih banyak di bidang pengolahan hasil tambang, energi, dan kehutanan. 5) Penguatan Kerja Sama Internasional melalui penguatan hubungan dagang dan investasi dengan negara-negara luar untuk membuka lapangan kerja formal yang lebih luas melalui peningkatan ekspor dan kerja sama teknologi.	dalam merancang program ketenagakerjaan yang berorientasi pada masa depan. 4) Pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi dengan mendorong wirausaha berbasis teknologi yang menciptakan lapangan kerja formal, melalui akses permodalan, pelatihan, dan inkubasi bisnis serta meningkatkan ekosistem startup dan inovasi teknologi di berbagai sektor ekonomi. 5) Konsolidasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan, yang mampu memberikan iklim investasi yang kondusif bagi pengusaha dan perusahaan yang menciptakan lapangan kerja formal serta mengoptimalkan peran kelembagaan lokal dalam mendorong kerja sama dengan sektor swasta dan publik pada skala nasional dan internasional.
16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Penguatan SDM 1. Penguatan akses pendidikan dan pelatihan; memastikan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta	Akselerasi Kelembagaan 1. Inklusi perempuan disektor formal dan informal; mendorong sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan	Mengokohkan Regulasi dan Penyadaran Masyarakat 1. Penguatan perlindungan hukum; meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan di tempat kerja, termasuk	Pengakuan dan KontribusiPengakuan dan Apresiasi; Mengakui kontribusi signifikan perempuan dalam angkatan kerja dan memperingati pencapaian



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	mengembangkan program pelatihan keterampilan yang menguntungkan perempuan. 2. Pengembangan kebijakan keluarga; mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di rumah tangga.	mendukung perempuan, termasuk kebijakan pengurangan kesenjangan gaji dan peningkatan akses perempuan ke posisi kepemimpinan 2. Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK); memberikan dukungan khusus kepada perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan memberikan akses ke modal, pelatihan, dan jaringan.	penegakan hukum terhadap pelecehan seksual dan diskriminasi gender. 2. Kampanye penyadaran masyarakat; melanjutkan kampanye penyadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja dan menginspirasi perubahan budaya yang positif	mereka dalam mencapai kesetaraan gender.
17.b Indek Inovasi Daerah	1. Mendorong pendirian pusat inovasi lokal dan pelatihan kreativitas untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan 2. Penciptaan ekosistem dan budaya inovasi yang inklusif dan kolaboratif	1. Menggalakkan pembentukan kluster inovasi sektor-sektor unggulan dan memfasilitasi program akselerator untuk mempercepat pengembangan solusi inovatif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat 2. Percepatan inovasi sebagai katalisator kesejahteraan masyarakat	1. Mendorong kerjasama regional dan internasional dalam riset dan pengembangan, serta memperluas jejaring kolaborasi antar kabupaten dan kota dengan lembaga inovasi global untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan daerah di pasar global, 2. Penguatan inovasi untuk daya saing sektor unggulan daerah pada rantai jaringan global	1. Memfasilitasi akses pembiayaan dan sumber daya bagi start-up dan usaha kecil menengah yang berfokus pada inovasi, serta membangun platform kolaborasi antar dan intra kabupaten dan kota untuk berbagi pengalaman dan sumber daya dalam mengimplementasikan solusi inovatif berkelanjutan, 2. Perwujudan daerah berdaya saing tinggi berbasis inovasi berkelanjutan
18.a 1. Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	1. Pembangunan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berpedoman kepada pengembangan ekonomi hijau 2. Input yang digunakan untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Akselerasi pengembangan ekonomi hijau pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Pemantapan pembangunan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengacu pada pembangunan ekonomi hijau	Pembangunan ekonomi hijau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	merupakan hasil dari pengembangan ekonomi hijau			
18.b. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja melalui : 1) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi 2) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global 3) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui Ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform 4) Penyediaan	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi melalui : 1) Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian 2) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Kabupaten Dharma Raya 3) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) 4) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh melalui: 1) Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon 2) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kabupaten, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global5) Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis6) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian			
19. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (1). Sinergitas kegiatan pembangunan TIK di Kabupaten/kota (2) Intensifikasi literasi digital masyarakat kabupaten/kota (3) Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil pada kabupaten/kota (4) Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK (5) Pemaksimalan layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi di kabupaten/kota (6) Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik (7). Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk inovasi (1). Koordinasi multipihak untuk menjamin ketersediaan infrastruktur TIK berkualitas dan merata (2). Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK (3). Pendekatan efektifitas pelayanan publik berbasis TIK (4). Koordinasi multipihak untuk menjamin keamanan dalam penggunaan teknologi digital (5). Pendampingan koperasi dan usaha kecil menengah untuk menjadikan teknologi digital sebagai bagian dari strategi inovasi (6). Peningkatan jumlah masyarakat yang menguasai kemampuan TIK melalui inkubasi dan pelatihan	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk daya saing1. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK 2. Pendampingan TIK untuk inovasi dan internasionalisasi koperasi dan usaha mikro/UMKM 3. Fasilitasi interaksi dan layanan sektor publik yang memberikan ruang besar bagi partisipasi publik dalam pembangunan	Transformasi layanan pemerintahan dan inovasi bisnis berbasis digital 1. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK 2. Koordinasi pemaksimalan efektifitas layanan pemerintahan berbasis digital dalam upaya meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan pemerintahan, serta memanfaatkan potensi inovasi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat3. Peningkatan wirausaha berbasis teknologi yang mampu meningkatkan jejaring kemitraan bisnis dan pasar melalui capaian inovasi TIK



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	TIK termasuk di daerah terpencil di kabupaten/kota (8) Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK (9) Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah (10) Pendampingan pelaku usaha untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif (11) Fasilitasi interaksi dan partisipasi publik untuk meningkatkan layanan sektor publik			
20. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja : (1) Penguatan proses bisnis usaha mikro melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. (2) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui Ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani,	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi : (1) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. (2) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan	Perkonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh : Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. (3) Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Barat. (3) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). (4) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.		
21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Penguatan Landasan Transformasi (Modal Dasar); 1) Meningkatkan Infrastruktur: Investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi dapat meningkatkan daya tarik bagi investor. Infrastruktur yang memadai akan mendorong terciptanya lingkungan bisnis dan iklim investasi yang kondusif yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan Kemudahan Berbisnis: Meningkatkan kemudahan berbisnis dengan	(Akselerasi transformasi) 1) Memberikan Fasilitas Akses Pembiayaan: Meningkatkan akses ke pembiayaan melalui lembaga keuangan dan pasar modal dapat membantu perusahaan mengakses modal yang diperlukan untuk proyek investasi. 2) Mendorong Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Membentuk kawasan ekonomi khusus dengan regulasi yang lebih fleksibel dan insentif khusus untuk menarik investasi ke wilayah Sumatera Barat. 3) Meningkatkan Promosi Investasi Asing Langsung: Melalui	(Ekspansi dan Transformasi Digital) 1) Mendorong Investasi Digitalisasi dan Transformasi Digital: Mendorong investasi dalam teknologi digital, termasuk infrastruktur digital, e-commerce, dan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing daerah 2) Meningkatkan Kerjasama Internasional: mendorong peningkatan hubungan yang baik dengan negara lain dan lembaga keuangan internasional untuk membuka peluang investasi lintas negara dan meningkatkan akses terhadap modal	Pemantapan Capaian Visi Pembangunan yakni :1) Mendorong Peningkatan Daya Saing Global: Melibatkan sektor swasta dan publik dalam inisiatif untuk meningkatkan daya saing global melalui kebijakan regulasi yang mendukung dan lingkungan bisnis yang kondusif.2) Mendorong Peningkatan Konektivitas Infrastruktur: Mengembangkan infrastruktur yang mendukung konektivitas global, termasuk pelabuhan, jalan, dan sarana transportasi lainnya untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional. 3) Kebijakan



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	memperbaiki regulasi, mengurangi birokrasi, dan menyederhanakan proses perizinan akan dapat menarik investor untuk berinvestasi di wilayah Sumatera Barat 3) Mendorong Pemberdayaan Pengusaha Lokal: Mendorong pengusaha lokal untuk berinvestasi dan berkembang dapat membantu memperkuat basis ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing daerah. 4) Meningkatkan investasi bidang Pendidikan dan Pelatihan: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan faktor penting dalam menarik investasi jangka panjang. Meningkatkan Promosi Investasi: Meningkatkan upaya promosi untuk menarik investor domestik dan asing. Ini dapat melibatkan partisipasi dalam konferensi internasional, roadshow investasi, dan kampanye pemasaran yang menyoroti potensi investasi dan keuntungan berbisnis di negara tersebut	promosi dan fasilitasi investasi asing langsung, akan dapat mempercepat aliran modal asing ke dalam sektor-sektor usaha unggulan daerah. Penguatan Pendampingan Investasi: penguatan layanan pendampingan investasi bagi investor baru, termasuk dukungan dalam proses perizinan dan integrasi dengan jaringan bisnis lokal, dapat mempercepat waktu penyelesaian investasi yang apad akhirnya akan meningmatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi	asing. 3) Meningkatkan kemampuan Adopsi Industri 4.0: Mendukung transformasi industri dengan meningaktkan kemampuan mengadopsi teknologi seperti IoT (Internet of Things), kecerdasan buatan (AI), dan manufaktur otomatis untuk dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi investasi. Menodorng peningkatan Inovasi dan Teknologi: Mendorong investasi dalam sektor-sektor inovatif dan teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Memberikan insentif dan dukungan bagi riset dan pengembangan dapat meningkatkan daya saing global.	Perlindungan Investasi: Menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi investor, baik domestik maupun asing, untuk meningkatkan kepercayaan dan menarik investasi jangka panjang. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi: Membangun ketahanan ekonomi melalui diversifikasi ekonomi, pengelolaan risiko, dan pengembangan sektor-sektor yang tahan terhadap guncangan global
22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke I (Penguatan Landasan	Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke II (Akselerasi	Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke III (Ekspansi dan	Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke IV (Pemantapan Capaian



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	Transformasi (Modal Dasar);1. Mendorong Diversifikasi Produk dan Pasar: Mendorong pelaku bisnis untuk diversifikasi produk dan pasar ekspor mereka. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan insentif atau dukungan finansial bagi perusahaan yang berinovasi dan memperluas keberadaannya di berbagai pasar.2. Mendorong Penguatan regulasi Sertifikasi dan Standarisasi: Memastikan bahwa produk yang diekspor memenuhi standar internasional untuk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen internasional dan membuka akses ke pasar global yang lebih luas.	transformasi) 1. Meningkatkan Fasilitas Keuangan untuk Ekspor: Menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap fasilitas keuangan seperti kredit ekspor, asuransi kredit, dan jaminan investasi dapat membantu mengurangi risiko dan memfasilitasi perdagangan internasional.2. Mendorong Riset dan Pengembangan (R&D): Mendukung kegiatan riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan ekspor, sekaligus menciptakan produk baru yang dapat diminati di pasar internasional.3. Mendorong Pengembangan Pasar Baru: Mendorong perusahaan untuk menjelajahi dan memasuki pasar-pasar baru, dengan memberikan dukungan keuangan, informasi pasar, dan bantuan lainnya untuk membantu perusahaan mengidentifikasi peluang di pasar internasional. Fasilitas Keuangan untuk Ekspor: membantu peningkatan akses yang mudah dan terjangkau terhadap fasilitas keuangan seperti kredit ekspor dan asuransi kredit guna membantu	Transformasi Digital)1. Pengembangan Infrastruktur Digital: mendorong Investasi dalam infrastruktur digital seperti broadband tingkat tinggi dan teknologi 5G untuk memastikan aksesibilitas dan kecepatan internet yang memadai, membantu perusahaan dalam melakukan transaksi online dan komunikasi lintas batas.2. Mendorong peningkatan Promosi Ekspor Digital: Mendorong dan mendukung upaya promosi ekspor digital melalui kampanye pemasaran online, kehadiran di platform e-commerce internasional, dan penggunaan media sosial.3. Mendorong Peningkatan Keamanan Data: Menetapkan kebijakan dan regulasi yang menjamin keamanan data pelanggan dan perusahaan dalam transaksi ekspor digital. Membangun kepercayaan terhadap keamanan data adalah kunci untuk kesuksesan ekspor digital. Mengembangkan Sertifikasi Digital: Membangun sistem sertifikasi digital untuk memastikan keamanan dan kualitas produk dalam perdagangan internasional	Visi Pembangunan)1. Mendorong Pengurangan Hambatan Perdagangan: Berupaya untuk mengurangi hambatan perdagangan, termasuk tarif dan hambatan non-tarif, melalui perundingan dan implementasi perjanjian perdagangan bebas dengan mitra dagang potensial.2. Mendorong Peningkatan Efisiensi Logistik: mendorong upaya untuk terus mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur logistik untuk memastikan rantai pasok ekspor berjalan dengan efisien. Jaringan transportasi, dan teknologi informasi merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing.3. Penguatan kepatuhan terhadap Standar Internasional: Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar internasional, baik untuk kualitas produk maupun keamanan, untuk memastikan bahwa produk ekspor memenuhi persyaratan pasar internasional. Mendorong penguatan prinsip Keberlanjutan dan Ramah Lingkungan: Memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
		melindungi perusahaan dari risiko pembayaran dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk menawarkan syarat pembayaran yang lebih baik kepada pelanggan internasional		dalam kebijakan ekspor. Produk yang dihasilkan secara berkelanjutan adalah produk yang ramah lingkungan dan meningkatkan daya saing produk ekspor berbasis ekonomi hijau
23.b Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	1. Penguatan regulasi dan kelembagaan sektor perumahan dan kawasan permukiman 2. Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh dipertanian dan perdesaan. 3. Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan bencana. 4. Meningkatkan rumah layak huni yang diprioritaskan di kawasan perkotaan dan perdesaan. 5. Menyiapkan skema pembangunan public housing (seperti rumah susun dan kawasan perumahan tapak) dan social housing (perumahan berbasis masyarakat dengan dukungan stimulan dan subsidi pemerintah) yang terjangkau berikut skema pembiayaan dan kelembagaan pembangunan perumahan. 6. Peningkatan peran developer dalam pembangunan melalui	1. Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui rehabilitasi rumah dan subsidi perumahan dari pemerintah daerah. 2. Membangun perumahan melalui berbagai skema perumahan (housing schemes) berbentuk public housing di kawasan cepat tumbuh perkotaan dan perdesaan. 3. Mengembangkan prasarana kawasan permukiman di kawasan cepat tumbuh di kawasan perkotaan dan perdesaan. 4. Mengembangkan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan yang terpadu dan merata bagi seluruh wilayah	Pengoptimalan program pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara menyeluruh melalui dukungan kebijakan	Pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman selaras dengan rencana tata ruang



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	kemudahan regulasi dan kebijakan subsidi.			
23.c Persentase Desa Mandiri (%)	1. Penguatan regulasi dan kelembagaan sektor perumahan dan kawasan permukiman 2. Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh dipertanian dan perdesaan. 3. Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan bencana. 4. Meningkatkan rumah layak huni yang diprioritaskan di kawasan perkotaan dan perdesaan. 5. Menyiapkan skema pembangunan public housing (seperti rumah susun dan kawasan perumahan tapak) dan social housing (perumahan berbasis masyarakat dengan dukungan stimulan dan subsidi pemerintah) yang terjangkau berikut skema pembiayaan dan kelembagaan pembangunan perumahan. 6. Peningkatan peran developer dalam pembangunan melalui kemudahan regulasi dan kebijakan subsidi.	1. Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui rehabilitasi rumah dan subsidi perumahan dari pemerintah daerah. 2. Membangun perumahan melalui berbagai skema perumahan (housing schemes) berbentuk public housing di kawasan cepat tumbuh perkotaan dan perdesaan. 3. Mengembangkan prasarana kawasan permukiman di kawasan cepat tumbuh di kawasan perkotaan dan perdesaan. 4. Mengembangkan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan yang terpadu dan merata bagi seluruh wilayah	Pengoptimalan program pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara menyeluruh melalui dukungan kebijakan	Pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman selaras dengan rencana tata ruang
24. ndeks Reformasi Hukum	Mempercepat proses harmonisasi regulasi dan peningkatan kompetensi	Mempercepat proses harmonisasi regulasi dan peningkatan kompetensi	Mengintensifkan kerja sama regional dan internasional serta meningkatkan infrastruktur regulasi digital.	Mendorong kemandirian dalam pembentukan regulasi, penyesuaian dengan standar internasional, inovasi



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	ASN untuk merespons perubahan sosial dan ekonomi.	ASN untuk merespons perubahan sosial dan ekonomi.		regulasi, serta penguatan monitoring dan evaluasi.
25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Dharmasraya. - Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE. - Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE). - Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat. - Tersedianya layanan publik yang terintegrasi -Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan. 2. Interoperabilitas:- Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem.- Tersedianya Government System Bus yang handal. 3. Keamanan Data:- Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan	1. Pengotomatisan Proses: - Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. - Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan. 2. Penggunaan Teknologi Baru: -Meneksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti Internet of Things (IoT) untuk perwujudan Smart City menuju Smart Region, penggunaan Block Chain untuk pengamanan data.- Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis cloud.- Tersedianya Big Data 3. Peningkatan Keamanan Siber - Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang lebih maju - Kolaborasi Pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber 4. Perluasan literasi digital kepada Masyarakat. 5. Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN	1. Pengotomatisan Proses: - Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. - Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan. 2. Penggunaan Teknologi Baru: -Meneksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti Internet of Things (IoT) untuk perwujudan Smart City menuju Smart Region, penggunaan Block Chain untuk pengamanan data. - Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis cloud. - Tersedianya Big Data 3. Peningkatan Keamanan Siber: - Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang lebih maju. - Kolaborasi Pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber 4. Perluasan literasi digital kepada Masyarakat 5. Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN	1. Inklusi Digital: - Memastikan aksesibilitas SPBE bagi semua lapisan masyarakat. 2. Pengembangan Kapabilitas Pemerintah: - Meningkatkan kapabilitas internal pemerintah dalam mengelola dan memelihara sistem SPBE.



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	teknologi keamanan. - Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data.4. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan)			
26. Indeks Pelayanan Publik	1. Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan2. Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik3. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	1. Percepatan pemerataan digitalisasi pelayanan publik dan SPBE 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda untuk mendukung pelayanan publik berbasis elektronik3. Penguatan sinergitas tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	1. Peningkatan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi dan terpadu 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda yang adaptif serta kompetitif untuk mendukung pelayanan publik terintegrasi dan terpadu3. Peningkatan penyelenggara pelayanan publik yang adaptif dan berdaya saing nasional4. Peningkatan partisipasi bermakna (meaningful participation) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	1. Terwujudnya layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan nasional2. Terwujudnya kinerja perangkat daerah yang adaptif, kompetitif serta berdaya saing nasional dan global 3. Terwujudnya penyelenggara pelayanan publik yang adaptif, kompetitif dan berintegritas berbasis digital4. Terwujudnya partisipasi bermakna (meaningful participation) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik5. Terwujudnya pemerataan aksesibilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan
27.a Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)	Pembenahan proses promosi dan mutasi pegawai yang mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme:	Penguatan upaya pencegahan praktik suap/gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah:1) Implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanis pelaporan/ pengelolaan	Pengembangan pengawasan internal yang inovatif sehingga lebih proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi: 1) Penyelenggaraan audit berkala untuk mendeteksi	Perwujudan pencegahan korupsi untuk melahirkan perilaku antikorupsi bagiseluruh pihak terkaitdalam penyelenggara pemerintahan daerah: 1. Penyusunan proses dan alur dari



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
		gratifikasi di instansi²) Menegakkan sanksi/ hukuman penerimaan suap/ gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten³) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/ pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/ gratifikasi⁴) Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal	penyalahgunaan anggaran dalam bentuk penyalahgunaan perjalanan dinas, markup anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan²) Pengembangan sistem insentif kepada pegawai yang menerapkan perilaku anti korupsi sehingga mendorong seluruh pegawai peduli terhadap Gerakan antikorupsi	perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan². Penguatan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan³. Pengembangan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa⁴. Pengembangan vendor management system⁵. Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan⁶. Penyelenggaraan pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan
28. Disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten/Kota	Mempercepat proses harmonisasi regulasi dan peningkatan kompetensi ASN untuk merespons perubahan sosial dan ekonomi.	Mempercepat proses harmonisasi regulasi dan peningkatan kompetensi ASN untuk merespons perubahan sosial dan ekonomi.	Mengintensifkan kerjasama regional dan internasional serta meningkatkan infrastruktur regulasi digital di setiap.	Mendorong kemandirian dalam pembentukan regulasi, penyesuaian dengan standar internasional, inovasi regulasi, serta penguatan monitoring dan evaluasi.
29. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	1. Peningkatan keprofesionalan aparatur dalam penanganan pelanggaran ² . Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak	Pengembangan kualitas SDM dan Sarpras serta inovasi untuk mendukung keefektifan penegakan peraturan daerah	1. Pemantapan keprofesionalan aparatur dalam penanganan pelanggaran ² . Pemantapan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak	Mewujudkan kelembagaan penyelenggaraan penegakan Perda yang transparan, partisipatif dan terpadu



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	terkait penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan		terkait penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan	
30. Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1. Pengembangan kualitas SDM dan Sarpras serta inovasi penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman dan ketertiban umum 2. Penguatan prosedur penyelesaian kasus gangguan kamtibmas	1. Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan 2. Penguatan transparansi, Partisipasi, Koordinasi dan keterpaduan	1. Pemantapan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan 2. Pemantapan transparansi, Partisipasi, Koordinasi dan keterpaduan 3. Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan	Menciptakan Dharma Raya yang tertib, aman dan nyaman
31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1) Difokuskan pada penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi2) Perlu ditingkatkan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah2) Penyempurnaan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis3) Penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak4) Penguatan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan	1) Difokuskan pada peningkatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah2) Penyempurnaan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis3) Penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak4) Penyempurnaan peraturan daerah serta	1) Difokuskan pada penguatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah2) Penguatan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis3) Penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak4) Penguatan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan	1) Difokuskan pada pemantapan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah2) Pemantapan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis3) Penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak4) Pemantapan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	disiplin yang lebih baik perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak	sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan	perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan	peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan
32. Tingkat Inflasi	1. Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan 2. Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga 3. Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah 4. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa : percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan peningkatan peran BUMD/BUMDes untuk efisiensi rantai pasok 5. Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah 6.	1. Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan 2. Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga 3. Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah 4. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa : percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan peningkatan peran BUMD/BUMDes untuk efisiensi rantai pasok 5. Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah 6.	Peningkatan kualitas & kuantitas layanan logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah antar wilayah sebagai pendukung Dharmasraya sebagai mandala pengembangan agrikultur sebagai lumbung pangan Sumatera	Pemantapan kualitas & kuantitas layanan logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah antar wilayah sebagai pendukung Dharmasraya sebagai mandala pengembangan agrikultur sebagai lumbung pangan Sumatera



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	Perlunya data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat atas kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal	Perlunya data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat atas kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal		
33.a Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	Penguatan Struktur dan ketahanan Industri Perbankan termasuk Industri Perbankan Syariah melalui langkah-langkah seperti konsolidasi bank syariah, bank umum syariah (BUS) dan BPRS, serta penguatan Unit Usaha Syariah (UUS) melalui kebijakan spin-off, dan peningkatan efisiensi perbankan syariah melalui sinergi dengan induk.	1. Akselerasi Digitalisasi Perbankan Syariah yang difokuskan pada penyelenggaraan dan ketahanan Teknologi Informasi (TI) perbankan syariah, pengembangan modul TI sesuai karakteristik produk perbankan syariah, serta akselerasi digitalisasi layanan BPRS. 2. Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah melalui penguatan tata kelola syariah (Shariah Governance Framework), pengembangan keunikan produk syariah, penguatan peran perbankan syariah dalam keuangan berkelanjutan (sustainable finance), rebranding perbankan syariah, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) yang mencerminkan nilai-nilai syariah	Peningkatan Kontribusi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional, melalui upaya meningkatkan literasi dan inklusi perbankan syariah, penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, peningkatan peran perbankan syariah di sektor UMKM, serta penguatan implementasi perlindungan konsumen dan masyarakat di industri perbankan syariah.	Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Perbankan Syariah, yang mencakup akselerasi proses perizinan dan penguatan perizinan yang terintegrasi, pengaturan yang berorientasi pada ketahanan, daya saing dan dampak sosial-ekonomi, dengan memperhatikan best practice dan/atau standar internasional, pengawasan berbasis teknologi untuk deteksi dini dan menjaga integritas sistem perbankan, dan pengembangan industri melalui kerja sama dengan lembaga internasional untuk mengembangkan industri secara berkelanjutan.



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
33.d Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat. 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi. 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif. 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal. 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal. 6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan.	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat. 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi. 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif. 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal. 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal. 6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan.	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat. 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi. 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif. 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal. 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal. 6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan.	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat. 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi. 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif. 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal. 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal. 6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan.
33.e Total Kredit/PDRB	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan. 2. Menyusun kebijakan/regulasi dalam mendukung penjaminan kredit perbankan serta subsidi bunga terutama bagi para pelaku usaha mikro. 3. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan. 4. Memperkuat pembiayaan usaha mikro melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan. 2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan. 3. Memperkuat pembiayaan usaha mikro melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap terhadap kredit perbankan. 2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan. 3. Memperkuat pembiayaan usaha mikro melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap terhadap kredit perbankan. 2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan. 3. Memperkuat pembiayaan usah amikro melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). 4. Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan terhadap Kredit Perbankan



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
34. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	1. Penguatan literasi dan edukasi keuangan. 2. Menggali potensi di sektor jasa keuangan nonbank, untuk mencapai sistem keuangan domestik yang stabil sesuai dengan kondisi daerah.	1. Melakukan literasi keuangan. 2. Mensosialisasikan sektor jasa keuangan yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi daerah. 3. Membuat regulasi yang dapat mendorong akses terhadap lembaga jasa keuangan .	1. Melakukan pendampingan terhadap sektor jasa keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah. 2. Mempermudah akses keuangan sesuai dengan jasa keuangan yang akan dikembangkan.	Mewujudkan kesinambungan dan keberlanjutan sektor jasa keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah.
35. Persentase Kerjasama Antar Daerah yang Ditindaklanjuti	Peningkatan kerjasama sinkronisasi kebijakan pembangunan dengan wilayah tetangga/ regional	Peningkatan cakupan kerjasama antar wilayah tetangga/ regional	Percepatan pembangunan lintas daerah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan yang berkeadilan	Terwujudnya integrasi pembangunan antar wilayah
36. Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	1. Penguatan kelembagaan lokal untuk resolusi konflik sosial 2. Penyelesaian konflik sosial yang berkeadilan	Pemantapan kelembagaan untuk mencegah timbulnya konflik sosial	Mewujudkan kondisi sosial di masyarakat yang berkeadilan serta berkelanjutan	Mewujudkan Kabupaten Dharmasraya multietnis yang harmonis
37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	1) Pengidentifikasian dan penguatan ketahanan sosial budaya dalam menghadapi tantangan perubahan sendi-sendi kehidupan di daerah akibat dari disrupsi teknologi 4.0 dan 5.0) Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal untuk penguatan keseimbangan kehidupan yang berkelanjutan secara ekologis dan identitas masyarakat berbasis Agama dan Budaya 3) Pemantapan model kebijakan dan implementasi membangun ketahanan keluarga dan lingkungan berbasis kearifan lokal 4)	1) Transformasi model dan praktek ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal dan lingkungan ekologi untuk dapat mempertahankan kesinambungan pembangunan 2) Transformasi implementasi ekonomi budaya melalui nilai, fungsi dan dampak yang signifikan kesejahteraan masyarakat 3) Transformasi nilai dan praktek -pendidikan formal, informal dan non formal, yang berdampak pada peningkatan SDM untuk kemajuan kebudayaan dan masyarakat 4) Transformasi kebijakan dan program	1) Pengembangan model dan praktek ketahanan sosial budaya lokal yang selaras dan adaptif dengan perkembangan global dan intervensi kebudayaan dunia 2) Penguatan kebudayaan lokal dalam era digitalisasi untuk menghadapi perubahan global dan lingkungan sebagai respon ketahanan masyarakat terhadap ekspansi dan intervensi budaya global 3) Partisipasi program ekonomi budaya dalam kancah budaya global yang diperankan oleh pelaku budaya 4) Partisipasi SDM hasil transformasi nilai	1) Perwujudan ketahanan sosial budaya yang berkelanjutan dan perkembangan kemajuan bangsa dan negara sebagai negara maju dan beradab 2) Eksistensi kebudayaan lokal yang berdaulat dan berjaya untuk menjalankan fungsi yang signifikan guna menjaga keberlanjutan ekologi dan identitas masyarakat berhadapan dengan globalisasi yang ekspansif 3) Perwujudan tingkat ekonomi budaya di daerah yang maju, terarah dan berkelanjutan untuk kemajuan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat 4)



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	Kebudayaan sebagai salah satu media mempromosikan Geds (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial) 5) Penguatan Pendidikan formal, informal dan non formal yang berbasis budaya lokal untuk meningkatkan nilai dan moral sebagai bagian dari identitas berbangsa 6) Penguatan Kerangka Kebijakan dan implementasi tentang Ekonomi budaya untuk kesejahteraan masyarakat 7) Penguatan fondasi kebijakan dan implementasi kebijakan bagi keberlanjutan eksistensi warisan budaya luhur sebagai identitas bangsa 8) Penguatan bentuk-bentuk ekspresi budaya berbasis kesukubangsaan dan komunitas sebagai kekuatan identitas dan modal pengembangan kebudayaan 9) Penguatan budaya literasi dalam berbagai bidang praktek dan aktivitas budaya di dalam lingkungan pendidikan, publik, teknologi dan ekonomi	warisan budaya yang berbasis digital dan transformasi IT 5) Transformasi media dan praktek ekspresi budaya yang sesuai dengan perkembangan dunia digital dan transformasi IT 6) Transformasi pola dan praktek budaya literasi di tengah masyarakat lokal, daerah, nasional dan internasional, melalui peningkatan kualitas SDM kebudayaan agar tercipta kecerdasan literasi yang signifikan 7) Transformasi gerakan dan praktek budaya literasi dan ekspresi budaya yang responsif terhadap GEDSI	dan praktek pendidikan pada dunia global yang berbasis kepada digitalisasi dan transformasi teknologi 5) Pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber pengembangan jati diri dan ekonomi budaya dalam berlangsungnya komunikasi masyarakat dunia global 6) Partisipasi dan komunikasi kebudayaan daerah dengan kebudayaan global sebagai wujud adaptasi dan respon terhadap akulturasi dan asimilasi kebudayaan dunia 7) Penerapan dan partisipasi budaya literasi dalam lingkup ekspansi global, sehingga mampu menciptakan keseimbangan literasi antar budaya lokal dan budaya global 8) Penerapan kebijakan kesetaraan gender yang diakui di tingkat global tanpa menghilangkan kearifan lokal dan paradigma lokal	Perwujudan sistem dan SDM kebudayaan yang dihasilkan dari proses transformasi dan ekspansi global sebagai bukti bagi kemajuan bangsa dan sebagai negara maju 5) Perwujudan warisan budaya sebagai jati diri yang bernilai simbolik dan ekonomis untuk menopang kemajuan bangsa 6) Perwujudan Ekspresi budaya yang maju, komunikatif dan fungsional bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat 7) Perwujudan budaya literasi yang disesuaikan dengan kemajuan SDM kebudayaan, kualitas dan ekonomi bangsa untuk menopang kemajuan yang berkelanjutan 8) Perwujudan kesetaraan gender di segala bidang kehidupan kebudayaan yang dipraktekan oleh masyarakat di semua wilayah sehingga menciptakan iklim budaya
38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Peletakan Pondasi Regulasi Kerukunan Umat Beragama 1) Memperkuat regulasi tentang kerukunan umat beragama	Membentuk Karakter Kerukunan Umat Beragama 1) Menjadikan materi kerukunan beragama yang terintegrasi	Memperkuat Struktur Organ Kerukunan Umat Beragama 1) Pelatihan Kepimimpinan Agama:	Kolaborasi Elemen Masyarakat untuk Kerukunan Umat Beragama 1) Penggalangan Kemitraan Antaragama:



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	sesuai dengan kearifan lokal dan adat istiadat yang menjadi landasan filosofis dalam kehidupan bermasyarakat ²) Penguatan Kebijakan Hukum: Meningkatkan perlindungan hukum bagi minoritas agama dan masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi berbasis agama	dalam kearifan lokal diajarkan kepada generasi muda sejak SD Sampai dengan Perguruan Tinggi ²) Penguatan terhadap kelompok dan aliran keagamaan bahwa pentingnya hidup bersama dan saling menghargai	Menyelenggarakan program pelatihan bagi pemimpin agama untuk memperkuat keterampilan mereka dalam mempromosikan dialog dan toleransi antaragama ²) Perkuat Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam melakukan konsolidasi dan dialog antar umat beragama ³) Edukasi dan dialog berkaitan pemeliharaan kerukunan, toleransi, moderasi beragama, dan wawasan kebangsaan	Mendorong kolaborasi antara pemimpin agama dari berbagai kepercayaan untuk mengatasi isu-isu sosial dan ekonomi bersama ²) Pengakuan terhadap Kontribusi Masyarakat Beragama: Menghargai dan mengakui kontribusi positif yang diberikan oleh masyarakat beragama dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya
39. Indeks Pembangunan Keluarga	1) Penguatan Layanan Kesejahteraan Keluarga: Fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga ²) Penguatan Resiliensi Keluarga: Program-program pembangunan ketahanan keluarga melalui pelatihan keterampilan, pengembangan keuangan inklusif, dan bantuan sosial untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan ³) Pemberdayaan Partisipasi Keluarga: Mendorong partisipasi aktif keluarga dalam pembangunan melalui program-program sosialisasi, pelatihan	1) Integrasi Kebijakan Multisektor: Meningkatkan koordinasi antar sektor dalam pembangunan keluarga untuk memastikan pendekatan holistik dan terintegrasi ²) Inovasi Program Pembangunan Keluarga: Mendorong penggunaan teknologi dan inovasi dalam penyediaan layanan kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi keluarga ³) Penguatan Kapasitas Keluarga: Program-program pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kapasitas keluarga dalam mengelola sumber daya dan mengatasi tantangan	1) Pengembangan Model Pembangunan Keluarga Berbasis Masyarakat: Mendorong adopsi dan adaptasi model-model pembangunan keluarga yang berhasil di tingkat lokal untuk diperluas secara nasional dan regional ²) Kolaborasi Internasional: Memperkuat kerja sama internasional dalam pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya di tingkat regional/ global ³) Advokasi dan Diplomasi: Mengadvokasi pentingnya pembangunan keluarga dalam agenda global dan mempromosikan kebijakan pro-keluarga di forum internasional	1) Konsolidasi Pencapaian: Evaluasi dan konsolidasi pencapaian dalam pembangunan keluarga untuk memastikan keberlanjutan dan perbaikan berkelanjutan ²) Inovasi Kelembagaan: Merancang dan mengimplementasikan kelembagaan dan mekanisme yang efektif dalam pembangunan keluarga untuk menyesuaikan dengan tuntutan masa depan ³) Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi: Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk melacak perubahan pembangunan kualitas



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	kepemimpinan keluarga, dan pengembangan komunitas berbasis keluarga			keluarga dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut
40.a Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	1. Peningkatan edukasi kesehatan dan pencegahan perkawinan dibawah umur2. Peningkatan dan penguatan perempuan dalam bidang politik, kewirausahaan dan profesional.3. Peningkatan akses pendidikan inklusif bagi perempuan	1. Peningkatan kesadaran melalui health-promoting behavior untuk perempuan dengan promosi kesehatan2. Akselerasi peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional.3. Pemantapan dan akselerasi kualitas pendidikan bagi perempuan melalui kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi profesional	1. Penguatan health promoting behaviour sejalan dengan peningkatan regulasi dan sistem kesehatan global2. Partisipasi kapasitas perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional di dunia global3. Penyediaan akses pendidikan global bagi perempuan untuk peningkatan partisipasi di dunia global.	1. Mewujudkan sistem kesehatan global untuk mendukung dan mempertahankan kesehatan perempuan2. Mewujudkan posisi dan peran perempuan dalam kemajuan tinggi di bidang politik, kewirausahaan dan profesional3. Mewujudkan sistem pendidikan yang menjamin keberlanjutan peran serta dan kualitas perempuan dalam pembangunan.
40.b Indeks Perlindungan Khusus Anak	Memperkuat pondasi perlindungan anak dengan mengimplementasikan kebijakan lokal yang mendukung hak-hak sipil dan kebebasan anak, mendorong terbentuknya lingkungan keluarga yang stabil dan pengasuhan alternatif yang berkualitas di masing-masing daerah, meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak, menyelenggarakan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang kreatif, serta memperkuat sistem perlindungan	Mempercepat transformasi dengan mengintensifkan upaya penegakan hukum hak sipil dan kebebasan anak di tingkat lokal, meningkatkan kualitas layanan dan dukungan bagi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di masing-masing daerah, memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak di wilayah ini, meningkatkan mutu pendidikan dan kesempatan budaya bagi anak-, serta memperkuat jaringan perlindungan khusus yang responsif di tingkat lokal.	Mengembangkan kerjasama dalam perlindungan hak sipil dan kebebasan anak di tingkat lokal, mendukung pengembangan sistem perlindungan keluarga dan alternatif di berbagai daerah, menyediakan akses universal terhadap layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak, mempromosikan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang beragam, serta mengadvokasi perlindungan anak dengan memperkuat peran setiap daerah dalam upaya ini.	Mencapai perwujudan Indonesia Emas dengan menjamin perlindungan hak sipil dan kebebasan anak sebagai bagian integral dari masyarakat yang maju, memperkuat sistem perlindungan keluarga yang tangguh dan berkelanjutan di tingkat lokal, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak secara menyeluruh, memberikan pendidikan berkualitas dan kegiatan budaya yang mencerminkan identitas masing-masing, serta menjamin



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	husus bagi anak-anak yang rentan di tingkat lokal.			perlindungan yang efektif bagi anak-anak dalam situasi khusus.
41. Indeks tutupan lahan	1. Pemetaan lokasi-lokasi yang rawan konversi lahan hutan menjadi non hutan 2. Restorasi kawasan bekas tambang 3. Pengembangan bibit dan penanaman kembali kawasan hutan yang telah gundul 4. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami 5. Pemanfaatan hasil non hutan dan kegiatan pariwisata dalam upayan pelestarian hutan secara lestari	1. Akselerasi penanaman hutan kembali terutama di bagian hulu sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari 2. Pengembangan hutan berbasis rakyat	Penghijauan di daerah sub DAS tengah	Pemantapan penghijauan pada DAS hulu tengah dan hilir melalui hutan kerakyatan
42.a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam; 2. Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal peningkatan kualitas air dan udara; 3. Pengembangan instrumen kebijakan dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, serta pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan dan pelestarian SDA 4. pembangunan yang mempertimbangkan resiko bencana,	1. Pembudayaan perilaku masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan; 2. Penerapan dan pengembangan teknologi dalam hal pembangunan sistem peringatan dini kualitas lingkungan; 3. Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan hidup melalui kegiatan wisata alam, riverfront/waterfront tourism, penyediaan RTH	1. Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS, serta kawasan konservasi darat dan perairan 2. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dalam menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup	Penguatan ketahanan lingkungan



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	daya dukung daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, keanekaragaman hayati, perubahan iklim, berbasis rencana tata ruang.			
42.b RT dengan Akses Sanitasi Aman	1. Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat dan terpusat, serta pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). 2. Pengembangan sistem layanan pengelolaan air limbah domestik 3. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah dan antar pemangku kepentingan untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi 4. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	1. Pemerataan infrastruktur dan peningkatan akses layanan sanitasi. 2. Penguatan kolaborasi dan kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi. 2. Penguatan kolaborasi dan kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman	Penguatan kelembagaan dan kolaborasi serta kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman
42.c.1 Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam ;2. Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk	1. Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan, 2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten	1. Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang zero waste. 2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi	1. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy, 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi termasuk pengolahan limbah B33. Pengembangan instrumen regulasi dan kebijakan serta kelembagaan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah.4. Peningkatan jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	disetiap daerah, 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy 4. Semakin berfungsinya TPST untuk mengolah timbulan sampah	pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	antarwilayah salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan)
42.c.2 Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam ;2. Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi;3. Pengembangan instrumen regulasi dan kebijakan serta kelembagaan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah.4. Perluasan cakupan layanan persampahan di perdesaan dan perkotaan	1. Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan, 2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten disetiap daerah, 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan	1. Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang zero waste2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	1. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy,2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan Kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan)
43.a.1 Konsumsi listrik per kapita	1. Penuntasan masalah listrik di pedesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan2. Perumusan kebijakan	1. Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk UMKM dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata,	1. Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak	1. Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk percepatan penyediaan listrik.	pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi 2. Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu 3. Meningkatkan pengembangan dan pengusaha ketenagalistrikan 4. Meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi, termasuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Pengembangan energi dan sumber daya energi yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di daerah dengan meningkatkan pemanfaatan energi surya.	terjangkau oleh perluasan jaringan (grid) 2. Menciptakan peluang investasi pembangkit listrik berbasis EBT bagi investor lokal maupun asing	terjangkau oleh perluasan jaringan (grid) 2. Menciptakan peluang investasi pembangkit listrik berbasis EBT bagi investor lokal maupun asing
43.b Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan :1. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif : 1. Penguatan sistem pangan lokal, pertanian cerdas iklim serta tatakelola pangan yang inklusif. 2. Pengembangan praktek pertanian	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan :1. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem	Mewujudkan Dharma Raya sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan di tingkat regional:1. Pertanian berbasis ekologi dan sumber daya lokal dengan input rendah. 2. Meningkatkan rantai nilai dan perdagangan pangan yang adil.



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.2. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.3. Meningkatkan peran pemuda sebagai regenerasi petani.4. Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan.5. Peningkatan kapasitas petani dalam teknologi dan inovasi.6. Peningkatan jumlah ketersediaan pangan.7. Pengurangan laju konversi lahan.8. Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi).9. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	berkelanjutan.3. Peningkatkan akses, dan pemanfaatan pangan.4. Perbaikan pengaturan pola makan.5. Peningkatan promosi pangan lokal.	peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.2. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.3. Perlindungan dan pemulihan sumber daya alam pertanian.4. Pengembangan kemitraan dan bisnis pertanian inklusif	
43.c.1 Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan dan perdesaan2. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya3. Penguatan kebijakan dan regulasi terkait pemanfaatan dan pengelolaan air baku	1. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya2. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion	1. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan air baku dan air minum intraregion; 2. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion; 2) Penyediaan	Pemantapan penyediaan air baku dan air minum dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
			air baku dan sistem transmisi/distribusinya	
43.c.2 Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum perpipaan pada kawasan perkotaan.2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan
44. Indeks Risiko Bencana (IRBI)	1. Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi: pemetaan resiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan.2. Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi: kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah	1. Memantapkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana dengan terpetakannya potensi dan resiko bencana serta kesiapan sistem peringatan dini dan infrastruktur kebencanaan.2. Memantapkan tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana dan kesiapan komunitas.3. Mengelola sumberdaya alam kawasan DAS secara berkelanjutan dengan pendekatan konservasi lingkungan	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana.2. Membangun tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju melibatkan instansi pemerintahan, organisasi non pemerintahan dan komunitas. 3. Memantapkan upaya konservasi lingkungan untuk mengurangi resiko bencana seperti banjir, longsor, abrasi, dan kekeringan di kawasan DAS dalam jangka panjang	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana dengan teknologi maju.2. Memantapkan tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju di daerah.3. Mengelola manfaat sumberdaya alam kawasan DAS sesuai dengan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.3. Memperkuat Regulasi, kebijakan dan sistem perijinan pembangunan agar sesuai dengan tata ruang serta melakukan konservasi lingkungan di kawasan DAS untuk mengurangi resiko bencana seperti banjir, longsor, abrasi, dan kekeringan dalam jangka panjang			
45.a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam.2. Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution); 3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan;4.	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;2. Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi, 3. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah,4. Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif;2. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi;	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim



No.	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama			
	Tahap I	Tahap I (Perkuatan Fondasi)	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon			



5.2. SASARAN POKOK RPJPD TAHUN 2025-2045

Penentuan sasaran pokok dikelompokkan berdasarkan misi, arah pembangunan serta indikator utama pembangunan. Target yang ditetapkan dari sasaran pokok pembangunan seperti terlihat pada tabel 5.4 berikut ini



Tabel 5- 7 Sasaran Pokok Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Kab. Dharmasraya Pada RPJPD Kab. Dharmasraya disepakati				
			2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 1	Transformasi Sosial						
IE1	Kesehatan untuk Semua						
1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	75	76	77	78	79
2.	Kesehatan Ibu dan Anak:						
a	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	120	100	78	50	20
b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	persen	14,6	12	11	8	5
3.	Penanganan Tuberkulosis:						
a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	persen	90	92	94	98	100
b)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	persen	95	94	96	99	100
4.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	persen	98,32	100,00	100,00	100,00	100,00
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata						
5.	Hasil Pembelajaran:						
a	persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	persen	L : 70,00; N : 64,00	L : 72,25; N : 66,51	L : 74,49; N : 69,01	L : 76,74; N : 71,52	L : 77,66; N : 75,68
1)	<i>Literasi Membaca</i>	<i>persen</i>	70	72,25	74,49	76,74	77,66
2)	<i>Numerasi</i>	<i>persen</i>	64	66,51	69,01	71,52	75,68



No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Kab. Dharmasraya Pada RPJPD Kab. Dharmasraya disepakati				
			2025	2030	2035	2040	2045
b	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	10,1	10,76	11,51	12,26	13,01
c	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,39	14,79	15,18	15,58	15,91
6.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	persen	3,02	13,53	14,04	14,54	14,89
7.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	persen	77,03	78,53	80,03	81,53	83,03
IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif						
8.	Tingkat Kemiskinan	persen	2,92-3,36	1,99-2,33	1,20-1,46	1,00-1,09	0,55-0,74
9.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	persen	33,09	44,40	55,71	67,01	78,32
10.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	persen	11,64	19,14	26,64	34,14	41,64
Misi 2	Transformasi Ekonomi						
IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi						
11.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	persen	5,37	6,47	7,57	8,66	9,76
12.	Pengembangan Pariwisata						
a	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	persen	1,12	1,295	1,4	1,6	1,8
13.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	persen	0,939	1,067	1,208	1,364	1,535
14.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD						
a	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian	persen	11,13	12,64	14,15	15,66	17,16
b	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	persen	3,77	5,07	6,37	7,67	8,97
c	Rasio Kewirausahaan Daerah	persen	4,68	6,13	7,58	9,03	10,48
d	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	persen	5,554	6,432	9,066	11,699	12,291
e	Return on Aset (ROA) BUMD	persen	0,05764	0,05712	0,05527	0,05148	0,04543



No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Kab. Dharmasraya Pada RPJPD Kab. Dharmasraya disepakati				
			2025	2030	2035	2040	2045
15.a	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,7	5	4	3,5	3
b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	persen	46,55	53,09	62,13	67,82	72,46
16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	persen	61,22	63,22	65,94	67,87	69,79
17.	Indeks Inovasi Daerah	indeks	58,39	65,69	73,9	83,14	93,53
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau						
18.	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
a	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	persen	27	25	23	21	20
b	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	juta rupiah/orang	73	75	77,5	80	82,5
IE6	Transformasi Digital						
19.	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	indeks	53,52	60,14	66,76	73,38	80
1E7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global						
20.	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	persen	100	100	100	100	100
21.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	persen	28	28	26	26	24
22.	Ekspor Barang dan Jasa	persen	55	56	57	58	59
IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi						
23.	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan						
a	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	persen	61,7	71,28	80,85	90,43	100
b	Persentase Desa Mandiri	persen	15,38	21,15	26,92	32,69	38,46
Misi 3	Transformasi Tata Kelola						
IE9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif						



No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Kab. Dharmasraya Pada RPJPD Kab. Dharmasraya disepakati				
			2025	2030	2035	2040	2045
24.	Indeks Reformasi Hukum	indeks	70,65	75,65	80,65	85,65	90,65
25.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks	2,83	3,37	3,92	4,46	5
26.	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4	4,3	4,6	4,85	5
27.	Anti Korupsi	<i>Anti Korupsi</i>					
a	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)	nilai	70	73	76	80	84
b	Indeks Persepsi Anti Korupsi	indeks	4	4,25	4,5	4,75	5
Misi 4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah						
IE10	Hukum Berkeadilan, dan Keamanan Daerah						
28.	Indeks Reformasi Hukum	<i>persen</i>	70	72	75	77	80
29.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	<i>persen</i>	100	100	100	100	100
30.	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	<i>persen</i>	100	100	100	100	100
IE11							
31.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	persen	0,5	1	1,5	1,7	2
32.	Tingkat Inflasi	persen	2,80 - 3,60	2,33 - 3,43	1,85 - 3,25	1,38 - 3,08	0,90 - 2,90
33.	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan						
a	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	persen	5,13	15	20	30	35
b	Nilai Transaksi Saham Per Kapita	rupiah	364.257	720.635	1.030.339	1.357.709	1.643.556
c	Total Kredit/PDRB	persen	16,74	21	25,12	30,25	34,83
34.	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	persen	2,26	2,5	3	4	5
IE12	Kerjasama antar wilayah						
35.	Persentase Kerjasama Antar Daerah yang Ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100
36.	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	persen	100	100	100	100	100



No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Kab. Dharmasraya Pada RPJPD Kab. Dharmasraya disepakati				
			2025	2030	2035	2040	2045
Misi 5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi						
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju						
37.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	52	56	60	63	65
38.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	75	77	79	82	84
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif						
39.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	indeks	65	67	70	72	75
40.a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	0,52-0,51	0,48-0,46	0,43-0,40	0,38-0,34	0,33-0,29
b	Indeks Perlindungan Khusus Anak	indeks	80	82,5	85	87,5	90
1E15	Lingkungan Hidup Berkualitas						
41.	Indeks Tutupan Lahan	indeks	46	50	55	60	65
42.	Kualitas Lingkungan Hidup						
a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	indeks	72,82	73,88	74,94	76	77,06
b	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	persen	13,83	34,51	52,62	62,19	80,3
c	Pengelolaan Sampah						
-	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persen	26,47	42,35	58,22	74,1	90
-	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	persen	28,79	48,37	67,95	87,53	100
IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan						
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan						
a	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/ orang	893,00	1.298,00	1.691,00	2.154,00	2.576,00
b	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	persen	5,96	4,78	3,59	2,4	1,22
c	Ketahanan Air	Ketahanan Air					



No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Kab. Dharmasraya Pada RPJPD Kab. Dharmasraya disepakati				
			2025	2030	2035	2040	2045
-	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,01	0,03	0,05	0,07	0,09
-	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persen	3	9,5	17	24,5	32
IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim						
44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	indeks	137,69	136,94-126,94	126,19-116,19	110,43-105,43	117,67-94,68
45	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	72,82	73,88	74,94	76	77,06
Misi 6	Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan						
Misi 7	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan di Wilayah Tenggara Sumatera Barat						
Misi 8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah						

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Tahun 2024

BAB VI PENUTUP

6.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Bab 6. Penutup

Menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi berdasarkan capaian pembangunan daerah, serta memuat isu strategis yang akan mempengaruhi kebijakan jangka panjang daerah



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang harus dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan jangka menengah daerah maupun jangka pendek dalam rangka terwujudnya visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2045 mendatang yaitu **“DHARMASRAYA MAJU YANG BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN”**. Visi pembangunan ini akan terwujud melalui partisipasi seluruh pelaku pembangunan sesuai dengan peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan pembangunan yang saling bersinergi dan berkesinambungan. Kaidah pelaksanaan pembangunan ini meliputi:

- 1) Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan;
- 2) Kerangka Pengendalian;
- 3) Sistem Intensif; dan
- 4) Mekanisme Perubahan.

6.1.1. Konsistensi Perencanaan

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan secara terpisah mengakibatkan muncul inkonsistensi antara rencana yang disusun dengan alokasi belanja dalam proses penganggaran. Kondisi tersebut menyebabkan bias nya alokasi

belanja untuk berbagai jenis kegiatan. Hal ini akan bermuara pada inkonsistensi alokasi belanja daerah, padahal masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber pendapatan di daerah sendiri yang dapat digunakan untuk membiayai suatu kegiatan.

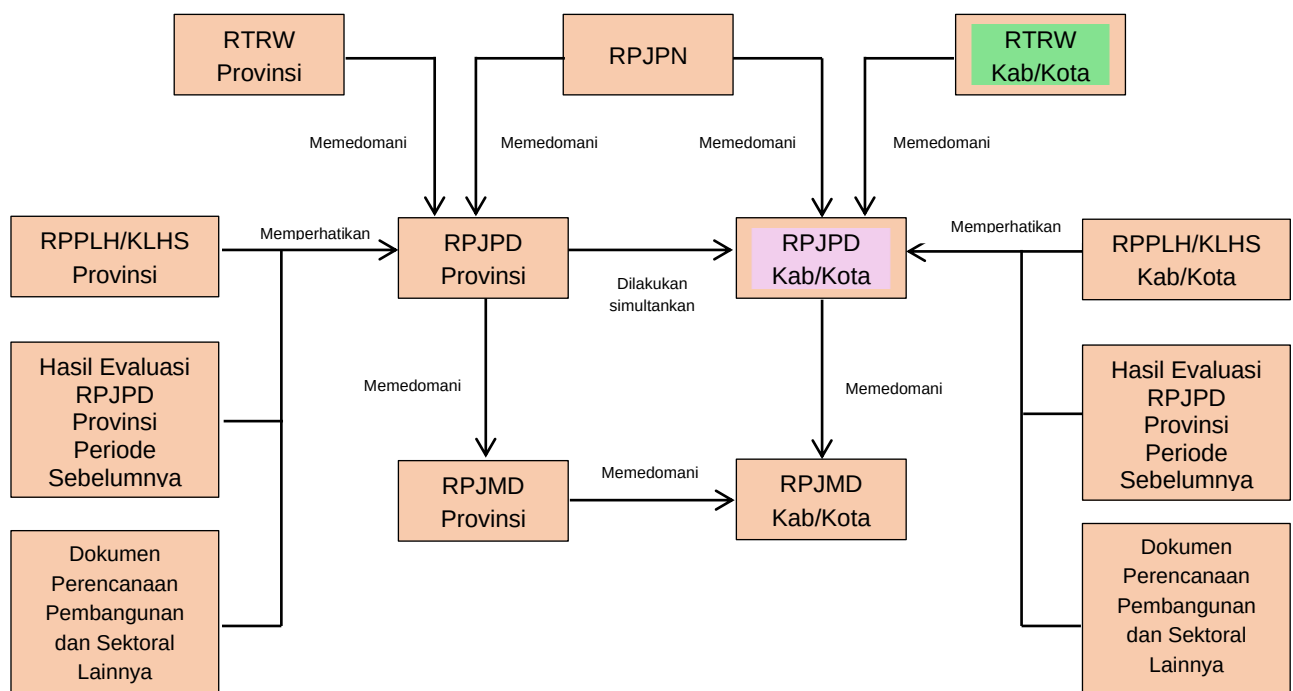
Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebelum terjadinya pelaksanaan pembangunan. Suatu proses yang berkesinambungan untuk menetapkan tujuan prioritas yang ingin dicapai kearah yang lebih baik secara terencana melalui tahapan-tahapan dengan melibatkan berbagai unsur dalam mengalokasikan sumber daya dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat sosial dengan jangka waktu tertentu merupakan arti dari perencanaan. Pembangunan seharusnya menyelesaikan suatu masalah secara menyeluruh dan holistik.

6.1.2. Keterkaitan RPJPD Kabupaten Dharma Raya dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat

Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan sangat penting artinya dalam rangka mewujudkan kesatuan arah dan efisiensi proses pembangunan serta untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah serta antar daerah terkait. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik ditingkat pusat maupun daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat pusat (APBN) dan di tingkat daerah (APBD).

Keterkaitan pertama yang sangat penting dan harus diupayakan semaksimal mungkin adalah antar RPJP Nasional dengan RPJP Daerah. Dalam penyusunannya, RPJP daerah baik provinsi maupun kabupate/kota harus mengacu pada RPJP nasional. Hal ini sangat penting artinya untuk menjaga agar pelaksanaan pembangunan daerah, terpadu dan saling mendukung dengan pelaksanaan pembangunan nasional. Keterkaitan penyusunan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam skema pada gambar berikut.

Gambar 6-1
Keterkaitan RPJP dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya



Keterkaitan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan antar dokumen RPJP daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan RPJP nasional meliputi :

- 1) Periodisasi RPJPD mengikuti periodisasi RPJP Nasional.
- 2) Muatan RPJPD selaras dengan jumlah sasaran visi, misi pembangunan, arah pembangunan dan indikator utama pembangunan dalam RPJP Nasional yang memuat 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi pembangunan, 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan dengan memperhatikan karakteristik, kewenangan, inovasi dan pengembangan masing-masing daerah.
- 3) Dokumen RPJP Nasional menjadi pedoman visi, misi dan program bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, serta calon anggota DPRD provinsi serta pasangan calon Kepala Daerah Provinsi.
- 4) RPJPD Kabupaten akan menjadi pedoman dan acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten dalam penyusunan visi, misi dan program pembangunan daerah kabupaten.

6.1.3. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

RPJPD Kabupaten Dharmasraya merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada RPJP Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis melalui pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif (THIS).

- Tematik, adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- Spasial, adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- Holistik, adalah penjabaran tematik program pembangunan kedalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
- Integratif, adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Pemanfaatan Kerangka Kerja Logis ini ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang direncanakan dalam RPJPD. Kerangka Kerja Logis akan menggambarkan hubungan antara input, proses, output, outcome, dan impact dari setiap sasaran pembangunan. Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, Kerangka Kerja Logis dilengkapi indikator kinerja yang menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Result Oriented/Relevant, dan Time Bound* (SMART). Indikator kinerja pada RPJPD ini saling berkesinambungan sampai dengan dokumen jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang nantinya akan mendukung pencapaian indikator kinerja pada RPJPD.

6.1.4. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Perencanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah. Perencanaan yang baik dapat menjadi awal mula dari kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan, karena dengan perencanaan kegiatan yang baik, tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik, apabila didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai, dan alokasi pendanaan yang adil dan merata berdasarkan skala prioritasnya, serta terukur dengan jelas. Berdasarkan hal tersebut, sangat perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan dan pendanaan pembangunan

Sebagai upaya untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan secara lebih inovatif, integratif dan tepat sasaran. Disamping itu perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Berikut skema pendanaan dan penganggaran dalam pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Dharmasraya baik dalam tahapan RPJPD, RPJMD dan RKPD :

- 1) Melakukan kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha
- 2) Menggunakan anggaran daerah dengan optimalisasi pendapatan melalui penciptaan inovasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.
- 3) Memanfaatkan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TSL) dengan meningkatkan kolaborasi pembangunan dengan BUMD dan perusahaan asing yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

6.1.5. Kerangka Pengendalian

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan didalam menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di daerah dan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

RPJPD sebagai dokumen perencanaan 20 tahunan dilaksanakan pengendaliannya melalui pengendalian terhadap dokumen jangka menengah dan dokumen jangka pendek. Pengendalian tersebut dilakukan terhadap kemungkinan risiko-risiko yang akan terjadi dalam upaya untuk mencapai target tujuan dan target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemerintah daerah, tujuan pemerintah daerah secara jelas tertuang antara lain dalam dokumen perencanaan daerah yang idealnya memperhatikan dokumen perencanaan nasional (RPJMN). Tujuan pemerintah daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis tujuan, yaitu tujuan strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, tujuan strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan/operasional yang tertuang dalam dokumen Renja Perangkat Daerah.

Pengendalian terhadap kemungkinan adanya risiko-risiko dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut dilakukan dalam 2 tahapan pengendalian, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.



1. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahapan perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaannya. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang mencakup:

- a. Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan
Konsistensi penjabaran pada dokumen perencanaan meliputi konsistensi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berikut indikator kinerja, konsistensi kebijakan yang dituangkan dalam program yang relevan hingga pada rumusan kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan. Konsistensi penjabaran ini dilakukan antar dokumen perencanaan yang meliputi: konsistensi dokumen RPJPD dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP dan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
- b. Penentuan prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program-program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur dan memiliki waktu.
- c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran
- d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.
Risiko secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sehingga pembangunan tidak bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan identifikasi berdasarkan indikator kinerja sasaran dengan menentukan risiko yang akan terjadi, penyebab risiko, dampak dari terjadinya risiko, kategori dan sumber risiko sehingga bisa dirumuskan rencana tindak pengendalian yang bertujuan untuk menurunkan level risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

2. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahapan pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi ini mencakup:

- a. Pemantauan terhadap prioritas pembangunan daerah
- b. Pemantauan terhadap mitigasi risiko dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan.
- c. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.
- d. Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perlu didukung dengan regulasi agar pelaksanaan pengendalian berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, untuk menjaga kualitas pengendalian yang dilakukan, regulasi pengendalian ini dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kebijakan tertinggi yang berlaku.

6.1.6. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan non pemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik.

Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan perilaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan didalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja K/L/D terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat-daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

6.1.7. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan rusang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJP Nasional dan Daerah dapat dimutakhirkan melalui RPJM Nasional dan Daerah. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

6.1.8. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu : 1) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; 2) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah, serta 3) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi Publik RPJP Nasional 2025-2045 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Komunikasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar K/L dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan, kabupaten, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak,

penyandang disabilitas, dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

6.2. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup :

1. Penguatan Perencanaan pembiayaan yang meliputi penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*);
2. Perluasan kerjasama bilateral, multilateral dan kerjasama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerjasama ekonomi lainnya;
3. Penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerjasama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model private financial initiative yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial;
4. Penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi;
5. Optimalisasi pemanfaatan aset (*aset securitization*), daur ulang aset (*aset recycling*), tukar guling aset (*aset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*aset value capture*).

Sementara itu, untuk peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik dilakukan melalui :

1. Pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (antara lain : dana pensiun, asuransi, dan instrumen di pasar modal);
2. Inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa menyewa, jual beli, dan bagi hasil;
3. Inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau, biru dan sirkular;
4. Produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya; serta
5. Penguatan bauran (*blended financing*) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan, yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non publik dalam pembangunan nasional.



Peningkatan kapasitas publik dan non publik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup :

1. Penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah;
2. Penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik;
3. Penyelarasan prioritas investasi publik skala nasional dan daerah;
4. Modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik;
5. Pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik;
6. Penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan
7. Penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.



BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA